



RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
KABUPATEN SARMI

2026





BUPATI SARMI
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI SARMI

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SARMI TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI SARMI,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan salah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana, sistematis dan tanggap terhadap perubahan dengan mengintegrasikan rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi, Rencana Kerja Pemerintah dan program nasional;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang RKPD kabupaten paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Mengingat:/2

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 669);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi dan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 11. Undang-Undang...../3

11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

21. Peraturan/4

21. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
23. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
24. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
25. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
26. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
29. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
30. Peraturan Menteri PANRB Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri...../5

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD; serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana PP Nomor 13 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pembinaan TKPK Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarmi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2013 Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sarmi (Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2016 Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2018 Nomor 6);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2023 Nomor 5);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2024 Nomor 3);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengakuan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Sarmi (Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2024 Nomor 4);

44. Peraturan Daerah...../6

44. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2025 Nomor 3).

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SARMI TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarmi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sarmi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA perangkat daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1(satu) tahun.

11. Anggaran pendapatan...../7

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja PD Tahun Anggaran 2026;
- b. Bahan penyusunan dan pembahasan KUA serta PPAS; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJAPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP

- (2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarmi.

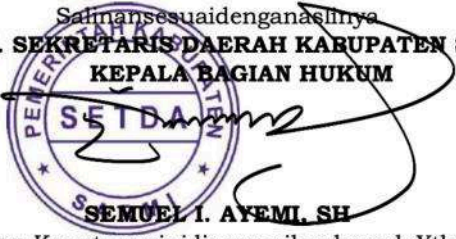
Ditetapkan di Sarmi
pada tanggal, 31 Oktober 2025

BUPATI SARMI,
CAP/TTD
DOMINGGUS CATUE, S.KM.,M.KES

Diundangkan di Sarmi
pada tanggal, 4 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI
CAP/TTD
EDUWARD P. DIMOMONMAU, ST., M.KP
Pembina Tk I
NIP. 19760207 199610 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SARMI TAHUN 2025 NOMOR 26

Salman sesuai dengan aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEMUEL I. AYEM, SH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua di Jayapura;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sarmi di Sarmi;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
8. Direktur PT. Bank Papua Cabang Sarmi di Sarmi;
9. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	BAB I-1
1.1 Latar Belakang	BAB I-1
1.2 Dasar Hukum	BAB I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen RKPD	BAB I-8
1.4 Maksud dan Tujuan	BAB I-11
1.5 Sistematika Dokumen RKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2026	BAB I-12
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	BAB II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah	BAB II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	BAB II-2
2.1.1.1 Letak, Luas, dan Batas Wilayah	BAB II-2
2.1.1.2 Topografi	BAB II-7
2.1.1.3 Geologi dan Jenis Tanah	BAB II-9
2.1.1.4 Hidrologi	BAB II-10
2.1.1.5 Klimatologi	BAB II-11
2.1.1.6 Suhu Udara	BAB II-11
2.1.1.7 Penggunaan Lahan	BAB II-13
2.1.1.8 Pengembangan Wilayah Berdasarkan Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP)	BAB II-15
2.1.1.9 Potensi Unggulan Daerah	BAB II-17
2.1.1.10 Demografi	BAB II-22
2.1.1.11 Demografi Orang Asli Papua (OAP)	BAB II-24
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	BAB II-26
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	BAB II-26
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	BAB II-36
2.1.2.3 Fokus Seni, Budaya, dan Olahraga	BAB II-42
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	BAB II-44
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib	BAB II-44
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	BAB II-64
2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan	BAB II-76

2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah	BAB II-79
2.1.4.1	Kondisi Ekonomi dan Struktur Perekonomian Daerah	BAB II-80
2.1.4.2	Kualitas Sumber Daya Manusia	BAB II-85
2.1.4.3	Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	BAB II-86
2.1.4.4	Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Daerah	BAB II-86
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD	BAB II-87
2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah	BAB II-214
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH		BAB III-1
3.1	Arah kebijakan ekonomi daerah	BAB III-2
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	BAB III-16
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNA DAERAH		BAB IV-1
4.1	Tema Pembangunan Daerah Tahun 2026.....	BAB IV-2
4.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	BAB IV-18
4.3	Prioritas Pembanguna Daerah Tahun 2026.....	BAB IV-21
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SARMI		BAB V-1
5.1	Rencana Program Pembangunan Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2026	BAB V-2
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH		BAB VI-1
6.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sarmi	BAB VI-1
BAB VII PENUTUP		BAB VII-1

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Alur Proses Penyusunan RKPD 2026 Sarmi	BAB I 3
Gambar 1.2 Keterkaitan Dokumen Perencanaan Antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten Sarmi	BAB I 10
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Sarmi	BAB II 3
Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Sarmi	BAB II 8
Gambar 2.3 Jenis Tanah dan wilayah sebarannya di Kabupaten Sarmi	BAB II 10
Gambar 2.4 Peta Tutupan Lahan di Kabupaten Sarmi	BAB II 14
Gambar 2.5 Peta Sub Satuan Wilayah Pengembangan Kabupaten Sarmi	BAB II 15
Gambar 2.6 Peta Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Sarmi	BAB II 22
Gambar 2.7 Grafik Agregat Jumlah Penduduk Orang Asli Papua Kabupaten Sarmi Bulan April Tahun 2025	BAB II 25
Gambar 2.8 Grafik tren pertumbuhan PDRB Kabupaten Sarmi tahun 2020–2024	BAB II 28
Gambar 2.9 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sarmi tahun 2020–2024	BAB II 29
Gambar 2.10 Tren PDRB Per Kapita Kabupaten Sarmi Tahun 2020 2024 ...	BAB II 30
Gambar 2.11 Tren pertumbuhan PDRB Per Kapit Kabupaten Sarmi Tahun 2020 2024	BAB II 30
Gambar 2.12 Grafik Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Papua, dan Kabupaten Sarmi Tahun 2020–2024	BAB II 32
Gambar 2.13 Perbandingan Indeks Gini Rasio Nasional, Provinsi Papua dan Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024	BAB II 33
Gambar 2.14 Persentase Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Papua dan Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024	BAB II 35
Gambar 2.15 Posisi Relative Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Se-Papua Tahun 2024	BAB II 36
Gambar 2.16 Perkembangan IPM Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua dan Nasional	BAB II 38
Gambar 2.17 Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sarmi Tahun 2020– 2023	BAB II 40
Gambar 2.18 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Sarmi, 2020–2023	BAB II 41
Gambar 2.19 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Sarmi Tahun 2020–2024	BAB II 49
Gambar 2.20 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan SMA Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024	BAB II 50
Gambar 2. 21 Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD, SMP dan SMA Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024	BAB II 52

Gambar 2.22 Pencapaian Aktual Angka Harapan Hidup Kabupaten Sarmi, 2020-2024	BAB II 54
Gambar 2.23 Perkembangan angka kejadian malaria di Kabupaten Sarmi tahun 2023-2025	BAB II 55
Gambar 2.24 Perkembangan kasus TBC Kabupaten Sarmi, 2023-2025	BAB II 58
Gambar 2.25 Tren Prevalensi Stunting Kabupaten Sarmi menurut SSGI Tahun 2021-2024	BAB II 59
Gambar 2.26 Tren Prevalensi Stunting Kabupaten Sarmi menurut E-PPGBM Tahun 2021-2024	BAB II 59
Gambar 2.27 Persentase kelahiran menurut proses kelahiran yang ditolong di Kabupaten tahun 2021-2023	BAB II 60
Gambar 2.28 Partisipasi Perempuan di Lembaga pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024 [%]	BAB II 65
Gambar 2.29 Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen di Kabupaten Sarmi tahun 2020-2024	BAB II 65
Gambar 2.30 Perempuan sebagai Tenaga Profesional di Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024	BAB II 66
Gambar 2.31 Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kab. Sarmi Tahun 2020-2024 (%)	BAB II 66
Gambar 2.32 Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Sarmi tahun 2020-2024	BAB II 67
Gambar 2.33 Indeks Pembangunan Manusia Perempuan di Kab. Sarmi tahun 2020-2024	BAB II 67
Gambar 2.34 Perkembangan Persentase Penduduk yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024	BAB II 69
Gambar 2.35 Laju Pertumbuhan Penduduk Kab Sarmi tahun 2020-2024	BAB II 70
Gambar 2.36 Persentase penduduk Usia ≥ 5 tahun yang menggunakan telepon seluler	BAB II 71
Gambar 2.37 Persentase Penduduk Usia ≥ 5 tahun yang memiliki/menguasai telepon seluler	BAB II 72
Gambar 2.38 Persentase Penduduk Usia ≥ 5 Tahun yang Menggunakan Komputer	BAB II 72
Gambar 2.39 Persentase Penduduk Usia ≥ 5 Tahun yang Pernah Mengakses Internet	BAB II 73
Gambar 2.40 Persentase SiLPA Terhadap APBD Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024	BAB II 75
Gambar 2.41 Rasio ketergantungan Kabupaten Sarmi tahun 2020-2024 (%)	BAB II 75
Gambar 2.42 Produksi Tanaman Pertanian di Kabupaten Sarmi tahun 2020-2024	BAB II 76

Gambar 2.43 Data Obyek Wisata dan Akomodasi Pariwisata Kabupaten SarMI Tahun 2020–2024	BAB II 77
Gambar. 3.1 Proyeksi Ekonomi Dunia World Economic Forum 2024 & 2025	BAB III 4
Gambar. 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan 3 Tahun 2024	BAB III 6
Gambar 3.3 Distribusi Ekonomi Indonesia Triwulan III Tahun 2024	BAB III 7
Gambar 3.4 Skenario Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2025–2029	BAB III 10
Gambar 4.1 Dasar Penentuan Tema, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2026	BAB IV 3
Gambar 4.2 Visi Indonesia Emas 2045 dalam RPJP Nasional Tahun 2025–2045	BAB IV 4
Gambar 4.3 Misi Pembangunan Indonesia 2045 dalam RPJPN Tahun 2025–2045	BAB IV 5
Gambar 4.4 Arah kebijakan pembangunan jangka Panjang	BAB IV 10
Gambar 4.5 Tema Pembangunan Kabupaten SarMI Tahun 2026–2030 ...	BAB IV 12
Gambar 4.6 Prioritas Pembangunan Kabupaten SarMI Tahun 2026	BAB IV 23

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Nama dan Luas Distrik serta nama Kampung di Kabupaten SarMI	BAB II 4
Tabel 2.2 Kondisi Topografi/Kemiringan Lereng Kabupaten SarMI	BAB II 7
Tabel 2.3 Kelas Ketinggian Kabupaten SarMI	BAB II 8
Tabel 2.4 Daerah Aliran Sungai (DAS) dan luasannya	BAB II 11
Tabel 2.5 Curah Hujan dan Hari Hujan menurut Bulandi Kabupaten SarMI Tahun 2024	BAB II 11
Tabel 2.6 Suhu Udara Maksimum, Minimum dan Rata-rata Menurut Bulan di Kabupaten SarMI 2022-2024	BAB II 12
Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Kabupaten SarMI Tahun 2022-2024	BAB II 23
Tabel 2.8 Agregat Jumlah Penduduk Orang Asli Papua Kabupaten SarMI Bulan April Tahun 2025	BAB II 24
Tabel 2.9 Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur di Kabupaten SarMI Tahun 2020-2024 (%)	BAB II 39
Tabel 2.10 Indikator Makro Fokus Seni, Budaya, dan Olahraga Kabupaten SarMI, 2020-2024	BAB II 43
Tabel 2.11 Statistik Sekolah, Guru dan Murid di Kabupaten SarMI Tahun 2020-2024	BAB II 47
Tabel 2.12 Rasio Ketersediaan Sekolah Tahun 2020-2024 di Kabupaten SarMI	BAB II 49
Tabel 2.13 Rekapitulasi Kasus HIV/AIDS Kabupaten SarMI Tahun 2024-2025	BAB II 56
Tabel 2.14 Perkembangan Kasus TBC Kabupaten SarMI Tahun 2023-2025 ...	BAB II 57
Tabel 2.15 Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Sebaran Tenaga Kesehatan di Kabupaten SarMI tahun 2024	BAB II 61
Tabel 2.16 Kondisi Jalan Kabupaten SarMI Tahun 2021-2024	BAB II 62
Tabel 2.17 Perkembangan Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten SarMI Tahun 2020-2024	BAB II 64
Tabel 2.18 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten SarMI Tahun 2020-2024 (%)	BAB II 70
Tabel 2.19 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten SarMI Tahun 2020-2024	BAB II 74
Tabel 2.20 Produksi Perikanan Kabupaten SarMI Tahun 2020-2024 (Ton)	BAB II 78
Tabel 2.21 Perkembangan PDRB Kabupaten SarMI Tahun 2020-2024	BAB II 81
Tabel 2.22 Data Struktur Perekonomian menurut Lapangan Usaha Kabupaten SarMI Tahun 2020-2024 (%)	BAB II 82
Tabel 2.23 PDRB per Kapita Kabupaten SarMI Tahun 2020-2024	BAB II 83
Tabel 2.24 Indeks Gini Kabupaten SarMI Tahun 2020-2024	BAB II 84
Tabel 2.25 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten SarMI Tahun 2020-2024	BAB II 85

Tabel 2.26 Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Sarmi	BAB II 87
Tabel 2.27 Tabel TC 19 (Evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan daerah Sampai dengan Tahun 2025)	BAB II 90
Tabel 3.1 Proyeksi Ekonomi Indonesia Tahun 2025 dan 2026	BAB III 7
Tabel 3.2 Proyeksi Ekonomi Papua Tahun 2026	BAB III 12
Tabel 3.3 Perkembangan PDRB Kabupaten Sarmi Tahun 2020–2024	BAB III 13
Tabel 3.4 Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Sarmi Tahun 2026	BAB III 14
Tabel 3.5 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2023–2026 (Dalam Rupiah)	BAB III 20
Tabel 3.6 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2023–2026 (Dalam Rupiah)	BAB III 23
Tabel 3.7 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2023–2026 (Dalam Rupiah)	BAB III 27
Tabel 4.1 Matriks Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2029	BAB IV 19
Tabel 4.2 Matriks Keterkaitan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2029	BAB IV 19
Tabel 4.3 Keterkaitan antara Tema, Prioritas, dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026	BA IV 24
Tabel 4.4 Keterkaitan antara Permasalahan dan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan dalam RKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2026	BAB IV 25
Tabel 4.5 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, RPJMD2025-2029 Dengan Prioritas RKPD 2026	BAB IV 27
Tabel 4.6 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sarmi dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Papua dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026	BAB IV 29
Tabel 4.7 Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2026 Dan RKPD Kabupaten Sarmi tahun 2026 sesuai Permendagri No.10tahun2025	BAB IV 31
Tabel 4.8 Program Proritas Daerah dan Sub Kegiatan dalam RKPD tahun 2026	BAB IV 37
Tabel 5.1 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2026 (Dalam Rupiah)	BAB V 4
Tabel 5.2 Program dan Kegiatan yang mendukung Pelaksanaan SPM ditahun 2026	BAB V 7
Tabel 5.3 Program dan Kegiatan yang mendukung focus kebijakan pemerintah Penghapusan Kemiskinan ditahun 2026	BAB V 12
Tabel 5.4 Program dan Kegiatan yang mendukung focus kebijakan pemerintah Penanganan Stunting ditahun2026	BAB V 27



Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat-Nya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarmi Tahun 2026 dapat disusun dengan baik. RKPD ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah serta dasar dalam perumusan KUA-PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2026.

Penyusunan RKPD ini mengacu pada Visi Pembangunan Kabupaten Sarmi, yaitu **"Bersatu Mewujudkan Sarmi yang Lebih Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan."** Tema pembangunan Tahun 2026, **"Pemenuhan Infrastruktur Pembangunan untuk Meningkatkan Pemerataan dan Akses Layanan Dasar,"** disusun dengan mempertimbangkan kondisi kewilayahan Sarmi yang berciri pesisir, sungai, dan perkampungan adat yang tersebar, serta tantangan utama dalam peningkatan konektivitas antar distrik dan aksesibilitas layanan dasar bagi seluruh masyarakat.

RKPD Tahun 2026 juga telah diselaraskan dengan Tema RKP Nasional Tahun 2026, **"Kedaulatan Pangan, Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif,"** serta Tema Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2026, **"Percepatan Pembangunan Struktur Ekonomi yang Inklusif Melalui Akselerasi Potensi Unggulan Daerah."** Sinkronisasi ini dimaksudkan agar arah pembangunan Kabupaten Sarmi berjalan serasi dengan kebijakan pembangunan regional dan nasional.

Dokumen ini disusun melalui proses teknokratis dan partisipatif yang melibatkan perangkat daerah, tokoh adat, tokoh agama, masyarakat, tokoh pemuda, perempuan, serta dunia usaha. Dengan demikian, RKPD ini diharapkan mampu menggambarkan kebutuhan pembangunan secara faktual, terutama terkait peningkatan pelayanan dasar, penguatan konektivitas antarwilayah, pembangunan infrastruktur strategis, dan pemberdayaan potensi ekonomi lokal.

Pemerintah Kabupaten Sarmi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan RKPD ini. Semoga dokumen ini menjadi pedoman yang efektif dalam mengarahkan pembangunan Tahun 2026, serta mendorong terwujudnya masyarakat Sarmi yang semakin maju, sejahtera, dan berkelanjutan.



BUPATI SARMI

Dominggus Catue
DOMINGGUS CATUE, S.KM.,M.KES

BAB I

Pendahuluan

Bab ini memberikan gambaran umum penyusunan dokumen RKPD, dan bab ini memuat penjelasan tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan RKPD Kabupaten Sarmi tahun 2026.

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang, terukur, dan berkesinambungan. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta program dan kegiatan pembangunan daerah untuk periode satu tahun anggaran.

RKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2029 sebagai pedoman utama pembangunan jangka menengah daerah. Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD, sehingga penyusunan RKPD diarahkan untuk mempercepat pencapaian sasaran dan target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan dokumen perencanaan lainnya, antara lain Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025–2029, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026, serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai bagian dari proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

RKPD Tahun 2026 berfungsi sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Renja PD, sekaligus menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2026. Dengan demikian, RKPD memiliki posisi strategis dalam menjembatani hubungan antara perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah agar pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung lebih terarah, konsisten, dan sinergis.

Selain itu, RKPD juga merupakan instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang berfungsi untuk mengukur capaian sasaran pembangunan dalam kerangka pelaksanaan RPJMD. Melalui evaluasi ini, pemerintah daerah dapat menilai efektivitas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikan pada tahun berikutnya.

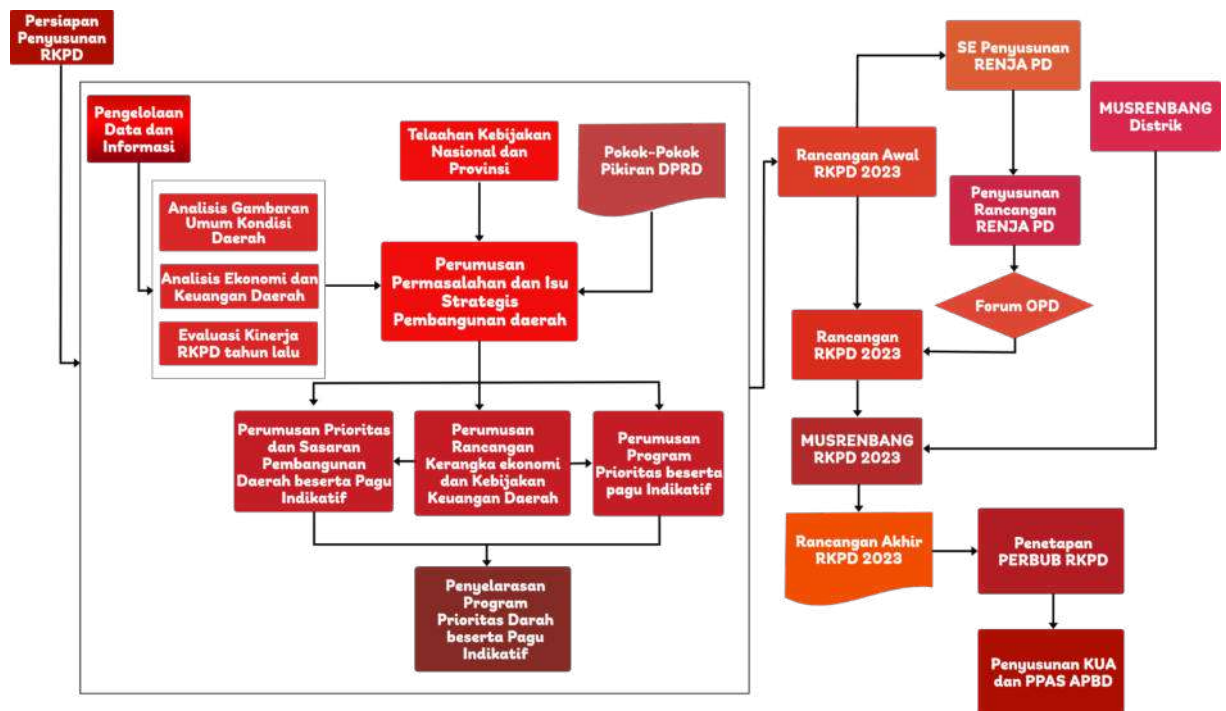
Penyusunan RKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2026 dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan, yaitu teknokratis, partisipatif, politis, top-down, dan bottom-up, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Proses penyusunan dimulai dari penyusunan Rancangan Awal RKPD oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dan kebijakan pembangunan Provinsi Papua.

Selanjutnya, rancangan tersebut dibahas melalui Forum Konsultasi Publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kampung, distrik, forum perangkat daerah, hingga Musrenbang RKPD Kabupaten. Proses ini dimaksudkan untuk menyelaraskan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah dengan aspirasi masyarakat, serta memastikan keselarasan dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional.

Sinkronisasi perencanaan dalam RKPD Tahun 2026 memperhatikan keterkaitan, konsistensi, dan sinergi dengan dokumen perencanaan di tingkat yang lebih tinggi, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Rumusan sasaran, program, dan kegiatan pembangunan disusun berdasarkan data, analisis, dan asumsi perencanaan yang akurat dan rasional, guna menjawab permasalahan pembangunan daerah secara efektif.

Dengan demikian, RKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2026 diharapkan menjadi dokumen yang komprehensif dan operasional dalam mengarahkan seluruh pelaksanaan pembangunan daerah agar berjalan konsisten, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sarmi.

Gambar 1.1
Alur Proses Penyusunan RKPD 2026 Sarmi



1.2. Dasar Hukum.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2026 didasarkan atas :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1104 ;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 52);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);

28. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 100);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembar negara Republik Indoensia tahun 2021 Nomor 172);
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
32. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
33. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
34. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
35. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);

39. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelaras Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsidan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1045);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021);
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 197);
43. Rencana Strategis Nasional Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting 2025-2029 (Stranas P3S) yang menjadi pedoman arah kebijakan pemerintah untuk percepatan penurunan stunting hingga 2029;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 nomor 435);
45. Peraturan Daerah Kabupaten SarMI Nomor 2 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten SarMI tahun 2013-2033, (Lembaran Daerah Kabupaten SarMI tahun 2013 Nomor 2);
46. Peraturan Daerah Kabupaten SarMI Nomor 4 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten SarMI (Lembaran Daerah Kabupaten SarMI tahun 2016 Nomor 4);
47. Peraturan Daerah Kabupaten SarMI Nomor 6 tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten SarMI tahun 2018 Nomor 6);
48. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten SarMI tahun 2023 Nomor 5);
49. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten SarMI Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten SarMI tahun 2024 Nomor 4).

1.3 Hubungan Antar Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarmi Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional. Keterpaduan antar dokumen tersebut diperlukan untuk menjamin konsistensi arah kebijakan pembangunan, kesinambungan program, serta sinkronisasi antara perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Hubungan RKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. RKPD dan RPJPD Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2045

RKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2026 merupakan penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sarmi periode 2025–2045, khususnya pada tahapan pertama periode RPJMD Tahun 2025–2029. RKPD memuat prioritas pembangunan tahunan, program, dan kegiatan yang diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pokok serta arah kebijakan pembangunan jangka panjang sebagaimana ditetapkan dalam RPJPD. Dalam pelaksanaannya, RKPD disusun dengan memperhatikan keselarasan dengan RPJPD Provinsi Papua dan RPJPN Tahun 2025–2045, agar terwujud keterpaduan arah pembangunan lintas wilayah dan lintas sektor.

2. RKPD dan RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2029

RKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2029. Kedua dokumen ini memiliki hubungan yang erat, di mana RKPD berfungsi sebagai instrumen tahunan untuk mengoperasionalkan sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah. Melalui RKPD, Pemerintah Kabupaten Sarmi melakukan penyesuaian dan penyelarasan terhadap target kinerja pembangunan, dengan tetap berpedoman pada dokumen teknokratis RPJMD yang telah disusun secara simultan pada tahun 2025. Dengan demikian, RKPD menjadi sarana evaluatif dan adaptif dalam mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah lima tahunan.

3. RKPD dan RPD Kabupaten Sarmi Tahun 2023–2026

RKPD Tahun 2026 juga merupakan penjabaran tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sarmi Tahun 2023–2026. Dokumen RPD berisi arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam masa transisi antara RPJMD sebelumnya dan RPJMD yang baru. Penyusunan RKPD 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan keselarasan arah kebijakan RPD dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Papua, dan RPJPD Kabupaten Sarmi, sehingga kesinambungan pembangunan tetap terjaga.

4. RKPD dan Renja Perangkat Daerah

RKPD menjadi pedoman utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) masing-masing perangkat daerah. Dengan demikian, terdapat keterpaduan antara dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan.

5. RKPD dan APBD Kabupaten SarMI

RKPD menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dengan demikian, RKPD memiliki fungsi strategis dalam memastikan bahwa pengalokasian anggaran dalam APBD selaras dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Evaluasi kesesuaian antara APBD dan RKPD menjadi instrumen penting dalam menjaga efektivitas dan akuntabilitas keuangan daerah.

6. RKPD dan RTRW Kabupaten SarMI

Penyusunan RKPD juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten SarMI, yang memuat rencana struktur ruang, pola ruang, serta kawasan strategis daerah. Integrasi antara RKPD dan RTRW penting untuk menjamin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan arah pengembangan wilayah, terutama dalam penentuan lokasi kegiatan fisik dan infrastruktur yang berhubungan dengan pemanfaatan ruang.

7. RKPD dan RPKD Kabupaten SarMI

RKPD Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029. Program dan kegiatan dalam RPKD diintegrasikan ke dalam RKPD agar seluruh perangkat daerah memiliki arah yang sama dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Integrasi ini memperkuat efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan secara lintas sektor dan berkelanjutan.

8. RKPD dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

RKPD Kabupaten SarMI Tahun 2026 telah mengintegrasikan empat pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. Prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) diinternalisasi ke dalam indikator program dan kegiatan sebagai upaya mendukung pencapaian target nasional dan global di tingkat daerah.

9. RKPD dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

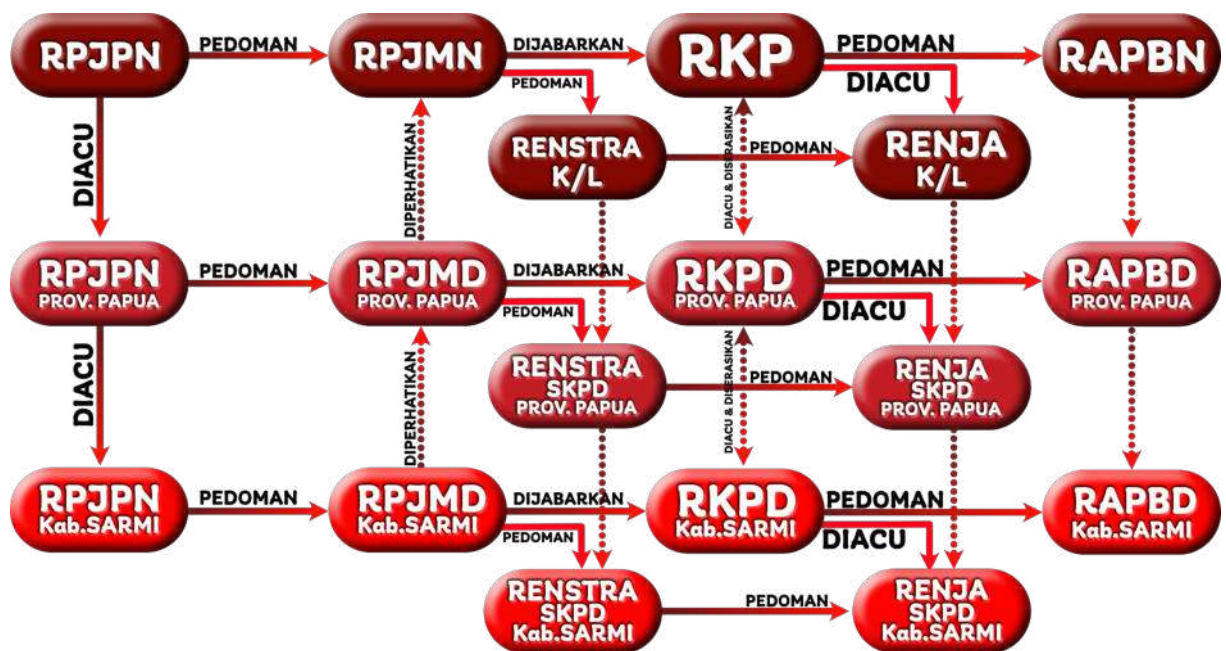
Dalam penyusunan RKPD, Pemerintah Kabupaten SarMI juga memperhatikan pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM). Setiap perangkat daerah pelaksana SPM wajib mengintegrasikan indikator tersebut ke dalam program dan kegiatan tahunan untuk memastikan bahwa pelayanan dasar kepada masyarakat dapat terpenuhi secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. RKPD dan Dokumen Perencanaan Nasional serta Provinsi

Dalam siklus manajemen pembangunan daerah yang meliputi tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, RKPD memiliki fungsi yang strategis sebagai penghubung antara kebijakan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. RKPD Kabupaten SarMI disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dan RKPD Provinsi Papua, sehingga arah kebijakan, prioritas, dan program pembangunan di Kabupaten SarMI selaras dengan kebijakan pembangunan di tingkat yang lebih tinggi.

Gambar 1.2

Keterkaitan Dokumen Perencanaan Antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten SarMI



Selain berpedoman pada dokumen perencanaan pusat dan provinsi yang bersifat wajib, penyusunan RKPD Kabupaten SarMI Tahun 2026 juga memperhatikan dokumen sektoral dan kajian tematik daerah sebagai bahan analisis dalam mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan. Hasil telaahan tersebut menjadi dasar dalam penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, penyusunan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, serta perumusan program prioritas dan pagu indikatif.

Dengan demikian, RKPD Kabupaten SarMI Tahun 2026 merupakan dokumen yang tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga strategis dalam menjamin konsistensi, sinkronisasi, dan keterpaduan seluruh proses perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

1.4 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten SarMI Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman utama dalam perumusan arah kebijakan pembangunan tahunan daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen perencanaan yang menjabarkan prioritas pembangunan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten SarMI Tahun 2025–2029, sekaligus menjadi acuan penyelarasan program dan kegiatan pembangunan lintas sektor dan lintas perangkat daerah.

Secara khusus, penyusunan RKPD Kabupaten SarMI Tahun 2026 dimaksudkan untuk:

1. Menjadi acuan dalam menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten SarMI Tahun 2023–2026;
2. Menjadi pedoman dalam penjabaran indikator utama pembangunan (IUP) sesuai RPJPD Kabupaten SarMI Tahun 2025–2045, agar pelaksanaan pembangunan tahun 2026 sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang daerah;
3. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026, yang selanjutnya digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten SarMI Tahun Anggaran 2026.

b. Tujuan

Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten SarMI Tahun 2026 bertujuan untuk memberikan arah yang jelas, terukur, dan terintegrasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten SarMI dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026.

Secara rinci, tujuan penyusunan RKPD Kabupaten SarMI Tahun 2026 adalah untuk:

1. Menyediakan landasan operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam merumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan yang selaras dengan arah kebijakan daerah dan prioritas pembangunan tahun 2026;
2. Menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang konsisten dengan RPJPD Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2045, RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2029 (dokumen teknokratis), serta RPD Kabupaten Sarmi Tahun 2023–2026, sehingga kesinambungan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan dapat terjaga;
3. Menyediakan pedoman dan indikator capaian pembangunan yang menjadi acuan dalam pengukuran serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara berkelanjutan;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, sehingga penggunaan sumber daya pembangunan dapat berlangsung secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2026 disusun dengan sistematika yang menggambarkan hubungan logis antarbagian agar substansi dokumen dapat dipahami secara utuh dan komprehensif. Adapun sistematika penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran umum mengenai proses penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Di dalamnya dijelaskan latar belakang penyusunan, dasar hukum, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen RKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2026.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menyajikan deskripsi umum tentang kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah. Selain itu, bab ini juga memuat hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan RKPD hingga tahun 2024, serta analisis pencapaiannya terhadap target RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2029. Dari hasil evaluasi tersebut, diidentifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan tahun 2026.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN DAERAH

Bab ini menjelaskan kondisi dan arah kebijakan ekonomi daerah, baik realisasi pada tahun 2024 maupun proyeksi untuk tahun 2026. Pembahasan mencakup perkembangan indikator makro ekonomi, struktur dan sumber-sumber pendapatan daerah, arah kebijakan fiskal, serta kebijakan pengelolaan belanja dan pembiayaan daerah. Bab ini bertujuan memberikan dasar bagi penentuan prioritas pembangunan dan alokasi sumber daya yang efisien serta berkelanjutan.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, serta prioritas pembangunan Kabupaten Sarmi Tahun 2026 yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 dan keselarasan dengan arah kebijakan RPJPD Tahun 2025–2045 serta RPJMD Tahun 2025–2029. Selain itu, bab ini juga mengidentifikasi keterkaitan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Papua, guna memastikan sinergitas antar level pemerintahan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka mencapai sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2026. Setiap program dan kegiatan disertai dengan pagu indikatif pendanaan serta memperhatikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan implementasi pembangunan secara efektif dan terukur.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai instrumen pengukuran capaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Indikator yang disajikan meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD), yang menjadi dasar dalam evaluasi kinerja tahunan serta pengambilan keputusan perencanaan pada tahun berikutnya.

BAB VII PENUTUP

Bab terakhir berisi penegasan kembali pentingnya pelaksanaan RKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2026 sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan daerah. Bab ini juga menyampaikan harapan agar seluruh pihak dapat berperan aktif, bersinergi, dan berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Sarmi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan sesuai arah pembangunan jangka menengah daerah.

BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini memberikan gambaran umum penyusunan dokumen RKPD, dan bab ini memuat penjelasan tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan RKPD Kabupaten Sarmi tahun 2026.

2.1 Kondisi Umum Daerah

Rencana pembangunan daerah disusun dengan memperhatikan karakteristik, potensi, serta kondisi wilayah sebagai dasar dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara terarah dan optimal dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah serta menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Pada bagian ini disajikan gambaran umum mengenai kondisi Kabupaten Sarmi yang mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, serta daya saing daerah. Analisis terhadap kondisi umum ini menjadi pijakan penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan, karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai potensi, permasalahan, dan tantangan pembangunan daerah.

Gambaran kondisi umum daerah berperan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan pembangunan di tahun perencanaan. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan pada periode sebelumnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan. Hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan menjadi acuan untuk menentukan prioritas pembangunan pada tahun berikutnya, sekaligus menjadi dasar dalam menyusun strategi peningkatan efektivitas program dan kegiatan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan yang bersifat operasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarmi Tahun 2026 memuat arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta program dan kegiatan yang

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, pencapaian sasaran RKPD tahun sebelumnya menjadi landasan dalam merumuskan program lanjutan, sedangkan target-target yang belum tercapai menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam perumusan kebijakan pembangunan tahun berjalan.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografis dan demografis merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan daerah karena memberikan gambaran mengenai karakteristik wilayah, potensi sumber daya alam, serta kondisi kependudukan yang menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan. Penjelasan aspek ini meliputi letak, luas, dan batas wilayah, topografi, hidrologi dan klimatologi, penggunaan lahan, potensi pengembangan wilayah, serta wilayah rawan bencana.

a. Letak, Luas, dan Batas Wilayah

Secara geografis, Kabupaten Sarmi terletak pada posisi 138°05'–140°30' Bujur Timur dan 1°35'–3°35' Lintang Selatan. Wilayah ini memiliki karakteristik bentang alam yang beragam, meliputi kawasan pesisir, dataran rendah, perbukitan, hingga pegunungan, dengan luas wilayah mencapai ±18.034 km².

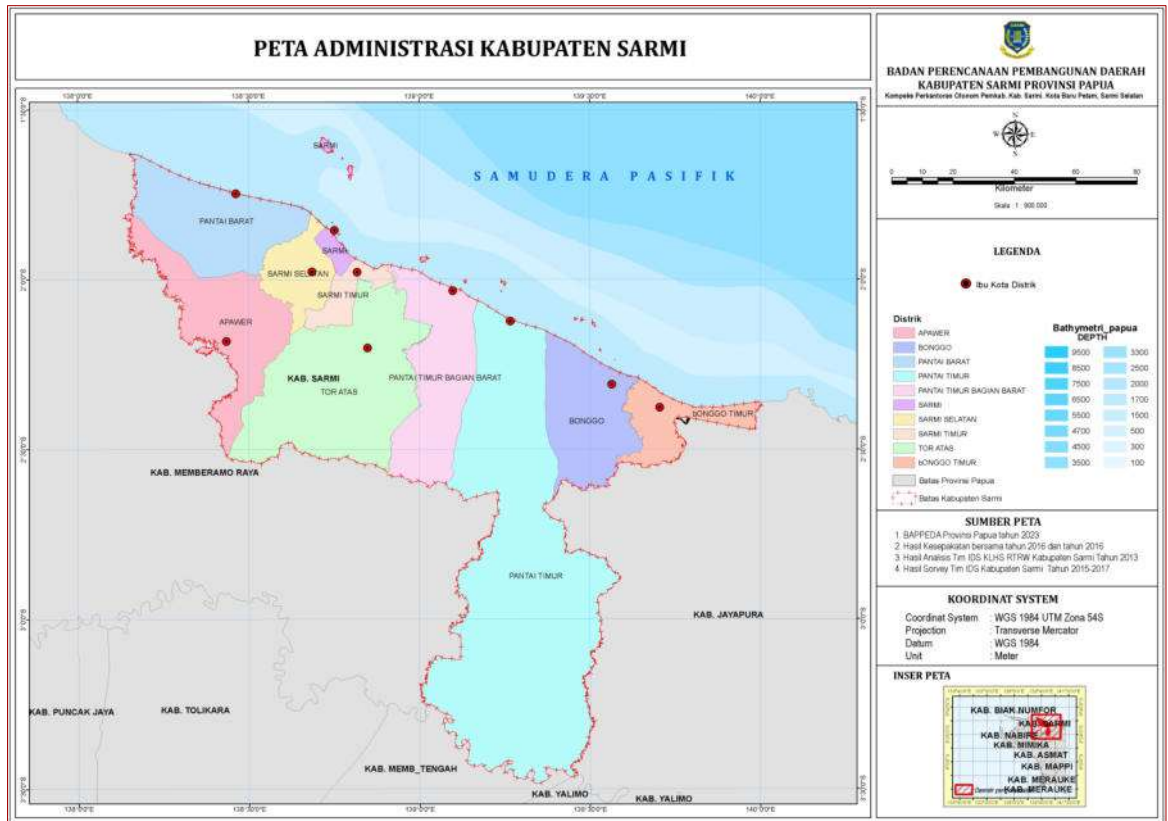
Secara administratif, Kabupaten Sarmi merupakan salah satu dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- » Sebelah Utara : Laut Pasifik
- » Sebelah Timur : Kabupaten Jayapura
- » Sebelah Selatan : Kabupaten Mamberamo Tengah
- » Sebelah Barat : Kabupaten Mamberamo Raya

Kabupaten Sarmi memiliki posisi strategis karena berada pada jalur pesisir utara Papua yang menghubungkan wilayah-wilayah di bagian barat dan timur Provinsi Papua. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Sarmi sebagai wilayah potensial untuk pengembangan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam, kelautan, dan jasa logistik antarwilayah.

Letak, luas, dan batas wilayah Kabupaten Sarmi dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Sarmi



Sumber; Hasil olahan POKJA KLHS RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025

Kabupaten Sarmi merupakan salah satu kabupaten dalam provinsi Papua yang berada dalam Pulau Papua, dengan luas wilayah sebesar 1.406.767,08 hektar atau 14.067,67 Km² atau sekitar 17,01 persen dari luas total Provinsi Papua. Luas laut Kabupaten Sarmi berdasarkan data RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042 adalah sebesar 3.185 hektar (Luas pesisir sampai jarak 12 mil) dengan panjang garis pantai sekitar 306,04Km. Kabupaten Sarmi merupakan hasil pemekaran dari wilayah administrasi Kabupaten Jayapura berdasar pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002.

Undang-undang tersebut menyatakan bahwa wilayah administratif Kabupaten Sarmi terdiri dari Distrik Mamberamo Hilir, Distrik Mamberamo Tengah, Distrik Mamberamo Hulu, Distrik Pantai Barat, Distrik Sarmi, Distrik Tor Atas, Distrik Pantai Timur dan Distrik Bonggo. Pada tahun 2005, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 4 Tahun 2005 terjadi pemekaran distrik sehingga jumlah distrik pada Kabupaten Sarmi menjadi sebanyak 11 distrik. Tiga distrik baru tersebut yaitu Distrik Mamberamo Tengah Timur, Distrik Apawer Hulu dan Distrik Roufer. Selanjutnya pada tahun 2006, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 dibentuk empat distrik baru lagi, yaitu: Distrik Sarmi Timur, Sarmi Selatan, Pantai Timur Barat dan Bonggo Timur sehingga seluruhnya berjumlah 15 Distrik. Berdasar pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 wilayah Distrik Mamberamo Hilir, Distrik Mamberamo

Tengah, Distrik Mamberamo Hulu dan Distrik Roufer dipisahkan dari administrasi Kabupaten SarMI menjadi wilayah administrasi baru yaitu Kabupaten Mamberamo Raya. Setelah pemekaran tahun 2007, wilayah administrasi Kabupaten SarMI terbagi menjadi 10 distrik, 84 kampung serta 2 kelurahan dengan luas wilayah sekitar 17.740 Km².

Pada awal tahun 2013 terjadi lagi proses pemekaran distrik di wilayah Pemerintahan Kabupaten SarMI, dari semula 10 menjadi 19 distrik. Kesembilan distrik baru adalah : Bonggo Barat, Muara Tor, Ismari, Apawer Hilir, Verkamp, Airoran, Sungai Biri, Sobey, Fee'en dan pada tahun 2014 ditambah 2 distrik yaitu distrik Bonggo Timur Jauh dan SarMI Timur Tengah, sehingga berjumlah 11 distrik, namun demikian pemekaran distrik ini belum ditetapkan secara definitif dalam Peraturan Daerah.

Selanjutnya Pada tahun 2023 berdasarkan hasil konsultasi Pemerintah Daerah Kabupaten SarMI bersama kementerian dalam negeri terkait status keberadaan distrik tersebut yang belum memiliki kode wilayah resmi dari kementerian dalam negeri, maka kementerian dalam negeri melalui IRJEN Kementarian dalam negeri dan hasil konsultasi bersama Badan Pemeriks Keuangan (BPK-RI) wilayah Papua memberikan catatan untuk status 11 Distrik yang belum memiliki kode registrasi ini, dibekukan sementara. Sehingga pada tahun 2025, basis data kewilayah distrik menggunakan perwilayahan 10 distrik.

Tabel 2.1.
Nama dan Luas Distrik serta nama Kampung di Kabupaten SarMI

NO	NAMA DISTRIK	LUAS WILAYAH	N A M A	
			KELURAHAN / KAMPUNG	KODE WILAYAH
1	DISTRIK SARMI	546		91 10 01
			1. KELURAHAN SARMI KOTA	91 10 01 1001
			2. KELURAHAN MARARENA	91 10 02 1002
			3. KAMPUNG SARMO	91 10 03 2003
			4. KAMPUNG SAWAR	91 10 04 2004
			5. KAMPUNG BAGAISEWAR	91 10 05 2005
			6. KAMPUNG LIKI	91 10 06 2006
			7. KAMPUNG PULAU ARMO	91 10 07 2007
			8. KAMPUNG LEMBAH NEIDAM	91 10 08 2008
2	DISTRIK SARMI TIMUR	1004		91 10 07
			1. KAMPUNG HOLMAFEN	91 10 07 2001
			2. KAMPUNG SEWAN	91 10 07 2002
			3. KAMPUNG WASKEY	91 10 07 2003
			4. KAMPUNG BAGAISEWAR BARU	91 10 07 2004
			5. KAMPUNG EBRAM	91 10 07 2005
			6. KAMPUNG BINYER	91 10 07 2006

NO	NAMA DISTRIK	LUAS WILAYAH	N A M A	
			KELURAHAN / KAMPUNG	KODE WILAYAH
3	DISTRIK SARMI SELATAN	951		91 10 08
			1. KAMPUNG MUNUKANIA	91 10 08 2001
			2. KAMPUNG KASUKWE	91 10 08 2002
			3. KAMPUNG SYARATESA	91 10 08 2003
			4. KAMPUNG AMSIRA	91 10 08 2004
			5. KAMPUNG WAPPOMANIA	91 10 08 2005
4	DISTRIK TOR ATAS	3937		91 10 02
			1. KAMPUNG SAMANENTE	91 10 02 2001
			2. KAMPUNG BORA - BORA	91 10 02 2002
			3. KAMPUNG TOGONFO	91 10 02 2003
			4. KAMPUNG KONDERJAN	91 10 02 2004
			5. KAMPUNG OMTE	91 10 02 2005
			6. KAMPUNG SAFROM TANE	91 10 02 2006
			7. KAMPUNG danANDER	91 10 02 2007
			8. KAMPUNG WAAF	91 10 02 2008
5	DISTRIK PANTAI BARAT	1388		91 10 03
			1. KAMPUNG MARTEWAR	91 10 03 2001
			2. KAMPUNG SAMORKENA	91 10 03 2002
			3. KAMPUNG ARBAIS	91 10 03 2003
			4. KAMPUNG KAPESO	91 10 03 2004
			5. KAMPUNG MASEP	91 10 03 2005
			6. KAMPUNG NISRO	91 10 03 2006
			7. KAMPUNG ARUSWAR	91 10 03 2007
			8. KAMPUNG KAMINAWARI	91 10 03 2008
			9. KAMPUNG WAIM	91 10 03 2009
			10. KAMPUNG SUBU	91 10 03 2010
			11. KAMPUNG KARFASIA	91 10 03 2011
			12. KAMPUNG WARI	91 10 03 2012
			13. KAMPUNG WEBRO	91 10 03 2013
			14. KAMPUNG NIWERAWAR	91 10 03 2014
			15. KAMPUNG BURGENA	91 10 03 2015
			16. KAMPUNG SIANTOA	91 10 03 2016
6	DISTRIK PANTAI TIMUR	3216		91 10 04
			1. KAMPUNG KOMRA	91 10 04 2001
			2. KAMPUNG ANSUDU	91 10 04 2002
			3. KAMPUNG BETAF	91 10 04 2003
			4. KAMPUNG YAMBEN / BENERAF	91 10 04 2004
			5. KAMPUNG SUNUM / YAMNA	91 10 04 2005
			6. KAMPUNG BETAF II	91 10 04 2006
			7. KAMPUNG ANSUDU II	91 10 04 2007
			8. KAMPUNG FINYABOR/TAKAR	91 10 04 2008

NO	NAMA DISTRIK	LUAS WILAYAH	N A M A	
			KELURAHAN / KAMPUNG	KODE WILAYAH
7	DISTRIK APAWER HULU	1414		91 10 06
			1. KAMPUNG AURIMI	91 10 06 2001
			2. KAMPUNG MURARA	91 10 06 2002
			3. KAMPUNG SASAWA PECE	91 10 06 2003
			4. KAMPUNG WAMARIRI	91 10 06 2004
			5. KAMPUNG AIRORAN	91 10 06 2005
			6. KAMPUNG TAMAJA	91 10 06 2006
			7. KAMPUNG MANIWA	91 10 06 2007
			8. KAMPUNG KWAWITANIA	91 10 06 2008
			9. KAMPUNG SURIMANIA	91 10 06 2009
			10. KAMPUNG PINAH	91 10 06 2010
8	DISTRIK BONGGO	693		91 10 05
			1. KAMPUNG KIREN	91 10 05 2001
			2. KAMPUNG ARMOPA	91 10 05 2002
			3. KAMPUNG TARONTA SRUM	91 10 05 2003
			4. KAMPUNG ANUS	91 10 05 2004
			5. KAMPUNG KRIM / PODENA	91 10 05 2005
			6. KAMPUNG MAWES WARES	91 10 05 2006
			7. KAMPUNG RIMSER SARI	91 10 05 2007
			8. KAMPUNG BEBON JAYA	91 10 05 2008
			9. KAMPUNG TETOM	91 10 06 2009
			10. KAMPUNG ROTEA	91 10 06 2010
9	DISTRIK BONGGO TIMUR	863		91 10 10
			1. KAMPUNG KAPTIAU	91 10 10 2001
			2. KAMPUNG MAWESDAY	91 10 10 2002
			3. KAMPUNG TARAWASIH MARENGGI	91 10 10 2003
			4. KAMPUNG GWIN JAYA	91 10 10 2004
			5. KAMPUNG TAMARSARI	91 10 10 2005
			6. KAMPUNG MAWES MUKTI	91 10 10 2006

Sumber; Data Olahan BAPPEDA Kabupaten Sarmi.

b. Topografi.

Secara umum, kondisi topografi Kabupaten SarMI menunjukkan karakteristik wilayah yang sangat beragam, mulai dari kawasan pesisir yang relatif datar hingga wilayah pegunungan dengan kemiringan lereng yang cukup curam. Variasi topografi ini membentuk karakter bentang alam yang kompleks dan berpengaruh terhadap pola penggunaan lahan, tata ruang wilayah, serta potensi dan kendala pembangunan di berbagai sektor.

Berdasarkan hasil analisis data Digital Elevation Model (DEM) dan peta topografi Kabupaten SarMI, konfigurasi kemiringan lahan di wilayah Kabupaten SarMI dapat diklasifikasikan ke dalam lima kelas lereng utama sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Kondisi Topografi/Kemiringan Lereng Kabupaten SarMI

Kelas Lereng	Luas (Ha)	Persentase (%)
0-8 %	951.281	52,75
8-15 %	293.066	16,25
15-25 %	290.320	16,10
25-40 %	175.634	9,74
>40 %	93.077	5,16
Total	1.803.377	100

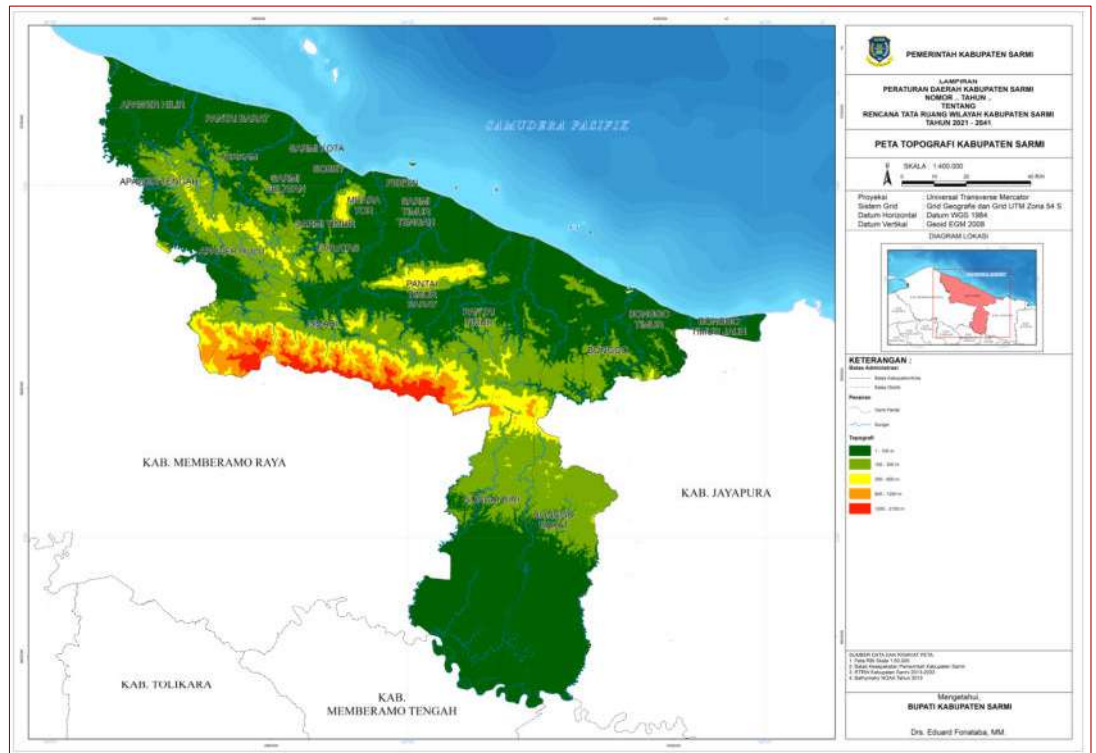
Sumber: Hasil analisis DEM (Digital Elevation Model) KLHS Kab. SarMI

Dari data tersebut diketahui bahwa sekitar 52,75% wilayah Kabupaten SarMI merupakan daerah datar dengan kemiringan lereng 0–8%, yang tersebar luas di kawasan pesisir utara dan wilayah tengah bagian timur. Kondisi ini relatif mendukung pengembangan kawasan permukiman, pertanian, serta pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Sementara itu, wilayah dengan kemiringan curam hingga sangat curam (>25%) yang mencakup sekitar 18,02% dari total luas wilayah, tersebar pada bagian selatan Kabupaten SarMI, terutama di Distrik SarMI Selatan, Tor Atas, dan sebagian Distrik Muara Tor, yang didominasi oleh formasi perbukitan dan pegunungan.

Selain karakteristik kemiringan, hasil analisis terhadap ketinggian wilayah menunjukkan bahwa Kabupaten SarMI didominasi oleh daerah dengan ketinggian antara 100–500 meter di atas permukaan laut (mdpl) atau sebesar 46,82% dari total luas wilayah. Wilayah dengan ketinggian di atas 1.000 mdpl berada di kawasan selatan, khususnya pada Distrik SarMI Selatan dan Tor Atas, yang memiliki potensi sebagai kawasan konservasi, hulu daerah aliran sungai (DAS), serta sumber air bagi wilayah sekitarnya.

Sebaran topografi Kabupaten SarMI secara spasial dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut.

Gambar 2.2
Peta Topografi Kabupaten Sarmi



Sumber; Hasil olahan POKJA KLHS RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025

Hasil analisis ketinggian wilayah menunjukkan bahwa Kabupaten Sarmi didominasi oleh daerah dengan ketinggian antara 100–500 meter di atas permukaan laut (mdpl), yang mencakup sekitar 46,82% dari total luas wilayah. Sementara itu, daerah dengan ketinggian 1.000–2.000 mdpl tersebar di wilayah selatan, meliputi Distrik Sarmi Selatan dan Tor Atas, dengan kondisi fisiografis yang lebih terjal. Secara umum, konfigurasi ketinggian dan kemiringan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Sarmi merupakan kawasan lindung yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan penyangga ekosistem, sedangkan wilayah

Tabel 2.3
Kelas Ketinggian Kabupaten Sarmi

Ketinggian	Luas (Ha)	Persentase (%)
0-50	245.806	13,63
50-100	472.965	26,23
100-500	844.310	46,82
500-1000	153.814	8,53
1000-2000	85.026	4,71
>2000	1.456	0,08
Total	1.803.376	100,00

pesisir dan dataran rendah memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap banjir dan genangan akibat dinamika hidrologis dan perubahan iklim. Rincian ketinggian wilayah Kabupaten Sarmi disajikan pada Tabel 2.3, dan sebarannya dapat dilihat pada Gambar 2.2 (Peta topografi Kabupaten Sarmi).

c. Geologi dan Jenis Tanah

Secara geologis, wilayah Kabupaten SarMI memiliki karakteristik tanah yang beragam, dipengaruhi oleh proses geomorfologis dan kondisi fisiografi wilayah. Berdasarkan hasil pemetaan tanah, terdapat enam (6) jenis tanah utama di Kabupaten SarMI, yaitu Entisol (Ent), Inceptisol (Ept), Ultisol (Ult), Alfisol (Alf), Oxisol (Ox), dan Mollisol (Olls). Komposisi dan sebaran masing-masing jenis tanah dapat dilihat pada Gambar 2.3 (Peta Jenis Tanah Kabupaten SarMI), dengan uraian sebagai berikut:

1. Entisol (Ent)

Merupakan tanah mineral muda yang terbentuk dari hasil deposisi aluvial dan sedimentasi pantai. Jenis tanah ini memiliki tingkat kesuburan relatif tinggi dan berpotensi besar untuk pengembangan pertanian. Sebarannya terutama terdapat di Distrik Pantai Timur, Pantai Timur Barat, dan Tor Atas.

2. Inceptisol (Ept)

Jenis tanah ini menunjukkan perkembangan horizon yang masih awal dengan tingkat pelapukan rendah. Tanah ini umumnya berada di daerah pegunungan dan hutan, berfungsi penting sebagai penyangga cadangan air tanah. Inceptisol tersebar luas hampir di seluruh wilayah Kabupaten SarMI.

3. Ultisol (Ult)

Merupakan tanah dengan tingkat pencucian tinggi dan tingkat kesuburan relatif rendah. Ciri khas tanah ini adalah warna kemerahan akibat kandungan besi yang tinggi. Ultisol tersebar luas di sebagian besar wilayah Kabupaten SarMI dan mendominasi kawasan berlereng sedang hingga curam.

4. Alfisol (Alf)

Jenis tanah ini memiliki tingkat kesuburan tinggi dengan kandungan bahan organik sedang, sangat potensial untuk pertanian produktif dan kegiatan agroforestri. Sebaran Alfisol meliputi Distrik SarMI, SarMI Timur, Pantai Barat, Pantai Timur, Apawer Hulu, dan Tor Atas.

5. Oxisol (Ox)

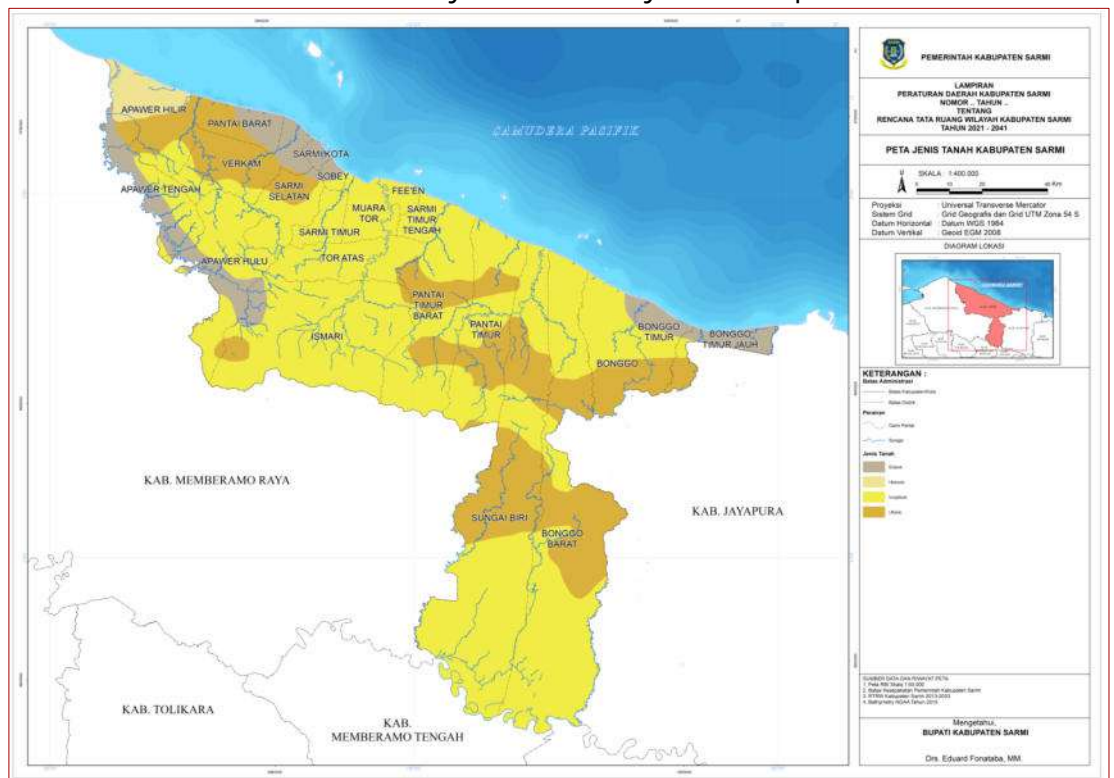
Tanah ini memiliki tingkat pelapukan lebih tinggi dibandingkan Ultisol, dengan kandungan mineral liat dominan. Persentase luasannya relatif kecil dan hanya ditemukan di Distrik Pantai Timur, Pantai Timur Barat, dan Apawer Hulu.

6. Mollisol (Olls)

Merupakan tanah khas pada ekosistem padang rumput, dikenal sangat subur dan produktif untuk berbagai jenis pertanian. Sebaran Mollisol ditemukan di Distrik Pantai Timur dan Tor Atas, dengan luasan yang cukup signifikan.

Kondisi geologi dan jenis tanah tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Sarmi memiliki keragaman potensi sumber daya lahan yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan pertanian, kehutanan, dan konservasi. Namun demikian, diperlukan pengelolaan ruang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk menghindari degradasi tanah dan erosi di wilayah-wilayah dengan kemiringan lereng tinggi.

Gambar 2.3
Jenis Tanah dan wilayah sebarannya di Kabupaten Sarmi



Sumber; Hasil olahan POKJA KLHS RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025

d. Hidrologi

Secara hidrologis, wilayah Kabupaten Sarmi memiliki potensi sumber daya air yang cukup melimpah dan strategis dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat serta pengembangan wilayah. Kondisi ini ditandai dengan keberadaan sejumlah sungai besar yang mengalir di berbagai wilayah kecamatan, antara lain Sungai Apawer, Iramuar, Muwar, Verkam, Verkam 1a, Moaif, Bulianang, Verkam 1, Bier, Unk, Biri, Wiru, Wiru 1, Sermoif, dan Tor. Sungai-sungai tersebut berperan penting sebagai sumber air baku, sarana transportasi lokal, serta pendukung kegiatan pertanian dan perikanan air tawar.

Secara umum, sistem hidrologi Kabupaten Sarmi tergabung dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Sentani, yang mencakup beberapa Sub-DAS utama, yaitu Sub DAS Apawer, Sub DAS Tor, Sub DAS Birri, Sub DAS Mamberamo Hilir, Sub DAS Taritatu Tengah, Sub DAS Taritatu Hilir, dan Sub DAS Grime. Distribusi luas masing-masing DAS di wilayah Kabupaten Sarmi dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Daerah Aliran Sungai (DAS) dan luasannya

NAMA DAS	LUAS (HA)	PERSENTASE (%)
Apauwer	328,070	20.56
Birri	277,452	17.39
Grime	29,163	1.83
Memberamo Hilir	57,485	3.60
Taritatu Tengah	293,466	18.39
Taritatu Hilir	179,897	11.27
Tor	430,387	26.97
Total	1,595,919	100.00

Sumber: BPDAS-PS, Kementerian Kehutanan

e. Klimatologi

Kondisi klimatologis Kabupaten Sarmi dipengaruhi oleh letak geografisnya yang berada di wilayah pesisir utara Pulau Papua dan berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik. Secara umum, Kabupaten Sarmi beriklim tropis lembap (humid tropis) dengan dua musim yang tidak terlalu ekstrem, yakni musim penghujan dan musim kemarau yang saling bergantian dalam intensitas yang bervariasi sepanjang tahun.

Tabel berikut menyajikan data curah hujan, jumlah hari hujan, dan penyinaran matahari menurut bulan di Kabupaten Sarmi Tahun 2024.

Tabel 2.5.
Curah Hujan dan Hari Hujan menurut Bulan di Kabupaten Sarmi Tahun 2024

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm/tahun)	Jumlah Hari Hujan (hari)
Januari	247,60	22
Februari	254,70	23
Maret	398,90	18
April	146,20	20
Mei	233,60	15
Juni	379,10	16
Juli	30,40	25
Agustus	134,70	31
September	219,20	30
Oktober	463,30	31
November	130,80	30
Desember	469,20	31

Sumber: BMKG-Stasiun Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

f. Suhu Udara

Kondisi suhu udara merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi karakteristik iklim, tata guna lahan, serta potensi sumber daya alam di Kabupaten Sarmi. Secara umum, Kabupaten Sarmi memiliki suhu udara yang relatif tinggi sepanjang tahun, mencerminkan karakteristik iklim tropis basah dengan fluktuasi musiman yang tidak signifikan.

Tabel 2.6
Suhu Udara Maksimum, Minimum dan Rata-rata
Menurut Bulan di Kabupaten SarMI 2022-2024

NO	BULAN	SUHU UDARA MAKSIMUM			SUHU UDARA MINIMUM		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Januari	34,3	32,9	33,00	22,4	23,0	23,20
2	Februari	33,2	33,7	33,20	22,8	23,0	23,30
3	Maret	33,5	33,3	33,80	23,2	22,4	23,20
4	April	33,6	34,2	32,60	23,7	22,5	23,90
5	Mei	33,5	30,6	34,80	23,8	22,5	21,90
6	Juni	32,6	33,3	34,80	23,9	23,0	23,30
7	Juli	32,1	32,8	33,60	23,9	22,5	23,40
8	Agustus	32,5	32,0	32,10	22,9	22,3	23,30
9	September	31,8	32,5	32,10	22,6	23,3	23,40
10	Oktober	32,6	32,7	32,20	22,6	22,3	23,60
11	November	33,2	33,8	33,20	23,9	23,0	23,90
12	Desember	33,0	35,3	34,20	23,4	22,8	23,60
RATA-RATA		33,0	33,1	33,3	23,2	22,7	23,3

Sumber: BMKG-Stasiun Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Berdasarkan data pada Tabel 2.6, suhu udara maksimum di Kabupaten SarMI selama periode 2022–2024 menunjukkan tren stabil dengan kecenderungan peningkatan tipis, dari 33,0°C pada tahun 2022 menjadi 33,3°C pada tahun 2024. Peningkatan ini menggambarkan adanya pengaruh perubahan iklim global yang turut berdampak terhadap kondisi lokal, meskipun dalam skala yang relatif kecil.

Suhu udara minimum juga mengalami fluktuasi ringan, dengan rata-rata 23,2°C pada tahun 2022, turun menjadi 22,7°C pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 23,3°C pada tahun 2024. Perubahan ini menunjukkan bahwa amplitudo suhu (perbedaan antara suhu maksimum dan minimum) di Kabupaten SarMI relatif kecil, yang menandakan kestabilan iklim mikro di wilayah pesisir tropis.

Dari distribusi bulanan, suhu udara tertinggi cenderung terjadi pada bulan Januari–Maret dan Desember, seiring dengan intensitas radiasi matahari yang tinggi dan berkurangnya frekuensi hujan lebat pada periode tersebut. Sebaliknya, suhu relatif lebih rendah pada bulan April–Juni, bertepatan dengan meningkatnya curah hujan dan kelembapan udara.

Secara umum, kisaran suhu udara Kabupaten SarMI antara 22°C hingga 33°C mencerminkan kondisi iklim tropis yang mendukung pertumbuhan vegetasi hutan hujan, aktivitas pertanian dataran rendah, dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Namun demikian, tren kenaikan suhu tahunan perlu menjadi perhatian dalam konteks adaptasi perubahan iklim, terutama terhadap ketahanan pangan, produktivitas sektor pertanian, dan kesehatan masyarakat.

g. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten SarMI pada tahun 2022 didominasi oleh kawasan hutan, yang mencerminkan karakteristik wilayah dengan tingkat tutupan vegetasi yang masih tinggi. Berdasarkan Peta Penutupan Lahan Tahun 2022 yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sebagian besar wilayah Kabupaten SarMI terdiri atas hutan lahan kering primer dan sekunder, yang tersebar hampir di seluruh bagian wilayah, baik di daerah pesisir maupun di bagian selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Mamberamo Tengah.

Jenis tutupan lahan utama di Kabupaten SarMI meliputi:

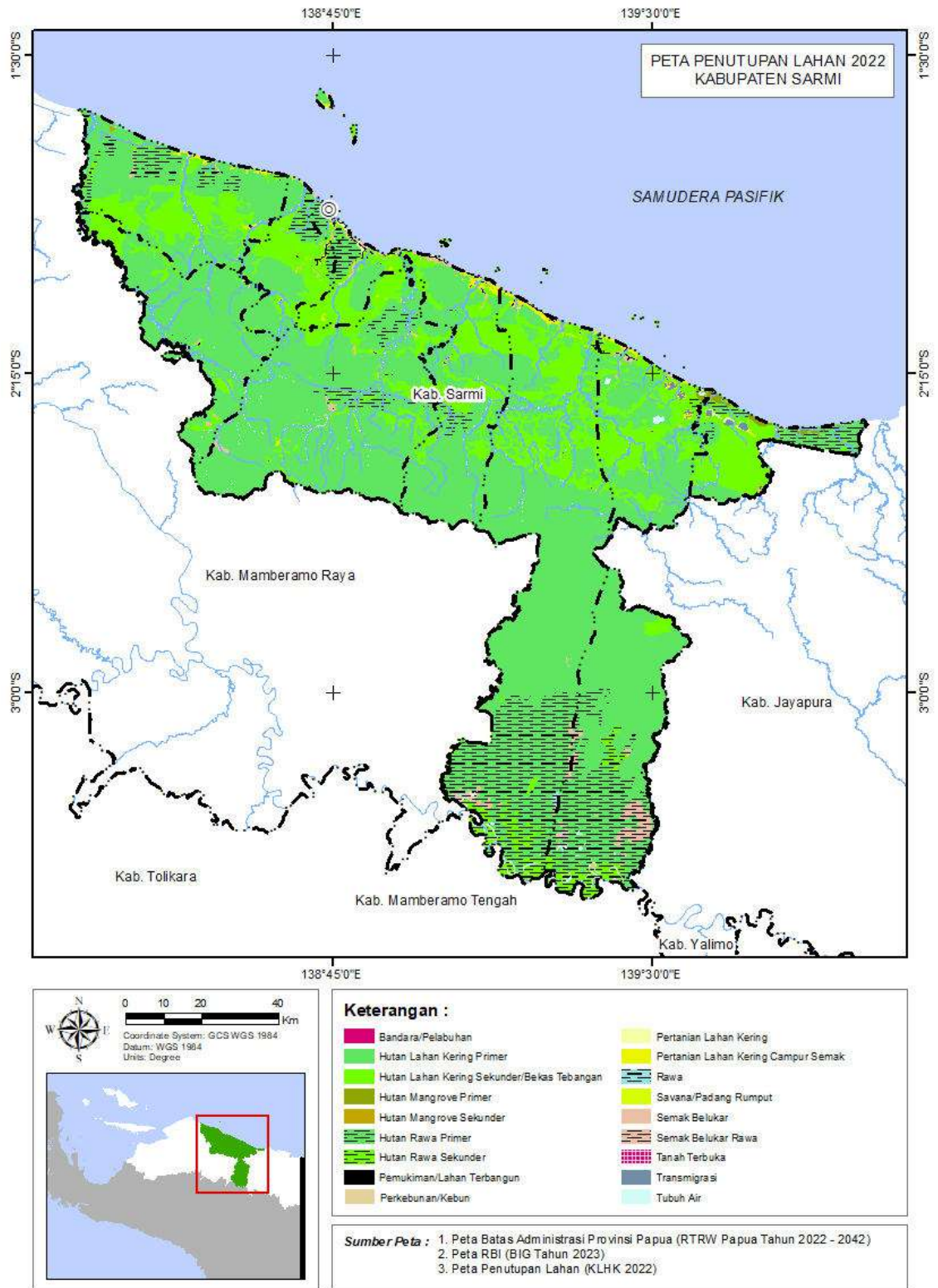
1. Hutan Lahan Kering Primer dan Sekunder, mencakup sebagian besar wilayah dengan fungsi ekologi penting sebagai daerah tangkapan air dan pelindung keanekaragaman hayati.
2. Hutan Rawa dan Hutan Mangrove, terutama terdapat di wilayah pesisir utara yang berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik.
3. Lahan Pertanian Lahan Kering, yang umumnya tersebar di sekitar permukiman penduduk dan daerah dataran rendah di sepanjang jalur transportasi utama.
4. Permukiman dan Lahan Terbangun, yang relatif kecil luasannya, terpusat di sekitar Ibu Kota Kabupaten SarMI dan beberapa distrik di sepanjang garis pantai.
5. Perkebunan dan Kebun Campuran, berkembang secara terbatas di wilayah dengan aksesibilitas tinggi, namun belum menjadi komponen dominan dalam struktur penggunaan lahan.
6. Rawa dan Semak Belukar, tersebar di daerah peralihan antara kawasan hutan dan lahan terbuka.
7. Tubuh Air dan Daerah Transmigrasi, menempati porsi kecil dari total luas wilayah.

Struktur penggunaan lahan tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten SarMI masih memiliki potensi besar dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, khususnya di sektor kehutanan, pertanian, dan konservasi lingkungan. Namun demikian, keterbatasan lahan terbangun dan aksesibilitas wilayah menjadi tantangan dalam pengembangan ekonomi daerah, sehingga diperlukan strategi penataan ruang yang mampu menyeimbangkan antara konservasi lingkungan dan pemanfaatan ruang untuk kegiatan produktif masyarakat.

Peta berikut menyajikan kondisi penutupan dan penggunaan lahan Kabupaten SarMI Tahun 2022, yang menggambarkan distribusi berbagai jenis tutupan lahan seperti kawasan hutan, pertanian, rawa, permukiman,

serta area lainnya. Peta ini menjadi acuan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam upaya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Gambar 2.4
Peta Tutupan Lahan di Kabupaten Sarmi



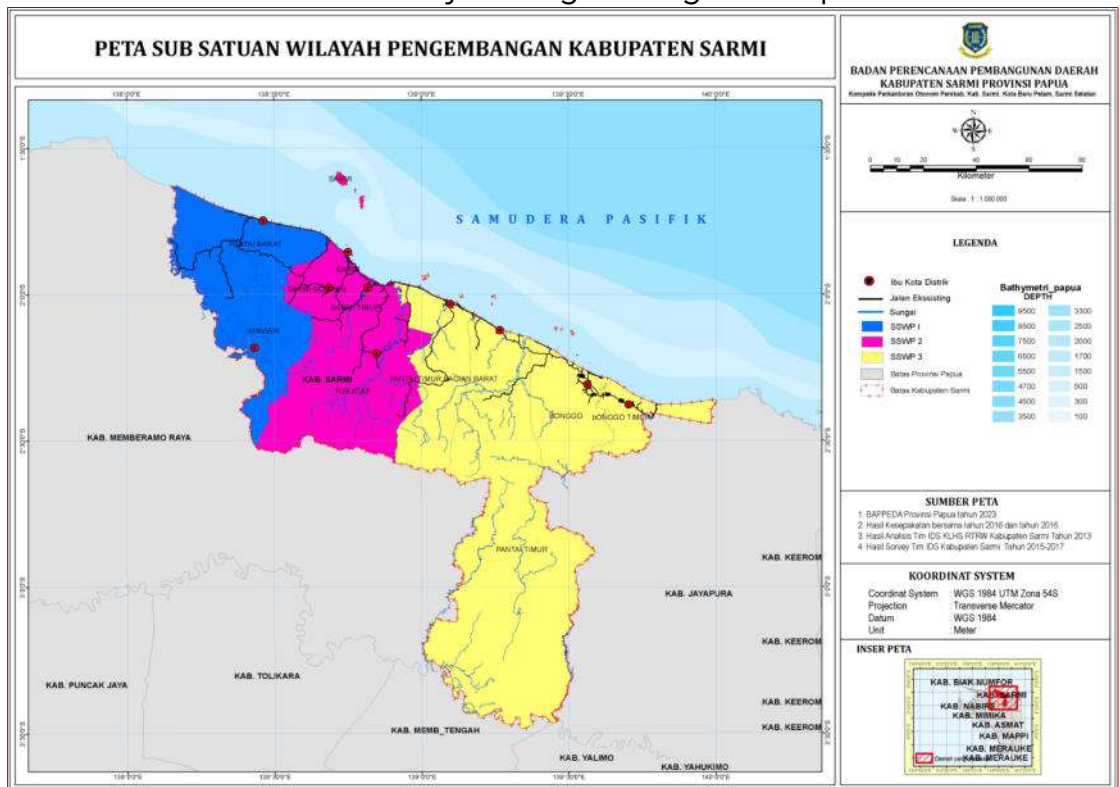
Sumber; Hasil olahan POKJA KLHS RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025

h. Pengembangan Wilayah Berdasarkan Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP)

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sarmi, arah pengembangan wilayah di Kabupaten Sarmi dibagi ke dalam tiga (3) Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP), yaitu SSWP I (Sarmi), SSWP II (Bonggo), dan SSWP III (Arbais). Pembagian wilayah pengembangan ini bertujuan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan sosial ekonomi di setiap kawasan.

Sebaran ketiga SSWP tersebut ditunjukkan pada Peta Sub Satuan Wilayah Pengembangan Kabupaten Sarmi berikut:

Gambar 2.5
Peta Sub Satuan Wilayah Pengembangan Kabupaten Sarmi



Sumber; Hasil olahan POKJA KLHS RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025

1. Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP I) – Sarmi (Warna Magenta)

SSWP I meliputi empat (4) distrik, yaitu Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sarmi, Distrik Sarmi Timur, dan Distrik Tor Atas. Kawasan ini berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan kabupaten serta menjadi simpul utama transportasi regional.

Arah pengembangan wilayah difokuskan pada:

- Pengembangan fasilitas pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan jasa;
- Pengembangan sarana pariwisata, olahraga, dan ruang terbuka hijau berupa taman kota;

- Peningkatan peran wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.

SSWP I memiliki posisi strategis karena terletak di wilayah pesisir tengah yang langsung berhadapan dengan Samudera Pasifik, serta menjadi lokasi Ibu Kota Kabupaten Sarmi. Kondisi ini menjadikan kawasan ini sebagai pusat kegiatan administratif, ekonomi, dan sosial yang dapat menggerakkan wilayah lain di sekitarnya. Aksesibilitas wilayah yang relatif baik mendukung pengembangan sektor jasa, perdagangan, serta kegiatan industri kecil dan menengah.

2. Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP II) – Bonggo (Warna Kuning)

SSWP II mencakup empat (4) distrik, yaitu Distrik Bonggo Timur, Distrik Bonggo, Distrik Pantai Timur, dan Distrik Pantai Timur Barat. Kawasan ini berperan sebagai kawasan pendukung kegiatan ekonomi berbasis pertanian dan agribisnis.

Arah pengembangan wilayah meliputi:

- Pengembangan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perdagangan serta jasa lokal;
- Pengembangan ruang terbuka hijau berupa taman dan jalur hijau;
- Pembangunan gudang dan terminal agribisnis untuk mendukung rantai pasok sektor pertanian.

SSWP II merupakan wilayah dengan potensi lahan pertanian dan perkebunan yang luas, sehingga diarahkan menjadi kawasan agribisnis unggulan Kabupaten Sarmi. Letaknya yang berada di bagian timur kabupaten juga berfungsi sebagai koridor penghubung menuju Kabupaten Jayapura dan pusat-pusat ekonomi regional. Diperlukan penguatan infrastruktur transportasi darat dan fasilitas logistik guna mendukung kelancaran distribusi hasil produksi pertanian.

3. Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP III) – Arbais (Warna Biru)

SSWP III meliputi dua (2) distrik, yaitu Distrik Pantai Barat dan Distrik Apawer Hulu. Wilayah ini berfungsi sebagai kawasan pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan permukiman perdesaan.

Arah pengembangan wilayah difokuskan pada:

- Penguatan basis ekonomi lokal melalui sektor pertanian dan peternakan;
- Pengembangan fasilitas pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan peribadatan;
- Peningkatan ruang terbuka hijau berupa taman dan jalur hijau desa.

SSWP III memiliki karakter wilayah perdesaan dengan tingkat aksesibilitas yang masih terbatas. Namun, kawasan ini memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan yang dapat mendukung ketahanan pangan daerah. Pengembangan infrastruktur dasar serta peningkatan konektivitas antarwilayah menjadi kunci dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan ini.

Pembagian Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) di Kabupaten Sarmi mencerminkan strategi pembangunan yang berbasis pada potensi dan fungsi wilayah. SSWP I berperan sebagai pusat kegiatan dan pertumbuhan utama, SSWP II sebagai pendorong ekonomi berbasis agribisnis dan perdagangan lokal, serta SSWP III sebagai wilayah penyangga dengan fokus pengembangan pertanian dan sumber daya alam.

Pendekatan spasial ini diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang berimbang, berkelanjutan, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat integrasi ekonomi antarwilayah dalam kerangka pembangunan jangka menengah Kabupaten Sarmi.

i. Potensi Unggulan Daerah

Kabupaten Sarmi memiliki berbagai potensi unggulan yang bersumber dari kekayaan sumber daya alam, posisi geografis yang strategis, keragaman sosial budaya masyarakat, serta keanekaragaman hayati yang tinggi. Potensi tersebut menjadi modal dasar dalam mendukung arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berkeadilan.

1) Sumber Daya Alam

Kabupaten Sarmi memiliki sumber daya alam yang melimpah, mencakup sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, serta pariwisata alam. Pemanfaatan potensi tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

a) Kehutanan

Wilayah Kabupaten Sarmi didominasi oleh kawasan hutan dengan luas mencapai $\pm 1.637.988$ hektar, atau sekitar 90 persen dari total luas wilayah daratan. Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan tersebut terdiri atas:

- Hutan Lindung seluas ± 224.514 hektar (12,4%),
- Hutan Produksi seluas ± 826.801 hektar, yang mencakup:
 - » Hutan Produksi Terbatas (HPT): ± 463.519 hektar,
 - » Hutan Produksi Tetap (HP): ± 295.050 hektar,
 - » Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK): ± 68.231 hektar.

Kawasan hutan di Kabupaten Sarmi berperan penting dalam menjaga fungsi ekologis dan hidrologis wilayah, serta memiliki potensi ekonomi melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), jasa lingkungan, dan pengembangan ekowisata hutan. Potensi kehutanan ini juga menjadi penyangga utama terhadap perubahan iklim dan bencana ekologis.

b) Pertambangan

Kabupaten Sarmi memiliki potensi bahan galian yang cukup beragam, meliputi bahan galian batuan, pasir besi, gamping, batubara, serta potensi minyak dan gas bumi.

Distribusi potensi pertambangan di wilayah ini meliputi:

- Pasir Besi: terdapat di Distrik Pantai Timur dan Pantai Timur Barat,
- Gamping: tersebar di Distrik Sarmi Timur dan Sarmi Kota,
- Batubara: berada di wilayah Pantai Timur Barat dan Tor Atas,
- Minyak dan Gas Bumi (Migas): diperkirakan terdapat di perairan Laut Pasifik.

Potensi pertambangan ini memiliki nilai strategis untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan PAD, namun pemanfaatannya tetap diarahkan secara selektif, berwawasan lingkungan, dan berbasis prinsip keberlanjutan.

c) Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan

Sektor pertanian dan perkebunan menjadi salah satu sektor unggulan yang menopang perekonomian masyarakat Kabupaten Sarmi. Luas areal perkebunan rakyat tercatat sebesar ± 5.087 hektar dengan total produksi mencapai ± 65.392 ton pada tahun 2021. Komoditas utama yang dikembangkan meliputi kelapa, kakao, pisang, dan vanili, dengan produksi tertinggi berasal dari kelapa sebanyak ± 1.111 ton.

Potensi pengembangan komoditas unggulan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Sarmi masih terbuka luas, antara lain: Kelapa dan Kakao di wilayah pesisir, Sagu; Padi ladang / padi gogo; dan Jagung & kacang-tanah / palawija.

Selain itu, kegiatan peternakan juga berkembang di beberapa distrik dengan potensi pengembangan peternakan sapi potong, kambing, dan unggas, yang didukung oleh ketersediaan lahan padang rumput alami dan potensi pakan hijauan yang cukup.

d) Perikanan

Kabupaten Sarmi merupakan daerah pesisir dengan garis pantai yang panjang dan memiliki banyak pulau kecil di sepanjang pesisir utara Papua. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah ini sangat besar, meliputi:

- Perikanan tangkap laut, dengan hasil utama ikan pelagis besar (tuna, tongkol), ikan demersal (kerapu, kakap), serta udang, kepiting, dan teripang.
- Perikanan budidaya, air tawar (kolam dan sungai) yang tersebar di wilayah Bonggo, Pantai Timur, dan Sarmi Timur.

Selain menjadi sumber pangan dan pendapatan masyarakat, sektor perikanan juga berpotensi dikembangkan menjadi sentra minapolitan, yang mendukung pengembangan industri olahan hasil laut berbasis lokal.

e) Pariwisata

Kabupaten Sarmi memiliki potensi pariwisata yang sangat beragam, terutama di sektor ekowisata dan wisata alam bahari. Daya tarik utama pariwisata di Kabupaten Sarmi meliputi:

- Pantai-pantai alami dengan pasir putih dan hitam serta panorama laut,
- Pulau-pulau kecil dengan ekosistem karang yang masih terjaga,
- Hutan bakau dan hutan tropis yang kaya keanekaragaman hayati,
- Budaya lokal dan tradisi masyarakat adat yang khas dan autentik.

Arah pengembangan sektor pariwisata difokuskan pada pengembangan kawasan ekowisata berbasis masyarakat, peningkatan infrastruktur pendukung, serta promosi destinasi unggulan secara terpadu dengan wilayah lain di Provinsi Papua.

2) Posisi Geografis Kabupaten Sarmi

Kabupaten Sarmi memiliki posisi geografis yang strategis, berada pada jalur penghubung antara Kota Jayapura di sebelah timur dan Kabupaten Mamberamo Raya di sebelah barat, serta berbatasan dengan wilayah pegunungan tengah di bagian selatan.

Kondisi ini menjadikan Kabupaten Sarmi sebagai wilayah transit strategis untuk pergerakan barang dan jasa antara pesisir utara Papua dengan wilayah pedalaman.

Apabila konektivitas antarwilayah semakin terbuka melalui peningkatan jaringan jalan trans-Papua dan pelabuhan laut, Kabupaten Sarmi berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir utara Papua, khususnya dalam pengembangan sektor logistik, perdagangan, dan jasa transportasi antarwilayah.

3) Keragaman Etnis dan Kebudayaan

Masyarakat Kabupaten Sarmi terdiri atas beragam kelompok etnis dengan lima suku besar yang menjadi penduduk asli wilayah ini. Masing-masing suku memiliki sistem sosial, nilai-nilai budaya, dan kearifan lokal yang unik.

Kekayaan budaya tersebut mencakup bahasa daerah, seni tari dan musik tradisional, ritual adat, serta pengetahuan lokal terkait pengelolaan alam dan sumber daya.

Potensi sosial budaya ini menjadi modal penting dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya (cultural tourism) serta penguatan identitas daerah melalui pelestarian warisan budaya lokal.

4) Keanekaragaman Hayati

Kabupaten Sarmi merupakan salah satu wilayah dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di Papua. Wilayah ini memiliki ekosistem hutan tropis, hutan rawa, mangrove, serta pesisir dan laut yang menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna endemik, baik darat maupun laut.

Keanekaragaman hayati tersebut memiliki nilai strategis bagi pengembangan ekowisata, penelitian ilmiah, dan konservasi lingkungan, sekaligus memberikan peluang bagi pengembangan ekonomi hijau (green economy) berbasis sumber daya alam berkelanjutan.

Potensi unggulan Kabupaten Sarmi mencerminkan kekayaan sumber daya alam dan sosial budaya yang dapat menjadi pendorong utama pembangunan ekonomi daerah. Dengan posisi geografis yang strategis, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, serta keberagaman budaya dan hayati yang khas, Kabupaten Sarmi memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru di pesisir utara Papua melalui pendekatan pembangunan yang berbasis potensi lokal, berkelanjutan, dan inklusif.

j. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Sarmi merupakan salah satu wilayah di Provinsi Papua yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam cukup tinggi. Berdasarkan hasil analisis peta potensi bencana (BNPB, BIG, dan RTRW Papua), jenis bencana utama yang berpotensi terjadi di wilayah ini meliputi banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami. Kondisi geografis Kabupaten Sarmi yang memiliki topografi bervariasi, mulai dari dataran rendah pesisir hingga kawasan perbukitan dan pegunungan di bagian selatan, turut mempengaruhi sebaran wilayah rawan bencana di daerah ini.

1. Potensi Bencana Banjir

Berdasarkan peta potensi bencana banjir, sekitar 36,96% wilayah Kabupaten Sarmi tergolong berpotensi rawan banjir dengan intensitas sedang hingga tinggi. Daerah dengan potensi banjir tertinggi tersebar di

wilayah pesisir utara dan dataran aluvial sungai-sungai besar, terutama di Distrik Pantai Timur, Pantai Timur Barat, Bonggo, Bonggo Timur, dan Sarmi Timur. Karakteristik morfologi datar, curah hujan tinggi, dan melimpahnya jaringan sungai menjadi faktor utama penyebab kerentanan banjir pada kawasan ini.

Wilayah-wilayah yang relatif aman dari bencana banjir berada di bagian selatan Kabupaten Sarmi, yang memiliki topografi bergelombang hingga bergunung.

2. Potensi Bencana Tanah Longsor

Peta potensi longsor menunjukkan bahwa bagian selatan dan tengah Kabupaten Sarmi memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana longsor. Distrik yang termasuk dalam kategori potensi longsor tinggi meliputi Tor Atas, Apawer Hulu, Pantai Barat, Sarmi Selatan, dan Bonggo Timur. Distrik Tor Atas tercatat sebagai wilayah dengan luas kawasan sangat rawan longsor terbesar, yakni mencapai ±2.126,65 hektar.

Sebaliknya, wilayah dengan potensi longsor rendah berada di daerah dataran pantai utara seperti Distrik Sarmi Kota, Pantai Timur, dan Bonggo, yang memiliki kemiringan lereng relatif datar. Faktor dominan penyebab tanah longsor di wilayah selatan Sarmi antara lain kemiringan lereng curam, curah hujan tinggi, serta aktivitas alih fungsi lahan.

3. Potensi Bencana Tsunami

Berdasarkan Peta Zonasi Ancaman Tsunami (BNPB, 2021), pesisir utara Kabupaten Sarmi berpotensi terdampak tsunami apabila terjadi gempa bumi dengan episentrum di wilayah laut utara Papua. Zona rawan tsunami mencakup Distrik Bonggo Timur, Bonggo, Pantai Timur, Pantai Timur Barat, Sarmi Timur, Sarmi Kota, dan Pantai Barat. Potensi ancaman terbesar terdapat di kawasan pesisir rendah yang padat permukiman, khususnya di sekitar Kota Sarmi.

Upaya mitigasi perlu difokuskan pada pembangunan sistem peringatan dini (early warning system), penyediaan jalur evakuasi, serta edukasi kebencanaan kepada masyarakat pesisir.

4. Potensi Bencana Gempa Bumi

Kabupaten Sarmi berada pada zona tektonik aktif yang berdekatan dengan sesar aktif Papua utara. Hal ini menyebabkan seluruh wilayah Kabupaten Sarmi memiliki potensi terpapar gempa bumi dengan intensitas sedang hingga tinggi. Meskipun kejadian gempa besar jarang terjadi, potensi guncangan kuat tetap perlu diantisipasi terutama pada wilayah pesisir dan kawasan permukiman padat.

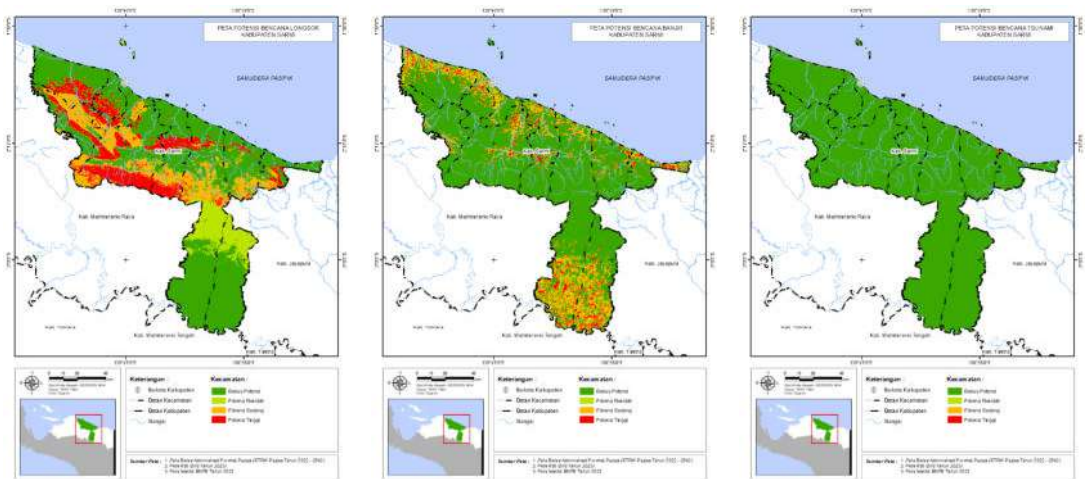
5. Riwayat Kejadian Bencana

Dalam periode tahun 2020–2023, beberapa kejadian bencana telah dilaporkan di Kabupaten SarMI, antara lain:

- Banjir dan genangan air di Distrik Pantai Timur, Bonggo, Bonggo Barat, SarMI Timur, dan SarMI Selatan (tahun 2023);
- Gelombang pasang dan angin puting beliung di beberapa kawasan pesisir utara;
- Gempa bumi ringan hingga sedang yang dirasakan di wilayah SarMI Kota, SarMI Selatan dan sekitarnya.

Kejadian-kejadian tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten SarMI memerlukan strategi mitigasi bencana terpadu berbasis wilayah dan komunitas.

Gambar 2.6
Peta Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten SarMI



j. Demografi

Untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi kependudukan di Kabupaten SarMI, diperlukan penyajian data jumlah penduduk berdasarkan wilayah administrasi. Distribusi penduduk yang berbeda antar distrik memberikan gambaran mengenai persebaran dan konsentrasi penduduk, yang selanjutnya menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2022–2024, jumlah penduduk di Kabupaten SarMI mengalami perkembangan yang bervariasi di setiap distrik. Adapun rincian jumlah penduduk menurut distrik selama periode tersebut dapat dilihat pada Tabel Jumlah Penduduk Kabupaten SarMI Tahun 2022–2024 berikut ini.

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Kabupaten SarMI Tahun 2022–2024

No	DISTRIK	2022	2023	2024
1	Pantai Timur Bagian Barat	5.087	5.147	4.839
2	Pantai Timur	2.962	2.962	2.786
3	Bonggo	4.382	4.469	5.071
4	Bonggo Timur	3.299	3.387	3.719
5	Tor Atas	1.310	1.330	2.238
6	SarMI	14.093	14.148	15.203
7	SarMI Timur	3.767	3.833	2.034
8	SarMI Selatan	3.312	3.322	2.349
9	Pantai Barat	2.195	2.227	2.939
10	Apawer Hulu	1.826	1.855	1.912
Kabupaten SarMI		42.233	42.680	43.090

Sumber: BPS Kabupaten SarMI, Data diolah 2024.

Secara umum, jumlah penduduk Kabupaten SarMI menunjukkan tren peningkatan selama periode 2022–2024. Pada tahun 2022, jumlah penduduk tercatat sebanyak 42.233 jiwa, meningkat menjadi 42.680 jiwa pada tahun 2023, dan diproyeksikan mencapai 43.090 jiwa pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan adanya peningkatan rata-rata sekitar 1,0 persen per tahun.

Berdasarkan distribusi wilayah, Distrik SarMI merupakan distrik dengan jumlah penduduk terbesar, mencapai lebih dari sepertiga total penduduk kabupaten. Kondisi ini menunjukkan bahwa Distrik SarMI berperan sebagai pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, dan pelayanan publik. Sementara itu, distrik dengan jumlah penduduk relatif kecil seperti Tor Atas dan Apawer Hulu menunjukkan tingkat kepadatan yang rendah, yang dapat diartikan sebagai daerah dengan tingkat aksesibilitas terbatas dan karakteristik geografis yang menantang.

Peningkatan jumlah penduduk di beberapa distrik menandakan adanya pergeseran konsentrasi penduduk seiring dengan berkembangnya kegiatan sosial ekonomi dan meningkatnya mobilitas masyarakat. Dinamika ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan wilayah, terutama terkait pemerataan pelayanan dasar, penyediaan infrastruktur, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, analisis terhadap pertumbuhan dan distribusi penduduk menjadi landasan penting dalam menyusun kebijakan pembangunan.

j. Demografi Orang Asli Papua (OAP)

Struktur dan komposisi penduduk merupakan salah satu aspek penting dalam analisis pembangunan daerah, karena menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial budaya. Pemahaman terhadap jumlah dan sebaran penduduk, khususnya penduduk Orang Asli Papua (OAP), memiliki arti strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan inklusif di Kabupaten Sarmi.

Berdasarkan data dari PDAK – Kementerian Dalam Negeri RI, jumlah penduduk Orang Asli Papua di Kabupaten Sarmi pada bulan April tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.8
Agregat Jumlah Penduduk Orang Asli Papua
Kabupaten Sarmi Bulan April Tahun 2025

NO	DISTRIK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Sarmi	3.140 (52,19%)	2.877 (47,82%)	6.017
2	Tor Atas	1.371 (53,08%)	1.212 (46,93%)	2.583
3	Pantai Barat	1.750 (53,10%)	1.546 (46,91%)	3.296
4	Pantai Timur	1.257 (53,86%)	1.077 (46,15%)	2.334
5	Bonggo	1.355 (54,20%)	1.145 (45,81%)	2.500
6	Apawer Hulu	1.187 (50,07%)	1.184 (49,94%)	2.371
7	Sarmi Selatan	1.151 (52,49%)	1.042 (47,52%)	2.193
8	Sarmi Timur	1.205 (51,68%)	1.127 (48,33%)	2.332
9	Pantai Timur Bagian Barat	1.926 (52,07%)	1.773 (47,94%)	3.699
10	Bonggo Timur	988 (51,84%)	918 (48,17%)	1.906
TOTAL		15.330 (52,44%)	13.901 (47,56%)	29.231

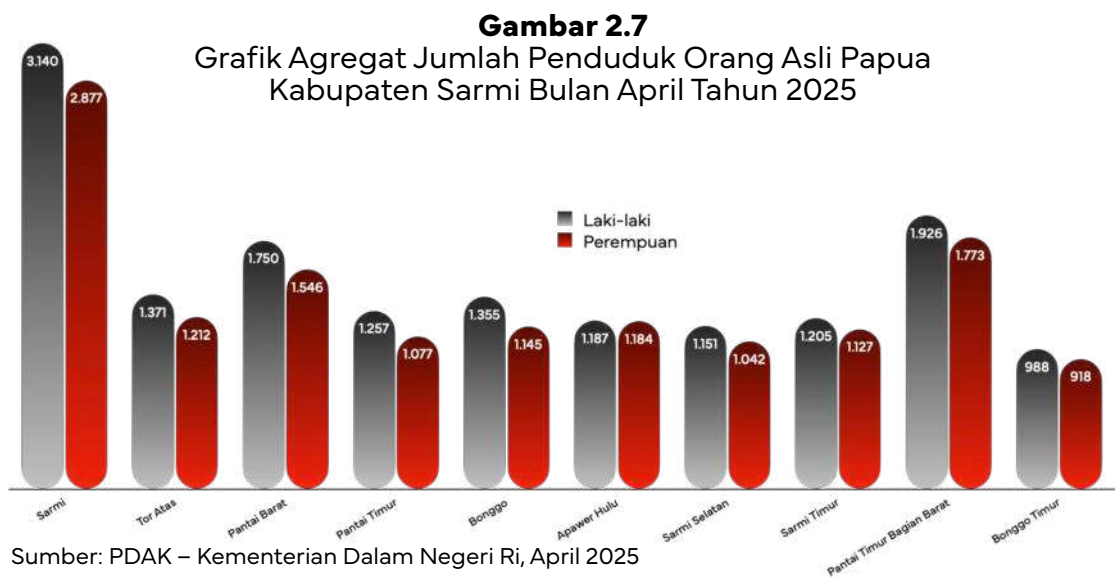
Sumber: PDAK – Kementerian Dalam Negeri Ri, April 2025

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Sarmi pada bulan April tahun 2025 tercatat sebanyak 29.231 jiwa, yang terdiri atas 15.330 jiwa laki-laki (52,44%) dan 13.901 jiwa perempuan (47,56%). Proporsi ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki masih mendominasi dengan selisih sekitar 4,88 persen dibandingkan penduduk perempuan.

Distribusi penduduk OAP antar distrik menunjukkan bahwa Distrik Sarmi memiliki jumlah penduduk tertinggi, yaitu sebanyak 6.017 jiwa, diikuti oleh Pantai Barat (3.296 jiwa) dan Pantai Timur Bagian Barat (3.699 jiwa). Kondisi ini mencerminkan bahwa distrik-distrik tersebut menjadi pusat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat OAP di Kabupaten Sarmi.

Sementara itu, distrik dengan jumlah penduduk OAP terendah adalah Bonggo Timur, yaitu sebanyak 1.906 jiwa. Jumlah penduduk yang relatif kecil di beberapa distrik mengindikasikan adanya tantangan dalam pemerataan pembangunan dan akses terhadap pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur transportasi.

Secara keseluruhan, sebaran penduduk OAP di Kabupaten Sarmi menunjukkan pola yang masih terkonsentrasi di wilayah pesisir dan perkotaan. Hal ini berkaitan erat dengan ketersediaan fasilitas umum serta peluang ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah pedalaman. Oleh karena itu, dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, perlu dilakukan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat OAP, terutama di distrik-distrik dengan kepadatan penduduk rendah, melalui kebijakan afirmatif yang berorientasi pada pemerataan pembangunan dan penguatan kapasitas masyarakat lokal. Untuk memahami lebih jauh dinamika tersebut, berikut ditampilkan data agregat jumlah penduduk OAP di setiap distrik Kabupaten Sarmi pada bulan April tahun 2025 dalam bentuk diagram.



Secara visual, grafik agregat jumlah penduduk Orang Asli Papua (OAP) Kabupaten Sarmi Tahun 2025 memperlihatkan variasi distribusi antar-distrik yang cukup signifikan, dengan dominasi populasi di wilayah pesisir. Pola ini mencerminkan konsentrasi aktivitas sosial-ekonomi serta akses pelayanan dasar yang lebih baik di kawasan tersebut. Data ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam merancang intervensi pembangunan yang lebih proporsional, khususnya untuk memperkuat keberdayaan OAP di wilayah dengan jumlah penduduk relatif kecil.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu dimensi utama dalam analisis kondisi daerah yang bertujuan untuk menggambarkan tingkat pencapaian pembangunan manusia dan kualitas hidup penduduk di Kabupaten Sarmi. Analisis pada aspek ini menjadi penting sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pemerataan hasil pembangunan.

Dalam konteks penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), analisis aspek kesejahteraan masyarakat dimaksudkan untuk menilai capaian dan permasalahan pembangunan sosial yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kemiskinan, dan kesejahteraan sosial lainnya. Kajian terhadap indikator-indikator tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting, kecenderungan perkembangan, serta kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat di Kabupaten Sarmi.

Kabupaten Sarmi memiliki karakteristik wilayah yang luas dan beragam, dengan sebagian besar penduduknya bermukim di wilayah pesisir dan perdesaan. Kondisi geografis yang kompleks serta keterbatasan sarana dan prasarana dasar menjadi faktor yang mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Namun demikian, potensi sumber daya alam yang melimpah, keberagaman budaya lokal, serta meningkatnya perhatian terhadap pembangunan manusia membuka peluang besar bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di masa mendatang.

Analisis dalam sub bab ini akan memuat gambaran umum dan kecenderungan perkembangan indikator kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sarmi, yang selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan, prioritas, serta program pembangunan daerah pada periode perencanaan RKPD tahun berjalan.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi merupakan pilar utama dalam analisis kesejahteraan masyarakat yang mencerminkan sejauh mana hasil pembangunan mampu meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Sarmi. Analisis ini bertujuan menilai kondisi sosial ekonomi melalui indikator tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, kesempatan kerja, dan pemerataan pembangunan antar wilayah.

Dalam konteks penyusunan RKPD, analisis ini penting untuk mengidentifikasi capaian pembangunan, mengukur ketimpangan sosial ekonomi, serta merumuskan strategi percepatan pertumbuhan yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan tidak hanya mendorong peningkatan output sektoral, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan, pesisir, dan daerah tertinggal.

Kabupaten Sarmi memiliki potensi besar di sektor perikanan, kehutanan, pertanian, dan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi lokal. Namun, berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, akses pasar, dan kapasitas sumber daya manusia masih perlu diatasi. Oleh karena itu, analisis kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini menjadi landasan dalam perumusan arah kebijakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kinerja indikator-indikator tersebut sampai dengan tahun 2024 sesuai ketersediaan data adalah sebagai berikut: indikator kemiskinan, ketimpangan pendapatan (Gini Ratio), tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia (IPM), yang akan diuraikan secara rinci pada bagian berikutnya.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator utama untuk menilai kinerja perekonomian suatu daerah. Melalui analisis terhadap PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK), dapat diketahui sejauh mana peningkatan kapasitas produksi dan nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di Kabupaten Sarmi dari tahun ke tahun.

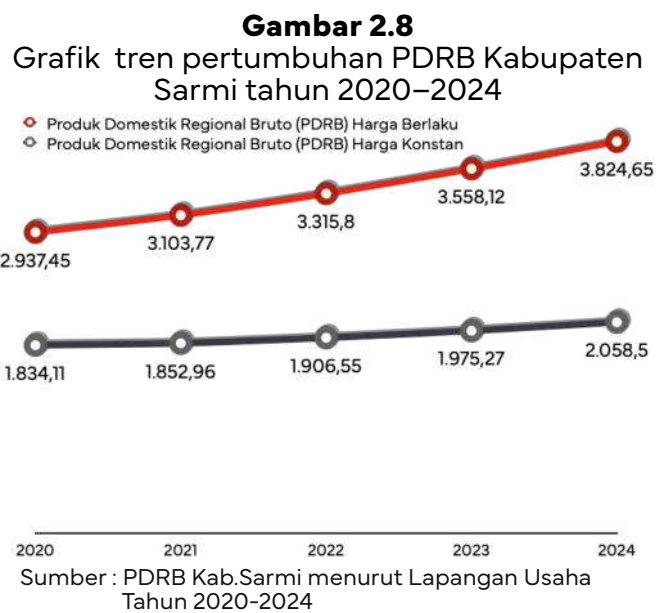
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika pertumbuhan ekonomi daerah, berikut disajikan grafik tren perkembangan PDRB Kabupaten Sarmi Tahun 2020–2024 yang menunjukkan arah pertumbuhan ekonomi baik secara nominal maupun riil.

Berdasarkan data PDRB Kabupaten Sarmi, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) meningkat dari Rp2.937,45 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp3.824,65 miliar pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya kenaikan nilai ekonomi nominal yang mencerminkan pertumbuhan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 (ADHK) juga mengalami peningkatan dari Rp1.834,11 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp2.058,50 miliar pada tahun 2024, yang menandakan peningkatan volume produksi barang dan jasa secara riil.

Secara umum, tren kenaikan baik pada ADHB maupun ADHK menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten SarMI terus tumbuh positif selama periode 2020–2024. Pertumbuhan ini menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong kegiatan ekonomi masyarakat di berbagai sektor, terutama pertanian, perikanan, konstruksi, dan jasa.

Selain menunjukkan peningkatan nilai PDRB secara nominal dan riil, penting pula untuk melihat bagaimana laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten SarMI dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi yang diukur berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) mencerminkan peningkatan volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika pertumbuhan ekonomi daerah, gambar 2.8 menyajikan grafik tren perkembangan PDRB Kabupaten SarMI Tahun 2020–2024 yang menunjukkan arah pertumbuhan ekonomi baik secara nominal maupun riil.



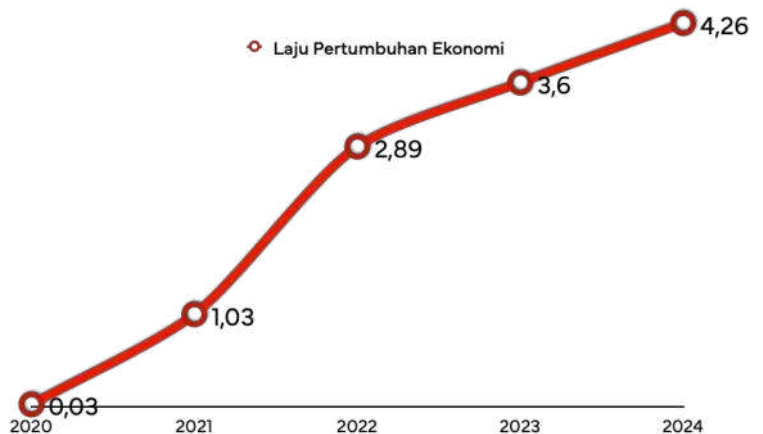
Tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten SarMI selama periode 2020–2024

memperlihatkan arah yang positif. Setelah mengalami perlambatan yang signifikan pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19, laju pertumbuhan secara bertahap kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Kenaikan ini menunjukkan adanya proses pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, seiring dengan meningkatnya produktivitas masyarakat, membaiknya investasi pemerintah maupun swasta, serta efektivitas kebijakan pembangunan daerah dalam mendorong kegiatan ekonomi di sektor-sektor unggulan.

Gambaran mengenai dinamika pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat pada grafik berikut, yang memperlihatkan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten SarMI atas dasar harga konstan tahun 2010 selama periode 2020–2024.

Grafik pada gambar 2.9 memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarmi menunjukkan tren yang semakin positif sepanjang periode 2020–2024. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi daerah hanya mencapai 0,03 persen, mencerminkan dampak berat pandemi COVID-19

Gambar 2.9
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sarmi tahun 2020–2024



Sumber : PDRB Kab.Sarmi menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

yang menekan hampir seluruh aktivitas ekonomi, terutama sektor pertanian, perdagangan, dan jasa. Namun, sejak tahun 2021, pertumbuhan mulai menunjukkan arah pemulihan dengan capaian 1,03 persen, seiring berjalannya kembali kegiatan ekonomi masyarakat dan penyesuaian kebijakan fiskal daerah untuk mendukung pemulihan produktivitas.

Memasuki tahun 2022 hingga 2023, pertumbuhan ekonomi meningkat masing-masing menjadi 2,89 persen dan 3,56 persen. Peningkatan tersebut mencerminkan mulai pulihnya sektor-sektor strategis, terutama sektor konstruksi, administrasi pemerintahan, serta perdagangan besar dan eceran yang berkontribusi signifikan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sarmi. Kinerja positif ini juga menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat daya saing ekonomi lokal melalui pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

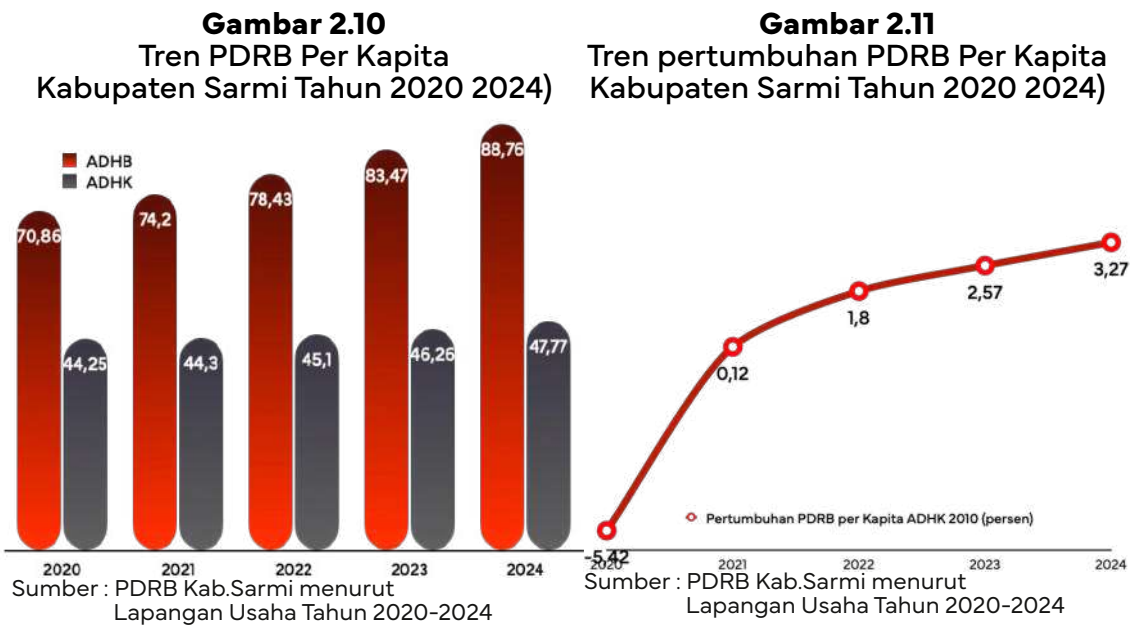
Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 4,26 persen, yang mengindikasikan optimisme terhadap kesinambungan pemulihan ekonomi daerah. Capaian ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat struktur ekonomi Kabupaten Sarmi yang lebih produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan salah satu indikator penting untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat serta kinerja ekonomi suatu daerah. Indikator ini menggambarkan besarnya rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk dalam suatu wilayah dalam periode tertentu, sehingga dapat mencerminkan kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Peningkatan PDRB per

kapita umumnya menjadi cerminan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, baik dari sisi peningkatan produksi, produktivitas tenaga kerja, maupun pemerataan hasil pembangunan.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan PDRB per kapita Kabupaten SarMI dalam kurun waktu lima tahun terakhir, berikut disajikan data dan tren pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) dan harga konstan tahun 2010 (ADHK) pada periode tahun 2020–2024 pada gambar 2.10 dan gambar 2.11.



Berdasarkan grafik di atas, perkembangan PDRB per kapita Kabupaten SarMI menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya, baik secara nominal (ADHB) maupun secara riil (ADHK).

- Pada tahun 2020, nilai PDRB per kapita ADHB tercatat sebesar Rp70,86 juta, sedangkan ADHK berada pada angka Rp44,25 juta. Tahun ini merupakan masa kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19, tercermin dari pertumbuhan negatif sebesar –5,42 persen.
- Tahun 2021 menunjukkan awal pemulihan ekonomi dengan kenaikan nilai PDRB per kapita menjadi Rp74,20 juta (ADHB) dan Rp44,30 juta (ADHK), disertai laju pertumbuhan positif 0,12 persen.
- Tahun 2022, peningkatan lebih signifikan terjadi dengan nilai PDRB per kapita mencapai Rp78,43 juta (ADHB) dan Rp45,10 juta (ADHK), serta pertumbuhan ekonomi naik menjadi 1,80 persen, seiring dengan pulihnya aktivitas produksi dan perdagangan.
- Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi semakin menguat dengan PDRB per kapita mencapai Rp83,47 juta (ADHB) dan Rp46,26 juta (ADHK), serta pertumbuhan riil meningkat menjadi 2,57 persen.

- Tahun 2024, yang merupakan proyeksi, menunjukkan tren kenaikan yang berkelanjutan dengan nilai PDRB per kapita mencapai Rp88,76 juta (ADHB) dan Rp47,77 juta (ADHK), serta laju pertumbuhan ekonomi riil mencapai 3,27 persen.

Dari tren tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum, PDRB per kapita Kabupaten Sarmi mengalami peningkatan konsisten selama periode 2020–2024. Meskipun pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan tajam akibat pandemi, namun sejak tahun 2021 hingga 2024 laju pertumbuhan menunjukkan pola positif yang stabil. Hal ini menandakan adanya proses pemulihan dan penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Pertumbuhan ini menggambarkan bahwa pendapatan rata-rata masyarakat Kabupaten Sarmi terus meningkat, sejalan dengan tumbuhnya aktivitas ekonomi di berbagai sektor, terutama sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan. Peningkatan PDRB per kapita atas dasar harga konstan juga menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut bukan hanya akibat inflasi, tetapi mencerminkan peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi secara riil.

c. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sarmi

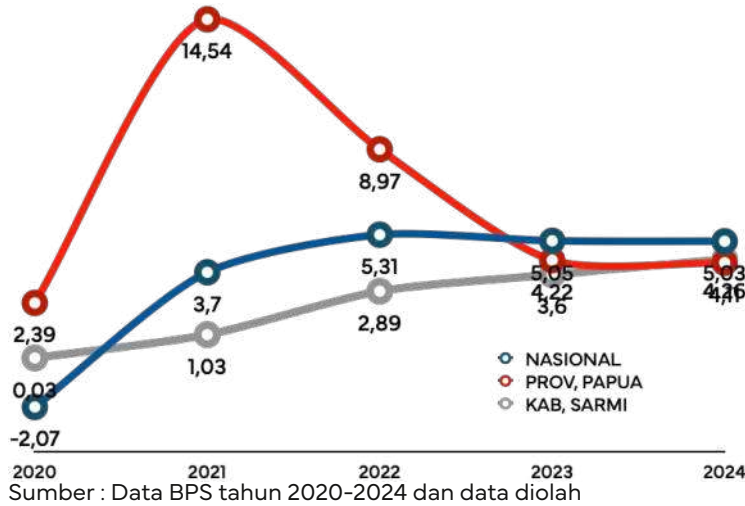
Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama yang mencerminkan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Angka pertumbuhan ekonomi menunjukkan tingkat perubahan nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor kegiatan ekonomi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, indikator ini menjadi ukuran penting untuk menilai keberhasilan kebijakan pembangunan daerah dalam mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, analisis terhadap laju pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk menilai posisi dan dinamika ekonomi Kabupaten Sarmi dibandingkan dengan kinerja ekonomi di tingkat provinsi dan nasional. Perbandingan ini juga berguna untuk mengidentifikasi potensi, tantangan, serta ruang kebijakan yang perlu diperkuat dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

Berikut pada gambar 2.12 disajikan data perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, dan Nasional dalam periode tahun 2020–2024.

Gambar 2.12

Grafik perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi Papua, dan Kabupaten Sarmi Tahun 2020–2024



Secara umum, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarmi dalam periode 2020–2024 menunjukkan tren positif dan stabil, dengan kecenderungan meningkat setiap tahun. Pola pertumbuhan ini sejalan dengan arah pemulihan ekonomi nasional dan Provinsi Papua pascapandemi COVID-19, meskipun

dengan dinamika dan laju yang berbeda.

Pada tahun 2020, ketika pandemi melanda, pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi sebesar –2,07 persen, sedangkan Provinsi Papua masih tumbuh positif 2,39 persen berkat kontribusi sektor pertambangan dan pengolahan. Kabupaten Sarmi sendiri menunjukkan ketahanan ekonomi yang cukup baik dengan pertumbuhan positif 0,03 persen, menandakan bahwa aktivitas ekonomi lokal relatif stabil meskipun dalam tekanan pandemi.

Memasuki tahun 2021, ekonomi nasional mulai pulih dengan pertumbuhan 3,70 persen, sementara Provinsi Papua mengalami lonjakan tajam hingga 14,54 persen, didorong oleh peningkatan ekspor hasil tambang. Kabupaten Sarmi juga mencatat pertumbuhan 1,03 persen, mencerminkan awal pemulihan ekonomi daerah, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan lokal.

Pada tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarmi meningkat menjadi 2,89 persen, beriringan dengan penguatan ekonomi nasional sebesar 5,31 persen dan perlambatan di tingkat Provinsi Papua menjadi 8,97 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sarmi mulai menunjukkan akselerasi pemulihan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Selanjutnya, tahun 2023 menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan ekonomi Sarmi mencapai 3,60 persen, mendekati rata-rata pertumbuhan provinsi sebesar 4,22 persen. Kinerja ini menggambarkan efektivitas kebijakan daerah dalam mendorong aktivitas produksi dan perdagangan lokal serta peningkatan daya beli masyarakat.

Pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarmi diproyeksikan meningkat lebih lanjut menjadi 4,26 persen, melampaui pertumbuhan Provinsi Papua (4,11 persen) dan mendekati rata-rata nasional (5,03 persen). Peningkatan ini memperlihatkan bahwa struktur ekonomi daerah semakin kuat dan berpotensi tumbuh lebih cepat dibandingkan rata-rata provinsi, terutama dengan penguatan sektor unggulan berbasis sumber daya lokal.

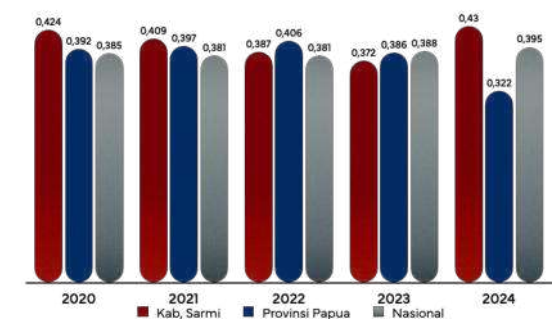
Secara keseluruhan, tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarmi selama periode 2020–2024 menunjukkan arah yang positif dan mencerminkan proses pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan yang stabil ini menjadi landasan penting bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah ke depan, terutama dalam memperkuat sektor-sektor produktif, mendorong investasi daerah, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Sarmi.

d. Indeks Gini Rasio

Indeks Gini Rasio merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Nilai Gini Rasio berada pada rentang 0 hingga 1, di mana semakin mendekati angka 0 menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan yang semakin baik, sedangkan nilai yang mendekati 1 menunjukkan ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi. Indikator ini menjadi penting dalam menilai sejauh mana hasil pembangunan ekonomi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, perkembangan data Indeks Gini Rasio Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, dan Nasional selama periode tahun 2020–2024 disajikan pada Gambar berikut. Visualisasi ini dimaksudkan untuk memperlihatkan tren perubahan ketimpangan pendapatan antarwilayah secara lebih jelas dan mudah dipahami.

Gambar 2.13
Perbandingan Indeks Gini Rasio Nasional, Provinsi Papua dan Kabupaten Sarmi Tahun 2020–2024



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan Indeks Gini Rasio Kabupaten Sarmi selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 nilai Gini Rasio tercatat sebesar 0,424, kemudian menurun secara bertahap hingga mencapai 0,372 pada tahun 2023

yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pemerataan pendapatan. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi kenaikan kembali menjadi 0,430, yang mengindikasikan meningkatnya kesenjangan pendapatan di masyarakat.

Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Papua dan tingkat nasional, ketimpangan pendapatan di Kabupaten Sarmi relatif lebih tinggi. Pada tahun 2024, Gini Rasio Provinsi Papua tercatat sebesar 0,322, sementara tingkat nasional sebesar 0,395. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan ekonomi di Kabupaten Sarmi masih perlu mendapatkan perhatian, terutama dalam upaya memperkuat akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan peluang usaha yang merata antarwilayah.

Fluktuasi Gini Rasio tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ketimpangan akses terhadap lapangan kerja, perbedaan tingkat produktivitas antar sektor ekonomi, serta disparitas pembangunan antar distrik. Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah antara lain melalui peningkatan pemerataan infrastruktur ekonomi, pemberdayaan masyarakat di sektor-sektor produktif seperti pertanian dan perikanan, serta penguatan program perlindungan sosial untuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Secara umum, arah kebijakan yang perlu ditempuh adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperluas akses kesempatan berusaha, serta memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Sarmi.

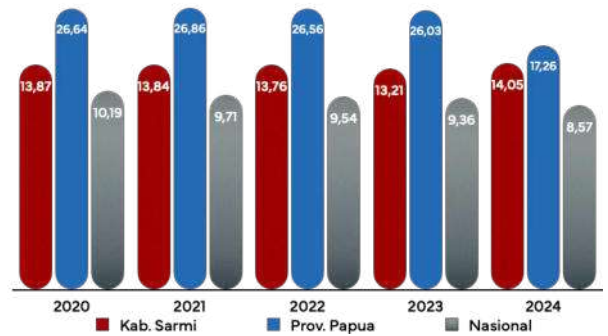
e. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Persentase penduduk miskin mencerminkan proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah standar minimum kebutuhan hidup layak. Oleh karena itu, penurunan tingkat kemiskinan menjadi salah satu prioritas strategis dalam pembangunan Kabupaten Sarmi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Untuk memberikan gambaran visual mengenai dinamika tingkat kemiskinan, perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Sarmi dibandingkan dengan Provinsi Papua dan tingkat Nasional pada periode tahun 2020–2024 disajikan pada gambar berikut. Grafik ini dimaksudkan untuk memperlihatkan tren perubahan tingkat kemiskinan secara lebih komprehensif, serta menunjukkan posisi Kabupaten Sarmi dalam konteks regional dan nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kabupaten Sarmi dalam periode tahun 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil dengan sedikit peningkatan pada tahun terakhir. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 13,87 persen, menurun tipis menjadi 13,21 persen pada tahun 2023, sebelum mengalami

Gambar 2.14
 Persentase Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Papua dan Kabupaten Sarmi Tahun 2020–2024



Sumber : Data BPS tahun 2020–2024, data diolah

kenaikan menjadi 14,05 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan adanya tekanan ekonomi terhadap kelompok masyarakat berpendapatan rendah, yang dapat dipengaruhi oleh faktor harga kebutuhan pokok, keterbatasan akses terhadap lapangan kerja produktif, serta perbedaan tingkat kesejahteraan antar wilayah distrik.

Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Papua dan Nasional, kondisi Kabupaten Sarmi masih menunjukkan capaian yang relatif lebih baik. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Sarmi sebesar 14,05 persen, lebih rendah dibandingkan Provinsi Papua yang sebesar 17,26 persen, namun masih jauh di atas rata-rata Nasional sebesar 8,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Sarmi telah mampu menjaga stabilitas tingkat kemiskinan di bawah rata-rata Provinsi, namun tantangan untuk menurunkan angka kemiskinan menuju rata-rata nasional masih cukup besar.

Perubahan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sarmi erat kaitannya dengan dinamika ekonomi daerah, ketersediaan lapangan kerja, serta efektivitas program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah. Upaya yang perlu terus diperkuat mencakup:

Peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi produktif, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah di sektor pertanian, perikanan, dan usaha kecil menengah.

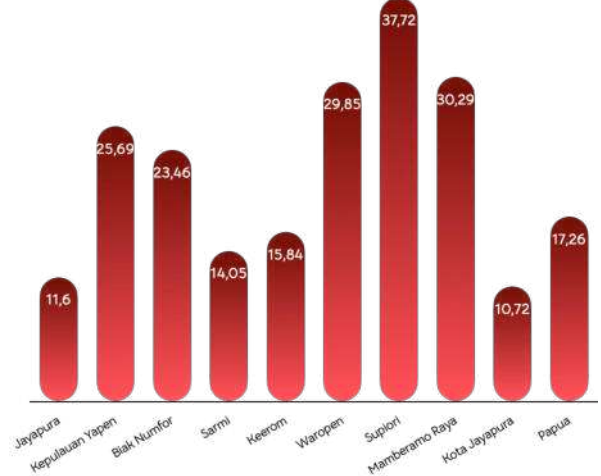
Pengembangan infrastruktur dasar pedesaan, seperti akses jalan, listrik, dan air bersih, guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Perluasan program pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial, termasuk intervensi yang terarah bagi kelompok rentan dan masyarakat adat.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sarmi dapat terus berlanjut secara berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Capaian Persentase Penduduk Miskin

Kota Capaian persentase penduduk miskin Kabupaten Sarmi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Papua menempatkan Kabupaten Sarmi pada posisi menengah bawah, dengan persentase penduduk miskin sebesar 14,05 persen. Adapun persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Papua tercatat di Kabupaten Supiori sebesar 37,72 persen, sedangkan yang terendah berada di Kota Jayapura dengan persentase 10,72 persen. Secara umum, rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Papua mencapai 17,26 persen. Data posisi relatif persentase penduduk miskin antar kabupaten/kota di Provinsi Papua tersebut tersaji pada gambar 2.13 di samping ini.

Gambar 2.15
Posisi Relative Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Se-Papua Tahun 2024



Sumber : Data BPS tahun 2024, data diolah

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis terhadap fokus Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sarmi dilakukan dengan meninjau capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta perkembangan indikator utama bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. IPM merupakan ukuran komposit yang menggambarkan keberhasilan pembangunan manusia dari tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

a. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang menggambarkan capaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. IPM menjadi ukuran penting dalam menilai sejauh mana masyarakat dapat mengakses hasil pembangunan secara merata dan berkelanjutan.

Berdasarkan data tahun 2020–2024, capaian IPM Kabupaten Sarmi menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 63,63 pada tahun 2020 menjadi 67,89 pada tahun 2024, atau meningkat sebesar 4,26 poin dalam lima tahun terakhir. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam kualitas hidup masyarakat, terutama pada aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Papua, IPM Kabupaten Sarmi secara umum berada di atas rata-rata provinsi pada empat tahun pertama, yakni tahun 2020–2023. Namun, pada tahun 2024, Provinsi Papua mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai 73,83, melampaui Kabupaten Sarmi (67,89). Lonjakan IPM provinsi tersebut menggambarkan percepatan pembangunan manusia di tingkat provinsi yang dipengaruhi oleh pemekaran wilayah, penataan tata kelola pemerintahan baru, serta peningkatan alokasi fiskal dan intervensi pembangunan sektoral dari pemerintah pusat.

Tren peningkatan IPM Kabupaten Sarmi juga menunjukkan keberhasilan daerah dalam mempertahankan arah pembangunan manusia yang positif dan berkelanjutan. Peningkatan ini merupakan hasil dari sinergi kebijakan lintas sektor, antara lain:

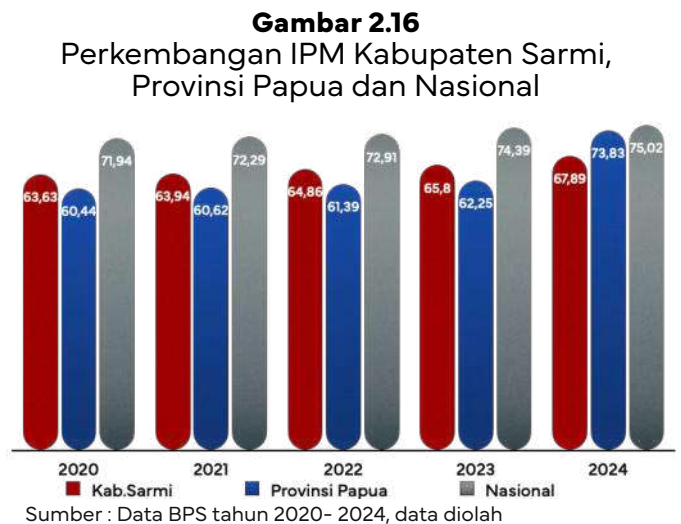
- Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, yang tercermin dari kenaikan rata-rata lama sekolah dari 9,52 tahun pada 2020 menjadi 9,99 tahun pada 2023;
- Perbaikan derajat kesehatan masyarakat, melalui peningkatan layanan puskesmas, pemerataan tenaga medis, serta penurunan prevalensi penyakit menular dan stunting;
- Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, yang terlihat dari meningkatnya pengeluaran riil per kapita dan program pemberdayaan ekonomi berbasis kampung.

Meskipun menunjukkan arah positif, tantangan utama masih terdapat pada pemerataan capaian antar wilayah distrik, terutama di wilayah dengan hambatan geografis dan keterbatasan infrastruktur dasar. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia, terutama pada kelompok usia produktif, masih perlu diperkuat melalui peningkatan keterampilan kerja dan perluasan lapangan usaha.

Secara keseluruhan, capaian IPM Kabupaten Sarmi selama periode 2020–2024 mencerminkan adanya kemajuan signifikan menuju pembangunan manusia yang lebih berkualitas, meskipun masih menghadapi tantangan dalam mengejar ketertinggalan dari rata-rata provinsi dan nasional. Ke depan, Pemerintah Daerah perlu memperkuat strategi pembangunan manusia berbasis wilayah dan karakteristik sosial budaya lokal, agar pertumbuhan IPM dapat berlangsung secara lebih cepat, inklusif, dan berkelanjutan.

Untuk memberikan gambaran visual mengenai perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sarmi dalam konteks regional dan nasional, berikut disajikan grafik perbandingan tren IPM Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, dan Nasional selama periode 2020–2024.

Untuk memberikan gambaran visual mengenai perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sarmi dalam konteks regional dan nasional, berikut disajikan grafik perbandingan tren IPM Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, dan Nasional selama periode 2020–2024.



Berdasarkan gambar 2.16, terlihat bahwa tren IPM Kabupaten Sarmi terus meningkat setiap tahun, meskipun masih berada di bawah capaian nasional dan sedikit berfluktuasi terhadap capaian Provinsi Papua.

Kenaikan IPM yang relatif stabil menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan manusia di Kabupaten Sarmi sudah berada pada jalur yang tepat, terutama dalam upaya meningkatkan akses pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Percepatan peningkatan IPM di tingkat provinsi dan nasional menjadi referensi penting bagi Kabupaten Sarmi untuk memperkuat kebijakan afirmatif dan investasi pada pembangunan manusia, khususnya di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan produktif di wilayah kampung dan distrik terpencil.

b. Bidang Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Sarmi diarahkan untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan pendidikan dasar hingga menengah, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah. Kinerja pendidikan tercermin melalui beberapa indikator makro seperti Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Secara umum, capaian indikator-indikator tersebut menunjukkan tren yang relatif meningkat dalam lima tahun terakhir, meskipun masih menghadapi tantangan dari sisi pemerataan dan kualitas layanan di wilayah pedalaman.

Sebagai dasar analisis, perkembangan Angka Melek Huruf penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Sarmi tahun 2020–2024 disajikan pada tabel berikut. Data ini menggambarkan kemampuan literasi dasar masyarakat lintas kelompok umur dan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai capaian pendidikan dasar di daerah.

Tabel 2.9

Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Sarmi Tahun 2020–2024 (%)

Kelompok Umur (Tahun)	2020	2021	2022	2023	2024
15–19	100,00	100,00	99,00	98,32	100,00
20–24	100,00	100,00	97,67	97,86	99,23
25–29	98,52	93,15	97,62	97,68	98,74
30–34	98,57	91,18	94,73	94,80	98,74
35–39	95,67	86,58	92,06	92,50	94,93
40–44	98,85	94,14	97,10	97,70	97,90
45–49	99,02	94,73	87,02	87,30	87,60
50+ / 60+	91,65	91,18	92,66	93,04	94,93
Total	95,68	92,40	94,66	97,36	98,74

Sumber: BPS Kabupaten Sarmi, Susenas 2020–2024 (diolah)

Berdasarkan data tersebut, tingkat melek huruf di Kabupaten Sarmi mengalami peningkatan signifikan dari 95,68 persen pada tahun 2020 menjadi 98,74 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini terjadi hampir di seluruh kelompok umur, terutama pada kelompok usia produktif 25–34 tahun yang mencapai tingkat melek huruf di atas 98 persen pada tahun 2024. Sementara itu, kelompok usia lanjut (50 tahun ke atas) juga menunjukkan peningkatan dari 91,65 persen pada tahun 2020 menjadi 94,93 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan nyata dalam upaya pengentasan buta huruf dan peningkatan kemampuan literasi dasar masyarakat di seluruh lapisan usia.

Kecenderungan positif ini tidak terlepas dari peran aktif Pemerintah Kabupaten Sarmi dalam memperluas akses pendidikan melalui pembangunan sekolah baru di kampung-kampung terpencil, peningkatan jumlah tenaga pendidik melalui mekanisme guru kontrak daerah, serta pelaksanaan program literasi masyarakat dan pendidikan non-formal. Selain itu, kerja sama lintas sektor dengan lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat turut mendorong peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan.

Meskipun demikian, tantangan masih dihadapi terutama terkait keterbatasan tenaga pendidik di daerah sulit dijangkau, kondisi geografis yang mempersulit mobilitas siswa dan guru, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Di sisi lain, capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Sarmi masih berada di bawah rata-rata Provinsi Papua, yang mengindikasikan masih perlunya intervensi dalam memperluas akses ke jenjang pendidikan menengah dan pendidikan vokasi.

Sebagai langkah strategis ke depan, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memperkuat program peningkatan mutu guru, perluasan beasiswa bagi pelajar dari keluarga miskin, serta penyediaan fasilitas pembelajaran yang ramah anak di wilayah perdesaan dan kepulauan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat fondasi pembangunan manusia dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat SarMI secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari analisis pembangunan bidang pendidikan, perkembangan capaian indikator pendidikan di Kabupaten SarMI tidak hanya dilihat dari aspek Angka Melek Huruf (AMH), tetapi juga dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai ukuran kemajuan partisipasi pendidikan formal masyarakat.

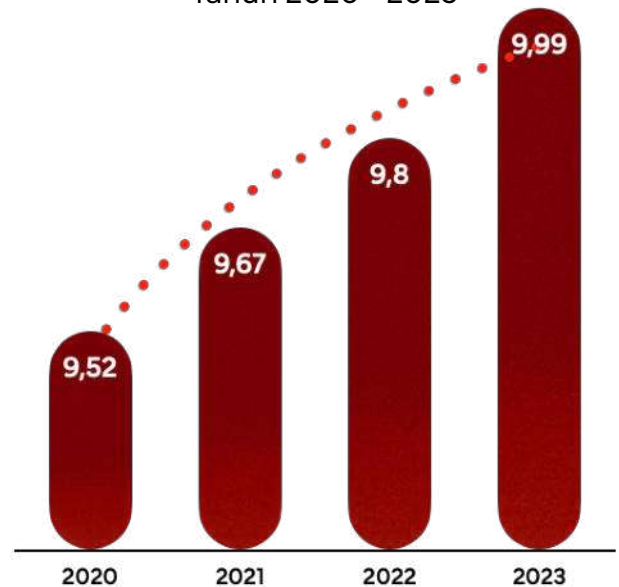
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arah perkembangan kualitas pendidikan di Kabupaten SarMI, data Rata-rata Lama Sekolah tahun 2020–2023 ditampilkan pada Gambar 2.17, yang menunjukkan tren peningkatan capaian pendidikan masyarakat secara bertahap dari tahun ke tahun.

Masih dalam konteks peningkatan kualitas pendidikan, capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten SarMI menunjukkan tren yang positif selama periode 2020–2023. RLS

merupakan indikator penting yang menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang telah ditempuh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam mengikuti pendidikan formal, dan menjadi salah satu ukuran capaian pembangunan manusia di bidang pendidikan.

Berdasarkan data, Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten SarMI meningkat secara konsisten dari 9,52 tahun pada tahun 2020 menjadi 9,99 tahun pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam partisipasi masyarakat terhadap pendidikan formal, baik di tingkat dasar maupun menengah. Dengan capaian hampir mendekati 10 tahun, rata-rata penduduk Kabupaten SarMI telah menempuh pendidikan hingga jenjang SMP kelas akhir atau awal SMA.

Gambar 2.17
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten SarMI Tahun 2020–2023



Sumber: BPS SarMI, Susenas 2020–2024 (diolah)

Peningkatan RLS tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan, terutama melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan di wilayah kampung dan distrik terpencil. Selain itu, program beasiswa daerah, bantuan seragam dan perlengkapan sekolah bagi siswa kurang mampu, serta kebijakan penempatan guru kontrak dan tenaga honorer pendidikan di wilayah sulit dijangkau turut mendorong peningkatan angka partisipasi sekolah.

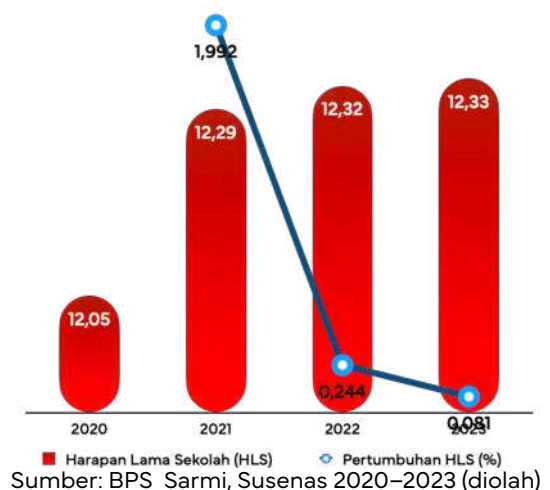
Meski demikian, tantangan masih dihadapi terutama pada kelompok masyarakat usia dewasa yang belum menyelesaikan pendidikan dasar secara formal. Kondisi geografis yang sulit diakses, tingkat kemiskinan, serta rendahnya kesadaran pendidikan di beberapa kampung masih menjadi faktor penghambat peningkatan RLS secara merata.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten SarMI berkomitmen untuk memperkuat program kejar paket A, B, dan C, meningkatkan akses pendidikan menengah dan vokasi, serta memperluas kerja sama dengan lembaga pendidikan non-formal dan organisasi masyarakat guna mempercepat peningkatan rata-rata lama sekolah. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia dan berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten SarMI secara berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, perkembangan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) juga menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil. Pada tahun 2020, HLS Kabupaten SarMI tercatat sebesar 12,05 tahun, kemudian meningkat menjadi 12,29 tahun pada 2021 atau tumbuh sebesar 1,99 persen. Namun pada tahun-tahun berikutnya, peningkatan tersebut mulai melambat; HLS hanya naik menjadi 12,32 tahun pada 2022 dan 12,33 tahun pada 2023, dengan tingkat pertumbuhan masing-masing 0,24 persen dan 0,08 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa capaian HLS Kabupaten SarMI telah mendekati titik stabil, atau telah mendekati jenjang pendidikan menengah atas (setara kelas XII).

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan kualitas pendidikan di Kabupaten SarMI, data Harapan Lama Sekolah tahun 2020–2023 ditampilkan pada Gambar 2.18, yang menunjukkan tren peningkatan capaian pendidikan masyarakat secara bertahap dari tahun ke tahun.

Gambar 2.18
Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten SarMI, 2020–2023



Peningkatan capaian HLS ini menggambarkan bahwa anak-anak di Kabupaten SarMI pada umumnya memiliki peluang untuk menempuh pendidikan hingga tingkat menengah atas. Secara keseluruhan, kenaikan HLS dan RLS secara bersamaan menunjukkan peningkatan aksesibilitas dan pemerataan layanan pendidikan di Kabupaten SarMI, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Namun, laju pertumbuhan yang mulai melambat dalam dua tahun terakhir mengindikasikan perlunya langkah strategis yang lebih kuat dalam memperluas layanan pendidikan, terutama di wilayah pedalaman, pesisir, dan kampung-kampung terpencil yang masih memiliki keterbatasan sarana pendidikan dan tenaga guru.

Untuk menjaga keberlanjutan peningkatan indikator pendidikan tersebut, Pemerintah Kabupaten SarMI perlu memperkuat kebijakan yang berfokus pada:

- Pemerataan sarana dan tenaga pendidik, terutama di distrik pedalaman dan pesisir;
- Program beasiswa dan bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu; serta
- Peningkatan mutu layanan pendidikan agar partisipasi sekolah tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas.

Dengan sinergi kebijakan tersebut, diharapkan capaian Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten SarMI dapat terus meningkat, sehingga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan memperkuat kualitas sumber daya manusia daerah dalam jangka menengah dan panjang.

Gambar berikut menyajikan perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten SarMI selama periode 2020–2023, yang menunjukkan arah peningkatan capaian pendidikan masyarakat seiring dengan berbagai program dan intervensi pemerintah daerah di bidang pendidikan.

2.1.2.2 Fokus Seni, Budaya, dan Olahraga

Analisis kinerja pembangunan pada bidang seni, budaya, dan olahraga di Kabupaten SarMI mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat melalui pelestarian budaya lokal serta penyediaan sarana dan prasarana kegiatan masyarakat.

Perkembangan indikator makro pada sektor seni, budaya, dan olahraga Kabupaten SarMI selama periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang bertahap namun konsisten, sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan di tengah keterbatasan anggaran dan sumber daya pelaksana.

Peningkatan persentase kegiatan seni dan budaya dari 50,0 persen pada tahun 2020 menjadi 65,0 persen pada tahun 2024 menggambarkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan kegiatan budaya lokal, terutama melalui pelibatan masyarakat adat dan sanggar seni untuk pembinaan dan pendampingan di sekolah-sekolah. Kegiatan ini menjadi salah satu sarana efektif dalam pelestarian nilai-nilai budaya daerah.

Sementara itu, persentase sarana seni dan budaya yang berfungsi aktif meningkat dari 40,0 persen menjadi 55,0 persen. Kenaikan ini sebagian besar didorong oleh pemanfaatan kembali fasilitas publik seperti balai kampung dan aula distrik untuk kegiatan budaya.

Pada bidang olahraga, indikator lapangan olahraga yang digunakan secara rutin menunjukkan peningkatan dari 35,0 persen menjadi 55,0 persen selama periode yang sama. Kondisi ini mencerminkan semakin aktifnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga berbasis komunitas, meskipun pembinaan atletik dan kegiatan olahraga prestasi masih belum merata di seluruh distrik.

Selanjutnya, rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk meningkat perlahan dari 0,70 menjadi 0,80, yang menunjukkan adanya perbaikan bertahap dalam penyediaan fasilitas dasar olahraga masyarakat, walaupun masih di bawah standar ideal.

Secara keseluruhan, perkembangan indikator tersebut menegaskan bahwa arah pembangunan sektor seni, budaya, dan olahraga Kabupaten SarMI masih berada pada jalur yang positif, dengan penekanan pada optimalisasi fasilitas yang ada, pemberdayaan komunitas lokal yang melaksanakan kegiatan disekolah-sekolah, dan peningkatan partisipasi masyarakat ketimbang perluasan infrastruktur baru.

Tabel 2.10
Indikator Makro Fokus Seni, Budaya, dan
Olahraga Kabupaten SarMI, 2020–2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024*	Tren Perkembangan
1	Persentase kegiatan festival seni dan budaya yang terselenggara dari total rencana tahunan	%	50,0	55,0	58,0	62,0	65,0	Meningkat perlahan
2	Persentase sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang berfungsi aktif dibanding total sarana yang ada	%	40,0	45,0	46,0	48,0	50,0	Meningkat terbatas
3	Persentase lapangan olahraga yang digunakan secara rutin untuk pembinaan dan kegiatan masyarakat	%	35,0	40,0	46,0	50,0	53,0	Meningkat perlahan
4	Rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk	Rasio	0,70	0,72	0,75	0,78	0,80	Stabil meningkat

Sumber: data LkiJP 2020–2024 (diolah)

Tabel 2.10 memperlihatkan tren peningkatan indikator makro pada sektor seni, budaya, dan olahraga Kabupaten SarMI selama periode 2020–2024. Meskipun dengan keterbatasan dukungan anggaran dan sumberdaya pelaksana, capaian indikator menunjukkan arah perkembangan yang positif. Tren ini diharapkan dapat berlanjut melalui penguatan peran komunitas budaya, kelompok pemuda, serta kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan sosial kultural daerah.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Aspek Pelayanan Umum merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Pelayanan umum mencakup seluruh bentuk pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat, baik dalam urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non-pelayanan dasar, maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang pemerintahan.

Secara umum, kondisi pelayanan publik di Kabupaten SarMI menunjukkan tren perbaikan meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam aspek ketersediaan sarana dan prasarana layanan dasar, kapasitas aparatur, serta efisiensi tata kelola pemerintahan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik telah diarahkan melalui penyempurnaan sistem pelayanan terpadu, optimalisasi penggunaan teknologi informasi, dan penguatan fungsi koordinasi antarperangkat daerah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi dan penerapan good governance menjadi kerangka utama dalam perbaikan pelayanan umum. Pemerintah Kabupaten SarMI telah melakukan berbagai langkah strategis, antara lain peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan berbasis kinerja, penataan prosedur pelayanan agar lebih cepat dan transparan, serta penguatan pengawasan internal guna menjamin akuntabilitas dan kepatuhan terhadap standar pelayanan minimal (SPM).

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Urusan pemerintahan merupakan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

1. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam pemenuhan hak dasar warga negara. Fokus layanan ini meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Kondisi dan perkembangan pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di Kabupaten SarMI menunjukkan adanya peningkatan bertahap, baik dari sisi cakupan pelayanan, kualitas infrastruktur pendukung, maupun kapasitas sumber daya manusia.

- Pada bidang pendidikan, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mutu layanan pembelajaran, termasuk melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik serta penyediaan sarana belajar yang memadai.
- Pada bidang kesehatan, akses terhadap layanan dasar semakin diperluas dengan penguatan peran Puskesmas, peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pengendalian penyakit menular.
- Dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pemerintah berfokus pada peningkatan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, dan sarana air bersih guna mendukung mobilitas masyarakat dan perekonomian lokal.
- Sementara pada bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhatian diarahkan pada penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta pengendalian dan penataan kawasan permukiman kumuh. Selain itu, pemerintah daerah juga melaksanakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang menysasar kelompok masyarakat rentan, miskin, dan berpenghasilan rendah, sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan tempat tinggal dan pemenuhan hak dasar atas perumahan yang layak huni.
- Untuk bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, berbagai langkah penguatan kelembagaan dan kesiapsiagaan masyarakat dilakukan guna menciptakan rasa aman dan tertib di lingkungan permukiman.
- Sedangkan pada bidang sosial, pelayanan diarahkan untuk memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin.

Secara umum, pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di Kabupaten SarMI masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran, sarana-prasarana yang belum merata, serta keterjangkauan layanan di wilayah pedalaman dan pesisir. Namun, arah kebijakan daerah ke depan difokuskan pada peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan dasar, sebagai pondasi dalam memperkuat kualitas pembangunan manusia.

1.1. Urusan Pendidikan

Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di bidang pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat daya saing daerah. Pembangunan pendidikan menjadi fondasi utama dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta berkontribusi terhadap pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten SarMI.

Pemerintah daerah menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan daerah, dengan fokus pada pemerataan akses, peningkatan mutu pembelajaran, serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas lembaga pendidikan. Layanan pendidikan mencakup PAUD, pendidikan dasar (SD dan SMP), pendidikan nonformal/kesetaraan, serta koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk pengelolaan SMA/SMK agar terwujud sinergi kebijakan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.

Secara umum, kondisi pendidikan di Kabupaten SarMI menunjukkan tren peningkatan akses dan partisipasi sekolah. Hal ini didukung oleh bertambahnya jumlah satuan pendidikan, peningkatan jumlah tenaga pendidik, serta bertambahnya peserta didik di setiap jenjang. Dukungan pemerintah juga diberikan melalui program bantuan operasional sekolah, peningkatan kompetensi guru, rehabilitasi sarana belajar, serta fasilitasi pendidikan bagi wilayah terpencil dan pesisir.

Meskipun demikian, pemerataan mutu dan ketersediaan sarana-prasarana pendidikan masih menjadi tantangan utama, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur dasar. Pemerintah daerah terus berupaya mengatasi kesenjangan ini melalui rehabilitasi ruang belajar, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, serta perluasan layanan pendidikan nonformal seperti PKBM dan PAUD.

Secara keseluruhan, capaian indikator pendidikan seperti Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan arah perbaikan yang positif. Ke depan, kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten SarMI difokuskan pada peningkatan mutu pembelajaran, digitalisasi pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik guna mewujudkan layanan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan.

Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dapat dilihat melalui beberapa indikator utama, termasuk jumlah sekolah, guru, dan murid sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.11 berikut:

Tabel 2.11
Statistik Sekolah, Guru dan Murid di Kabupaten SarMI
Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023*	2024*	Keterangan Perkembangan
SEKOLAH						
PAUD dan TK	20	54	56	60	62	Terus bertambah seiring peningkatan akses PAUD di distrik dan program PAUD
SD	65	65	65	68	72	Relatif stabil; penambahan satuan pendidikan difokuskan pada rehabilitasi dan optimalisasi sekolah eksisting.
SMP	18	18	19	20	23	Peningkatan bertahap seiring dengan pembukaan unit sekolah baru.
SMA/SMK	9	9	9	10	10	Tetap stabil;
GURU						
PAUD dan TK	87	85	95	120	120	Data diperbarui sejak 2023; peningkatan seiring pelatihan dan rekrutmen tenaga pendidik PAUD desa.
SD	447	445	469	472	485	Peningkatan jumlah guru mengikuti kebutuhan rasio ideal guru-murid di setiap distrik.
SMP	208	196	208	215	220	Fluktuasi stabil; peningkatan melalui program redistribusi guru dan pelatihan peningkatan kompetensi.
SMA/SMK	83	123	144	158	156	Tren pemulihan positif pasca penyesuaian kewenangan pengelolaan SMA/SMK sesuai arahan OTSUS
MURID						
PAUD dan TK	975	1397	1487	1642	1483	Meningkat signifikan, menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan usia dini.
SD	4881	6583	6227	6330	6340	Fluktuatif; dipengaruhi dinamika demografi anak usia sekolah dasar dan migrasi penduduk antar distrik.
SMP	2476	2654	2693	2625	2878	Stabil meningkat; mencerminkan perluasan akses pendidikan menengah pertama.
SMA/SMK	1423	1681	1973	2125	2261	Capaian meningkat kembali pada 2024; menandakan meningkatnya minat lulusan SMP melanjutkan pendidikan menengah.

Sumber: data LkiJP 2020-2024 (diolah)

Tabel 2.11. Statistik Sekolah, Guru, dan Murid di Kabupaten SarMI Tahun 2020-2024, Tabel ini menampilkan perkembangan jumlah sekolah, guru, dan murid di Kabupaten SarMI selama periode 2020-2024. Secara umum, tren pendidikan menunjukkan arah positif dengan peningkatan pada hampir semua jenjang, terutama di PAUD dan SMP. Ketersediaan guru meningkat mengikuti kebutuhan rasio ideal guru-murid, sementara jumlah murid terus bertambah seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan formal.

Capaian kinerja pembangunan urusan wajib pendidikan di Kabupaten SarMI selama periode 2020-2024 ditunjukkan melalui sejumlah indikator utama, antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk, dan Rasio Guru terhadap Murid. Penjelasan mengenai perkembangan indikator dimaksud disajikan sebagai berikut.

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan tingkat keterjangkauan penduduk usia sekolah terhadap layanan pendidikan formal. Indikator ini menunjukkan daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, serta mencerminkan sejauh mana anak-anak di setiap jenjang pendidikan memperoleh kesempatan untuk bersekolah.

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten SarMI selama periode 2019–2023 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat pada dua kelompok usia awal sekolah (7–12 tahun dan 13–15 tahun), serta perbaikan yang cukup berarti pada kelompok usia 16–18 tahun. Secara umum, capaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas akses dan pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah distrik, meskipun masih terdapat tantangan pada jenjang pendidikan menengah atas.

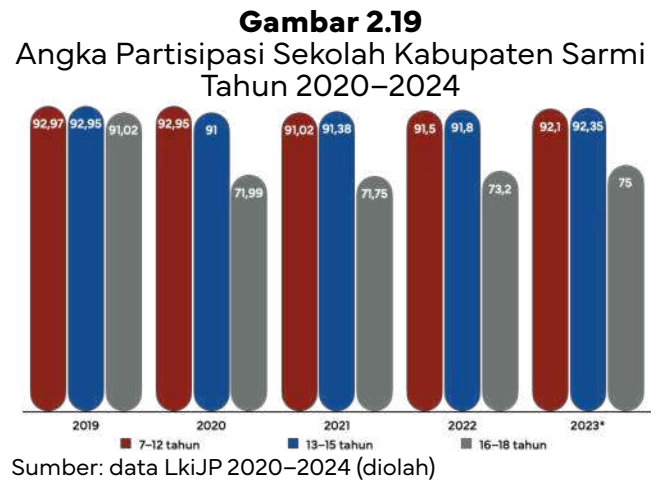
Pada kelompok usia 7–12 tahun, APS mengalami fluktuasi ringan dengan nilai yang tetap tinggi di atas 91 persen sepanjang periode pengamatan. Setelah sedikit menurun pada masa pandemi tahun 2021, angka partisipasi kembali meningkat menjadi 92,10 persen pada tahun 2023, seiring dengan peningkatan ketersediaan sekolah dasar di kampung-kampung dan bantuan operasional pendidikan dasar yang tepat sasaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia sekolah dasar di Kabupaten SarMI telah mendapatkan layanan pendidikan formal secara merata.

Sementara itu, kelompok usia 13–15 tahun atau jenjang sekolah menengah pertama juga menunjukkan tren positif, dengan kenaikan dari 91,00 persen pada tahun 2020 menjadi 92,35 persen pada tahun 2023. Peningkatan ini didorong oleh program pembangunan ruang kelas baru SMP di distrik pesisir dan pedalaman, penempatan guru melalui redistribusi tenaga pendidik, serta penyediaan dukungan fasilitas asrama bagi siswa dari kampung terpencil. Kebijakan ini berhasil mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan kesinambungan transisi dari SD ke SMP.

Adapun kelompok usia 16–18 tahun masih menjadi perhatian karena tingkat partisipasinya relatif rendah dibanding jenjang lainnya, yakni meningkat dari 71,75 persen pada tahun 2021 menjadi 75,00 persen pada tahun 2023. Meskipun demikian, tren perbaikan ini menunjukkan hasil positif dari upaya Pemerintah Kabupaten SarMI dalam memperluas akses pendidikan menengah atas melalui pembukaan unit sekolah baru, terutama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta pemberian bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu.

Selama periode 2019–2023, capaian APS di Kabupaten SarMI menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan peningkatan pada jenjang pendidikan menengah dan menengah atas. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perluasan akses,

penyediaan sarana prasarana pendidikan, serta dukungan pembiayaan melalui program beasiswa dan BOS daerah mulai memberikan dampak terhadap peningkatan angka partisipasi sekolah. Perkembangan APS di Kabupaten SarMI selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.19 berikut.



b. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah.

Rasio ketersediaan sekolah mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Rasio Ketersediaan Sekolah adalah jumlah sekolah di tiap jenjang pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan atas. Rasio ini mengindikasikan kemampuan seluruh sekolah yang ada di suatu daerah untuk menampung semua penduduk usia pendidikan berdasarkan jenjang pendidikan. Dengan demikian juga mencerminkan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Hal ini dapat dibaca, makin tinggi nilai indikator ini, makin tinggi kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Perkembangan rasio ketersediaan sekolah Tahun 2016–2019 di Kabupaten SarMI disajikan pada tabel berikut;

Tabel 2.12
Rasio Ketersediaan Sekolah Tahun 2020–2024 di Kabupaten SarMI

No	JENJANG PENDIDIKAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	RASIO KETERSEDIAAN SD	2,4	1,1	1,2	1,0	1,0
	Jumlah Gedung Sekolah Dasar (SD)	65	65	67	68	72
	Jumlah Penduduk usia 7-12 tahun	2.680	5.705	5.789	6.624	6.882
2	RASIO KETERSEDIAAN SMP	2,0	0,9	0,9	0,8	0,9
	Jumlah Gedung SMP	18	18	19	20	23
	Jumlah Penduduk usia 13-15 tahun	918	2.042	2.090	2.478	2.662
3	RASIO KETERSEDIAAN SMA/SMK	1,25	0,57	7,12	0,55	0,51
	Jumlah Gedung MA/SMK	9	9	109	10	10
	Jumlah Penduduk usia 16-18 tahun	722	1.566	1.530	1.818	1.950

Sumber data LkiJP dinas Pendidikan [data diolah]

Perkembangan rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten SarMI selama periode 2020–2024 menunjukkan tren relatif fluktuatif, dengan kecenderungan peningkatan kapasitas sarana pendidikan dasar dan menengah pertama, namun masih rendah pada jenjang menengah atas.

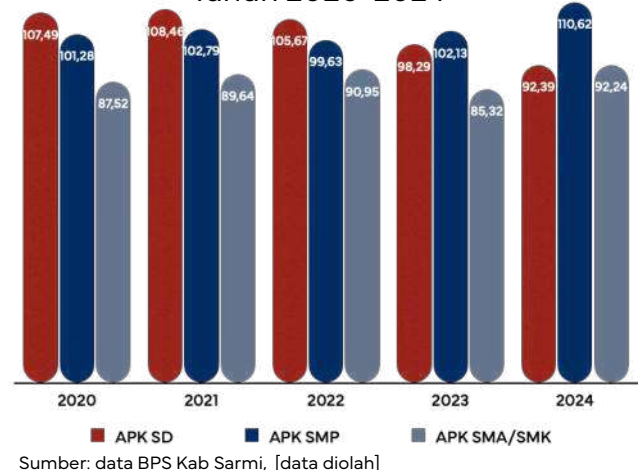
Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), rasio ketersediaan sekolah menurun dari 2,4 pada tahun 2020 menjadi 1,0 pada tahun 2024. Penurunan ini lebih disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk usia sekolah (7–12 tahun) yang cukup signifikan, sementara pertambahan jumlah sekolah berlangsung secara bertahap dari 65 unit menjadi 72 unit. Kondisi ini menggambarkan perluasan akses pendidikan dasar belum seimbang dengan pertumbuhan jumlah penduduk usia sekolah dasar. Untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), rasio ketersediaan sekolah juga menunjukkan tren menurun dari 2,0 pada tahun 2020 menjadi 0,9 pada tahun 2024, meskipun jumlah sekolah meningkat dari 18 menjadi 23 unit. Hal ini menandakan peningkatan kebutuhan layanan pendidikan menengah pertama akibat bertambahnya jumlah lulusan SD yang melanjutkan ke jenjang SMP. Sedangkan pada jenjang Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK), rasio ketersediaan sekolah berfluktuasi tajam, dari 1,25 pada tahun 2020 menjadi 0,51 pada tahun 2024, meskipun jumlah sekolah meningkat dari 9 menjadi 10 unit. Penurunan ini memperlihatkan bahwa ketersediaan fasilitas pendidikan menengah atas masih sangat terbatas dibandingkan jumlah penduduk usia 16–18 tahun, sehingga diperlukan intervensi melalui pembangunan unit sekolah baru, penguatan layanan pendidikan jarak jauh, atau kerja sama antar distrik.

Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten SarMI masih di bawah kebutuhan ideal, khususnya pada jenjang SMP dan SMA/SMK. Pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan kebutuhan pendidikan berbasis wilayah, guna memastikan pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan lintas distrik.

c. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menggambarkan tingkat partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan pada jenjang tertentu, tanpa memperhitungkan kesesuaian usia. APK dihitung sebagai rasio antara jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu, terlepas dari usianya, terhadap jumlah

Gambar 2.20
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan SMA Kabupaten SarMI Tahun 2020-2024



penduduk pada kelompok usia yang seharusnya menempuh jenjang pendidikan tersebut. Nilai APK memberikan gambaran umum mengenai cakupan layanan pendidikan dan keterjangkauan akses pendidikan di suatu daerah, sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut.

d. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menggambarkan proporsi penduduk usia sekolah yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Indikator ini mencerminkan tingkat efisiensi sistem pendidikan dalam menjangkau peserta didik tepat usia. Semakin tinggi nilai APM, semakin besar pula proporsi anak yang mengenyam pendidikan sesuai jenjangnya. Jika APM mencapai 100 persen, berarti seluruh anak usia sekolah telah bersekolah tepat waktu pada jenjang pendidikan yang semestinya.

Perkembangan APM di Kabupaten SarMI selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang bervariasi pada setiap jenjang pendidikan. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), APM relatif stabil dengan capaian tertinggi sebesar 91,61 persen pada tahun 2020, dan sempat menurun menjadi 84,79 persen pada tahun 2023, sebelum kembali meningkat menjadi 85,43 persen pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan kesinambungan partisipasi anak usia SD, meskipun secara umum akses pendidikan dasar tetap terjaga.

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), tren APM menunjukkan fluktuasi cukup signifikan. Capaian APM sempat menurun dari 77,70 persen pada tahun 2021 menjadi 62,29 persen pada tahun 2022, namun kembali meningkat hingga mencapai 79,65 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini menandakan adanya perbaikan dalam keterjangkauan dan pemerataan layanan pendidikan menengah pertama di wilayah Kabupaten SarMI.

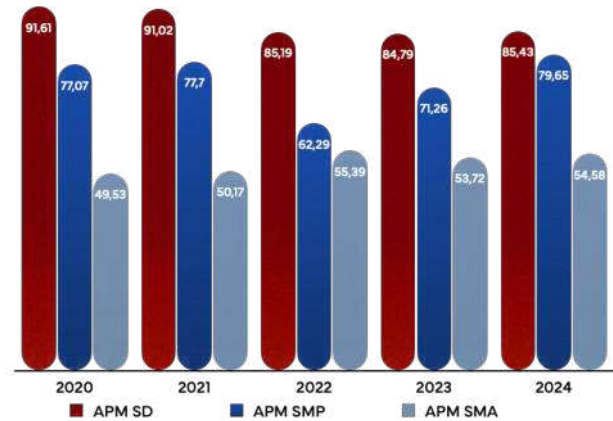
Sementara itu, APM jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) mengalami peningkatan bertahap dari 49,53 persen pada tahun 2020 menjadi 54,58 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam perluasan akses pendidikan menengah atas, meskipun masih perlu upaya lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi siswa agar lebih optimal.

Secara keseluruhan, capaian APM Kabupaten SarMI mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan dasar dan menengah, sekaligus menekan angka putus sekolah di setiap jenjang.

Selengkapnya perkembangan angka partisipasi murni Kabupaten SarMI tahun 2020–2024 tersaji pada gambar 2.21.

Secara umum, capaian APM Kabupaten Sarmi menggambarkan adanya peningkatan akses pendidikan yang cukup baik, terutama pada jenjang menengah pertama dan atas. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara APM SD dengan jenjang SMP dan SMA, yang menunjukkan bahwa sebagian anak usia sekolah menengah belum sepenuhnya terserap dalam sistem pendidikan formal. Tantangan utama yang perlu diatasi mencakup faktor geografis, keterbatasan sarana pendidikan di distrik terpencil, serta tingkat kesejahteraan keluarga yang berpengaruh terhadap keberlanjutan pendidikan anak.

Gambar 2.21
Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD, SMP dan SMA Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024



Sumber: data BPS Kab Sarmi, [data diolah]

Upaya strategis yang perlu dilakukan antara lain memperkuat kebijakan pemerataan guru dan fasilitas pendidikan, optimalisasi program afirmasi pendidikan bagi anak daerah, serta mendorong sinergi lintas sektor dalam penanganan anak tidak sekolah (ATS).

1.2. Kesehatan

Kesehatan merupakan investasi penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah serta memiliki peran strategis dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan Urusan Wajib Kesehatan di Kabupaten Sarmi diarahkan untuk mencapai sasaran strategis berupa meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan.

Kondisi umum kesehatan masyarakat di Kabupaten Sarmi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, maupun pelayanan kesehatan yang tersedia. Faktor pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh ketersediaan dan mutu fasilitas kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, sistem pembiayaan, serta tata kelola layanan kesehatan.

Sebagai daerah dengan karakteristik wilayah yang luas dan sebaran penduduk tidak merata, Kabupaten Sarmi menghadapi tantangan tersendiri dalam menjamin akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang

memadai. Penanganan penyakit menular dan tidak menular seperti malaria, HIV/AIDS, dan tuberkulosis (TBC) memerlukan penanganan berkelanjutan dengan dukungan lintas sektor, peningkatan peran puskesmas, serta kolaborasi masyarakat dan lembaga nonpemerintah. Upaya penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta optimalisasi jejaring pelayanan kesehatan terus diarahkan untuk memperkuat sistem kesehatan daerah secara terpadu.

Analisis kinerja urusan kesehatan dilakukan berdasarkan perkembangan indikator utama bidang kesehatan selama lima tahun terakhir (2020–2024). Secara umum, capaian indikator menunjukkan tren yang cukup positif, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan tahun mendatang.

a. Angka Harapan Hidup (AHH)

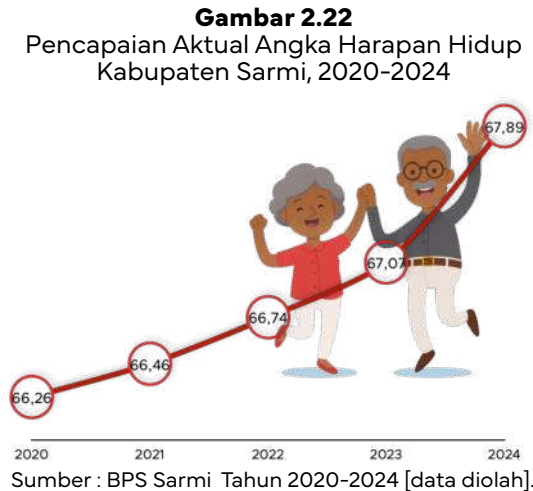
Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Sarmi selama periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Berdasarkan data BPS, AHH meningkat dari 66,26 tahun pada 2020 menjadi 67,89 tahun pada 2024, atau naik 1,63 tahun dalam lima tahun terakhir. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar, menurunnya angka kesakitan dan kematian, serta meningkatnya kesadaran perilaku hidup sehat.

Nilai AHH tahun 2024 sebesar 67,89 tahun tergolong “**kategori sedang**”, dan telah mendekati batas kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Sarmi berada pada level menengah namun terus mengalami kemajuan.

Peningkatan rata-rata sekitar 0,4 tahun per tahun ini menggambarkan kesinambungan program kesehatan daerah, seperti penguatan layanan puskesmas, peningkatan imunisasi, penurunan gizi buruk, serta perbaikan sistem rujukan dan penanganan penyakit menular. Faktor pendorong utama antara lain: meningkatnya cakupan layanan KIA, program pencegahan penyakit menular dan tidak menular, pemerataan tenaga kesehatan, serta percepatan penurunan stunting.

Meski menunjukkan tren positif, capaian AHH Kabupaten Sarmi masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Hambatan utama meliputi keterbatasan akses wilayah terpencil, tingginya prevalensi penyakit menular di daerah endemis, serta belum optimalnya fasilitas rujukan dan layanan RSUD.

Secara umum, peningkatan AHH selama periode 2020–2024 menegaskan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan layanan kesehatan, memperbaiki mutu pelayanan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk menggambarkan kecenderungan tersebut, berikut disajikan Grafik Perkembangan AHH Kabupaten Sarmi Tahun 2020–2024, pada gambar 2.22.



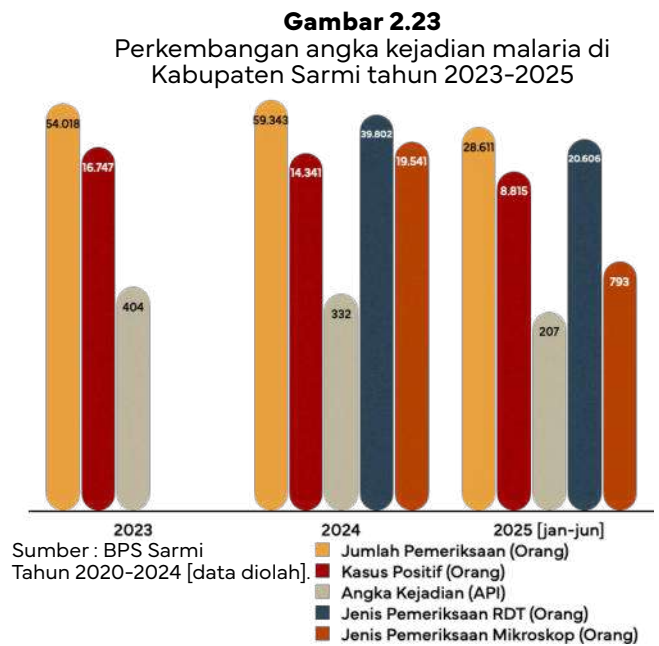
Grafik di atas menunjukkan tren peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Sarmi selama periode 2020–2024. Nilai AHH meningkat dari 66,26 tahun pada tahun 2020 menjadi 67,89 tahun pada tahun 2024, atau mengalami kenaikan sebesar 1,63 tahun dalam lima tahun terakhir. Kecenderungan peningkatan ini mencerminkan membaiknya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses layanan dasar, keberhasilan program promotif dan preventif, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. Secara nasional, AHH Kabupaten Sarmi tahun 2024 termasuk dalam kategori sedang dan menunjukkan arah menuju kategori tinggi.

b. Angka Kejadian Malaria (API)

Selama tiga tahun terakhir, angka kejadian malaria di Kabupaten Sarmi menunjukkan kecenderungan fluktuatif namun masih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi, jumlah pemeriksaan malaria tahun 2023 mencapai 54.018 orang dengan 16.747 kasus positif dan API sebesar 404. Pada tahun 2024 jumlah pemeriksaan meningkat menjadi 59.343 orang dengan 14.341 kasus positif dan API menurun menjadi 332. Sementara hingga pertengahan tahun 2025 (Januari–Juni), telah tercatat 28.611 pemeriksaan dengan 8.815 kasus positif dan API sebesar 207.

Penurunan API dari 404 pada tahun 2023 menjadi 332 pada tahun 2024 mengindikasikan adanya kemajuan dalam pengendalian malaria, meskipun jumlah pemeriksaan meningkat. Hal ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program surveilans dan intervensi berbasis wilayah endemis, seperti penyemprotan rumah (IRS), distribusi kelambu berinsektisida, dan deteksi dini kasus di tingkat kampung melalui kader malaria.

Jika dilihat dari jenis pemeriksaan, tren tahun 2024–2025 menunjukkan bahwa deteksi kasus lebih banyak ditemukan melalui pemeriksaan cepat (RDT) dibandingkan dengan mikroskop. Pada tahun 2024 tercatat 39.802 pemeriksaan menggunakan RDT dan 19.541 dengan mikroskop, sementara pada semester I tahun 2025 sebanyak 20.606 pemeriksaan RDT dan 793 mikroskop. Kondisi ini menggambarkan peningkatan cakupan pemeriksaan aktif di lapangan, yang berarti semakin banyak kasus malaria berhasil ditemukan melalui pendekatan jemput bola daripada menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan.



Meskipun capaian tersebut positif, malaria masih menjadi tantangan utama kesehatan masyarakat di Kabupaten SarMI, khususnya di distrik dengan mobilitas tinggi dan akses geografis sulit. Upaya pengendalian diarahkan pada peningkatan kapasitas tenaga surveilans, optimalisasi pencatatan dan pelaporan elektronik (Sismal), serta penguatan koordinasi lintas sektor untuk pengendalian vektor.

c. Kasus HIV/AIDS di Kabupaten SarMI

Perkembangan kasus HIV/AIDS di Kabupaten SarMI menunjukkan adanya peningkatan perhatian dan upaya penanggulangan yang terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan. Berdasarkan data tahun 2024–2025, tercatat 161 orang terinfeksi HIV/AIDS di seluruh wilayah kerja Puskesmas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 137 orang (85%) telah mendapatkan pengobatan antiretroviral (ARV), sementara 24 orang (15%) belum menjalani pengobatan secara rutin. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterjangkauan terhadap layanan pengobatan sudah relatif baik, meskipun masih diperlukan penguatan edukasi dan pendampingan bagi pasien yang belum mengakses ARV secara konsisten.

Distribusi kasus HIV/AIDS paling tinggi tercatat di Puskesmas SarMI dengan 60 kasus, diikuti oleh Puskesmas Arbais (20 kasus) dan Puskesmas Burtin (17 kasus). Beberapa wilayah lain seperti Puskesmas Bonggo Timur, Samanente, dan Aurimi mencatat jumlah kasus yang relatif rendah.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, perempuan mendominasi jumlah pengidap HIV/AIDS dengan total 116 orang, sedangkan laki-laki sebanyak 45 orang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa faktor kerentanan sosial dan ekonomi perempuan terhadap penularan HIV masih cukup tinggi dan memerlukan intervensi lintas sektor, khususnya pada kelompok usia produktif. Dari sisi layanan skrining, selama tahun 2024–2025 sebanyak 1.675 orang telah menjalani tes HIV, menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan dini. Namun demikian, tercatat 15 orang meninggal akibat HIV/AIDS, dengan kasus kematian tertinggi terjadi di Puskesmas Burtin dan Puskesmas Bonggo Barat, masing-masing sebanyak 3 orang. Secara keseluruhan, kondisi ini menggambarkan bahwa tantangan utama dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten SarMI terletak pada aspek penemuan kasus baru dan kepatuhan pengobatan, yang menjadi fokus peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat di tahun-tahun mendatang.

Tabel 2.13
Rekapitulasi Kasus HIV/AIDS Kabupaten SarMI Tahun 2024–2025

No	PUSKESMAS	Jumlah Kasus Positif HIV/AIDS	Sudah Berobat ARV	Belum Berobat ARV	Pria	Wanita	Jumlah Tes HIV	Jumlah Meninggal
1	PKM SarMI	60	56	4	18	42	400	2
2	PKM Arbais	20	4	16	3	17	140	2
3	PKM Petam	6	6	0	0	6	80	1
4	PKM Bagaiserwar	11	11	0	3	8	141	0
5	PKM Burtin	17	17	0	7	10	200	3
6	PKM Betaf	11	11	0	3	8	150	0
7	PKM Bonggo Timur	2	0	2	0	2	115	2
8	PKM Bonggo	10	10	0	3	7	200	2
9	PKM Bonggo Barat	15	11	4	6	9	48	3
10	PKM Samanente	9	9	0	2	7	175	0
11	PKM Aurimi	0	0	0	0	0	26	0
Jumlah		161	137	24	45	116	1.675	15

Sumber; LkiJP Dinas Kesehatan tahun 2024 dan 2025 [semester 1]

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebaran kasus HIV/AIDS di Kabupaten SarMI masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan daerah dengan akses mobilitas tinggi, seperti Puskesmas SarMI dan Arbais. Tingginya jumlah kasus pada kelompok perempuan memperlihatkan pentingnya pendekatan berbasis keluarga, perlindungan sosial, dan peningkatan literasi kesehatan reproduksi.

Kecenderungan tingginya angka tes HIV menjadi indikator positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat, namun angka kematian dan pasien yang belum menjalani terapi ARV menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam kepatuhan pengobatan dan keberlanjutan layanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan konseling pra dan pascates, serta peningkatan koordinasi lintas sektor untuk menekan angka kasus baru dan memperluas cakupan pengobatan ARV di seluruh distrik.

d. Kasus TBC di Kabupaten SarMI

Perkembangan kasus Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten SarMI periode 2023–2025 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2023, estimasi kasus TBC sebanyak 154 orang, dengan 93 kasus ternotifikasi dan tingkat keberhasilan pengobatan 79%. Sementara pada tahun 2024, estimasi kasus meningkat tajam menjadi 381 orang, namun cakupan pengobatan (treatment coverage) menurun hingga 33%, menunjukkan adanya kendala dalam pelacakan dan penanganan kasus di lapangan.

Hingga pertengahan tahun 2025 (Januari–Juni), estimasi kasus TBC mencapai 380 orang, dengan 40 kasus ternotifikasi dan keberhasilan pengobatan 63%. Meskipun tingkat keberhasilan masih di bawah target nasional (90%), adanya penurunan jumlah pasien baru yang dilaporkan menunjukkan peningkatan efektivitas skrining dini dan tindak lanjut kasus.

Dari sisi komorbiditas, tercatat adanya penurunan jumlah pasien TBC dengan HIV positif, dari 9 kasus pada 2023 menjadi 4 kasus pada 2025, yang mengindikasikan peningkatan koordinasi layanan TBC-HIV di fasilitas kesehatan. Namun, kasus TBC resisten obat (TB RO) masih ditemukan meski jumlahnya kecil, sehingga pengawasan kepatuhan pengobatan tetap menjadi prioritas.

Selain itu, kasus TBC anak menunjukkan tren peningkatan ringan dari 6 kasus pada 2024 menjadi 7 kasus di 2025, yang mengindikasikan masih adanya penularan di lingkungan rumah tangga. Capaian jumlah terduga TBC (suspek) baru mencapai 10% dari target 1.898 orang, menunjukkan perlunya intensifikasi kegiatan penjarangan kasus melalui pendekatan berbasis masyarakat dan kunjungan lapangan oleh petugas kesehatan.

Secara umum, capaian indikator prevalensi TBC di Kabupaten SarMI menunjukkan masih perlunya penguatan sistem penemuan kasus aktif, peningkatan cakupan pengobatan, serta pengendalian faktor risiko melalui sinergi lintas sektor untuk mendukung target eliminasi TBC tahun 2030.

Tabel 2.14
Perkembangan Kasus TBC Kabupaten SarMI Tahun 2023–2025

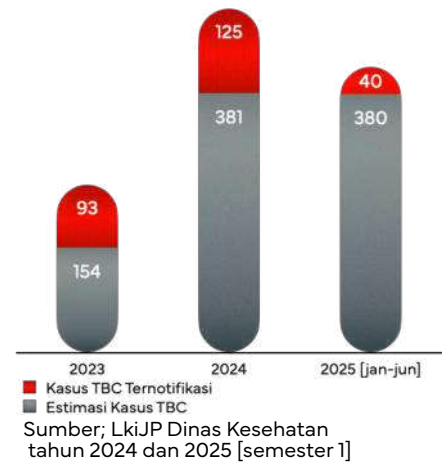
No	Uraian	2023	2024	2025 (Jan–Jun)
1	Estimasi Kasus TBC	154	381	380
2	Kasus TBC Ternotifikasi	93	125	40
3	Jumlah Penemuan dan Pengobatan Kasus TBC SO	115	128 (66 P, 62 L)	50 (24 P, 26 L)
4	Treatment Coverage (%)	60% (target 90%)	33% (target 90%)	11% (target 90%)
5	Keberhasilan Pengobatan TB SO (%)	79% (kohort 2022)	69% (kohort 2023)	63% (kohort 2024)
6	Pasien TBC dengan HIV Positif	9	12 (7 P, 5 L)	4 (1 P, 3 L)
7	Kasus TBC Resisten Obat	1	4 (2 P, 2 L)	2
8	Pasien TB RO yang Memulai Pengobatan	1	5	2
9	Kasus TBC Anak (0–14 th)	19	6	7
10	Jumlah Terduga TBC (Suspek)	-	-	199 orang (10% dari target 1.898 orang)

Sumber; LkiJP Dinas Kesehatan tahun 2024 dan 2025 [semester 1]

Tabel 2.14 memperlihatkan perkembangan kasus TBC di Kabupaten Sarmi selama periode 2023–2025. Terlihat adanya peningkatan estimasi kasus pada tahun 2024, diikuti penurunan cakupan pengobatan dan keberhasilan terapi. Pada tahun 2025, kinerja pengendalian TBC mulai menunjukkan perbaikan dengan peningkatan deteksi dini dan penguatan koordinasi layanan TBC-HIV di tingkat Puskesmas.

Gambar 2.24. Perkembangan Kasus TBC Kabupaten Sarmi Tahun 2023–2025
Grafik ini menunjukkan tren perkembangan kasus Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Sarmi selama periode 2023–2025. Terlihat bahwa estimasi kasus TBC mengalami peningkatan signifikan dari 154 kasus pada tahun 2023 menjadi 381 kasus pada tahun 2024, dan relatif stabil di angka 380 kasus pada tahun 2025. Namun, jumlah kasus yang ternotifikasi masih jauh lebih rendah, yaitu 93 kasus pada 2023, 125 kasus pada 2024, dan menurun menjadi 40 kasus pada 2025. Kondisi ini menggambarkan adanya tantangan dalam deteksi dan pelaporan kasus TBC di tingkat layanan kesehatan dasar.

Gambar 2.24
Perkembangan kasus TBC Kabupaten Sarmi, 2023–2025



e. Status Gizi dan Stunting:

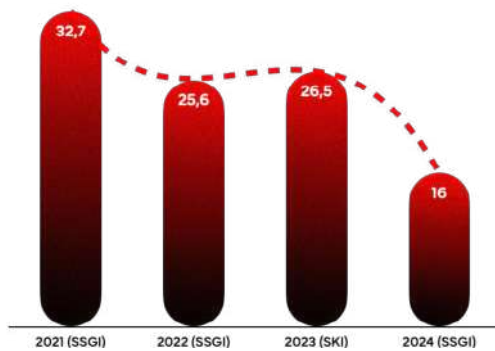
Perkembangan status gizi dan angka stunting di Kabupaten Sarmi menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam empat tahun terakhir. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi stunting mengalami penurunan cukup tajam dari 32,7% pada tahun 2021 menjadi 16,0% pada tahun 2024, atau turun sekitar 49% dalam empat tahun terakhir. Penurunan paling besar terjadi antara tahun 2023 dan 2024, yaitu sebesar -39,6%, yang menunjukkan adanya efektivitas program percepatan penurunan stunting yang dijalankan oleh pemerintah daerah bersama lintas sektor.

Sementara itu, data E-PPGBM yang bersumber dari pencatatan rutin di tingkat posyandu menunjukkan tren yang fluktuatif. Setelah meningkat dari 11,0% (Desember 2021) menjadi 29,06% (Juni 2024), prevalensi stunting kemudian menurun menjadi 24,09% pada Desember 2024. Fluktuasi ini menggambarkan adanya perbedaan metode pengumpulan data antara survei nasional dan pencatatan lapangan, serta mencerminkan dinamika cakupan sasaran dan intensitas kegiatan penimbangan balita di setiap periode.

Meskipun demikian, baik hasil survei nasional maupun data lokal menunjukkan bahwa Kabupaten Sarmi telah menempuh kemajuan berarti menuju penurunan prevalensi stunting di bawah target nasional 14% pada tahun 2024. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penguatan intervensi gizi spesifik dan sensitif, peningkatan cakupan posyandu aktif, serta koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di tingkat distrik dan kampung.

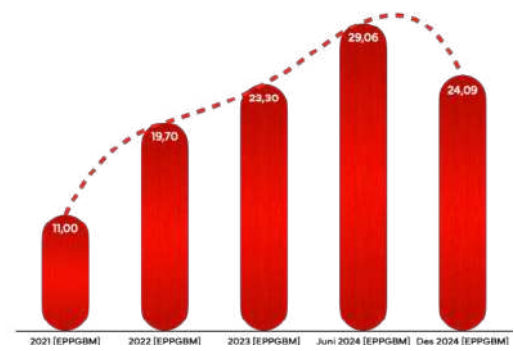
Tren Prevalensi Stunting Kabupaten Sarmi Menurut SSGI & E-PPGBM Tahun 2021–2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.25
Tren Prevalensi Stunting Kabupaten Sarmi menurut SSGI Tahun 2021–2024



Sumber; Dinas Kesehatan Kab. Sarmi (diolah).

Gambar 2.26
Tren Prevalensi Stunting Kabupaten Sarmi menurut E-PPGBM Tahun 2021–2024



Sumber; Dinas Kesehatan Kab. Sarmi (diolah).

Gambar 2.25. dan 2.26 Tren Prevalensi Stunting Kabupaten Sarmi Menurut SSGI & E-PPGBM Tahun 2021–2024, Grafik ini menunjukkan tren prevalensi stunting berdasarkan dua sumber data utama, yaitu SSGI/SKI dan E-PPGBM. Secara umum, prevalensi stunting mengalami penurunan signifikan berdasarkan hasil survei nasional, sementara data E-PPGBM memperlihatkan variasi yang mencerminkan dinamika penimbangan dan cakupan layanan di lapangan.

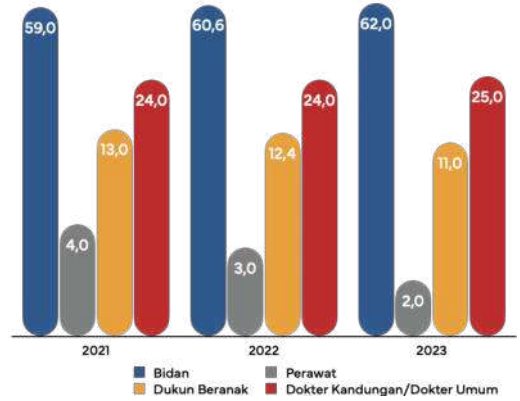
c. Cakupan Pertolongan Persalinan.

Cakupan pertolongan persalinan merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan tingkat aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan ibu di daerah. Indikator ini mencerminkan sejauh mana proses persalinan ditangani oleh tenaga kesehatan profesional seperti bidan, perawat, maupun dokter, dibandingkan dengan praktik tradisional oleh dukun beranak. Peningkatan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan menjadi prioritas dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Kabupaten Sarmi.

Selama periode 2021–2023, capaian cakupan pertolongan persalinan di Kabupaten SarMI menunjukkan arah perkembangan yang positif, dengan tren peningkatan pada proporsi persalinan yang ditolong oleh bidan dan dokter, serta penurunan pada praktik persalinan tradisional. Kondisi ini menandakan adanya kemajuan signifikan dalam ketersediaan dan pemanfaatan layanan kesehatan maternal di wilayah ini.

Gambaran mengenai tren pertolongan persalinan di Kabupaten SarMI selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 2.23 berikut. Grafik ini menunjukkan perbandingan proporsi persalinan yang ditolong oleh bidan, perawat, dukun beranak, dan dokter pada periode tahun 2021 hingga 2023.

Gambar 2.27
Persentase kelahiran menurut proses kelahiran yang ditolong di Kabupaten tahun 2021-2023



Sumber; Dinas Kesehatan Kab. SarMI (diolah).

Berdasarkan data pada gambar 2.27, terlihat bahwa peran bidan dalam membantu proses persalinan

meningkat dari sekitar 59,0% pada tahun 2021 menjadi 62,0% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan profesional dan keberhasilan program pemerintah daerah dalam mendorong persalinan di fasilitas kesehatan.

Sementara itu, proporsi kelahiran yang ditolong oleh dukun beranak menurun dari 13,0% menjadi 11,0%, menandakan adanya pergeseran perilaku masyarakat ke arah praktik persalinan yang lebih aman. Peran dokter umum dan dokter kandungan relatif stabil di kisaran 24–25%, menunjukkan adanya kesinambungan layanan rujukan bagi kasus-kasus berisiko tinggi.

Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan kemajuan positif dalam peningkatan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan profesional di Kabupaten SarMI. Peningkatan ini diharapkan terus berlanjut seiring dengan penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga medis, serta optimalisasi pelayanan kesehatan di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.

d. Sarana Prsarana Kesehatan.

Sarana dan prasarana kesehatan merupakan komponen penting dalam menunjang pelayanan kesehatan masyarakat. Ketersediaan fasilitas kesehatan, baik yang bersifat rujukan maupun pelayanan dasar, menjadi tolok ukur kemampuan daerah dalam menyediakan akses pelayanan yang merata dan berkualitas. Selain itu, keberadaan tenaga kesehatan yang memadai,

mencakup dokter, bidan, perawat, tenaga farmasi, serta tenaga penunjang lainnya, turut menentukan efektivitas dan kesinambungan pelayanan kesehatan di tingkat fasilitas.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten SarMI terus berupaya memperkuat infrastruktur kesehatan melalui pengembangan dan optimalisasi fasilitas pelayanan dasar, peningkatan distribusi tenaga kesehatan di seluruh wilayah distrik, serta penguatan sistem rujukan antar-fasilitas kesehatan.

Gambaran umum mengenai kondisi sarana dan prasarana kesehatan serta sebaran tenaga kesehatan di Kabupaten SarMI pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.15 berikut. Tabel ini menampilkan data jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia serta komposisi tenaga kesehatan di masing-masing puskesmas.

Tabel 2.15.
Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Sebaran Tenaga Kesehatan di Kabupaten SarMI tahun 2024

RUMAH SAKIT TYPE D		PUSKESMAS		PUSTU		APOTEK		POLIKLINIK		POSYANDU		
1		11		34		6		7		113		
NO	PUSKESMAS	DOKTER UMUM	DOKTER GIGI	KEFARMASIAN	PERAWAT	BIDAN	PROMKES	NUTRISIO NIS	SANITARIAN	TEKNIK LAB.MEDIK	PERAWAT GIGI	JML
1	SARMI	5	0	4	45	18	0	5	2	6	3	90
2	BAGAI SERWAR	2	1	0	14	14	5	2	1	2	0	40
3	BURTIN	2	0	0	13	8	0	1	1	3	0	27
4	BETAF	1	0	2	16	6	5	2	1	2	0	34
5	BONGGO BARAT	1	0	0	9	7	1	1	0	1	0	21
6	BONGGO	3	0	1	13	12	2	2	1	3	0	37
7	BONGGO TIMUR	2	0	3	11	8	5	1	1	1	0	32
8	SAMANENTE	1	0	1	13	13	1	2	1	1	0	32
9	ARBAIS	2	0	0	21	8	5	1	3	2	0	40
10	PETAM	2	0	2	17	12	3	2	2	3	0	42
11	AURIMI	1	0	1	9	6	2	1	2	1	0	22
JUMLAH		22	1	14	181	112	29	20	15	25	3	417

Sumber; Dinas Kesehatan Kab. SarMI (diolah).

Berdasarkan Tabel 2.15, dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 Kabupaten SarMI telah memiliki 1 Rumah Sakit Tipe D, 11 Puskesmas, serta jaringan pelayanan dasar berupa 34 Pustu dan 113 Posyandu yang tersebar di berbagai distrik. Kondisi ini menunjukkan bahwa cakupan fasilitas kesehatan di Kabupaten SarMI relatif baik untuk menjangkau wilayah kampung dan kepulauan.

Dari sisi sumber daya manusia kesehatan, total terdapat 417 tenaga kesehatan yang tersebar di 11 puskesmas. Komposisi tenaga kesehatan didominasi oleh perawat (181 orang) dan bidan (112 orang) yang berperan langsung dalam pelayanan dasar kesehatan masyarakat. Jumlah dokter umum sebanyak 22 orang dan dokter gigi hanya 1 orang, menunjukkan masih perlunya peningkatan tenaga medis spesialis dan tenaga kesehatan penunjang, khususnya di wilayah terpencil.

Secara umum, ketersediaan sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan di Kabupaten SarMI tahun 2024 sudah cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar, namun masih dibutuhkan penguatan kapasitas tenaga profesional dan pemerataan distribusi tenaga di seluruh wilayah agar pelayanan kesehatan dapat lebih optimal dan merata.

1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur pada urusan pekerjaan umum diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat-pusat kegiatan ekonomi, serta mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa. Fokus utama pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur dasar, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta penanganan wilayah rawan banjir dan longsor.

Secara umum, kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten SarMI menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2021–2024. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten SarMI, total panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten tercatat 638,24 km pada tahun 2021, dan mengalami penyesuaian menjadi 494,275 km pada tahun 2024. Penurunan panjang total jalan ini terjadi akibat penetapan dan pemberlakuan SK Perubahan Status Jalan Tahun 2023, yang efektif digunakan sebagai dasar database tahun 2024, sehingga beberapa ruas jalan mengalami perubahan status dan pengalihan kewenangan pengelolaan.

Perkembangan kondisi jalan Kabupaten SarMI dalam periode 2021–2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Kondisi Jalan Kabupaten SarMI Tahun 2021–2024

Kondisi Jalan	2021	2022	2023	2024
Baik (Km)	62,113	49,284	65,450	39,789
Sedang (Km)	186,921	56,523	48,420	4,492
Rusak Ringan (Km)	11,086	112,278	104,040	29,541
Rusak Berat (Km)	378,120	420,155	420,340	420,453
Jumlah	638,24	638,24	638,25	494,275

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten SarMI, 2024.

Pada tahun 2021, kondisi jalan dalam kategori baik dan sedang mencapai sekitar 39% dari total panjang jalan, menunjukkan bahwa sebagian besar ruas jalan masih dalam kondisi rusak berat ($\pm 59\%$). Pada tahun 2022, terjadi penurunan panjang jalan dalam kondisi baik menjadi 49,28 km, sementara kategori rusak berat meningkat menjadi 420,15 km, dipengaruhi oleh faktor kerusakan akibat intensitas curah hujan tinggi serta keterbatasan kegiatan pemeliharaan rutin di beberapa distrik terpencil.

Pada tahun 2023, meskipun total panjang jalan relatif tetap (638,25 km), terjadi peningkatan kembali kondisi baik menjadi 65,45 km, sebagai hasil dari kegiatan peningkatan dan rehabilitasi jalan strategis, khususnya pada ruas penghubung antar-distrik prioritas. Namun demikian, kategori rusak berat masih mendominasi dengan panjang 420,34 km, menunjukkan masih tingginya kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan dan peningkatan kualitas permukaan jalan.

Memasuki tahun 2024, terjadi perubahan signifikan pada total panjang jalan menjadi 494,275 km akibat penyesuaian data berdasarkan SK Jalan Tahun 2023. Dengan data baru tersebut, proporsi jalan dalam kondisi baik dan sedang menurun secara persentase, sedangkan kategori rusak berat tetap mendominasi sebesar 420,45 km atau sekitar 85% dari total panjang jalan, yang menegaskan pentingnya intervensi strategis melalui program peningkatan infrastruktur jalan secara bertahap dan berkelanjutan.

1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan rumah yang layak huni serta lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan berkelanjutan, terutama di wilayah yang memiliki tingkat keterisolasian dan risiko bencana tinggi seperti Kabupaten SarMI.

Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan sektor ini. Dua indikator utama yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan kondisi perumahan di Kabupaten SarMI adalah rasio rumah layak huni dan rasio permukiman layak huni.

Secara historis, rasio rumah layak huni di Kabupaten SarMI menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil. Pada tahun 2018, rasio rumah layak huni baru mencapai 0,67 persen, kemudian meningkat menjadi 0,70 persen pada tahun 2021. Berdasarkan tren tersebut dan memperhitungkan realisasi program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan rumah baru melalui skema bantuan stimulan, serta dukungan DAK dan OTSUS untuk pembangunan perumahan, maka data perumahan untuk periode 2020–2024 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.17.

Perkembangan Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Sarmi Tahun 2020–2024

Tahun	Rasio Rumah Layak Huni (%)	Keterangan
2020	0,69	Peningkatan dari realisasi 2019 melalui program pembangunan rumah rakyat dan perbaikan RTLH
2021	0,70	Kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni di beberapa distrik
2022	0,73	Dukungan DAK fisik perumahan, Otsus dan penataan lingkungan meningkat
2023	0,75	Dukungan sumber dana Otsus untuk pembangunan Rumah Sehat
2024	0,77	Dukungan sumber dana Otsus untuk pembangunan Rumah Sehat

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sarmi, 2024 (diolah).

Secara umum, peningkatan rasio rumah dan permukiman layak huni menunjukkan arah yang positif meskipun masih berada pada level persentase yang rendah dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Papua. Kondisi ini menggambarkan masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah dan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap perumahan layak yang cukup besar. Tabel 2.17 Perkembangan Rasio Rumah dan Permukiman Layak Huni Kabupaten Sarmi Tahun 2020–2024 memperlihatkan peningkatan bertahap yang menggambarkan efektivitas intervensi program perumahan dan permukiman. Meskipun capaian persentase masih relatif kecil, tren positif ini menunjukkan adanya upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tempat tinggal dan lingkungan masyarakat.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan bagian dari urusan wajib pelayanan dasar yang diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang publik dan politik, serta menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Pemerintah Kabupaten Sarmi terus berupaya mengintegrasikan prinsip pengarusutamaan gender (PUG) dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, agar setiap kebijakan dan program lebih berpihak pada perempuan dan anak.

Keterlibatan perempuan dalam lembaga pemerintahan dan ruang publik menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan. Perempuan berperan strategis dalam memastikan kebijakan pembangunan memiliki perspektif kesetaraan dan berpihak pada kelompok rentan.

a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Perkembangan partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Kabupaten SarMI selama periode 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif namun relatif stabil pada kisaran 40 persen. Tahun 2020 tercatat sebesar 37,12 persen, meningkat menjadi 43,58 persen pada tahun 2021, kemudian menurun tipis menjadi 43,05 persen pada tahun 2022, dan kembali naik menjadi 44,10 persen di tahun 2023 serta 45,25 persen pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan adanya dinamika dalam proses regenerasi dan promosi jabatan di birokrasi daerah, namun arah kebijakan masih konsisten dalam mendorong representasi perempuan di lembaga publik.

Meskipun terdapat fluktuasi, tren umum menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan. Hal ini menjadi indikasi positif dari penerapan kebijakan afirmatif dan peningkatan kesadaran gender di kalangan birokrasi.

Gambar 2.28 Perkembangan Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten SarMI Tahun 2020–2024. Grafik menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan dengan tren relatif stabil di atas 40 persen, menandakan efektivitas kebijakan afirmatif yang telah diterapkan.



b. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten SarMI cenderung stagnan sepanjang periode 2020–2024, yaitu pada kisaran 20 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa partisipasi politik perempuan dalam pemilihan legislatif masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan dukungan partai politik dan minimnya kaderisasi politik perempuan di tingkat lokal.



c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK) di Kabupaten Sarmi mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada akhir periode. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 46,32 persen, menurun menjadi 44,85 persen di tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 50,17 persen di tahun 2022, 53,45 persen di tahun 2023, dan 55,14 persen di tahun 2024.

Peningkatan TPAK perempuan pada akhir periode menunjukkan mulai meningkatnya peluang dan akses kerja bagi perempuan, termasuk pada sektor informal dan UMKM. Pemerintah Daerah perlu memperkuat program pelatihan keterampilan berbasis ekonomi kreatif dan pengembangan kewirausahaan perempuan.



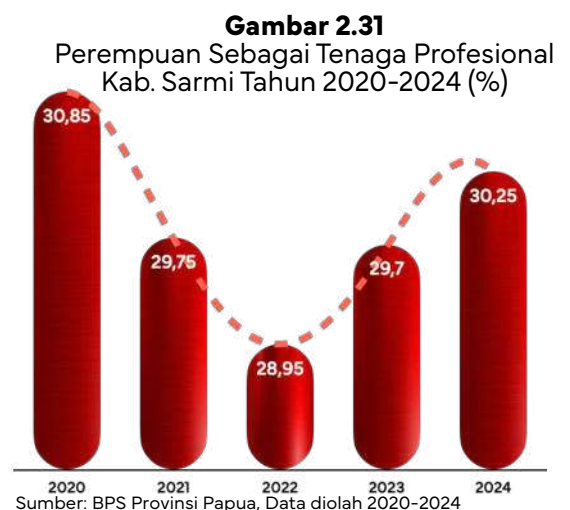
Sumber: BPS Provinsi Papua, Data diolah 2020-2024

Gambar 2.30 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Sarmi Tahun 2020–2024. Grafik ini memperlihatkan tren kenaikan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, menunjukkan adanya perluasan peluang ekonomi bagi perempuan di Kabupaten Sarmi.

d. Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional

Perkembangan persentase perempuan yang bekerja sebagai tenaga profesional di Kabupaten Sarmi cenderung menurun di awal periode namun meningkat kembali pada tahun terakhir. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 30,85 persen, menurun menjadi 28,95 persen di tahun 2022, dan meningkat menjadi 29,70 persen pada tahun 2023 serta 30,25 persen pada tahun 2024.

Meskipun masih di bawah 35 persen, peningkatan di akhir periode menunjukkan kemajuan dalam pendidikan dan kompetensi perempuan. Perluasan kesempatan pendidikan tinggi dan pelatihan teknis menjadi faktor penting untuk memperkuat peran perempuan di sektor profesional.



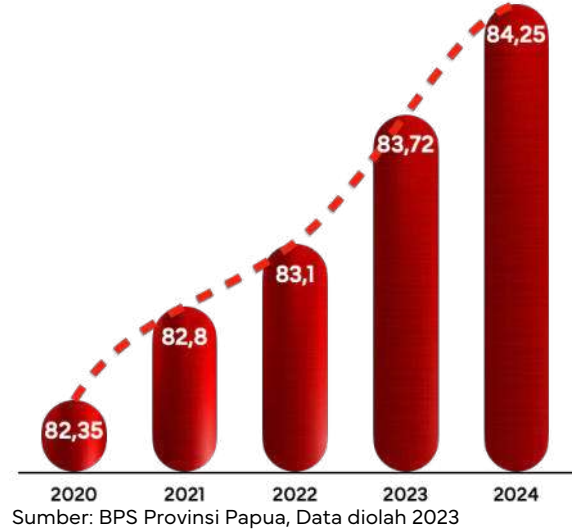
Sumber: BPS Provinsi Papua, Data diolah 2020-2024

e. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Sarmi menunjukkan tren fluktuatif namun relatif stabil di kisaran 70 persen. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 71,85 persen, menurun menjadi 68,85 persen pada tahun 2022, dan meningkat kembali menjadi 70,35 persen di tahun 2023 serta 71,20 persen di tahun 2024.

Fluktuasi IDG menunjukkan bahwa meskipun perempuan telah berpartisipasi aktif dalam pembangunan, kesenjangan gender masih terjadi terutama di bidang politik dan ekonomi formal. Penguatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan strategis masih perlu ditingkatkan.

Gambar 2.32
Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Sarmi tahun 2020-2024

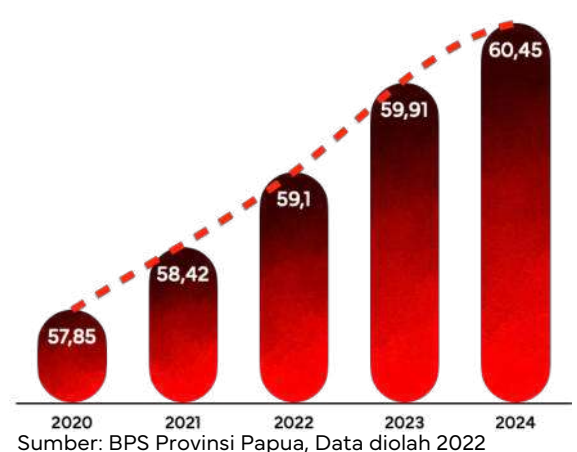


g. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan di Kabupaten Sarmi juga menunjukkan peningkatan yang konsisten dari 57,85 persen pada tahun 2020 menjadi 59,91 persen pada tahun 2023 dan 60,45 persen pada tahun 2024.

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan Kabupaten Sarmi dari 57,85 persen pada tahun 2020 menjadi 60,45 persen pada tahun 2024 mencerminkan kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang semakin inklusif terhadap kebutuhan perempuan. Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan akses layanan kesehatan dasar yang lebih merata, meskipun kesenjangan IPM antara laki-laki dan perempuan masih perlu dikurangi melalui kebijakan berbasis gender, khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pemberdayaan ekonomi perempuan usia produktif.

Gambar 2.33
Indeks Pembangunan Manusia Perempuan di Kab. Sarmi tahun 2020-2024



2. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten SarMI merupakan bagian dari pelayanan publik yang bersifat wajib, dengan fokus pada peningkatan ketertiban administrasi kependudukan serta keakuratan basis data kependudukan daerah. Upaya ini sejalan dengan pelaksanaan program nasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan kebijakan pemutakhiran data secara berkelanjutan.

Secara umum, capaian kinerja pelayanan administrasi kependudukan menunjukkan tren positif selama periode 2020–2024. Hal ini ditandai dengan peningkatan proporsi penduduk yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) baik pada kelompok penduduk usia 5 tahun ke atas, 17 tahun ke atas, maupun total penduduk. Kondisi ini mencerminkan semakin optimalnya layanan pendaftaran penduduk, penerbitan dokumen kependudukan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya identitas hukum dan administrasi kependudukan.

a. Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang memiliki NIK menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 88,40 persen, meningkat menjadi 92,85 persen pada tahun 2022, dan mencapai 96,10 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini menggambarkan adanya perluasan cakupan pelayanan pendaftaran penduduk di seluruh distrik, termasuk wilayah pedalaman dan pesisir yang sebelumnya sulit dijangkau. Optimalisasi pelayanan keliling dan penerapan sistem digital SIAK Terpusat turut mendukung pencapaian tersebut.

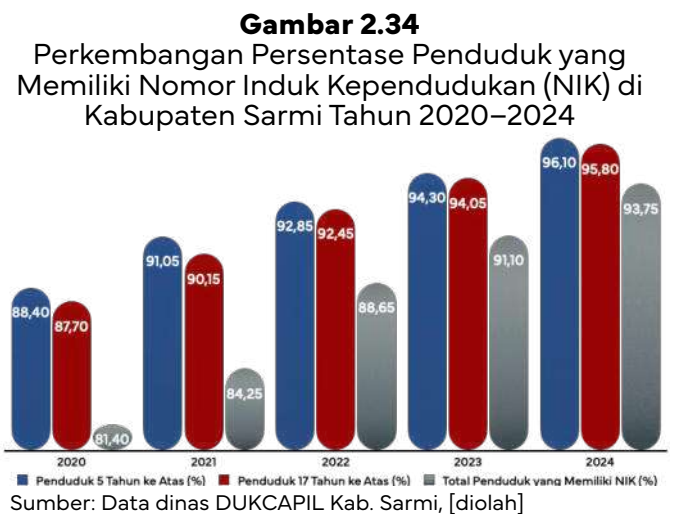
b. Penduduk Usia 17 Tahun ke Atas yang Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Penduduk usia 17 tahun ke atas yang memiliki NIK juga mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 87,70 persen, meningkat menjadi 92,45 persen pada tahun 2022, dan mencapai 95,80 persen pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan semakin efektif dalam menjangkau kelompok wajib KTP serta kelompok rentan, seperti masyarakat adat dan penduduk di wilayah terisolir. Dukungan program nasional Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) berperan penting dalam mempercepat proses kepemilikan dokumen identitas ini.

c. Penduduk yang Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Secara keseluruhan, persentase penduduk Kabupaten SarMI yang memiliki NIK meningkat dari 81,40 persen pada tahun 2020 menjadi 88,65 persen pada tahun 2022, dan mencapai 93,75 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan terjadinya penguatan sistem pelayanan administrasi kependudukan berbasis data, integrasi data antarinstansi, serta penataan kembali database kependudukan melalui verifikasi dan validasi rutin. Capaian ini juga menjadi indikator meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan, yang selanjutnya dapat mendukung penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan berbasis data penduduk yang valid.

Grafik memperlihatkan tren peningkatan persentase penduduk yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kabupaten SarMI pada seluruh kelompok umur. Kenaikan yang konsisten menunjukkan efektivitas program pelayanan administrasi kependudukan serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen identitas kependudukan sebagai dasar dalam mengakses berbagai layanan publik dan pembangunan sosial ekonomi.



Meskipun capaian kinerja urusan administrasi kependudukan menunjukkan hasil yang menggembirakan, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan infrastruktur jaringan data dan sistem informasi di wilayah terpencil, rendahnya literasi digital masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan daring, serta masih terbatasnya jumlah petugas lapangan yang memiliki kompetensi teknis di bidang kependudukan. Selain itu, kondisi geografis Kabupaten SarMI yang tersebar dan sulit dijangkau turut mempengaruhi efektivitas pelayanan langsung kepada masyarakat.

Menghadapi kondisi tersebut, arah kebijakan tahun 2025 difokuskan pada penguatan kualitas dan jangkauan layanan administrasi kependudukan berbasis digital, peningkatan kolaborasi lintas sektor dalam pemutakhiran data penduduk, serta pengembangan layanan jemput bola di distrik-distrik terpencil.

3. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

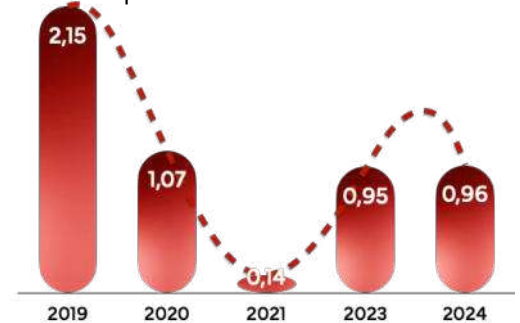
Perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten SarMI selama periode 2018–2023 menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, laju pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 2,13 persen, kemudian meningkat menjadi 2,81 persen pada tahun 2019. Namun, sejak tahun 2020 hingga 2023, laju pertumbuhan penduduk terus mengalami perlambatan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta penguatan layanan administrasi kependudukan di tingkat distrik dan kampung.

Tabel 2.18
Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten SarMI Tahun 2020–2024 (%)

Tahun	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
2020	2,15
2021	1,07
2022	0,14
2023	0,95
2024	0,96

Sumber: BPS Kabupaten SarMI 2020–2024, [data diolah]

Gambar 2.35
Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten SarMI tahun 2020–2024



Tabel 2.18 dan gambar 2.30. Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten SarMI Tahun 2020–2024 menunjukkan tren penurunan yang signifikan hingga mencapai titik terendah pada tahun 2022 sebesar 0,14 persen, sebelum kembali mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2023 dan 2024.

Penurunan laju pertumbuhan penduduk dalam periode 2020–2024 mengindikasikan keberhasilan implementasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, khususnya dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan ketersediaan sumber daya. Meskipun demikian, fluktuasi pada tahun 2023–2024 menandakan masih terdapat tantangan dalam pemerataan akses layanan KB di wilayah distrik terpencil serta lemahnya koordinasi lintas sektor dalam mengintegrasikan data kependudukan dengan perencanaan pembangunan daerah.

4. Komunikasi dan Informatika

a. Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler/Nirkabel

Perkembangan tingkat penggunaan telepon seluler/nirkabel oleh penduduk usia 5 tahun ke atas di Kabupaten SarMI menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, persentase

penduduk pengguna telepon seluler tercatat sebesar 63,12 persen, kemudian meningkat signifikan menjadi 78,79 persen pada tahun 2022. Berdasarkan perkiraan capaian, pada tahun 2023 angka ini diperkirakan mencapai 81,25 persen, dan meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi sekitar 83,40 persen, seiring dengan meluasnya cakupan jaringan seluler dan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengakses perangkat komunikasi digital.

Gambar 2.36. Perkembangan Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler di Kabupaten Sarmi Tahun 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang stabil, menandakan semakin luasnya penetrasi teknologi komunikasi digital di wilayah kampung maupun perkotaan.

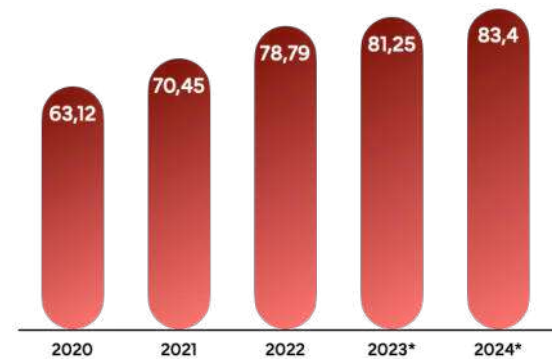
Peningkatan signifikan dalam penggunaan telepon seluler/nirkabel menggambarkan semakin kuatnya adaptasi masyarakat terhadap teknologi komunikasi.

Faktor pendorong utama tren ini antara lain kebijakan pemerintah daerah yang mendorong transformasi digital melalui penyediaan akses internet publik dan infrastruktur menara BTS. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan sinyal di wilayah dengan topografi sulit dan biaya perangkat yang relatif tinggi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Arah kebijakan tahun 2025 difokuskan pada penguatan literasi digital masyarakat, perluasan cakupan jaringan komunikasi di wilayah belum terlayani, serta optimalisasi layanan berbasis teknologi informasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan partisipatif.

b. Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Memiliki atau Menguasai Telepon Seluler

Tingkat kepemilikan atau penguasaan telepon seluler oleh penduduk usia 5 tahun ke atas di Kabupaten Sarmi juga menunjukkan peningkatan positif dalam kurun waktu 2020–2024. Pada tahun 2020, proporsi penduduk yang memiliki atau menguasai perangkat telepon seluler tercatat sebesar 52,52 persen, dan meningkat menjadi 64,04 persen pada tahun 2021. Berdasarkan tren tersebut, diperkirakan angka ini meningkat menjadi 71,80 persen pada tahun 2023, dan mencapai 75,25 persen pada tahun 2024, seiring dengan penurunan harga perangkat dan meningkatnya kebutuhan komunikasi digital pascapandemi.

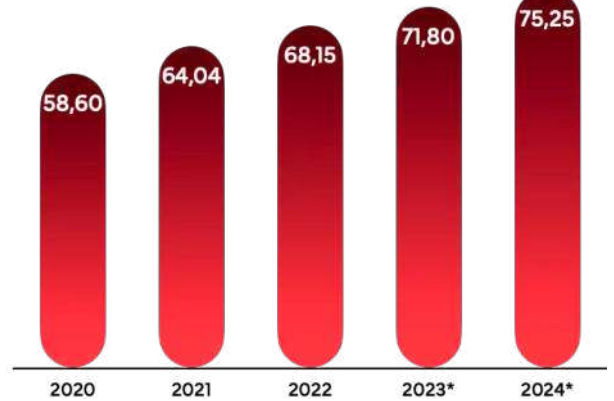
Gambar 2.36
Persentase penduduk Usia ≥ 5 tahun yang menggunakan telepon seluler



Sumber: BPS Provinsi Papua, Data diolah

Gambar 2.37. Perkembangan Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Memiliki atau Menguasai Telepon Seluler di Kabupaten Sarmi Tahun 2020–2024 memperlihatkan tren pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan, mencerminkan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap perangkat komunikasi digital.

Gambar 2.37
Persentase Penduduk Usia ≥ 5 tahun yang memiliki/menguasai telepon seluler



Sumber: BPS Provinsi Papua, Data diolah

Kenaikan kepemilikan telepon seluler mencerminkan semakin

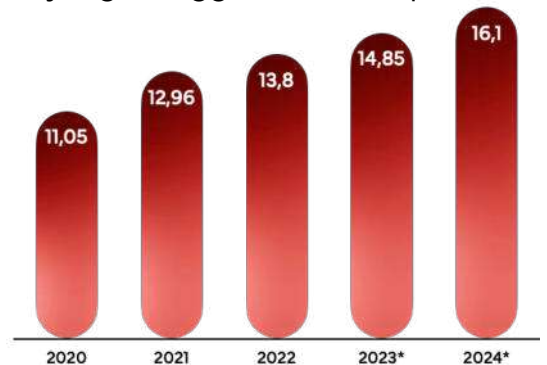
inklusifnya akses masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Fenomena ini turut memperkuat konektivitas sosial-ekonomi masyarakat, termasuk dalam sektor perdagangan daring, pendidikan jarak jauh, dan layanan publik digital. Namun, masih diperlukan langkah strategis untuk memperkecil kesenjangan digital antarwilayah, terutama di distrik dan kampung dengan akses sulit.

c. Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer

Perkembangan penggunaan komputer oleh penduduk usia 5 tahun ke atas di Kabupaten Sarmi menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan sepanjang periode 2020–2024. Pada tahun 2020, persentase pengguna komputer tercatat sebesar 11,05 persen, kemudian meningkat menjadi 12,96 persen pada tahun 2021. Berdasarkan tren pertumbuhan tahunan dan perluasan akses teknologi informasi di sektor pendidikan serta pemerintahan, diproyeksikan angka ini meningkat menjadi 14,85 persen pada tahun 2023 dan 16,10 persen pada tahun 2024.

Gambar 2.38 Perkembangan Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer di Kabupaten Sarmi Tahun 2019–2024 memperlihatkan peningkatan bertahap yang menggambarkan mulai tumbuhnya literasi digital masyarakat, terutama di kalangan pelajar dan aparatur pemerintahan.

Gambar 2.38
Persentase Penduduk Usia ≥ 5 Tahun yang Menggunakan Komputer



Sumber: BPS Provinsi Papua, Data diolah

Peningkatan penggunaan komputer di Kabupaten Sarmi menunjukkan kemajuan dalam penetrasi teknologi dasar, khususnya pada bidang

pendidikan dan administrasi publik. Namun demikian, angka pengguna komputer yang masih di bawah 20 persen menunjukkan masih rendahnya literasi teknologi dan keterbatasan fasilitas perangkat keras, terutama di sekolah dan perkantoran di distrik dengan akses sulit.

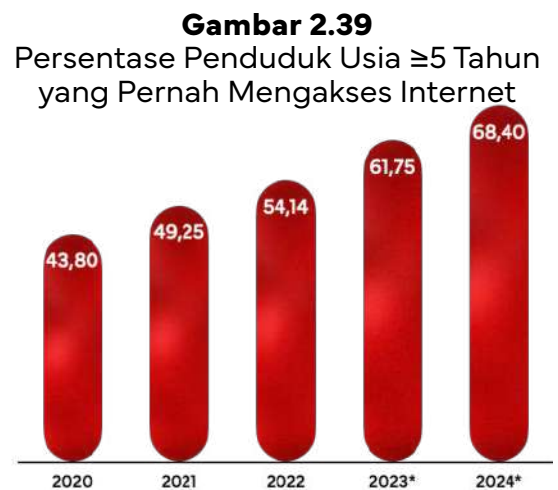
d. Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet

Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang pernah mengakses internet di Kabupaten Sarmi juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 2020–2024. Pada tahun 2020, persentase penduduk yang telah mengakses internet tercatat sebesar 35,27 persen, meningkat menjadi 54,14 persen pada tahun 2022. Berdasarkan pola pertumbuhan dan peningkatan ketersediaan jaringan internet di berbagai wilayah distrik, diproyeksikan bahwa persentase tersebut mencapai 61,75 persen pada tahun 2023, dan meningkat menjadi 68,40 persen pada tahun 2024.

Narasi visual (caption grafik):

Gambar 2.39 Perkembangan Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet di Kabupaten Sarmi Tahun 2019–2024 menunjukkan peningkatan pesat seiring dengan perluasan jaringan telekomunikasi, meningkatnya penetrasi gawai pintar, dan dorongan transformasi digital pada berbagai sektor pelayanan publik.

Peningkatan akses internet di Kabupaten Sarmi menandakan kemajuan signifikan dalam konektivitas masyarakat terhadap jaringan informasi global. Kondisi ini didukung oleh pembangunan menara BTS di wilayah distrik pesisir dan pengembangan layanan internet publik di fasilitas pendidikan dan pemerintahan. Meskipun demikian, kesenjangan digital antarwilayah masih menjadi tantangan, terutama di distrik pegunungan yang belum terjangkau sinyal kuat dan infrastruktur jaringan tetap terbatas.



Sumber: BPS Provinsi Papua, Data diolah

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

9.1. Keuangan

a. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Sarmi menunjukkan perbaikan kinerja pengelolaan keuangan yang bertahap selama lima tahun terakhir. Jika pada

tahun 2018–2019 Kabupaten SarMI masih memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP), maka sejak tahun 2020 hingga 2024 telah berhasil meningkat menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Perkembangan ini mencerminkan adanya upaya serius dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah, penyajian laporan keuangan yang lebih tertib, serta penguatan sistem pengendalian internal pemerintah. Walaupun demikian, opini WDP juga menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan aset tetap, penatausahaan persediaan, serta verifikasi belanja daerah yang perlu ditingkatkan agar ke depan dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 2.19
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten SarMI Tahun 2020–2024

Tahun	Opini BPK terhadap LKPD	Keterangan
2020	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Peningkatan dari TMP tahun sebelumnya
2021	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Konsistensi hasil pemeriksaan
2022	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Masih terdapat catatan pada pengelolaan aset
2023	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Masih terdapat catatan pada pengelolaan aset dan kas di bendahara
2024	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Proses perbaikan berkelanjutan

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten SarMI

Peningkatan opini BPK dari TMP menjadi WDP merupakan capaian penting yang menandakan terwujudnya perbaikan akuntabilitas fiskal daerah. Namun, belum tercapainya opini WTP menandakan masih perlunya penguatan pada aspek penatausahaan aset, rekonsiliasi antar perangkat daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pada perangkat daerah. Arah kebijakan tahun 2025 diarahkan pada pencapaian opini WTP melalui peningkatan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, penyempurnaan sistem informasi keuangan daerah, dan percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

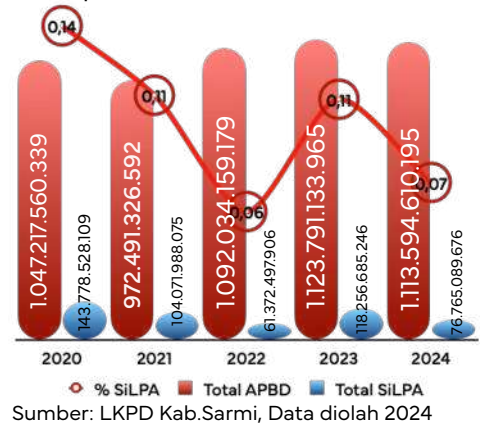
b. Persentase SILPA terhadap APBD

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menggambarkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD dalam satu tahun anggaran. Persentase SiLPA yang terlalu tinggi dapat mengindikasikan rendahnya serapan anggaran, sementara persentase yang terlalu kecil dapat menunjukkan adanya tekanan terhadap kas daerah.

Gambar 2.40 menunjukkan Sepanjang tahun 2020–2024, persentase SiLPA Kabupaten Sarmi menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan membaik seiring dengan peningkatan kedisiplinan perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Fluktuasi nilai SiLPA menunjukkan dinamika pelaksanaan APBD Kabupaten Sarmi dalam menghadapi kondisi fiskal nasional dan penyesuaian transfer ke daerah. Tren penurunan SiLPA pada 2021–2024 mengindikasikan meningkatnya efektivitas perencanaan dan realisasi program. Untuk tahun 2025, kebijakan diarahkan pada optimalisasi penyerapan anggaran dengan memperkuat pengawasan internal, mempercepat proses pengadaan, serta meningkatkan akurasi proyeksi pendapatan daerah.

Gambar 2.40
Persentase SiLPA Terhadap APBD Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024

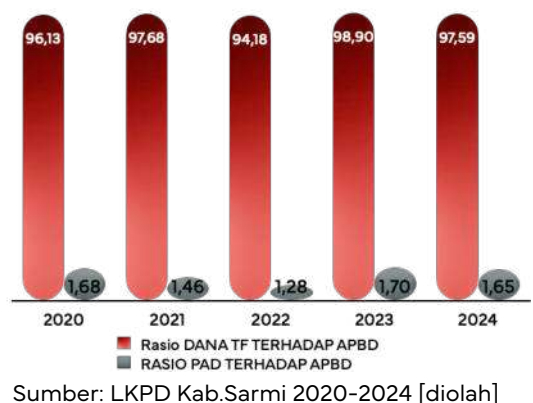


c. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah merupakan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian fiskal daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Indikator ini menunjukkan seberapa besar proporsi pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan provinsi dibandingkan kapasitas fiskal daerah sendiri yang tercermin melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi rasio dana transfer terhadap APBD, semakin besar tingkat ketergantungan fiskal suatu daerah, dan semakin lemah pula kemampuan daerah untuk mandiri dalam pembiayaan pembangunan.

Berdasarkan data tahun 2020–2024, struktur pendapatan Kabupaten Sarmi masih sangat didominasi oleh dana transfer, dengan kontribusi PAD yang relatif kecil. Hal ini mencerminkan bahwa upaya meningkatkan pendapatan daerah perlu diperkuat melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan lokal, peningkatan kualitas layanan perpajakan, serta perluasan basis ekonomi daerah. Rincian perkembangan rasio tersebut dapat dilihat pada gambar 2.41.

Gambar 2.41
Rasio ketergantungan Kabupaten Sarmi tahun 2020-2024 (%)



Perkembangan rasio dana transfer terhadap APBD Kabupaten SarMI pada periode 2020–2024 menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, dengan kisaran 94–99 persen setiap tahunnya. Nilai ini menempatkan Kabupaten SarMI dalam kategori ketergantungan sangat tinggi, sehingga kemandirian fiskal daerah masih terbatas.

Pada tahun 2022 terjadi penurunan rasio dana transfer menjadi 94,18 persen, yang merupakan capaian paling rendah dalam lima tahun terakhir. Penurunan ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten SarMI dalam meningkatkan kontribusi PAD, meskipun realisasi PAD masih berada pada kisaran 1,28–1,70 persen terhadap APBD. Kondisi ini mengindikasikan bahwa PAD belum menjadi sumber pendapatan utama yang signifikan, namun terdapat kecenderungan peningkatan pada tahun 2023–2024.

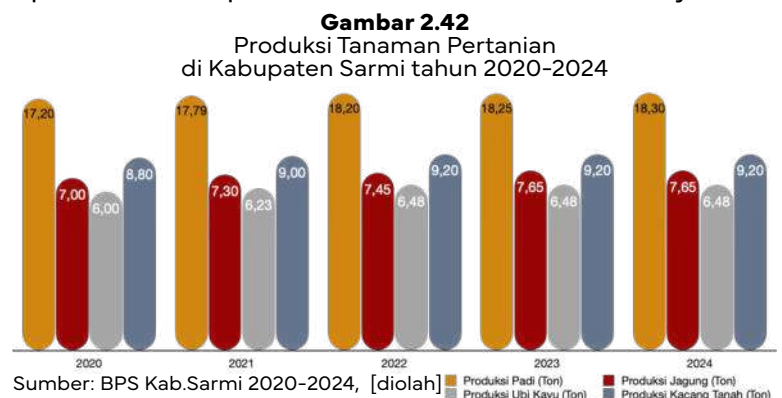
Meskipun PAD pada tahun 2023 dan 2024 mengalami kenaikan berturut-turut menjadi 1,70 persen dan 1,65 persen, kontribusinya masih sangat kecil dibandingkan skala kebutuhan pembiayaan pembangunan. Hal ini menekankan perlunya strategi penguatan pendapatan daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal, perluasan basis pajak dan retribusi daerah, perbaikan manajemen aset daerah, serta penerapan sistem pemungutan berbasis digital.

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Urusan Pertanian

Sektor pertanian memiliki peranan yang sangat strategis dalam struktur perekonomian Kabupaten SarMI. Selain menjadi penyedia bahan pangan nabati dan hewani, sektor ini juga menjadi tumpuan utama masyarakat di kampung sebagai sumber pendapatan dan lapangan kerja, serta penyedia bahan baku bagi sektor industri pengolahan. Kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten SarMI merupakan yang terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya, sehingga peningkatan produktivitas pertanian menjadi salah satu fokus utama pembangunan daerah.

Capaian kinerja urusan pertanian dapat diukur melalui indikator jumlah produksi tanaman pangan utama di Kabupaten SarMI selama periode 2020–2024, seperti ditunjukkan pada gambar 2.42.



Selama periode 2020–2024, sektor pertanian Kabupaten SarMI menunjukkan tren peningkatan produksi yang relatif stabil. Produksi padi meningkat dari 17,20 ton pada tahun 2020 menjadi 18,30 ton pada tahun 2024, atau naik rata-rata sebesar 1,6 persen per tahun. Kenaikan ini mencerminkan hasil positif dari kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana produksi seperti benih unggul dan pupuk bersubsidi.

Produksi jagung juga menunjukkan peningkatan dari 7,00 ton pada tahun 2020 menjadi 7,65 ton pada tahun 2024, dengan pertumbuhan rata-rata 2,2 persen per tahun. Sementara itu, produksi ubi kayu mengalami peningkatan pada periode 2020–2022 namun cenderung stabil pada dua tahun terakhir, yang menunjukkan perlunya inovasi dalam teknik budidaya serta diversifikasi lahan tanam. Produksi kacang tanah relatif stabil dengan pertumbuhan terbatas, menunjukkan potensi untuk pengembangan pada lahan kering yang belum termanfaatkan secara optimal.

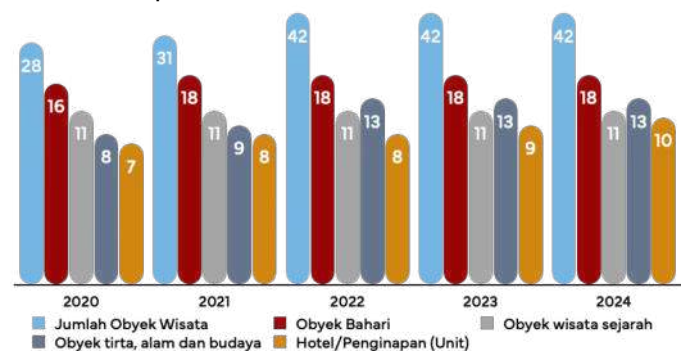
Secara umum, capaian indikator kinerja urusan pertanian menggambarkan arah positif, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan infrastruktur irigasi, akses pembiayaan petani yang rendah, serta minimnya penerapan teknologi pertanian modern. Pemerintah daerah perlu mendorong kolaborasi antara penyuluh, kelompok tani, dan pelaku usaha agar produktivitas pertanian dapat meningkat secara berkelanjutan.

2. Urusan Pariwisata

Sektor pariwisata di Kabupaten SarMI merupakan salah satu urusan pilihan yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan kekayaan alam berupa pantai, laut, dan situs sejarah, pariwisata dapat menjadi sektor unggulan bila didukung dengan infrastruktur dan promosi yang memadai. Namun demikian, kontribusinya terhadap PDRB masih relatif kecil akibat rendahnya aksesibilitas dan belum optimalnya pengelolaan potensi wisata.

Perkembangan jumlah obyek wisata dan akomodasi di Kabupaten SarMI selama periode 2020–2024 ditampilkan pada gambar 2.43.

Gambar 2.43
Data Obyek Wisata dan Akomodasi Pariwisata Kabupaten SarMI Tahun 2020–2024



Sumber: BPS Kab. SarMI 2020–2024, [diolah]

Perkembangan sektor pariwisata Kabupaten Sarmi selama periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan positif, baik dari sisi jumlah obyek wisata maupun fasilitas akomodasi. Jumlah obyek wisata meningkat dari 28 lokasi pada tahun 2020 menjadi 42 lokasi pada tahun 2024, menggambarkan adanya upaya perluasan destinasi dan penguatan potensi wisata lokal yang tersebar di berbagai distrik.

Kategori obyek wisata bahari menjadi potensi unggulan dengan jumlah meningkat dari 16 obyek pada tahun 2020 menjadi 18 obyek sejak tahun 2021 hingga 2024, menegaskan peran wisata pesisir sebagai ikon utama pariwisata daerah. Sementara itu, obyek wisata sejarah masih stabil sebanyak 11 lokasi, dan obyek tirta, alam, serta budaya bertambah dari 8 lokasi pada tahun 2020 menjadi 13 lokasi pada tahun 2022, menunjukkan peningkatan minat terhadap wisata berbasis alam dan budaya lokal.

Dari sisi akomodasi, jumlah hotel dan penginapan meningkat dari 7 unit pada tahun 2020 menjadi 10 unit pada tahun 2024, menandakan tumbuhnya dukungan sektor jasa pariwisata dan kesiapan daerah dalam melayani wisatawan.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa arah pembangunan pariwisata Kabupaten Sarmi telah bergerak ke arah yang lebih baik dengan fokus pada penguatan potensi wisata bahari, peningkatan fasilitas pendukung, dan pengembangan wisata berbasis masyarakat lokal.

3. Urusan Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu pilar ekonomi daerah yang berpotensi besar dikembangkan di Kabupaten Sarmi, mengingat wilayahnya memiliki garis pantai yang luas dan sumber daya perikanan melimpah. Kegiatan utama sektor ini meliputi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, dengan kontribusi terbesar berasal dari subsektor perikanan tangkap.

Perkembangan Sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Sarmi selama periode 2020–2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20.
Produksi Perikanan Kabupaten Sarmi Tahun 2020–2024 (Ton)

Tahun	Produksi Perikanan Tangkap [ton]	Produksi Perikanan Budidaya [ton]	Total Produksi
2020	15.828	1,2	15.829,2
2021	16.395	1,33	16.396,33
2022	2.196	2,66	2.198,66
2023	8.734	2,50	8.736,5
2024	23.608	3,15	23.611,15

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Sarmi 2020–2024, [diolah]

Berdasarkan data pada Tabel 2.20, produksi perikanan di Kabupaten SarMI selama periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, baik pada subsektor perikanan tangkap maupun budidaya.

Produksi perikanan tangkap mengalami kenaikan dari 15.828 ton pada tahun 2020 menjadi 23.608 ton pada tahun 2024, atau meningkat sekitar 49 persen dalam lima tahun terakhir. Peningkatan ini mencerminkan bertambahnya aktivitas nelayan lokal, perbaikan sarana penangkapan, serta dukungan program pemerintah dalam pengembangan armada dan fasilitas pelabuhan perikanan.

Sementara itu, produksi perikanan budidaya meskipun dalam skala kecil juga memperlihatkan perkembangan positif, dari 1,2 ton pada tahun 2020 menjadi 3,15 ton pada tahun 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan mulai meningkatnya minat masyarakat terhadap kegiatan budidaya ikan air tawar dan laut, meskipun masih terkendala pada aspek teknologi, ketersediaan benih, dan pakan ikan yang terbatas.

Secara keseluruhan, total produksi perikanan Kabupaten SarMI meningkat dari 15.829,2 ton pada tahun 2020 menjadi 23.611,15 ton pada tahun 2024, atau tumbuh rata-rata sekitar 10 persen per tahun. Capaian ini menunjukkan bahwa sektor perikanan tetap menjadi salah satu tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir.

Namun demikian, terdapat tantangan yang perlu diantisipasi, antara lain masih rendahnya nilai tambah hasil tangkapan akibat minimnya fasilitas pengolahan ikan, keterbatasan rantai pasok dan distribusi ke pasar regional, serta kurang optimalnya data statistik perikanan budidaya. Ke depan, arah kebijakan pengembangan sektor perikanan difokuskan pada penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas nelayan dan pembudidaya, serta diversifikasi produk hasil laut agar sektor ini dapat memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar bagi Kabupaten SarMI.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah merupakan gambaran mengenai kemampuan Kabupaten SarMI dalam mengelola potensi sumber daya yang dimiliki guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat posisi daerah dalam konteks pembangunan regional dan nasional. Peningkatan daya saing daerah menjadi salah satu fokus utama pembangunan karena menjadi tolok ukur efektivitas tata kelola pemerintahan, kualitas sumber daya manusia, dan kapasitas infrastruktur daerah.

Secara umum, daya saing daerah dipengaruhi oleh empat pilar utama, yaitu: (1) kondisi perekonomian daerah, (2) kualitas sumber daya manusia, (3) infrastruktur dan konektivitas wilayah, serta (4) tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah. Keterpaduan antar pilar tersebut menjadi faktor penentu dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan percepatan pembangunan di Kabupaten SarMI.

1. Kondisi Ekonomi dan Struktur Perekonomian Daerah

1). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten SarMI Tahun

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten SarMI, perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten SarMI selama periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren pertumbuhan positif. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) meningkat dari Rp2.937,45 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp3.824,65 miliar pada tahun 2024, yang mencerminkan adanya peningkatan kapasitas ekonomi daerah secara nominal.

Sementara itu, berdasarkan harga konstan 2010 (ADHK), PDRB juga menunjukkan kenaikan dari Rp1.834,11 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp2.058,50 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini menggambarkan adanya pertumbuhan ekonomi riil yang tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor inflasi atau perubahan harga.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten SarMI (PDRB ADHK) cenderung meningkat setiap tahun. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 0,03 persen sebagai dampak perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Namun, sejak tahun 2021 hingga 2024, pertumbuhan terus membaik dengan capaian masing-masing 1,03 persen (2021), 2,89 persen (2022), 3,56 persen (2023), dan diproyeksikan mencapai 4,26 persen pada tahun 2024.

Peningkatan tersebut menunjukkan proses pemulihan ekonomi yang konsisten, terutama didorong oleh pulihnya aktivitas sektor pertanian, konstruksi, dan perdagangan, serta mulai meningkatnya aktivitas jasa pemerintahan dan layanan masyarakat. Tren pertumbuhan yang semakin positif ini juga mengindikasikan mulai membaiknya daya beli masyarakat dan meningkatnya kinerja sektor-sektor produktif daerah.

Secara ringkas, perkembangan PDRB Kabupaten SarMI Tahun 2020–2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21
Perkembangan PDRB Kabupaten SarMI Tahun 2020–2024

Tahun	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	PDRB ADHK 2010 (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
2020	2.937,45	1.834,11	0,03
2021	3.103,77	1.852,96	1,03
2022	3.315,80	1.906,55	2,89
2023*	3.562,53	1.974,37	3,56
2024**	3.824,65	2.058,50	4,26

Sumber: BPSKab. SarMI 2020–2024, [diolah]

Tabel 2.21 menunjukkan tren peningkatan nilai PDRB Kabupaten SarMI selama periode 2020–2024, baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun harga konstan (ADHK). Pertumbuhan ekonomi daerah yang terus menguat dari 0,03 persen menjadi 4,26 persen mencerminkan proses pemulihan ekonomi dan peningkatan aktivitas produktif di berbagai sektor utama.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten SarMI selama periode 2020–2024 menunjukkan arah positif dengan peningkatan laju pertumbuhan dari 0,03 persen pada tahun 2020 menjadi 4,26 persen pada tahun 2024. Kinerja ini mencerminkan pemulihan ekonomi pascapandemi serta meningkatnya aktivitas produktif di sektor utama, khususnya pertanian, kehutanan, perikanan, konstruksi, dan perdagangan.

Meskipun pertumbuhannya stabil, struktur ekonomi SarMI masih didominasi sektor primer, sementara sektor sekunder dan tersier mulai berkembang secara bertahap. Kondisi ini mengindikasikan perlunya percepatan transformasi ekonomi melalui diversifikasi usaha, hilirisasi komoditas unggulan, serta penguatan peran UMKM dan infrastruktur pendukung.

Dengan penguatan sektor produktif berbasis potensi lokal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Kabupaten SarMI berpeluang memperluas basis ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing daerah di masa mendatang.

2) Data Struktur Perekonomian Menurut Lapangan Usaha

Struktur perekonomian Kabupaten SarMI selama periode 2020–2024 masih didominasi oleh sektor primer, khususnya pertanian, kehutanan, dan perikanan, diikuti oleh sektor konstruksi serta perdagangan besar dan eceran. Meskipun demikian, beberapa sektor jasa seperti administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan juga menunjukkan kontribusi yang stabil terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Perubahan struktur ekonomi ini menggambarkan dinamika aktivitas ekonomi masyarakat dan arah transformasi ekonomi daerah yang mulai bergeser ke sektor-sektor bernilai tambah lebih tinggi, seperti tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 22
Data Struktur Perekonomian menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Sarmi Tahun 2020–2024 (%)

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**	Rata-rata 2020–2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31,51	30,42	29,63	29,40	27,81	29,75
2	Pertambangan dan Penggalian	1,18	1,16	1,13	1,14	1,09	1,14
3	Industri Pengolahan	1,86	1,83	1,81	1,78	1,77	1,81
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6	Konstruksi	20,21	20,82	21,19	21,18	21,58	21,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,16	9,48	9,90	10,15	10,39	9,82
8	Transportasi dan Pergudangan	5,24	5,09	5,68	6,01	6,15	5,63
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,65	0,67	0,70	0,75	0,77	0,71
10	Informasi dan Komunikasi	3,10	3,29	3,39	3,43	3,55	3,35
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,30	1,33	1,36	1,34	1,35	1,34
12	Real Estat	3,27	3,36	3,46	3,57	3,63	3,46
13	Jasa Perusahaan/Bisnis	0,56	0,57	0,58	0,56	0,54	0,56
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15,18	15,09	14,27	13,84	14,37	14,55
15	Jasa Pendidikan	2,84	2,76	2,75	2,70	2,72	2,75
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,37	2,51	2,52	2,50	2,60	2,50
17	Jasa Lainnya	1,50	1,52	1,54	1,55	1,58	1,54

Sumber: BPS Kabupaten Sarmi, 2024

Keterangan: *Angka sementara; **Angka sangat sementara

Tabel menunjukkan struktur ekonomi Kabupaten Sarmi yang masih didominasi sektor primer dengan kontribusi rata-rata 29,75 persen, terutama dari pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor konstruksi dan perdagangan menjadi penyumbang utama dari sektor sekunder dan tersier dengan tren kenaikan yang stabil.

Struktur perekonomian Kabupaten Sarmi memperlihatkan bahwa transformasi menuju sektor bernilai tambah masih berlangsung secara bertahap. Dominasi sektor primer menandakan pentingnya strategi hilirisasi dan peningkatan produktivitas subsektor pertanian dan perikanan sebagai motor penggerak utama ekonomi daerah. Di sisi lain, kenaikan kontribusi sektor konstruksi dan perdagangan mencerminkan mulai tumbuhnya aktivitas ekonomi perkotaan dan konektivitas wilayah.

Ke depan, arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah perlu difokuskan pada penguatan sektor sekunder dan tersier, peningkatan daya saing lokal melalui pengembangan industri kecil dan menengah, serta perluasan pasar hasil produksi daerah.

3) PDRB per Kapita dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan salah satu indikator penting untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di suatu daerah. PDRB per kapita dihitung berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita, semakin besar pula nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh setiap penduduk.

Selama periode tahun 2020–2024, PDRB per kapita Kabupaten SarMI menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten SarMI, nilai PDRB per kapita meningkat dari Rp55,13 juta pada tahun 2020 menjadi Rp68,35 juta pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan tingkat pendapatan masyarakat dan pertumbuhan aktivitas ekonomi yang lebih merata di berbagai sektor.

Tabel 2. 23
PDRB per Kapita Kabupaten SarMI Tahun 2020–2024

Tahun	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2020	2.937,45	53.300	55,13	-
2021	3.103,77	54.000	57,45	4,2
2022	3.315,80	54.600	60,73	5,7
2023*	3.562,53	55.100	64,65	6,5
2024**	3.824,65	55.950	68,35	5,7

Sumber: BPS Kabupaten SarMI, 2024
Keterangan: *Angka sementara; **Angka sangat sementara

Tabel 2.23, menunjukkan peningkatan nilai PDRB per kapita Kabupaten SarMI dari Rp55,13 juta pada tahun 2020 menjadi Rp68,35 juta pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan kemampuan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan aktivitas produktif yang lebih luas.

Tren peningkatan PDRB per kapita menggambarkan kemajuan ekonomi daerah dan membaiknya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten SarMI. Kenaikan pendapatan ini terutama didorong oleh meningkatnya kinerja sektor pertanian, konstruksi, perdagangan, dan jasa pemerintahan. Namun demikian, pertumbuhan tersebut masih perlu diimbangi dengan pemerataan antarwilayah serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

Ke depan, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, pengembangan usaha mikro dan kecil, serta peningkatan akses terhadap pelayanan dasar ekonomi akan menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing dan memperluas kesejahteraan masyarakat SarMI secara berkelanjutan.

4) Ketimpangan dan Distribusi Pendapatan

Pembangunan ekonomi yang inklusif tidak hanya diukur dari pertumbuhan PDRB, tetapi juga dari sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, analisis ketimpangan pendapatan menjadi penting untuk menilai keseimbangan distribusi hasil pembangunan antarwilayah maupun antarkelompok sosial ekonomi di Kabupaten SarMI.

Tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten SarMI selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang menggambarkan perubahan tingkat pemerataan ekonomi antar kelompok masyarakat. Indeks Gini menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana distribusi pendapatan berlangsung secara adil, di mana semakin kecil nilai indeks menunjukkan semakin merata pendapatan masyarakat.

Tabel 2. 24
Indeks Gini Kabupaten SarMI Tahun 2020–2024

Tahun	Indeks Gini	Kategori Ketimpangan
2020	0,424	Ketimpangan Sedang
2021	0,409	Ketimpangan Sedang
2022	0,387	Ketimpangan Rendah–Sedang
2023*	0,372	Ketimpangan Rendah
2024**	0,430	Ketimpangan Sedang

Sumber: BPS Kabupaten SarMI, 2024

Tabel menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Kabupaten SarMI sempat menurun hingga kategori rendah pada tahun 2023, namun kembali meningkat ke kategori sedang pada tahun 2024.

Selama periode 2020–2023, Indeks Gini Kabupaten SarMI mengalami penurunan dari 0,424 menjadi 0,372, mencerminkan peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat seiring dengan menguatnya aktivitas ekonomi pascapandemi dan membaiknya akses terhadap lapangan kerja di sektor pertanian, perikanan, serta perdagangan.

Namun, peningkatan kembali indeks pada tahun 2024 menjadi 0,430 menandakan adanya ketimpangan baru yang perlu mendapat perhatian. Kenaikan ini dapat disebabkan oleh perbedaan tingkat pertumbuhan antarwilayah, konsentrasi kegiatan ekonomi pada sektor tertentu, serta masih terbatasnya kapasitas ekonomi masyarakat berpendapatan rendah.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten SarMI terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang menunjukkan adanya kemajuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Meski demikian, kesenjangan kualitas SDM antar distrik masih terlihat, terutama di wilayah pedalaman dan pesisir yang aksesibilitasnya terbatas.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor utama yang menentukan daya saing dan kapasitas pembangunan daerah. Peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, pemerataan akses pendidikan, serta perluasan kesempatan kerja menjadi bagian penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Salah satu indikator yang dapat mencerminkan kualitas dan partisipasi SDM dalam pembangunan ekonomi adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK menunjukkan besarnya penduduk usia kerja yang aktif berpartisipasi dalam pasar kerja, sedangkan TPT menggambarkan proporsi angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan.

Tabel 2. 25

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten SarMI Tahun 2020–2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK	67,17	68,57	68,96	63,70	61,74
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT	7,16	3,50	2,09	3,09	3,41

Sumber: BPS Kabupaten SarMI, 2020-2024

Tabel 2.25, menunjukkan fluktuasi partisipasi tenaga kerja dan penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten SarMI selama periode 2020–2024, yang mencerminkan proses pemulihan dan penyesuaian struktur tenaga kerja pascapandemi.

Selama periode 2020–2024, TPAK Kabupaten SarMI mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun dari 68,96 persen pada tahun 2022 menjadi 61,74 persen pada tahun 2024. Penurunan ini dapat diartikan sebagai berkurangnya partisipasi tenaga kerja akibat pergeseran struktur ekonomi dan terbatasnya lapangan kerja formal di beberapa sektor produktif.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan perbaikan signifikan dari 7,16 persen pada tahun 2020 menjadi hanya 3,41 persen pada tahun 2024. Tren ini menandakan adanya peningkatan kesempatan kerja, khususnya di sektor pertanian, jasa perdagangan, dan konstruksi yang masih menjadi tumpuan utama masyarakat.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kualitas SDM Kabupaten Sarmi mulai menunjukkan arah positif, meskipun masih menghadapi tantangan pada aspek produktivitas dan relevansi keterampilan tenaga kerja terhadap kebutuhan pasar.

3. Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah

Ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar menjadi faktor utama dalam memperkuat daya saing daerah. Pemerintah Kabupaten Sarmi terus berupaya meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan jalan, jembatan, dan sarana transportasi yang menghubungkan sentra produksi dengan pusat distribusi dan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan infrastruktur telekomunikasi, energi, serta air bersih juga menjadi prioritas untuk mendorong aktivitas ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Kendala utama yang dihadapi adalah kondisi geografis wilayah yang cukup menantang, dengan sebaran penduduk yang tidak merata dan karakteristik alam yang kompleks. Hal ini menyebabkan biaya pembangunan dan logistik relatif tinggi, sehingga diperlukan strategi pembangunan infrastruktur yang berbasis kewilayahan dan berorientasi pada potensi ekonomi lokal.

4. Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Daerah

Aspek tata kelola pemerintahan menjadi landasan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan daya saing daerah. Pemerintah Kabupaten Sarmi terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan kapasitas aparatur. Upaya inovasi daerah juga terus dikembangkan, baik melalui digitalisasi layanan publik maupun program-program pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi.

Penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan menjadi kunci keberhasilan tata kelola daerah yang adaptif dan berdaya saing. Kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat sipil diperlukan untuk mendorong terciptanya ekosistem inovasi yang produktif dan berkelanjutan.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan serta Realisasi RPD

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten SarMI sampai dengan tahun berjalan menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah secara konsisten berupaya merealisasikan target dan prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Upaya ini ditempuh melalui optimalisasi perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pada seluruh perangkat daerah, meskipun menghadapi tantangan struktural berupa luasnya wilayah pelayanan, karakteristik geografis wilayah pulau, pesisir, sungai, serta konektivitas antar distrik yang masih terbatas.

Di sisi lain, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, ketersediaan sumber daya manusia, dan dinamika kebutuhan masyarakat juga memengaruhi tingkat pencapaian program pembangunan. Kondisi ini menuntut penyelarasan yang lebih adaptif antara prioritas tahunan dengan kemampuan pendanaan dan kapasitas pelaksanaan di tingkat daerah maupun distrik.

Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan menjadi penting untuk memastikan efektivitas, efisiensi, serta konsistensi antara dokumen perencanaan dan realisasi pembangunan. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap capaian kinerja perangkat daerah, realisasi output dan outcome, serta pemanfaatan anggaran, yang kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPD dan RKPD tahun berjalan.

Secara makro, tingkat keberhasilan pembangunan daerah dianalisis melalui perkembangan indikator kinerja utama, antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, serta indikator penunjang lainnya yang menggambarkan kualitas layanan dasar, aksesibilitas antarwilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam perbaikan kebijakan, penguatan prioritas pembangunan, serta penyesuaian arah program dan kegiatan pada tahun perencanaan berikutnya.

Tabel 2.26
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten SarMI

NO	Indikator Makro	Satuan	2023 Target	2023 Realisasi	Capaian [%]	2024 Target	2024 Realisasi	capaian [%]	Target 2025	Target 2026
1	IPM	Indeks	64,20	67,00	104,4	64,47	67,89	105,3	68,83	69,65
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Persen	4,79	3,56	74,3	5,23	4,26	81,5	4,87	5,48
3	Pendapatan Per Kapita	Rp. Juta	73,21	83,33	113,8	75,17	88,76	118,1	93,40	98,04
4	Tingkat Pengangguran (%)	Persen	4,57	3,09	67,6	3,97	3,41	85,9	3,30	3,19
5	Angka Kemiskinan (%)	Persen	13,15	13,21	100,5	12,49	14,05	112,5	13,76	13,34
6	Gini Rasio	Indeks	0,401	0,372	92,8	0,393	0,430	109,4	0,364	0,360

Perkembangan indikator makro Kabupaten SarMI dalam dua tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup positif, meskipun pelaksanaannya tetap dipengaruhi oleh tantangan geografis, kapasitas fiskal daerah, serta keterbatasan konektivitas antarwilayah pesisir, sungai, dan kampung-kampung dengan akses sulit [terpencil]. Secara umum, sebagian besar indikator makro mengalami peningkatan kinerja, baik dari sisi pembangunan manusia maupun pertumbuhan ekonomi, meskipun pada beberapa indikator masih diperlukan penguatan kebijakan.

Pertama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan di atas target pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing dengan capaian 104,36% dan 105,30%. Tren kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan akses pendidikan, kesehatan, serta peningkatan standar hidup masyarakat, terutama pada distrik-distrik yang telah mendapat intervensi layanan dasar.

Kedua, pendapatan per kapita menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan, dengan capaian 113,82% pada 2023 dan meningkat menjadi 118,08% pada 2024. Kinerja ini mengindikasikan adanya penguatan aktivitas ekonomi, terutama sektor-sektor berbasis sumber daya lokal dan perdagangan antarwilayah.

Ketiga, angka kemiskinan masih menunjukkan fluktuasi. Meskipun capaian 2023 telah melampaui target (100,46%), peningkatan angka kemiskinan pada 2024 menyebabkan capaian naik menjadi 112,49% tetapi dalam arah yang tidak menguntungkan. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi terarah, khususnya pada distrik dengan akses terbatas dan kerentanan sosial yang tinggi.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi masih berada di bawah target, menunjukkan bahwa penguatan lapangan kerja berbasis lokal dan percepatan aktivitas ekonomi produktif perlu mendapatkan perhatian pada tahun perencanaan selanjutnya.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, ditetapkan target indikator makro Kabupaten SarMI tahun 2026, antara lain IPM sebesar 69,65, pertumbuhan ekonomi 5,48%, pendapatan per kapita Rp 98,04 juta, tingkat pengangguran 3,19%, angka kemiskinan 13,34%, serta Gini Rasio 0,360. Target tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten SarMI dalam mendorong peningkatan kesejahteraan, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta memperkuat pondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Realisasi capaian indikator kinerja makro yang telah diuraikan sebelumnya merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten SarMI. Pencapaian tersebut merupakan hasil pelaksanaan berbagai program dan kegiatan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing, serta diarahkan pada prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat pada wilayah pesisir, sungai, dan kampung-kampung adat.

Dalam rangka menilai konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, serta memastikan keterukuran hasil pembangunan, diperlukan penyajian capaian kinerja pada tingkat perangkat daerah. Penyajian ini mengacu pada struktur Tabel TC.19 sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang memuat informasi mengenai indikator kinerja perangkat daerah, target tahunan, realisasi capaian, serta persentase tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Program dan kegiatan perangkat daerah yang dilaksanakan pada tahun 2024 serta tahun 2025 sebagai tahun berjalan menjadi dasar pengukuran capaian kinerja, baik dalam konteks pelaksanaan RKPD maupun peninjauan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Daerah. Melalui tabel ini, dapat diketahui sejauh mana kontribusi masing-masing perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan, memperkuat layanan dasar, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat di seluruh distrik.

Berikut disajikan Tabel TC.19 Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang memuat hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 dan tahun berjalan 2025.

Tabel 2.27
Evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan Daerah

Tabel T-C.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2025
KABUPATEN SARMI

No	Kode	3 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	4 Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	5 Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		6 Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		7 Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		8 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		9 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		10 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD y/d tahun n-1		11 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD y/d Tahun n-1 (%)		12 Parangkat Daerah Penanggung Jawab	13 Ket.		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Semua Bidang																			
	1.01.01	URUSAN PENUNJANG PROGRAM PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-			85.492.904.719		28.072.171.775			32,84%		28.072.171.775			0,00%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-			-		-			0,00%		-			0,00%			
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			-			-		-			0,00%		-			0,00%			
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			-			-		-			0,00%		-			0,00%			
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-			81.764.369.620		26.948.246.470					26.948.246.470						
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)			-			81.444.370.130	520,00	26.948.246.470	130,00		25%		26.948.246.470	130,00		33,09%		0%	
	1.01.01.2.02.0005	Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)			-			169.999.745	10,00	-	-		0%		-	-		0,00%		0%	
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)			-			149.999.745	10,00	-	-		0%		-	-		0,00%		0%	
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-			199.994.723		-					-						0,00%
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			-			199.994.723	5,00	-	-		0%		-	-		0,00%		0%	
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-			654.445.305		-					513.023.305						0,00%
	1.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)			-			84.652.745	12,00	-	-		0%		43.230.745	-		51,07%		0%	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Tingkat Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD t/6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD t/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD t/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	1.01.01.2.06.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumentasi)	-	-	-	-	20,00	469.792.560	-	0,00%	0%	469.792.560	0%					
	1.01.01.2.06.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-	-	100,00,000,000	-	-	0,00%	0%	-	0,00%					
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Pemerintah Daerah		-	-	-	-	1.832.747.891	246.023.000	-	0%	0%	246.023.000	0%					
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	24.919.500	-	-	0,00%	0%	-	0%					
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	245.682.183	-	-	6,37%	0%	-	0%					
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	449.962.500	-	-	19,89%	0%	-	0%					
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	19.999.708	-	-	0,00%	0%	-	0%					
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	-	-	-	-	165.000,000	-	-	24,77%	0%	-	0%					
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	553.184,000	-	-	18,01%	0%	-	0%					
	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	-	-	-	372.000,000	-	-	0,00%	0%	-	0%					
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-	846.471.625	339.879.000	-	58,40%	0%	339.879.000	0%					
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	-	-	-	36.472.525	-	-	0%	0%	-	0%					
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	-	-	-	173.999.000	-	-	22,98%	0%	-	0%					
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	-	-	-	636.000,000	71,28	71,28	43,81%	428%	278.600,000	0%					
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-	194.875.555	25.000.000	-			25.000.000						



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/Kegiatan (output)	5		6		7		8		9		10		11		Peringkat Daerah Pemangung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Peranginan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Peranginan Dinas Dipelihara dan Dibayarkan Pakajanya (Unit)	- ,00	- ,00	4,00	29.755.855	- ,00	0,00%	- ,00	0,00%	- ,00	0%	- ,00	0,00%			
		1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralihan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralihan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	- ,00	- ,00	20,00	165.120.000	- ,00	0%	- ,00	0%	25.000.000	0%	25.000.000	0,00%			
		2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	-	3.629.159.024	-	90,48%	3.283.690.449	90,48%	3.283.690.449	0,00%	3.283.690.449	0,00%	DINAS KETAHANAN PANGAN		
		2.09.01.2.02	Administrasi Kewangan Peranglat Daerah		-	-	-	3.108.217.449	-	75%	3.108.217.449	75%	3.108.217.449	0%	3.108.217.449	0,00%			
		2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	- ,00	- ,00	24,00	3.124.397.980	18,00	99,48%	3.108.217.449	99,48%	3.108.217.449	0%	3.108.217.449	0,00%			
		2.09.01.2.06	Administrasi Umum Peranglat Daerah		-	-	-	211.999.172	-	100%	29.323.000	100%	29.323.000	0%	29.323.000	0,00%			
		2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	- ,00	2,00	3.072.000	2,00	100%	3.072.000	100%	3.072.000	0%	3.072.000	0,00%			
		2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	- ,00	- ,00	12,00	24.999.172	12,00	100%	25.000.000	100%	25.000.000	0%	25.000.000	0,00%			
		2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	- ,00	2,00	162.125.000	2,00	100%	23.751.000	100%	23.751.000	0%	23.751.000	0,00%			
		2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	26.250.000	-	0%	26.250.000	0%	26.250.000	0%	26.250.000	0,00%			
		2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	- ,00	- ,00	2,00	26.250.000	- ,00	100,00%	26.250.000	100,00%	26.250.000	0%	26.250.000	0,00%			
		2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	254.319.125	-	0%	119.900.000	0%	119.900.000	0%	119.900.000	0,00%			
		2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Suret Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Suret Menyurat (Laporan)	- ,00	- ,00	4,00	11.610.000	- ,00	0%	- ,00	0%	- ,00	0%	- ,00	0,00%			
		2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	- ,00	4,00	242.709.125	3,00	75%	119.900.000	75%	119.900.000	0%	119.900.000	0,00%			
		2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	12.992.147	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%			



No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Peningkatan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 1/6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD y/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD y/d Tahun n-1 (%)		Parangkat Daerah Pemangku Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dibayarkan atau Kendaraan Dinas Jabatan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dibayarkan atau Kendaraan Dinas Jabatan Pajaknya (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	20,00	12.992.747	- ,00	-	0,00%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	-	-	7.652.804.929	5.899.434.268	-	-	77,09%	0,00%	5.899.434.268	5.899.434.268	0,00%	0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	-	177.410.381	4.500.000	-	-			4.500.000	4.500.000		0,00%		
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	-	-	-	29.999.276	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		0,00%		
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		-	-	-	-	167.411.105	4.500.000	-	-	3,05%	0,00%	4.500.000	4.500.000		0,00%		
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	-	-	3.305.041.748	3.271.711.268	-	-			3.271.711.268	3.271.711.268		0,00%		
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	- ,00	-	- ,00	-	28,00	3.305.041.748	21,00	21,00	98,99%	0,00%	21,00	3.271.711.268	0%	0,00%		
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-			-	-		0,00%		
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-		0,00%		
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	-	-	367.852.800	125.273.000	-	-			125.273.000	125.273.000		0,00%		
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	58.696.000	1,00	1,00	100%	0,00%	1,00	58.696.000	0%	0,00%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	79.682.800	-	1,00	1,00	100%	0,00%	1,00	-	0%	0,00%		
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	288.170.000	66.577.000	25,00	25,00	0%	23,10%	25,00	66.577.000	0%	0,00%		
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-	3.802.500.000	2.497.950.000	-	-			2.497.950.000	2.497.950.000		0,00%		
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	4.500.000	4.500.000	- ,00	- ,00	0%	100,00%	- ,00	4.500.000	0%	0,00%		
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	30.000.000	11.050.000	48,00	48,00	0%	36,83%	48,00	11.050.000	0%	0,00%		
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	3.788.000.000	2.482.400.000	2,00	2,00	50%	65,88%	2,00	2.482.400.000	0%	0,00%		



No	Kode	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (output)	Target Kinerja RKPD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 4/8 Tahun Lalu (t-2)		Target Kinerja yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 4/8 tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 4/8 tahun n-1		Perangkat Daerah Pemangkas Jwab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA																	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	15.000.000	0,50	15.000.000	50%	75,26%	3.325.631.158	0,00%	3.325.631.158			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	15.000.000	1,00	15.000.000	100%	100,00%	15.000.000	0%	15.000.000			
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	- ,00	-	- ,00	-	29,00	3.639.749.635	7,25	2.648.414.953	25%	72,76%	2.648.414.953	0,00%	2.648.414.953			
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	33.630.000	0,50	13.3720.000	50%	100,00%	33.630.000	0%	33.630.000			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	133.720.000	1,00	133.720.000	100%	100,00%	133.720.000	0%	133.720.000			
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	100.090.000	1,00	100.090.000	100%	100,00%	100.090.000	0%	100.090.000			
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	2.12.01.2.08.0002	Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperihara dan Pakainya (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	595.184.822	0,50	493.496.205	50%	81,35%	493.496.205	0,00%	493.496.205			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	100%	100,00%	50.000.000	0%	50.000.000			
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	443.496.205	0,75	443.496.205	75%	81,35%	443.496.205	0%	443.496.205			



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RKPDMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 1/6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 1/3 Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD 1/3 Tahun n-1 (%)		Parangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2																			13
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)																	
	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																	
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)																	
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)																	
	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)																	
	2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)																	
	2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)																	



No	Kode	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/ Kegiatan (output)	5		6		7		8		9		10		11		Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2																	13
2.14.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	-	-	-	-	1,00	13.200.000	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
2.14.01.2.02.0001		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	-	-	-	19,00	2.333.792.598	4,75	1.756.291.594	25%	1.756.291.594	4,75	1.756.291.594	0,00%		
2.14.01.2.06		Administrasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	2,00	15.620.000	1,00	15.620.000	50%	15.620.000	1,00	15.620.000	0,00%		
2.14.01.2.06.0004		Penyiapan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	1,00	64.204.000	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
2.14.01.2.06.0009		Penyiapan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	1,00	934.864.863	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
2.14.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	1,00	4.000.000	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
2.14.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	1,00	20.000.000	0,25	20.000.000	25%	20.000.000	0,25	20.000.000	0,00%		
2.14.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	1,00	910.864.863	0,25	910.864.863	25%	910.864.863	0,25	910.864.863	0,00%		
2.14.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	1,00	3.861.283.737	-	-	25%	3.861.283.737	-	3.861.283.737	0,00%		
2.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	1,00	5.626.879.232	-	-	69,80%	4.066.990.207	-	4.066.990.207	0,00%		DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	1,00	2.830.792.967	-	-	91,77%	2.830.792.967	-	2.830.792.967	0,00%		
2.15.01.2.02.0001		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	35,00	2.755.802.761	8,75	2.755.802.761	25%	2.755.802.761	8,75	2.755.802.761	0,00%		
2.15.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	12,00	74.990.206	9,00	74.990.206	75%	74.990.206	9,00	74.990.206	0,00%		
2.15.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	1,00	646.945.495	-	-	100,00%	646.945.495	-	646.945.495	0,00%		



No	Kode	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan/Departemen dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja (Program/output) (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d 6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yg direvisasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD y/d Tahun n-1(%)		Perangkat Daerah Pemanangjawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	347.045.495	100,00	109.600.000	50,00	31,58%	0%	109.600.000	0,00%	
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	299.900.000	35,00	247.297.240	20,00	82,46%	0%	247.297.240	0,00%	
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	1.318.650.000		879.300.000				879.300.000	0,00%	
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	1.318.650.000	51,00	879.300.000	30,00	66,68%	0%	879.300.000	0,00%	
	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	-	5.432.535.667		2.305.440.014		42,44%		2.305.440.014	0,00%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	-	2.900.114.857		1.348.214.014				1.348.214.014	0,00%	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	- ,00	-	- ,00	2.900.114.857	350,00	1.348.214.014	175,00	46,49%	0%	1.348.214.014	0,00%	
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	-	984.715.000		193.626.000				193.626.000	0,00%	
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	763.475.000	1,00	-	1,00	0,00%	0%	-	0,00%	
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	7.210.000	1,00	187.626.000	- ,00	2602,30%	0%	187.626.000	0,00%	
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	214.030.000	1,00	6.000.000	- ,00	2,80%	0%	6.000.000	0,00%	
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	- ,00	-	- ,00	1.547.705.810		763.600.000				763.600.000	0,00%	
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	- ,00	-	- ,00	6.000.000	1,00	6.000.000	1,00	100,00%	0%	6.000.000	0,00%	
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	60.000.000	1,00	-	- ,00	0,00%	0%	-	0,00%	
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	1.481.705.810	1,00	757.600.000	0,50	51,13%	0%	757.600.000	0,00%	



No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RKPD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 5/6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RKPD 4 tahun n-4 (%)		Pangikat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2																
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD															
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)															
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapan (Paket)															
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas															
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															



No	Kode	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	5		6		7		8		9		10		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran tahun n-1 (%)		12	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	- ,00	- ,00	1,00	11.400.000	1,00	11.400.000	100%	1,00	0,00%	0,00%	1,00	0,00%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	- ,00	- ,00	2,00	24.990.000	1,00	11.400.000	50%	1,00	45,62%	0,00%	1,00	0,00%				
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	- ,00	- ,00	2,00	29.955.000	1,00	12.914.255	50%	1,00	43,11%	0,00%	1,00	0,00%				
	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	- ,00	8,00	189.977.026	5,00	36.242.000	63%	5,00	19,08%	0,00%	5,00	0,00%				
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	- ,00	8,00	511.192.335	6,00	415.400.000	75%	6,00	81,26%	0,00%	6,00	0,00%				
2.18.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA		-	-	-	4.027.400.056	4,00	4.027.400.056	92,96%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%				
2.18.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%				
2.18.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKD-SKPD		-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%				
2.18.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKD-SKPD		-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%				
2.18.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	-	3.384.463.537	3,00	3.120.086.629	92,96%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%				
2.18.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Buam)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Buam)	- ,00	- ,00	32,00	3.966.589.412	8,00	3.102.236.629	25%	8,00	92,15%	0,00%	8,00	0,00%				
2.18.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	- ,00	- ,00	4,00	178.714.125	4,00	178.714.125	100%	4,00	98,87%	0,00%	4,00	0,00%				
2.18.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%				
2.18.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%				



No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (eksponen)/Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 1/6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja RKPD di evaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD /4 tahun n-4(%)		Paragraf Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah															13
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	1,00	72.480.000	1,00	72.480.000	100,00%	0%	0,00%			
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah															
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	-	-	2,00	189.000.000	2,00	189.000.000	100,00%	0%	0,00%			
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah															
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	-	-	-	1,00	581.481.427	-	-	0%	0%	0,00%			
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	-	-	-	1,00	15.000.000	1,00	15.000.000	100,00%	0%	0,00%			
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	-	-	-	4,00	525.906.427	1,00	525.906.427	25%	0%	0,00%			
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	-	-	-	-	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00%	0%	0,00%			
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	-	-	-	-	1,00	10.000.000	-	-	100,00%	0%	0,00%			
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu (%)	-	-	-	-	100,00	1.126.583.942	75,00	1.126.583.942	45,46%	0%	0,00%			



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Kegiatan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD pada 6/6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg diresialisasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 6/6 Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD 6/6 Tahun n-1 (%)		Perangkit Daerah Pemangung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2														13
	219.01.2.05.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	-	-	-	22,00	2.478.694.069	11,00	1.126.583.942	50%	45,45%		
	219.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu (%) (a-b)	-	-	-	-	100,00	-	50,00	-	50%	0,00%		
	219.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
	219.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	1,00	25.465.249	-	74.965.249	0%	100,00%		
	219.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		-	-	-	-	-	25.000.000	-	-	0%	0,00%		
	219.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0,00%		
	219.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	1,00	99.500.000	-	49.500.000	0%	49,75%		
	219.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) (a-b) (1)	-	-	-	-	100,00	261.399.603	400,00	106.700.000	400%	40,82%		
	219.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		-	-	-	-	-	261.399.603	-	106.700.000		40,82%		
	102.01	PROGRAM PENUNJANG SARMI KABUPATEN/KOTA		-	-	-	-	-	2.134.405.384	-	2.769.026.750		129,73%		
	102.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Program Pokok		-	-	-	-	-	-	-	-				
	102.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKD-SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-		0,00%		
	102.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket	-	-	-	-	-	505.000.600	-	246.179.000				
	102.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	1,00	9.971.000	-	-	0%	0,00%		
	102.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	1,00	90.000.000	-	90.000.000	0%	100,00%		
	102.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	1,00	199.990.000	-	46.000.000	0%	23,00%		
	102.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	1,00	20.986.500	-	-	0%	0,00%		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD t/1 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD y/d tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD y/d tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD y/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Pemangung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	102.01.2.06.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	-	12,00	-	59.415.000,00	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%		13
	102.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	20,00	-	124.632.000,00	-	0,00%	-	110.779.000,00	88,40%	-	0,00%	-	-	0,00%		
	102.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah dan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	10,00	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%		
	102.01.2.08	Penyediaan Jasa Pelembagaan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	1,00	-	1.461.448.975,00	-	0,00%	-	2.432.347.750,00	170,88%	-	0,00%	-	-	0,00%		
	102.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	1,00	-	9.990.000,00	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%		
	102.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	12,00	-	51.650.000,00	-	78,12%	-	40.347.750,00	78,12%	-	0,00%	-	-	0,00%		
	102.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	12,00	-	1.399.808.975,00	3,00	25%	-	2.392.000.000,00	170,88%	3,00	0,00%	-	-	0,00%		
	102.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	-	-	-	167.955.809,00	-	-	-	90.500.000,00	-	-	-	-	-	-		
	102.01.2.09.0002	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan, Pengoperasian atau Lapangan	Jumlah Laporan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan, Pengoperasian atau Lapangan (Unit)	-	6,00	-	69.981.000,00	-	43,58%	-	30.500.000,00	43,58%	-	0,00%	-	-	0,00%		
	102.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	1,00	-	97974.809,00	-	61,24%	-	60.000.000,00	61,24%	-	0,00%	-	-	0,00%		
	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	-	2.904.740.975,00	-	87,00%	-	2.530.123.973,00	87,00%	-	0,00%	-	-	0,00%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	1,00	-	15.000.000,00	-	0,00%	-	15.000.000,00	100,00%	-	0,00%	-	-	0,00%		
	2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	1,00	-	15.000.000,00	-	0,00%	-	15.000.000,00	100,00%	-	0,00%	-	-	0,00%		



No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) Kegiatan (output)	Target Kinerja RKPD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 1/6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 1/6 tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RKPD 1/6 Tahun n-1 (%)		Paraset Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2.24.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	-	-	-	-	1,00	10.000.000	-	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,00%		13
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	-	-	-	20,00	2.345.311.124	5,00	2.098.701.823	25%	89,49%	5,00	2.098.701.823	0%	0,00%		
	2.23.01.2.05.0002	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	-	-	-	-	1,00	19.417.500	-	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,00%		
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	2,00	73.145.000	-	-	0%	94,41%	-	28.015.000	0%	0,00%		
	2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	1,00	43.470.000	-	-	0%	46,01%	-	20.000.000	0%	0,00%		
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	1,00	39.029.562	-	-	0%	100,00%	-	39.028.000	0%	0,00%		
	2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	1,00	327.296.900	-	-	0%	0,00%	-	304.490.000	0%	0,00%		
	2.24.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	1,00	24.996.000	-	-	0%	40,01%	-	10.000.000	0%	0,00%		
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	1,00	302.300.900	0,25	294.490.000	25%	97,42%	0,25	294.490.000	0%	0,00%		
	2.24.01.2.08.0002	Pengadaan Perawatan dan Jasa Lainnya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	1,00	75.540.889	-	-	0%	70,02%	-	24.889.150	0%	0,00%		
	2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	1,00	35.547.900	-	-	0%	0,00%	-	24.889.150	0%	0,00%		
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	1,00	35.547.900	-	-	0%	70,02%	-	24.889.150	0%	0,00%		
	2.23.01.2.09.0001	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dibayarkan atau Dibayarkan Pakajinya (Unit)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	1,00	35.547.900	-	-	0%	70,02%	-	24.889.150	0%	0,00%		



No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Kapalasan)	Target Kinerja RKPD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 4/6 Tahun Lalu (t-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 4/6 tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun n-1 (%)		Pencapaian Kinerja dan Anggaran RKPD 4/6 tahun n-1	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2.24.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	-	-	1,00	39.992.989	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0,00%		
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA																	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	8.826.850.812	-	-	57,35%	57,35%	5.062.086.053	5.062.086.053		0,00%	DINAS PERIKAMAN	
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	-	-	-	1,00	18.900.000	-	-	100,00%	100,00%	18.900.000	18.900.000		0,00%		
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	4.419.381.076	-	-			3.939.763.292	3.939.763.292				
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	-	-	-	-	40,00	4.399.381.826	10,00	10,00	25%	89,18%	3.923.300.292	3.923.300.292		0,00%		
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	-	-	-	-	1,00	19.999.250	-	-	82,32%	82,32%	16.463.000	16.463.000		0,00%		
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	18.807.000	-	-			18.807.000	18.807.000				
	3.25.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	-	-	-	1,00	18.807.000	-	-	100,00%	100,00%	18.807.000	18.807.000		0,00%		
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	469.821.761	-	-			388.419.680	388.419.680				
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	-	-	-	1,00	88.880.761	1,00	1,00	100%	100%	88.880.761	88.880.761		0,00%		
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Persediaan dan Persediaan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	1,00	74.400.000	0,25	0,25	25%	120,97%	90.000.000	90.000.000		0,00%		
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	1,00	20.121.000	0,25	0,25	25%	71,36%	14.388.919	14.388.919		0,00%		
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	1,00	286.400.000	0,25	0,25	25%	68,15%	195.180.000	195.180.000		0,00%		



No	Kode	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Sasaran)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RKPD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 9/6 tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 9/6 tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RKPD 9/6 tahun n-1 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	26.250.000	2,00	26.250.000	100%	0%	0,00%				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	41.590.000	1,00	41.590.000	100%	0%	0,00%				
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	26.250.000	1,00	26.250.000	100%	0%	0,00%				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	61,00	26.250.000	61,00	26.250.000	100%	0%	0,00%				
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	590.850.000	1,00	590.850.000	100%	0%	0,00%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	19.950.000	1,00	19.950.000	100%	0%	0,00%				
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	11.700.000	1,00	11.700.000	100%	0%	0,00%				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kendaran Dinas Jabatan yang Dibelhara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	559.200.000	1,00	559.200.000	100%	0%	0,00%				
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	-	-	-	-	-	12.221.598	-	12.221.598	-	-	0,00%				
			Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	-	-	-	-	-	12.221.598	-	12.221.598	-	-	0,00%				
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	-	-	-	11.265.346.874	-	11.265.346.874	-	-	0,00%				
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	10.039.188.853	-	10.039.188.853	-	-	0,00%				
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	8.869.030.853	-	8.869.030.853	-	-	0,00%				
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	- ,00	-	- ,00	-	85,00	8.847.270.853	21,25	10.336.346.874	25%	0%	0,00%				



No	Kode	Ususan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	5		6		7		8		9		10		11		12	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	-	-	-	-	2,00	21760.000	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-		
	3.27.01.2.06.0004	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor (Paket)	-	-	-	-	1,00	45.900.000	-	-	16,34%	-	89.500.000	0%	-	-		
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Pengiriman dan Penyediaan (Paket)	-	-	-	-	1,00	20.000.000	-	-	17,26%	-	3.452.600	0%	-	-		
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	1,00	347.368.000	-	-	22,61%	-	78.547.400	0%	-	-		
	3.27.01.2.08	Ususan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-		756.890.000					839.500.000					
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Surat Menyurat (Laporan)	-	-	-	-	1,00	17.490.000	-	-	42,88%	-	7.500.000	0%	-	-		
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	-	-	-	1,00	24.200.000	-	-	12,40%	-	3.000.000	0%	-	-		
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	-	-	-	1,00	715.200.000	0,25	829.000.000	115,91%	0,25	829.000.000	0%	-	-		
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	-	-		74.183.847.951			63,95%		46.699.835.017	0,00%			SECRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	-		900.000.000					6.836.208.419					
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disediakan (Laporan)	-	-	-	-	1,00	200.000.000	-	-	300,00%	-	600.000.000	0%	-	-		
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	-	-	-	-	1,00	200.000.000	-	-	200,00%	-	400.000.000	0%	-	-		
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	-		500.000.000			1167,24%		5.836.208.419					
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Daerah		-	-	-	-		20.180.622.027					16.134.987.926					



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RKPD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 1/6 Tahun Lalu (t-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 1/6 tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RKPD 1/6 tahun n-1 (%)		Parangikot Daerah Pemangku Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	-	-	-	2.520,00	19.780.622.027	-	-	0%	78,54%	-	15.534.987.926	0%	0,00%		13
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	-	-	-	-	1,00	200.000.000	-	-	0%	200,00%	-	400.000.000	0%	0,00%		
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	-	-	-	1,00	200.000.000	-	-	0%	100,00%	-	200.000.000	0%	0,00%		
	4.01.01.2.05	Administrasi Kesejahteraan Perangikot Daerah		-	-	-	-		2.579.078.675						1.295.024.922				
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	-	-	-	-	1,00	179.080.000	-	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,00%		
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	-	-	-	50,00	2.030.532.175	-	-	0%	34,47%	-	700.000.000	0%	0,00%		
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	-	-	-	150,00	369.446.500	-	-	0%	161,06%	-	595.024.922	0%	0,00%		
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangikot Daerah		-	-	-	-		9.844.860.000						6.602.491.672				
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	1,00	1.910.000.000	-	-	0%	93,71%	-	1.789.771.672	0%	0,00%		
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengemasan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengemasan yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	1,00	820.000.000	-	-	0%	31,71%	-	260.000.000	0%	0,00%		
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	-	-	-	-	1,00	3.220.000.000	-	-	0%	101,95%	-	3.282.720.000	0%	0,00%		
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	1,00	3.894.860.000	-	-	0%	32,61%	-	1.270.000.000	0%	0,00%		
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-		1.519.600.000						-				
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-	-	-	-	2,00	1.519.600.000	-	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,00%		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 5/6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD y/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD y/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Pemangung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2														13
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	-	-	12.992.904.968	1,00	90.000.000	-	104.840.000	0%	6.986.122.078	0,00%	
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	-	-	1.272.000.000	1,00	1.272.000.000	-	203.775.078	0%	203.775.078	0,00%	
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	-	-	436.000.000	1,00	436.000.000	-	70.000.000	0%	70.000.000	0,00%	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	-	-	11.194.904.968	1,00	11.194.904.968	-	6.607.507.000	0%	6.607.507.000	0,00%	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	-	-	-	3.796.992.770	100,00	1.486.993.000	-	1.785.000.000	0%	1.785.000.000	0,00%	
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi (Unit)	-	-	-	2.249.999.770	3,00	2.249.999.770	-	-	0%	-	0,00%	
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	-	-	-	413.789.511	12,00	413.789.511	-	-	0%	-	0,00%	
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	-	-	-	12.900.000.000	12,00	12.900.000.000	-	-	0%	-	0,00%	
	4.01.01.2.12	Facilitas Kerumah Tanggahan Sekretariat Daerah													
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	-	-	-	3.020.000.000	1,00	500.000.000	-	-	0%	-	0,00%	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Daerah	Jumlah Paket Keputusan Rumah Tangga Daerah yang Disiapkan (Paket)	-	-	-	-	1,00	500.000.000	-	-	0%	0,00%	-	0,00%				
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Keputusan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disiapkan (Paket)	-	-	-	-	1,00	2.020.000.000	-	-	0%	37,52%	760.000.000	0%				
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	-	-	-	-	900.000.000	900.000.000	-	-	0%	0,00%	750.000.000	0,00%				
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	-	-	-	-	10,00	200.000.000	-	-	0%	0,00%	-	0%				
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	-	-	-	-	1,00	200.000.000	-	-	0%	0,00%	-	0%				
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	-	-	-	-	3,00	300.000.000	-	-	0%	116,67%	350.000.000	0%				
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah (Dokumen)	-	-	-	-	1,00	200.000.000	-	-	0%	200,00%	400.000.000	0%				
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	-	-	-	-	5,996.000.000	5.996.000.000	-	-			1.850.000.000					
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	-	-	-	-	1,00	446.000.000	-	-	0%	0,00%	-	0%				
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	-	-	-	-	1,00	4.400.000.000	-	-	0%	30,68%	1.350.000.000	0%				
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	-	-	-	-	1,00	350.000.000	-	-	0%	142,86%	500.000.000	0%				
	4.02.01	PROGRAM PENJILANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan (%)	0,40	-	-	-	-	30.409.272.747	-	-	0%	7,03%	23.424.749.954	0%			SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	-	-	-	124.471.820	124.471.820	-	-			97.940.000					
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	-	-	-	2,00	29.200.000	2,00	2,00	100%	47,95%	14.000.000	0%				
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	-	-	-	-	1,00	14.000.000	1,00	1,00	100%	0,00%	1,00	0%				



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RPKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-RKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	-	-	14.331.920	-	0%	14.000.000	0%	14.000.000	0%	0%							
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	-	-	5.500.000	-	100,00%	5.500.000	100,00%	5.500.000	0%	0%							
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	-	-	25.600.000	1,00	100%	14.600.000	57,03%	14.600.000	100%	0%							
			Jumlah Dokumen SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	-	-	14.000.000	-	0%	14.000.000	0%	14.000.000	0%	0%							
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktiklar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	-	-	5.951.897.854	-	0%	5.863.777.854	0%	5.863.777.854	100,00%	0%							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	-	5.775.537.854	-	100,00%	5.775.537.854	100,00%	5.775.537.854	0%	0%							
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	-	176.360.000	-	0%	88.180.000	0%	88.180.000	50,00%	0%							
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	271.740.000	-		271.740.000		271.740.000									
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	30.000.000	-		30.000.000		30.000.000									
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktiklar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	241.740.000	-		241.740.000		241.740.000									



No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Kinerja RKPD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 1/2 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 1/2 Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 1/2 Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 1/2 Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kgl.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	-	-	1.021.661.044	1.021.661.044											13
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	13.387.500	13.387.500	- ,00	-	62,50%	0%	- ,00	13.387.500	0%	0,00%			
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	72.156.000	72.156.000	- ,00	-	60,35%	0%	- ,00	72.156.000	0%	0,00%			
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	540.825.000	540.825.000	- ,00	-	0%	0%	- ,00		0%	0,00%			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Peraturan Daerah (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	72,09%	50%	1,00	1,00	0%	0%			
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	68.155.664	68.155.664	- ,00	-	45,36%	0%	- ,00	68.155.664	0%	0,00%			
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	327.136.880	327.136.880	- ,00	-	54,70%	0%	- ,00	327.136.880	0%	0,00%			
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-	2.130.277.185	2.130.277.185											
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	45.000.000	45.000.000	1,00	1,00	79,53%	50%	1,00	45.000.000	0%	0,00%			
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	139.860.000	139.860.000	3,00	3,00	81,89%	75%	3,00	139.860.000	0%	0,00%			
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	3.967.185	3.967.185	- ,00	-	100,00%	0%	- ,00	3.967.185	0%	0,00%			
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1.941.450.000	1.941.450.000	- ,00	-	53,80%	0%	- ,00	1.941.450.000	0%	0,00%			
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-	1.110.500.000	1.110.500.000											



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 5/6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan di evaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD y/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD/d Tahun n-1(%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pereliharaan, Biaya Pereliharaan, dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Dibayarkan Pajaknya (Unit)	-	-	-	-	5,00	106.370.000	-	-	65,90%	-	70.100.000	0%	0,00%			
	4.02.01.2.09.0006	Pereliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	-	-	-	2,00	46.970.000	-	-	86,01%	-	40.400.000	0%	0,00%			
	4.02.01.2.09.0009	Pereliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pereliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	1.000.000.000	-	-	100,00%	-	1.000.000.000	0%	0,00%			
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		-	-	-	-	15.544.623.208	15.544.623.208	-	-		11.060.054.871	0%	0,00%				
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menemima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	-	-	-	-	25,00	14.186.960.208	-	-	68,39%	-	9.702.411.871	0%	0,00%			
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakelan Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakelan Dinas dan Atribut DPRD yang Disiapkan (Paket)	-	-	-	-	5,00	543.375.000	-	-	100,00%	-	543.375.000	0%	0,00%			
	4.02.01.2.15.0003	Peiksaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	-	-	-	-	25,00	814.268.000	-	-	100,00%	-	814.268.000	0%	0,00%			
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD		-	-	-	-	1.868.859.000	1.868.859.000	-	-		1.868.859.000	0%	0,00%				
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	-	-	-	-	2,00	22.320.000	-	-	32,80%	-	7.320.000	0%	0,00%			
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD (Laporan)	-	-	-	-	4,00	157.705.000	-	-	100,00%	-	157.705.000	0%	0,00%			
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	-	-	-	-	2,00	1.463.834.000	-	-	100,00%	-	1.463.834.000	0%	0,00%			
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disiapkan (Paket)	-	-	-	-	1,00	240.000.000	-	-	100,00%	-	240.000.000	0%	0,00%			
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	-	-	8.601.775.177	8.601.775.177	-	-	42,42%	-	3.648.756.172	0,00%	0,00%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	-	-	-	-	129.999.665	129.999.665	-	-	100%	-	80.000.000	0%	0,00%			
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	-	-	-	1,00	49.999.665	1,00	1,00	0,00%	-	-	0%	0,00%			
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0%	0,00%			



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 1/6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 1/6 Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD 1/6 tahun n-1 (%)		Peringkat Daerah Pemangku Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	-	-	-	-	1,00	40.000.000	-	-	100,00%	-	40.000.000	0%	0,00%			
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	-	-	-	-	1,00	40.000.000	1,00	40.000.000	100,00%	1,00	40.000.000	100%	0,00%			
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Daerah		-	-	-	-	5.712.218.496	2.534.004.837		2.534.004.837			2.534.004.837		0,00%			
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	-	-	-	53,00	5.607.077.531	26,50	2.534.004.837	45,19%	26,50	2.534.004.837	50%	0,00%			
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	-	-	-	1,00	-	-	-	0,00%	-	-	0%	0,00%			
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD		-	-	-	-	105.140.965	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%			
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawain		-	-	-	-	379.111.632	-	-	-			-		0,00%			
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	100%	0,00%			
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Berdasarkan Tugas Menunggu yang Mendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	-	-	-	150,00	379.111.632	150,00	-	0,00%	150,00	-	0%	0,00%			
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum		-	-	-	-	1.081.570.932	-	-	-			396.623.320		0,00%			
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	1,00	262.532.932	-	-	0,00%	-	-	0%	0,00%			
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	2,00	372.265.000	0,50	173.350.000	25%	0,50	173.350.000	25%	0,00%			
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	3,00	93.061.000	0,75	43.060.000	25%	0,75	43.060.000	25%	0,00%			



No	Kode	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RKPD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 1/6 Tahun Lalu (n-2)		Tugas Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 1/6 tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RKPD 1/6 tahun n-1		Perangkat Daerah Pemangung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	5.01.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	0,00	-	0,00	75,00	363.712.000	50,00	180.213.320	49,55%	50,00	180.213.320	0%	0,00%			
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	0,00	-	0,00	1,00	15.000.000	0,25	12.000.000	80,00%	0,25	12.000.000	0%	0,00%			
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Listrik yang disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	-	0,00	-	0,00	3,00	132.096.000	0,75	102.574.399	77,65%	0,75	102.574.399	0%	0,00%			
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	0,00	-	0,00	7,00	1.069.588.452	8,00	471.402.616	44,07%	8,00	471.402.616	0%	0,00%			
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaran Dinas Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan oleh Kendaran Dinas Jabatan Pajaknya (Unit)	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%				
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaran Dinas Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan oleh Kendaran Dinas Jabatan Pajaknya (Unit)	-	0,00	-	0,00	2,00	82.190.000	1,00	52.151.000	63,45%	1,00	52.151.000	0%	0,00%			
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	-	0,00	-	0,00	2,00	26.882.759.187	-	14.424.047.432	53,66%	-	14.424.047.432	0%	0,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	0,00	-	0,00	6,00	24.998.205	-	24.998.205	100,00%	-	24.998.205	0%	0,00%			
	5.02.01.2.01.0001	Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	-	0,00	-	0,00	2,00	24.997.669	-	-	0,00%	-	-	0%	0,00%			
	5.02.01.2.01.0006	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	0,00	-	0,00	14,00	12.640.782.877	7,00	5.319.556.968	42,08%	7,00	5.319.556.968	0%	0,00%			



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RKJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 1/6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 1/6 tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RKPD 1/6 tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	-	-	-	5,00	24.994.097	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0,00%		13
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	-	-	-	-	1,00	25.026.870	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0,00%		
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	-	-		199.995.298					49.995.000					
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	-	-	-	-	1,00	199.995.298	-	-	25,00%	25,00%	-	-	0%	25,00%		
	5.02.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	-	-		2.603.624.782					1.934.631.740					
	5.02.01.2.05.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	1,00	564.255.186	-	-	68,24%	68,24%	-	-	0%	68,24%		
	5.02.01.2.05.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	1,00	294.983.000	0,75	0,75	22,83%	22,83%	67.340.000	67.340.000	0%	22,83%		
	5.02.01.2.05.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	1,00	194.004.936	0,25	0,25	15,46%	15,46%	30.000.000	30.000.000	0%	15,46%		
	5.02.01.2.05.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	-	-	-	-	1,00	499.969.000	1,00	1,00	100,00%	100,00%	499.969.000	499.969.000	0%	100,00%		
	5.02.01.2.05.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	1,00	1.000.413.000	0,75	0,75	90,19%	90,19%	902.264.080	902.264.080	0%	90,19%		
	5.02.01.2.05.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	-	-	-	1,00	49.999.660	1,00	1,00	100,00%	100,00%	49.999.660	49.999.660	0%	100,00%		
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-		9.947.613.304					6.944.766.934					
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	-	-	-	1,00	30.000.000	0,75	0,75	66,67%	66,67%	20.000.000	20.000.000	0%	66,67%		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	287.142.000	0,75	132.329.934	46,09%	0,75	132.329.934	0%	0,00%			
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlingkapan Kantor	Jumlah Laporan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	8.754.471.304	3,00	6.792.437.000	77,59%	3,00	6.792.437.000	0%	0,00%			
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	1.861.728.585	-	150.098.585	-	-	150.098.585	-	0,00%			
	5.02.01.2.09.0002	Pemeliharaan, Biaya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Gedung yang Dipelihara/Rehabilitasi/ Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	1.500.000.000	-	50.100.000	0,00%	-	50.100.000	0%	0,00%			
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung yang Dipelihara/Rehabilitasi/ Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	111.730.000	0,50	50.100.000	44,84%	0,50	50.100.000	0%	0,00%			
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	4,00	249.998.585	1,00	99.998.585	40,00%	1,00	99.998.585	0%	0,00%			
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	5.845.817.942	-	2.620.386.746	44,82%	-	2.620.386.746	-	0,00%	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	-	50.000.000	-	50.000.000	100,00%	-	50.000.000	-	0,00%			
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	4,00	50.000.000	4,00	50.000.000	100,00%	4,00	50.000.000	0%	0,00%			
	5.02.01.2.01.0006	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	- ,00	-	- ,00	-	43,00	4.999.200.043	21,50	2.313.586.746	46,28%	21,50	2.313.586.746	0%	0,00%			
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	- ,00	-	- ,00	-	43,00	4.999.200.043	21,50	2.313.586.746	46,28%	21,50	2.313.586.746	0%	0,00%			
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	- ,00	-	- ,00	-	43,00	4.999.200.043	21,50	2.313.586.746	46,28%	21,50	2.313.586.746	0%	0,00%			



No	Kode	Ususan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Tingkat Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja s/d 6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg direvisasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Direvisasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD y/d tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD y/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Pemanangjawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	4,00	19.998.000	- ,00	-	0,00%	-	-	0,00%				
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	5,00	25.000.000	- ,00	-	0,00%	-	-	0,00%				
	5.02.01.2.05	Administrasi Kewasewajaan Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	18.101.500	-	-	-	-	-	-				
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kewasewajaan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kewasewajaan (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	4,00	18.101.500	- ,00	-	0,00%	-	-	0,00%				
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%				
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	162.860.440	-	-	-	-	-	-				
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	20,00	49.990.000	- ,00	-	0,00%	-	-	0,00%				
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	2.319,00	24.976.440	- ,00	-	0,00%	-	-	0,00%				
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	16,00	87.894.000	- ,00	-	0,00%	-	-	0,00%				
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penujangan Ususan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-	-	520.665.879	-	-	-	-	-	-				
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	4.995.000	- ,00	-	0,00%	-	-	0,00%				
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	4,00	35.990.000	- ,00	-	0,00%	-	-	0,00%				
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	3,00	479.680.879	1,50	256.800.000	53,54%	1,50	256.800.000	0%				



No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Kapalasan)	Target Kinerja RKPD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 1/6 Tahun Lalu (t-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 1/6 tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 1/6 tahun n-1		Perangkat Daerah Pemangkas Swab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perseorangan Pemilik Perseorangan																	
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)																	
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG KEBERKEMBANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)																
	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)																
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)																
	5.03.01.2.05.0003	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
	5.03.01.2.05.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)																
	5.03.01.2.05.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)																
	5.03.01.2.05.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan (Paket)																



No	Kode	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	5.03.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	10,00	44.999.960	3,75	33.747.000	38%	74,99%	3,75	33.747.000	0%	0,00%		
	5.03.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	100,00	362.870.000	70,00	210.888.500	70%	58,12%	70,00	210.888.500	0%	0,00%		
	5.03.01.2.08		Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-		569.402.175		273.582.763				273.582.763				
	5.03.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	100,00	7.995.000	85,00	5.994.000	85%	74,97%	85,00	5.994.000	0%	0,00%		
	5.03.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	70.000.000	0,50	41.355.763	50%	59,08%	0,50	41.355.763	0%	0,00%		
	5.03.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	491.407.175	0,75	226.233.000	75%	46,04%	0,75	226.233.000	0%	0,00%		
	5.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-		280.910.908		79.500.000				79.500.000				
	5.03.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaran Perorangan Dinas dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	10,00	53.379.708	4,00	12.000.000	40%	22,48%	4,00	12.000.000	0%	0,00%		
	5.03.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	10,00	59.531.200	3,00	7.500.000	30%	12,60%	3,00	7.500.000	0%	0,00%		
	5.03.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	168.000.000	0,50	60.000.000	50%	35,7%	0,50	60.000.000	0%	0,00%		
	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	-	-		11.173.029.497		7.162.624.219				7.162.624.219				
	1.03.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	-		-		-				-				
	1.03.01.2.01.0001		Perencanaan Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
	1.03.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
	1.03.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-



No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan)	Target Kinerja RKPD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 5/6 Tahun Lalu (t-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP 5/6 tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 5/6 tahun n-1		Paragraf Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2																			
	103.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-		
	103.01.2.02	Administrasi Keuangan Daerah		-	-	-	-	6.255.314.219	6.255.314.219	6.255.314.219	6.255.314.219	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-		
	103.01.2.02.0001	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	-	-	-	7945.018.435	7945.018.435	7945.018.435	7945.018.435	75%	78,73%	57,75	6.255.314.219	0%	0,00%	-		
	103.01.2.02.0005	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	-	-	-	7945.018.435	7945.018.435	7945.018.435	7945.018.435	75%	78,73%	57,75	6.255.314.219	0%	0,00%	-		
	103.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-		
	103.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-		
	103.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-									
	103.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-		
	103.01.2.05	Administrasi Kepengawalan Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-									
	103.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-		
	103.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-		
	103.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	-	-	1.598.468.000	1.598.468.000	1.598.468.000	1.598.468.000									
	103.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-		
	103.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-		
	103.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-		
	103.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-		
	103.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material yang Disediakan (Paket)		-	-	-	-	499.944.000	499.944.000	499.944.000	499.944.000	100%	4,20%	1,00	21.000.000	0%	0,00%	-		
	103.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-		
	103.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	-	-	-	1.098.524.000	1.098.524.000	1.098.524.000	1.098.524.000	13%	29,43%	20,00	323.297164	0%	0,00%	-		
	103.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-									
	103.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-		
	103.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-		
	103.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-	1.528.303.062	1.528.303.062	1.528.303.062	1.528.303.062									
	103.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-	-	-	-	36.499.950	36.499.950	36.499.950	36.499.950	90%	24,20%	180,00	8.833.772	0%	0,00%	-		



No	Kode	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) (outcome)/ Kegiatan (output)	5		6		7		8		9		10		11		12	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	103.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Listrik yang disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	-	-	-	-	2,00	89.437.700	1,00	20.436.642	22,85%	1,00	20.436.642	0%	0,00%			
	103.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Sewa dan Perangkoan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sewa dan Perangkoan Kantor yang disediakan (Laporan)	-	-	-	-	114,00	1.402.365.412	64,50	533.742.422	57%	64,50	533.742.422	0%	0,00%			
	103.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	-	-	-	-	41,00	74.840.000	-	-	0,00%	-	-	0%	0,00%			
	103.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-	25,00	26.400.000	-	-	0,00%	-	-	0%	0,00%			
	103.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan (Unit)	-	-	-	-	25,00	26.400.000	-	-	0,00%	-	-	0%	0,00%			
	103.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	-	-	-	25,00	26.400.000	-	-	0,00%	-	-	0%	0,00%			
	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	-	-	6.621.484.204	6.621.484.204		1.797.945.390	27,15%		1.797.945.390	0,00%	0,00%	INSPEKTORAT DAERAH		
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	-	99.998.770	99.998.770		-	0,00%		-	0%	0,00%			
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	-	-	-	-	1,00	99.998.770	-	-	0,00%	-	-	0%	0,00%			
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	-	-	-	-	1,00	99.998.770	-	-	0,00%	-	-	0%	0,00%			
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	-	-	4.578.771.762	4.578.771.762		1.258.793.390	28,11%		1.258.793.390	0,00%	0,00%			
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	-	-	-	1,00	99.933.500	-	-	0,00%	-	-	0%	0,00%			
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	-	-	-	1,00	99.933.500	-	-	0,00%	-	-	0%	0,00%			
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	-	-	-	49.990.200	49.990.200		-	0,00%		-	0%	0,00%			
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	-	-	-	1,00	49.990.200	-	-	0,00%	-	-	0%	0,00%			



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/ Kegiatan (output)	5		6		7		8		9		10		11		Perangkat Daerah Pemanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2																		
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepengawalan Perangkat Daerah							469.987.000	199.972.000	199.972.000			199.972.000					
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%			
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	-	-	-	5,00	469.987.000	199.972.000	-	0%	-	-	42,55%	0,00%			
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						449.433.073	292.180.000	292.180.000				292.180.000					
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						32.461.946	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%			
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						99.985.625	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%			
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	1,00	9.999.250	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%			
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						14.806.252	292.180.000	292.180.000			1973,36%	292.180.000					
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	20,00	292.180.000	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%			
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						73.140.896	-	-	-			-					
	6.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	-	-	5,00	73.140.896	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%			
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						900.162.503	47.000.000	47.000.000				47.000.000					
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	-	-	-	1,00	49.999.572	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%			
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	-	-	-	1,00	49.999.000	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%			
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	-	-	-	2,00	99.200.000	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%			
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	-	-	-	2,00	700.973.931	0,50	47.000.000	25%	0,50	47.000.000	6,70%	0,00%			



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RKPD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 1/6 Tahun Lalu (n-2)		Tugas Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 1/6 tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RKPD 1/6 tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2																			
8.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
8.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
8.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	0,00	-	0,00	1,00	15.000.000	-	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0%	0,00%			
8.01.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	-	0,00	-	0,00%	1,00	15.000.000	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0%	0,00%			
8.01.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%			
8.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
8.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	-	0,00	-	0,00%	36,00	3.793.905.922	9,00	25%	85,45%	9,00	3.241.793.903	0%	0,00%				
8.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	0,00	-	0,00%	1,00	14.998.040	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,00%				
8.01.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	-	0,00	-	0,00%	2,00	14.996.000	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,00%				
8.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
8.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	0,00	-	0,00%	1,00	30.000.000	-	0%	50,00%	-	15.000.000	0%	0,00%				
8.01.01.2.06.0004		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	0,00	-	0,00%	1,00	10.000.000	-	0%	100,00%	-	10.000.000	0%	0,00%				
8.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	0,00	-	0,00%	3,00	168.471.000	-	0%	73,60%	-	124.000.000	0%	0,00%				



No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 1/6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-3)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-3)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 1/6 Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD 1/6 tahun n-1(%)		Perangkit Daerah Pemangung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	395.203.191	-	343.115.000	1,00	395.203.191	-	343.115.000	0%	343.115.000	0%	343.115.000	0,00%				13
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	9.990.000	-	9.990.000	1,00	9.990.000	-	9.990.000	100,00%	9.990.000	0%	9.990.000	0,00%				
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	49.998.000	-	45.000.000	3,00	49.998.000	-	45.000.000	92,00%	46.000.000	0%	46.000.000	0,00%				
	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	12.100.000	-	3.010.000	1,00	12.100.000	-	3.010.000	24,88%	3.010.000	0%	3.010.000	0,00%				
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	323.115.191	-	284.115.000	4,00	323.115.191	1,00	284.115.000	87,93%	284.115.000	0%	284.115.000	0,00%				
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaran Perorangan Dinas Pemeliharaan, Biaya Kendaran Perorangan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	-	34.977.498	-	28.000.000	1,00	34.977.498	-	28.000.000	80,05%	28.000.000	0%	28.000.000	0,00%				
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Perorangan Dinas	Jumlah Kendaran Perorangan Dinas Pemeliharaan, Biaya Kendaran Perorangan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	-	41.699.897,75	-	32.888.605,609	2,00	41.699.897,75	-	32.888.605,609	78,87%	32.888.605,609	0%	32.888.605,609	0,00%				
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	596.146.646	-	510.083.396	2,00	596.146.646	-	510.083.396	100,00%	510.083.396	0%	510.083.396	0,00%				
	1.02.01.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	-	72.000.000	-	72.000.000	2,00	72.000.000	-	72.000.000	100,00%	72.000.000	0%	72.000.000	0,00%				
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD (Dokumen)	-	40.000.250	-	-	1,00	40.000.250	-	-	0%	-	0%	-	0,00%				



No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg direvisasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja yang Direvisasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Pemanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	102.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	-	-	-	-	1,00	833.000	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-		13
	102.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	-	-	-	-	3,00	92.888.056	-	-	51,39%	-	47738.056	0,00%	-	47738.056		
	102.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	-	-	-	2,00	340.345.340	-	-	99,98%	-	340.345.340	0,00%	-	340.345.340		
	102.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	34.396.776.664	-	-	-	-	27.563.977.659	-	27.563.977.659			
	102.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	-	-	-	986,00	34.216.776.994	25,00	25,00	80,03%	25,00	27.384.208.659	0,00%	25,00	27.384.208.659		
	102.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	-	-	-	-	1,00	100.000.000	-	-	99,93%	-	99.930.000	0,00%	-	99.930.000		
	102.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	-	-	-	2,00	79.999.670	-	-	99,80%	-	79.839.000	0,00%	-	79.839.000		
	102.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	487.000.000	-	-	-	-	320.100.000	-	320.100.000			
	102.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	-	-	-	-	4,00	300.000.000	-	-	100,00%	-	300.000.000	0,00%	-	300.000.000		
	102.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	-	-	-	3,00	187.000.000	-	-	10,75%	-	20.100.000	0,00%	-	20.100.000		
	102.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	1.444.807.000	-	-	-	-	1.038.477.149	-	1.038.477.149			
	102.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disiapkan (Paket)	-	-	-	-	5,00	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-		



No	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Kinerja RKPD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja 1/2 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yg Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 1/2 tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD 1/2 tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Pemanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	102.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	0,00	-	76.128.931	3,00	76.128.931	-	0,00%	0%	0,00%	-	0,00%	0,00%			
	102.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	0,00	-	288.717.460	3,00	288.717.460	-	0,00%	0%	96,77%	-	0,00%	0,00%			
	102.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	0,00	-	49.999.609	1,00	49.999.609	-	0,00%	0%	100,00%	-	0,00%	0,00%			
	102.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Penyelesaian yang Disediakan (Laporan Tamu)	-	0,00	-	143.869.000	1,00	143.869.000	-	0,00%	0%	99,51%	-	0,00%	0,00%			
	102.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	0,00	-	886.092.000	4,00	886.092.000	-	0,00%	0%	63,22%	-	0,00%	0,00%			
	102.01.2.06	Penyediaan Jasa Penujangan Usuan Pemerintahan Daerah		-	-	-	4.475.175.800	-	4.475.175.800	-	-	-	-	-	3.155.975.800	-			
	102.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	0,00	-	29.999.100	1,00	29.999.100	-	0,00%	0%	100,00%	-	0,00%	0,00%			
	102.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	0,00	-	199.976.700	3,00	199.976.700	-	0,00%	0%	100,00%	-	0,00%	0,00%			
	102.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	0,00	-	4.245.200.000	2,00	4.245.200.000	1,00	50%	50%	68,92%	1,00	2.926.000.000	0%	0,00%		
	102.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Usuan Pemerintahan Daerah		-	-	-	299.991.605	-	299.991.605	-	-	-	-	-	299.991.605	-			
	102.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Perawatan, Perbaikan, Penggantian, dan Pemeliharaan Peralatan, Peralatan, dan Perbaikan Peralatan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelekan dan Perbaikan Pajak dan Perizinannya (Unit)	-	0,00	-	299.991.605	20,00	299.991.605	-	0,00%	0%	100,00%	-	0,00%	0,00%			
	104.01	PROGRAM PENUNJANG USUAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	-	5.805.630.831	-	5.805.630.831	-	-	-	73,22%	-	4.250.968.594	-	0,00%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	104.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	-	0,00	-	16.960.000	1,00	16.960.000	1,00	100%	100%	50,00%	1,00	8.480.000	0%	0,00%		
	104.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	0,00	-	8.480.000	1,00	8.480.000	1,00	100%	100%	100,00%	1,00	8.480.000	0%	0,00%		
	104.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0%	0,00%	-	-	-	0,00%		



No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan)	Target Kinerja RKPD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 1/6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 1/6 Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 1/6 Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Pemanggung Jawab	Kd.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	104.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	-	-	-	-	1,00	8.480.000	-	-	0,00%	0,00%	-	0%	0,00%			13
	104.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu (%) (5-SKPD (Laporan))	-	-	-	-	38,00	4.303.654.156	38,00	3.263.638.594	100%	75,85%	38,00	3.263.638.594	0%	0,00%		
	104.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	-	-	-	38,00	4.053.394.156	38,00	3.191.878.594	100%	78,75%	38,00	3.191.878.594	0%	0,00%		
	104.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasi Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	-	-	-	-	1,00	165.000.000	-	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,00%		
	104.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	-	-	-	-	10,00	85.260.000	8,00	71.760.000	80%	84,17%	8,00	71.760.000	0%	0,00%		
	104.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu (%) (8-B)	-	-	-	-	2,00	47.410.000	2,00	47.410.000	100%	100,00%	2,00	47.410.000	0%	0,00%		
	104.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	-	-	-	-	2,00	47.410.000	2,00	47.410.000	100%	100,00%	2,00	47.410.000	0%	0,00%		
	104.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Perencanaan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	-	332.391.000	-	86.350.000	0%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	104.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	2,00	42.330.000	-	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,00%		
	104.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	40,00	185.061.000	15,00	86.350.000	38%	46,66%	15,00	86.350.000	0%	0,00%		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	5		6		7		8		9		10		11		12	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	104.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	104.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	-	-	-	987.485.975	1,00	18.000.000	-	0%	-	727.560.000	0%				
	104.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	-	-	-	28.800.000	12,00	28.800.000	13,00	108%	19.120.000	66,39%	19.120.000	0%			
	104.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	-	-	-	940.685.975	12,00	940.685.975	10,00	83%	708.440.000	75,31%	708.440.000	0%			
	104.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						117.530.000	-	-	-			117.530.000					
	104.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak Operasional atau Lapangan (Unit)	-	-	-	-	117.730.000	3,00	117.730.000	1,50	50%	117.530.000	99,83%	117.530.000	0%			
	105.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA						6.431.016.141	-	-	-			4.368.682.530	67,93%	4.368.682.530			SATUAN POLISI RAMONG PRAJA
	105.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.800.000	-	-	-			8.800.000		8.800.000			
	105.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						-	-	-	-			-	-	-			
	105.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	-	-	-	-	3.314.486.036	1,00	3.314.486.036	1,00	100%	2.320.456.530	70,01%	2.320.456.530	0%			
	105.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.314.486.036	29,00	3.314.486.036	29,00	100%	2.320.456.530	70,01%	2.320.456.530	0%			
	105.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	-	-	-	110.000.000	-	-	-			-	-	-			
	105.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						110.000.000	-	-	-			-	-	-			
	105.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						110.000.000	-	-	-			-	-	-			
	105.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						472.446.000	-	-	-			252.206.000		252.206.000			
	105.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	370.240.000	2,00	370.240.000	2,00	100%	150.000.000	40,51%	150.000.000	0%			



No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	105.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	.00	-	.00	1,00	2.000.000,00	1,00	2.000.000,00	100,00%	100,00%	1,00	2.000.000,00	0%	0,00%		
	105.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Dinas dan Komunikasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Dinas dan Komunikasi SKPD (Laporan)	-	.00	-	.00	7,00	100.206.000,00	7,00	100.206.000,00	100,00%	100,00%	7,00	100.206.000,00	0%	0,00%		
	105.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-		-			2.500.883.105		2.500.883.105				1.767.500.000,00				
	105.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	.00	-	.00	1,00	4.500.000,00	1,00	4.500.000,00	100,00%	100,00%	1,00	4.500.000,00	0%	0,00%		
	105.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	.00	-	.00	3,00	2.496.383.105	3,00	2.496.383.105	100,00%	70,62%	3,00	1.763.000.000,00	0%	0,00%		
	105.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-		-			25.001.000		25.001.000				19.720.000,00				
	105.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya yang Dipelihara dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan (Unit)	-	.00	-	.00	2,00	25.001.000,00	2,00	25.001.000,00	100,00%	78,88%	2,00	19.720.000,00	0%	0,00%		
	105.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-		-			3.277.407.334		3.277.407.334				2.260.720.238				
	105.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-		-			10.000.000		10.000.000				10.000.000,00				
	105.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	.00	-	.00	1,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	100,00%	100,00%	1,00	10.000.000,00	0%	0,00%		
	105.01.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		-		-			-		-								
	105.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-		-			2.296.092.393		2.296.092.393				1.673.270.238				
	105.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	.00	-	.00	20,00	2.281.093.268	15,00	1.668.320.238	75%	72,70%	15,00	1.658.320.238	0%	0,00%		
	105.01.2.02.0007		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	-		-						100%	99,67%	4,00	14.950.000,00	0%	0,00%		
	105.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-		-													



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 5/6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 5/6 Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD 5/6 Tahun n-1(%)		Perangiot Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	105.01.2.05.0002	Penyediaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-			
	105.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	-	-	544.949.341	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-			
	105.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	1,00	9.514.050	2,00	2,00	2,00	95,85%	2,00	9.500.000	2,00	2,00	95,85%	9.500.000	0%	0,00%	
	105.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	1,00	4.998.291	2,00	2,00	2,00	98,03%	2,00	4.900.000	2,00	2,00	98,03%	4.900.000	0%	0,00%	
	105.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	2,00	281.954.000	0,75	0,75	0,75	55,19%	0,75	155.612.000	0,75	0,75	55,19%	155.612.000	0%	0,00%	
	105.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	-	2,00	248.483.000	0,50	0,50	0,50	40,46%	0,50	100.538.000	0,50	0,50	40,46%	100.538.000	0%	0,00%	
	105.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	426.365.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306.900.000	-	-
	105.01.2.06.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	-	1,00	426.365.000	0,75	0,75	0,75	71,98%	0,75	306.900.000	0,75	0,75	71,98%	306.900.000	0%	0,00%	
106.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	-	4.345.609.512	-	-	-	-	38,39%	1.668.474.821	-	-	-	1.668.474.821	0,00%	DINAS SOSIAL	
106.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	-	3.505.001.109	-	-	-	-	-	1.072.297.542	-	-	-	1.072.297.542	-	-	
106.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	- ,00	-	29,00	-	5,75	5,75	5,75	20%	5,75	1.072.297.542	5,75	5,75	20%	1.072.297.542	0%	0,00%	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	-	1,00	3.505.001.109	0,25	0,25	0,25	30,55%	0,25	1.072.297.542	0,25	0,25	30,55%	1.072.297.542	0%	0,00%	
106.01.2.05		Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	-	271.818.000	-	-	-	-	-	91.528.678	-	-	-	91.528.678	-	-	
106.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	2,00	173.970.000	1,00	1,00	1,00	50%	1,00	41.528.678	1,00	1,00	25,87%	41.528.678	0%	0,00%	
106.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	2,00	97.848.000	-	-	-	-	0%	50.000.000	-	-	-	50.000.000	0%	0,00%	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	-	1,00	97.848.000	- ,00	- ,00	- ,00	51,10%	- ,00	50.000.000	- ,00	- ,00	- ,00	50.000.000	0%	0,00%	
106.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	488.802.279	-	-	-	-	-	480.052.279	-	-	-	480.052.279	-	-	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RKPD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 1/6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 1/6 Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RKPD 1/6 tahun n-1 (%)		Peringkat Daerah Pemangung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2																			
	106.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	106.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Disediakan (Laporan)																		
	106.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor																		
	106.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	106.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
	106.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Keluarga)																		
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
	2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/ Kegiatan (output)	5		6		7		8		9		10		11		12	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2																		
	2.07.01.2.06.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		-	-	-	8.109.716	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%				
	2.07.01.2.06	Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%				
	2.07.01.2.06.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Keleluasaannya		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%				
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	-	208.102.341	-	-	110.152.841	-	0%	-	110.152.841	0,00%				
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan (Paket)	-	-	-	13.631.500	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%				
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	-	1,00	4.066.000	-	-	4.066.000	-	0%	-	-	0,00%				
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	1,00	114.690.000	-	-	90.000.000	-	0%	-	-	0,00%				
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	-	1,00	5.480.841	-	-	3.286.841	-	0%	-	-	0,00%				
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	4,00	12.800.000	-	-	12.800.000	-	0%	-	-	0,00%				
	2.07.01.2.06.0009	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	-	1,00	5.7434.000	-	-	5.7434.000	-	0%	-	-	0,00%				
	2.07.01.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	520.458.500	-	-	371.284.000	-		-	371.284.000					
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	-	1,00	24.840.000	-	-	13.084.000	-	0%	-	-	0,00%				
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	-	1,00	3.650.500	-	-	-	-	0%	-	-	0,00%				
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	-	2,00	491.986.000	-	-	358.200.000	0,50	25%	-	-	0,00%				
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	21.000.000	-	-	57.434.000	-		-	57.434.000					
	2.07.01.2.09.0007	Pemeliharaan Asat Tetap Lainnya	Jumlah Asat Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	-	2,00	21.000.000	-	-	57.434.000	-	0%	-	-	0,00%				



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Peningkatan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2																	12	13
	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	0,00	3.708.706.761	-	3.00	3.860.000	-	0,00	79,29%	2.940.625.839	0,00%	2.940.625.839	0,00%			
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
	2.08.01.2.01.0006		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	-	0,00	3.860.000	-	3,00	3.860.000	-	0,00	0,00%	7.660.000	0,00%	7.660.000	0,00%			
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	0,00	3.118.627.293	-	28,00	3.118.627.293	14,00	79,55%	2.480.890.619	50%	2.480.890.619	0,00%	2.480.890.619	0,00%		
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	-	0,00	-	-	1,00	-	-	0,00%	-	0%	-	0,00%	-	0,00%		
	2.08.01.2.05	Administrasi Kesegawaian Perangkat Daerah																	
	2.08.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	0,00	90.595.000	-	1,00	13.245.000	-	28,12%	38.255.220	0%	38.255.220	0,00%	38.255.220	0,00%		
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	0,00	6.342.000	-	1,00	6.342.000	-	23,75%	1.506.500	0%	1.506.500	0,00%	1.506.500	0,00%		
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	0,00	71.008.000	-	1,00	71.008.000	-	46,51%	33.024.720	0%	33.024.720	0,00%	33.024.720	0,00%		
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	0,00	69.604.308	-	5,00	69.604.308	-	99,99%	69.600.000	0%	69.600.000	0,00%	69.600.000	0,00%		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Program) (output)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 1/6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang direvisasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 1/6 Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD 1/6 Tahun n-1 (%)		Parangkat Daerah Pemangku Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2																	
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)					1,00	7.500.000	- ,00	2.248.000	0%	29,97%	0%	2.248.000	0%		
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)					1,00	7.500.000	- ,00	2.950.000	0%	39,33%	0%	2.950.000	0%		
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)					3,00	380.570.160	1,50	329.722.000	50%	86,64%	0%	329.722.000	0%		
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							22.790.000		9.300.000				9.300.000			
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Perantara atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Perantara yang Dikeluarkan dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)					1,00	9.750.000	- ,00	6.500.000	0%	66,67%	0%	6.500.000	0%		
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							9.750.000					0,00%				
	2.08.01.2.09.0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)					5,00	3.290.000	- ,00	2.800.000	0%	85,11%	0%	2.800.000	0%		
	2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												0,00%				
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5.616.348.368		1.499.929.190			26,71%	1.499.929.190			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												0,00%				
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3.864.872.979		1.096.929.190				1.096.929.190			
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)					37,00	3.864.872.979	- ,00	1.096.929.190	0%	28,38%	0%	1.096.929.190	0%		
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian																
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya												0,00%				
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum							313.984.000									



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) Kegiatan (output)	5		6		7		8		9		10		11		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Kd.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	2,00	124.995.000	-	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,00%		13
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	1,00	16.999.000	-	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,00%		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	15,00	171.940.000	-	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,00%		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-		1.422.079.389	403.000.000	403.000.000	0%	0,00%	403.000.000	403.000.000	0%	0,00%		
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Suret Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Suret Menyurat (Laporan)	-	-	-	-	1,00	4.500.000	-	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,00%		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	-	-	-	1,00	36.015.000	-	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,00%		
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	-	-	-	3,00	48.000.000	-	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,00%		
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	-	-	-	5,00	1.333.564.389	-	-	0%	30,22%	-	403.000.000	0%	0,00%		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-		15.462.000	-	-			-	-				
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan Pakainya (Unit)	Jumlah Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan (Unit)	-	-	-	-	1,00	15.462.000	-	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,00%		
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	-	-		3.983.194.507	989.023.144	989.023.144		24,83%	989.023.144	989.023.144		0,00%	DISTRIK BONGGO TIMUR	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Peringkat Daerah		-	-	-	-		2.805.944.198	687.023.144	687.023.144			687.023.144	687.023.144		0,00%		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	-	-	-	34,00	2.805.944.198	-	-	0%	24,46%	-	687.023.144	0%	0,00%		
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Peringkat Daerah		-	-	-	-		-	-	-			-	-				
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		-	-	-	-		-	-	-			-	-				
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Peringkat Daerah		-	-	-	-		335.634.750	79.140.000	79.140.000		0,00%	-	79.140.000		0,00%		



No	Kode	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 1/6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD y/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD y/d Tahun n-1 (%)		Parangkat Daerah Pemangung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	701.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	2,00	22.668.750	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-		
	701.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	2,00	164.526.000	-	-	0,00%	-	9.000.000	0,00%	-	-		
	701.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	1,00	3.000.000	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-		
	701.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	5,00	145.440.000	-	-	48,23%	-	70.140.000	0,00%	-	-		
	701.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-	-	833.560.559	-	-	-	-	222.860.000	-	-	-		
	701.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	-	-	-	5,00	3.000.000	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-		
	701.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	-	-	-	1,00	4.723.150	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-		
	701.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	-	-	-	2,00	825.835.409	-	-	26,99%	-	222.860.000	0,00%	-	-		
	701.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-	-	5.055.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	701.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan Pakayats (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakayats (Unit)	-	-	-	-	5,00	5.055.000	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-		
	701.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-		
	701.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA		-	-	-	-	-	3.686.704.855	-	-	29,54%	-	1.089.158.872	0,00%	-	-	DISTRIK PANTAI TIMUR	
	701.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	2.269.898.085	-	-	-	-	676.858.872	-	-	-		
	701.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	-	-	-	26,00	2.269.898.085	-	-	0,00%	-	676.858.872	0,00%	-	-		
	701.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	89.276.496	-	-	29,82%	-	13.000.000	0,00%	-	-		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RKJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 1/6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 1/6 Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RKPD 1/6 Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Pemangung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	701.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	-	-	-	1,00	89.276.496	-	-	0%	14,56%	-	13.000.000	0%	0,00%		
	701.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	1,00	33.625.880	-	-	0%	0,00%	-	20.000.000	0%	0,00%		
	701.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	5,00	140.919.750	-	-	0%	14,19%	-	20.000.000	0%	0,00%		
	701.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	12,00	81.640.000	-	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,00%		
	701.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	12,00	81.640.000	-	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,00%		
	701.01.2.08	Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	1,00	1.071.344.644	-	-	0%	16,67%	-	379.300.000	0%	0,00%		
	701.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	1,00	6.000.000	-	-	0%	0,00%	-	1.000.000	0%	0,00%		
	701.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	1,00	1.065.344.644	-	-	0%	35,51%	-	378.300.000	0%	0,00%		
	701.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	-	4.951.874.431	-	-	0%	25,95%	-	1.285.105.936	0%	0,00%	DISTRIK PANTAI BARAT	
	701.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	-	3.404.779.676	-	-	0%	28,04%	-	954.605.936	0%	0,00%		
	701.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	-	-	-	25,00	3.404.779.676	-	-	0%	0,00%	-	954.605.936	0%	0,00%		
	701.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	-	228.426.575	-	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,00%		
	701.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	2,00	15.573.575	-	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,00%		
	701.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	1,00	132.993.000	-	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,00%		
	701.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	1,00	79.860.000	-	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,00%		
	701.01.2.08	Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	-	1.278.686.158	-	-	0%	0,00%	-	330.500.000	0%	0,00%		
	701.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	25,00	23.194.124	-	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,00%		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Kegiatan (output)	5		6		7		8		9		10		11		Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	701.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	-	-	-	1,00	9.014.125	-	-	0%	-	-	0%	0,00%		13
	701.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	-	-	-	3,00	12.464.779.909	-	-	0%	-	330.500.000	0%	0,00%		
	701.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-	39.982.022	39.982.022	-	-	0%	-	-	-	0,00%		
	701.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	-	-	-	-	1,00	39.982.022	-	-	0%	-	-	-	0,00%		
	701.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA		-	-	-	-	3.552.345.819	3.552.345.819	-	-	56,67%	2.013.088.766	2.013.088.766	0,00%	DISTRIK TOR ATAS		
	701.01.2.02	Administrasi Keuangan Daerah		-	-	-	-	2.392.065.740	2.392.065.740	-	-	52,95%	1.266.624.156	1.266.624.156	0%			
	701.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	-	-	-	29,00	2.392.065.740	-	-	0%	-	-	0%			
	701.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
	701.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
	701.01.2.06	Administrasi Umum Daerah		-	-	-	-	415.866.760	415.866.760	-	-	0%	-	187.300.000	0%			
	701.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	1,00	189.250.160	-	-	4,39%	-	8.300.000	0%			
	701.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	1,00	64.989.000	-	-	60,01%	-	39.000.000	0%			
	701.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	1,00	21.602.600	-	-	0%	-	-	0,00%			
	701.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	1,00	140.025.000	-	-	99,98%	-	140.000.000	0%			
	701.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-	691.164.931	691.164.931	-	-	0%	-	551.664.610	0%			
	701.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	-	-	-	1,00	691.164.931	-	-	79,82%	-	551.664.610	0%			



No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Kegiatan (output)	Target Kinerja RKPD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 5/1 Tahun Lalu (t-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD 5/1 tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD 5/1 tahun n-1 (%)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2														
	701.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
	701.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	-	-	-	2,00	53.248.388	-	0,00%	0%	7500.000		
	701.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
	701.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
	701.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	-	-	-	4,00	18.000.000	-	0,00%	0%	1.328.121.819		
	701.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
	701.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	-	-	-	12,00	3.288.696.490	-	26,65%	0%	876.321.819		
	701.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
	701.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Berorta Atribut Kepegawaian													
	701.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
	701.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	2,00	254.000.000	-	8,00%	0%	28.000.000		
	701.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	-	-	200.000.000	-	22,22%	0%	16.000.000		
	701.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
	701.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	-	-	8,00	15.093.130	-	0,00%	0%	-		
	701.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
	701.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	-	-	-	12,00	1.370.400.000	-	30,93%	0%	423.800.000		
	701.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
	701.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
	701.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	-	-	-	22,00	2.134.051.990	-	27,42%	0%	581.257.791		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RKPD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 1/6 Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-3)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-3)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 1/6 Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD 1/6 tahun n-1 (%)		Peringkat Daerah Pemangung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	701.01.2.02.0005																			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	- ,00	- ,00	- ,00	14.000.000	1,00	3.939.267.600	- ,00	7.000.000	50,00%	- ,00	7.000.000	0%	0,00%				
	701.01.2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah		-	-	-														
	701.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-														
	701.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	-														
	701.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	- ,00	- ,00	249.985.000	1,00	3.939.267.600	- ,00	147.500.000	43,20%	- ,00	108.000.000	0%	0,00%				
	701.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	- ,00	- ,00	- ,00	5.022.600	1,00	5.022.600	- ,00	2.500.000	49,78%	- ,00	2.500.000	0%	0,00%				
	701.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Komultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komultasi SKPD (Laporan)	- ,00	- ,00	- ,00	74.260.000	1,00	74.260.000	- ,00	370.000.000	49,82%	- ,00	370.000.000	0%	0,00%				
	701.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-														
	701.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	- ,00	- ,00	- ,00	21.269.323	4,00	21.269.323	- ,00	21.269.000	100,00%	- ,00	21.269.000	0%	0,00%				
	701.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-														
	701.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	- ,00	- ,00	- ,00	16.485.000	1,00	16.485.000	- ,00	8.000.000	48,53%	- ,00	8.000.000	0%	0,00%				
	701.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	- ,00	- ,00	823.637.522	1,00	823.637.522	- ,00	339.900.000	41,27%	- ,00	339.900.000	0%	0,00%				
	701.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-														
	701.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		-	-	-														
	701.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	-														
	701.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	-														
	701.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	- ,00	- ,00	- ,00	3.074.628.185	22,00	3.074.628.185	- ,00	1.453.119.975	47,26%	- ,00	1.453.119.975	0%	0,00%				



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RKJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 1/6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 1/6 Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RKPD 1/6 tahun n-1 (%)		Peringkat Daerah Pemangku Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	701.01.2.02.0005																			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	1,00	24.789.375	- ,00	13.200.000	0%	53,25%	- ,00	13.200.000	0%	0,00%			
	701.01.2.05	Administrasi Kepengawalan Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	19.507.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	701.01.2.05.0002	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	27,00	19.507.500	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%			
	701.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	236.152.975	-	28.750.000	-	-	28.750.000	-	-	-	-	-	-
	701.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	1,00	9.983.475	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%			
	701.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perengklapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perengklapan Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	1,00	39.151.860	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%			
	701.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	1,00	19.906.537	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%			
	701.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	1,00	84.110.000	- ,00	10.000.000	0%	11,89%	- ,00	10.000.000	0%	0,00%			
	701.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	1,00	20.501.103	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%			
	701.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	1,00	62.500.000	- ,00	18.750.000	0%	30,00%	- ,00	18.750.000	0%	0,00%			
	701.01.2.08	Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-	-	710.597.162	-	455.545.000	-	-	455.545.000	-	-	-	-	-	-
	701.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	1,00	4.740.000	- ,00	1.185.000	0%	25,00%	- ,00	1.185.000	0%	0,00%			
	701.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	1,00	6.900.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%			
	701.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	698.957.162	- ,00	454.360.000	0%	65,01%	- ,00	454.360.000	0%	0,00%			



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Tingkat Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2																			13
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Perorangan Dinas atau Kendaraan Pemeliharaan, dan Pajak Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibersihkan	- ,00	-	- ,00	-	1,00	42.512.943	- ,00	- ,00	0,00%	-	-	0,00%					
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	14.742.263	- ,00	- ,00	0,00%	-	-	0,00%					
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	7.01.01.2.01.0006		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	- ,00	-	- ,00	-	1,00	25.888.918	- ,00	- ,00	0,00%	-	-	0,00%					
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	- ,00	-	- ,00	-	17,00	2.146.837.608	- ,00	- ,00	27,50%	-	-	27,50%					
	7.01.01.2.05	Administrasi Keselamatan																		
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Berseata Atribut Kelengkapannya																		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum																		
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	86.702.375	- ,00	- ,00	28,83%	-	-	28,83%					
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	5,00	25.005.223	- ,00	- ,00	27,99%	-	-	27,99%					
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	10,00	30.000.000	- ,00	- ,00	0,00%	-	-	0,00%					
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	4,00	14.040.000	- ,00	- ,00	21,37%	-	-	21,37%					



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD n-1		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg direvisasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Direvisasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD n/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD n/d Tahun n-1 (%)		Perangkolet Daerah Pemangkuang Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	701.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	0,00	-	0,00	4,00	50.766.425	-	0,00	25,21%	-	12.800.000	0%	0,00%			
	701.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	0,00	-	0,00	3,00	615.424.943	-	0,00	39,60%	-	243.700.000	0%	0,00%			
	701.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-		-			31.993.353					8.000.000					
	701.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dipangkas oleh Pegawai (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dipangkas oleh Pegawai (Unit)	-	0,00	-	0,00	4,00	31.993.353	-	0,00	25,01%	-	8.000.000	0%	0,00%			
	701.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan		-		-						0,00%	-			0,00%			
	701.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-		-			5.308.923.791			94,11%		4.996.198.605		0,00%	DISTRIBUKAN KE BAGIAN BARAT		
	701.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Kegiatan Prangkolet Daerah		-		-			14.120.000					5.320.000					
	701.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	-	0,00	-	0,00	1,00	8.800.000	1,00	100%	0,00%	1,00	-	0%	0,00%			
	701.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	-	0,00	-	0,00	1,00	5.320.000	-	0%	100,00%	-	5.320.000	0%	0,00%			
	701.01.2.02	Administrasi Keuangan Prangkolet Daerah		-		-			3.560.760.605					3.543.540.605					
	701.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	0,00	-	0,00	37,00	3.543.540.605	-	0%	100,00%	-	3.543.540.605	0%	0,00%			
	701.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	-	0,00	-	0,00	12,00	17.220.000	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,00%			



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RKPD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 5/6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 5/6 Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RKPD 5/6 Tahun n-1 (%)		Perangik Daerah Pemangung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	701.01.2.05	Administrasi Kesegawalan Perangkat Daerah		-	-	-	45.390.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	701.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya		-	-	-	45.390.000	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%		
	701.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	-	219.359.365	-	-	172.642.000	172.642.000	0%	-	172.642.000	-	-	0,00%		
	701.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	1,00	14.961.765	-	-	-	-	99,85%	-	14.940.000	-	-	0%		
	701.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	1,00	134.760.000	-	-	-	-	79,25%	-	106.800.000	-	-	0%		
	701.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	-	1,00	14.977.600	-	-	-	-	73,59%	-	11.022.000	-	-	0%		
	701.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	1,00	54.660.000	-	-	-	-	72,96%	-	39.880.000	-	-	0%		
	701.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	701.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%		
	701.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	1.380.770.321	-	-	1.201.342.000	1.201.342.000	0%	-	1.201.342.000	-	-	0,00%		
	701.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	-	1,00	12.000.000	-	-	-	-	100,00%	-	12.000.000	-	-	0%		
	701.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	-	1,00	12.000.000	-	-	-	-	90,00%	-	10.800.000	-	-	0%		
	701.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlekapan Kantor		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%		
	701.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	-	5,00	1.356.770.321	-	-	-	-	86,86%	-	1.178.542.000	-	-	0%		
	701.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	88.523.500	-	-	73.354.000	73.354.000	0%	-	73.354.000	-	-	0,00%		
	701.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	-	-	1,00	19.827.500	-	-	-	-	92,06%	-	18.254.000	-	-	0%		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RKPD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 5/6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD y/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RKPD y/d Tahun n-1 (%)		Peringkat Daerah Pemangku Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	-	-	-	-	1,00	68.696.000	-	-	80,21%	-	55.100.000	0%	0,00%			
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																	
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	-	-	-	-	1,00	1.664.655.000	-	-	41,65%	-	693.315.000	0%	0,00%			
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	-	-	-	-	8,00	3.797.424.000	-	-	29,77%	-	1.130.517.000	0%	0,00%			
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	-	-	-	-	7,00	1.469.395.000	-	-	21,52%	-	316.170.000	0%	0,00%			
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	-	-	-	-	5,00	2.206.162.000	-	-	25,03%	-	552.210.000	0%	0,00%			
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Terpasang (Buket)	-	-	-	-	2,00	542.130.000	-	-	0,00%	-	-	0%	0,00%			
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Lomba Kompetensi/ Lomba Akademik (Preserta Didik)	-	-	-	-	150,00	722.072.947	-	-	38,66%	-	279.184.169	0%	0,00%			
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	-	-	-	-	347,00	11.457.600.000	173,50	173,50	54,33%	173,50	6.224.500.000	0%	0,00%			
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenakan Pangkat/ Golongan, Promosi, Penempatan, Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	-	-	-	-	230,00	1.333.707.900	127,00	127,00	66,37%	127,00	911.838.226	0%	0,00%			
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	-	-	-	-	68,00	1.354.317.480	-	-	25,12%	-	340.260.000	0%	0,00%			



No	Kode	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RKPD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 1/6 Tahun Lalu (t-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 1/6 tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD 1/6 Tahun n-1 (%)		Persepsi Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2														13
1.01.02.2.01.0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	- ,00	-	- ,00	-	69,00	9.084.058.000	- ,00	9.079.058.000	0%	0,00%		
1.01.02.2.01.0030		Peningkatan Kapasitas Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Mengikuti Kegiatan dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	140,00	199.999.800	100,00	199.999.800	71%	0,00%		
1.01.02.2.01.0031		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	1.019.580.000	- ,00	284.430.000	0%	0,00%		
1.01.02.2.01.0037		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	-	-	-	-	-	299.999.380	-	-	0%	0,00%		
1.01.02.2.01.0038		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	30,00	1.216.296.511	- ,00	600.000.000	0%	0,00%		
1.01.02.2.01.0045		Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Perengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	6.570,00	5.599.988.728	- ,00	-	0%	0,00%		
1.01.02.2.01.0046		Pengadaan Perengkapan Peserta Didik	Jumlah Perengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	6.570,00	5.599.988.728	- ,00	-	0%	0,00%		
1.01.02.2.01.0047		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru	- ,00	-	- ,00	-	68,00	3.439.229.200	- ,00	865.134.000	0%	0,00%		
1.01.02.2.01.0050		Penyenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik (Satuan Pendidikan)	- ,00	-	- ,00	-	68,00	917.999.144	- ,00	917.999.144	0%	0,00%		
1.01.02.2.01.0051		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	- ,00	-	- ,00	-	6,00	4.404.310.000	- ,00	-	0%	0,00%		
1.01.02.2.01.0054		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	- ,00	-	- ,00	-	920,00	1.504.754.000	- ,00	-	0%	0,00%		
1.01.02.2.01.0055		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	3,00	591.556.875	- ,00	-	0%	0,00%		
1.01.02.2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		-	-	-	-	-	21.497.275.541	-	10.383.253.104				
1.01.02.2.02.0003		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	744.061.300	- ,00	196.103.400	0%	0,00%		
1.01.02.2.02.0008		Pembangunan Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	1.539.270.000	- ,00	579.320.000	0%	0,00%		



No	Kode	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (output)	Target Kinerja RKPD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 1/4 Tahun Lalu (t-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 1/4 tahun (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RKPD 1/4 tahun (n-1)		Peringkat Daerah Pemangku Jember	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	1.149.850.000	- ,00	181.290.000	0%	15,77%	- ,00	181.290.000	0%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	361.450.000	- ,00	83.520.000	0%	23,17%	- ,00	83.520.000	0%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Peserta Didik (Peserta Didik)	-	-	-	-	-	235.492.500	-	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Persekolahan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Peserta Didik (Peserta Didik)	- ,00	-	- ,00	-	2.100,00	777.285.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	- ,00	-	- ,00	-	300,00	863.178.406	190,00	465.932.080	63%	53,98%	190,00	465.932.080	0%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	258,00	4.406.958.125	- ,00	2.348.000.000	0%	53,28%	- ,00	2.348.000.000	0%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan yang Menerima Fasilitas Koneksi Fasilitas/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	160,00	579.866.389	126,00	377.412.176	79%	65,16%	126,00	377.412.176	0%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kalambar dan Manajamen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan (Setuan Pendidikan)	- ,00	-	- ,00	-	15,00	779.000.000	- ,00	400.000.000	0%	51,35%	- ,00	400.000.000	0%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	- ,00	-	- ,00	-	22,00	5.775.520.362	- ,00	5.134.826.000	0%	88,91%	- ,00	5.134.826.000	0%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelola Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah tenaga kependidikan yang Mengikuti Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	30,00	149.999.448	65,00	149.999.448	217%	100,00%	65,00	149.999.448	0%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	200,00	597.046.047	- ,00	150.000.000	0%	25,12%	- ,00	150.000.000	0%	0,00%		



No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan)	Target Kinerja RKPD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 1/4 Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 1/4 Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 1/4 Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kd.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Mengikuti Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	-	.00	-	.00	22,00	316.850.000	-	.00	100,00%	0%	-	.00	0%	0,00%		13	
	1.01.02.2.02.0061	Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks yang Didik Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Didik Peserta Didik (Buku)	-	.00	-	.00	24.485,00	1.377.637.800	-	.00	0,00%	0%	-	-	0%	0,00%			
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perengkapan Peserta Didik yang Tersedia (paket)	Jumlah Perengkapan Peserta Didik yang Tersedia (paket)	-	.00	-	.00	2.540,00	952.787.655	-	.00	0,00%	0%	-	-	0%	0,00%			
	1.01.02.2.02.0063	Rehabilitasi Sedang/Berat Arama Sekolah	Jumlah Arama Sekolah yang telah selesai/dibekerjakan sedang/berat (Unit)	-	.00	-	.00	1,00	-	-	.00	0,00%	0%	-	-	0%	0,00%			
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Alat Praktis dan Peralat Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	-	.00	-	.00	4,00	763.759.364	-	.00	0,00%	0%	-	-	0%	0,00%			
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		-	-	-	-	-	9.956.232.212	-	-	-	-	1.948.321.474	-	-	-	0,00%		
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	-	.00	-	.00	2,00	300.000.000	-	.00	23,22%	0%	-	.00	0%	0,00%			
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	-	.00	-	.00	3,00	489.217.500	-	.00	0,00%	0%	-	-	0%	0,00%			
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perengkapan PAUD	Jumlah perengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	-	.00	-	.00	560,00	690.420.034	-	.00	0,00%	0%	-	-	0%	0,00%			
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	-	.00	-	.00	1.200,00	654.015.000	-	.00	32,87%	0%	-	.00	0%	0,00%			
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	-	.00	-	.00	21,00	532.800.000	-	.00	56,75%	0%	-	.00	0%	0,00%			
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Menerima Fasilitas Kesenikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	-	.00	-	.00	240,00	690.301.678	-	.00	49,14%	0%	-	-	0%	0,00%			
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	-	.00	-	.00	54,00	1.301.963.000	-	.00	0,00%	0%	-	-	0%	0,00%			
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		-	-	-	-	-	101.000.000	-	-	0,00%	0%	-	-	0%	0,00%			



No	Kode	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja RKPD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 5/6 tahun lalu (n-2)		Tingkat Capaian Kinerja RKPD 5/6 tahun lalu (n-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan yg divaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD 5/6 tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran tahun n/4 tahun n-1 (%)		Pangikat Daerah Pemanggang Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	-	0,00	-	0,00	1,00	419.580.000	-	0,00	117.120.000	0,00%	0,00%			
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	-	0,00	-	0,00	6,00	4.776.935.000	-	0,00	894.360.000	0,00%	0,00%			
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		-	-	-	-	-	6.863.469.228	-	0,00%	5.647.305.000	0,00%	0,00%			
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Kurir Pendidik dan tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kemakan (Pengajar/Orang tua, Pengingat, Kompetensi dan Kualifikasi (Orang Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	-	0,00	-	0,00	50,00	69.999.628	-	0,00%	-	0,00%	0,00%			
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	-	0,00	-	0,00	4,00	549.470.000	-	0,00%	-	0,00%	0,00%			
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perengkapan Sekolah	Jumlah Perengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	-	0,00	-	0,00	320,00	79.999.600	-	0,00%	-	0,00%	0,00%			
	1.01.02.2.04.0046	Penyenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	-	0,00	-	0,00	450,00	6164.000.000	-	0,00%	5.647.305.000	0,00%	0,00%			
	1.01.02.3.05	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		-	-	-	-	-	11.065.386.973	-	0,00%	6.870.979.710	0,00%	0,00%			
	1.01.02.3.05.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang telah Dibangun (Unit)	-	0,00	-	0,00	1,00	1.099.875.000	-	0,00%	299.940.000	0,00%	0,00%			
	1.01.02.3.05.0017	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah dan Ruang (Unit)	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah dan Ruang (Unit)	-	0,00	-	0,00	1,00	1101.852.930	-	0,00%	310.290.000	0,00%	0,00%			
	1.01.02.3.05.003E	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Peserta Didik Sekolah	-	0,00	-	0,00	432.097.500	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%			
	1.01.02.3.05.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)	-	0,00	-	0,00	1.937,00	615.825.000	-	0,00%	-	0,00%	0,00%			
	1.01.02.3.05.0047	Penyenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian (Satuan Pendidikan)	-	0,00	-	0,00	10,00	199.999.710	-	0,00%	199.999.710	100,00%	0,00%			
	1.01.02.3.05.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		-	0,00	-	0,00	149.653.520	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%			



No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Peningkatan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 5/6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD y/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD y/d Tahun n-1 (%)		Peranglat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	1.01.02.3.05.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (Orang)	-	0,00	125,00	2.292.000.000	125,00	1.614.000.000	125,00	1.614.000.000	0%	0,00%		13
	1.01.02.3.05.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan dan Kualifikasi (Orang)	-	0,00	75,00	148.999.313	-	-	-	-	0%	0,00%		
	1.01.02.3.05.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	-	0,00	22,00	578.000.000	-	-	-	-	0%	0,00%		
	1.01.02.3.05.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	-	0,00	5,00	4.446.750.000	-	4.446.750.000	-	4.446.750.000	0%	0,00%		
	1.01.02.3.06	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		-	-	-	3.433.975.665	-	1.107.598.000	-	1.107.598.000	-	-		
	1.01.02.3.06.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Siswa yang Mengelola BOS (Satuan Pendidikan)	-	-	-	536.929.874	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.3.06.0033	Pengadaan Alat Praktis dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	-	0,00	10,00	1.640.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.3.06.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	-	0,00	250,00	399.447.791	-	250.000.000	-	250.000.000	0%	0,00%		
	1.01.02.3.06.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola BOS (Satuan Pendidikan)	-	0,00	5,00	857.598.000	-	857.598.000	-	857.598.000	0%	0,00%		
	1.01.02.3.08	Penyediaan bantuan fasilitas dan biaya bagi pendididhan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	undefined (undefined)-1438	-	-	-	9.395.194.000	-	6.667.131.000	-	6.667.131.000	0%	0,00%		
	1.01.02.3.08.0001	Penyediaan Bantuan Fasilitas Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Bantuan Fasilitas di luar kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	2.199.217.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
	1.01.02.3.08.0002	Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota (Satuan Pendidikan)	-	0,00	72,00	7.195.977.000	-	6.667.131.000	-	6.667.131.000	0%	0,00%		
	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		-	-	-	334.668.866	-	-	-	-	0,00%	0,00%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 5/6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan di evaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 5/6 Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 5/6 Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD 5/6 Tahun n-1 (%)		Perangik Daerah Pemangung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota (Peserta Didik)	-	-	-	-	334.668.866	-	-	-	0,00%	0,00%				
	1.01.06.2.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Temudung Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota (Peserta Didik)	-	-	-	-	334.668.866	-	-	-	0,00%	0,00%				
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota															
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	-	-	-	-	2.648.554.144	-	-	-	0,00%	0,00%				
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Regional/Regional Maintenance Center (Unit)	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center (Unit)	-	-	-	-	109.900.000	83,00	83,00	91.169.000	82,96%	0%				
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	-	-	-	-	2.799.999.830	-	-	-	0,00%	0,00%				
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	-	-	-	-	150.000.000	-	-	150.000.000	100,00%	0%				
	1.02.02.2.02.0034	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hail Pengurangan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	-	-	-	-	400.000.000	-	-	111.000.000	27,75%	0%				
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat															
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	-	-	-	-	6.403.390.332	-	-	2.561.883.000	40,01%	0%				



No	Kode	Urusan/Bidang Penyelenggaraan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d/6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg direalisasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direalisasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Pemanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	102.02.2.01.0040	Pengabdian pelayanan kepada orang dengan Tuberkulosis			-			543.946.377	-						0,00%		
	102.02.2.01.0041	Pengabdian pelayanan kepada orang dengan HIV (ODHIV)			-			47.541.747	-						0,00%		
	102.02.2.01.0042	Pengabdian pelayanan kesehatan Malaria			-			158.492.832	-						0,00%		
	102.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAJA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAJA KESEHATAN MASYARAKAT			-			89.910.642.239	-						26,87%		DINAS KESEHATAN
	102.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			-			36.340.880.498	-								
	102.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas			-			11.202.700.307	-						0,00%		
	102.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)		-			3.173.280.000	-						0,00%		
	102.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)		-			8.656.910.820	-						29,49%		
	102.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)		-			2.259.293.535	-						28,39%		
	102.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)		-			2.750.000.000	-						0,00%		
	102.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center (Unit)		-			269.350.000	-						0,00%		
	102.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (Paket)		-			7.479.346.000	-						0,00%		
	102.02.2.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan (Paket)		-			549.999.836	-						35,75%		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 5/6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-3)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-3)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 5/6 Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD 5/6 Tahun n-1 (%)		Peranglist Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	102.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	19,454.603.094	19,454.603.094	-	19,454.603.094									
	102.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	- ,00	- ,00	600,00	500.000.000	- ,00	500.000.000	- ,00	0,00%	0%	0,00%	- ,00	0%	0,00%	-		
	102.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	- ,00	- ,00	500,00	500.000.000	- ,00	500.000.000	- ,00	28,00%	0%	28,00%	- ,00	0%	0,00%	140.000.000		
	102.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	- ,00	- ,00	500,00	549.999.247	- ,00	549.999.247	- ,00	0,00%	0%	0,00%	- ,00	0%	0,00%	-		
	102.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	- ,00	- ,00	14.500,00	349.999.530	- ,00	349.999.530	- ,00	0,00%	0%	0,00%	- ,00	0%	0,00%	-		
	102.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	- ,00	- ,00	100,00	149.999.498	- ,00	149.999.498	- ,00	0,00%	0%	0,00%	- ,00	0%	0,00%	-		
	102.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	- ,00	- ,00	10.000,00	200.000.000	- ,00	200.000.000	- ,00	0,00%	0%	0,00%	- ,00	0%	0,00%	-		
	102.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	- ,00	- ,00	1.250,00	299.996.000	- ,00	299.996.000	- ,00	100,00%	0%	100,00%	- ,00	0%	0,00%	299.996.000		
	102.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	-	-		150.000.000		150.000.000		0,00%		0,00%			0,00%	-		
	102.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	- ,00	- ,00	40.000,00	206.000.000	- ,00	206.000.000	- ,00	0,00%	0%	0,00%	- ,00	0%	0,00%	-		
	102.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	- ,00	- ,00	120,00	400.000.000	- ,00	400.000.000	- ,00	83,20%	0%	83,20%	- ,00	0%	0,00%	332.800.000		
	102.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terguga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terguga Tuberkulosis	-	-		450.000.000		450.000.000		15,61%		15,61%			0,00%	70.257.000		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (output) / (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja RKPD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 1/5 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 1/d tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RKPD 1/d tahun n-1 (%)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	- ,00	-	- ,00	449.999.032	100,00	449.999.032	- ,00	70.448.000	0%	15,66%	- ,00	70.448.000	0%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	200.000.000	1,00	200.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	2.398.250.090	3,00	2.398.250.090	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	249.999.869	2,00	249.999.869	- ,00	165.182.924	0%	66,07%	- ,00	165.182.924	0%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	199.999.250	2,00	199.999.250	- ,00	199.999.250	0%	100,00%	- ,00	199.999.250	0%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Atuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Atuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	150.000.000	2,00	150.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	251.999.829	2,00	251.999.829	- ,00	251.999.829	0%	100,00%	- ,00	251.999.829	0%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	3.356.514.301	2,00	3.356.514.301	- ,00	69.577.100	0%	2,07%	- ,00	69.577.100	0%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	430.000.000	4,00	430.000.000	- ,00	327.740.000	0%	76,22%	- ,00	327.740.000	0%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	9.338.850.072	4,00	9.338.850.072	- ,00	2.246.427.000	0%	24,05%	- ,00	2.246.427.000	0%	0,00%		



No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	5		6		7		8		9		10		11		Peringkat Daerah Pemangung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	- ,00	- ,00	- ,00	11,00	23.423.042.164	5,50	12.136.206.772	51,81%	5,50	12.136.206.772	0%	0,00%				
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	- ,00	- ,00	- ,00	4,00	4.198.959.000	- ,00	2.585.976.000	61,59%	- ,00	2.585.976.000	0%	0,00%				
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	- ,00	- ,00	- ,00	300,00	300.000.000	- ,00	-	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%				
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	- ,00	- ,00	- ,00	95,00	300.000.000	- ,00	300.000.000	100,00%	- ,00	300.000.000	0%	0,00%				
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	- ,00	- ,00	- ,00	2.000,00	1.050.000.000	- ,00	-	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%				
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	- ,00	- ,00	- ,00	2,00	199.999.914	- ,00	-	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%				
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)	- ,00	- ,00	- ,00	1,00	257.993.219	- ,00	257.993.219	100,00%	- ,00	257.993.219	0%	0,00%				
	1.02.02.3.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		- ,00	- ,00	- ,00	-	3.058.159.846	- ,00	1.291.363.920		- ,00	1.291.363.920						
	1.02.02.3.02.0044	Pengelolaan Manajemen Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Peninjauan Manajemen Puskesmas (Dokumen)	- ,00	- ,00	- ,00	1,00	399.999.283	- ,00	-	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%				
	1.02.02.3.02.0046	Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)	Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang telah Tendaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik (Unit/Fasyankes)	- ,00	- ,00	- ,00	11,00	100.000.000	- ,00	-	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%				
	1.02.02.3.02.0047	Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Jumlah dukungan pelayanan kesehatan lainnya (Dokumen)	- ,00	- ,00	- ,00	3,00	1.808.160.943	- ,00	721.363.920	39,89%	- ,00	721.363.920	0%	0,00%				



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kct.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	1.02.02.3.02.0064	Peningkatan penyakit Kusta	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Kusta (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	130.000.000	1,00	130.000.000	- ,00	130.000.000	0%	100,00%		
	1.02.02.3.02.0065	Peningkatan penyakit Filariasis	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Filariasis (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	130.000.000	2,00	130.000.000	- ,00	130.000.000	0%	100,00%		
	1.02.02.3.02.0067	Peningkatan penyakit Frambusia	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Frambusia (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	130.000.000	1,00	130.000.000	- ,00	130.000.000	0%	100,00%		
	1.02.02.3.02.0068	Peningkatan Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit (imunisasi) (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	180.000.000	5,00	360.000.000	- ,00	180.000.000	0%	50,00%		
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN MANUSIA KESEHATAN		-	-	-	500.000.000		1.100.000.000		500.000.000		45,45%		DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Peningkatan Sumberdaya Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota		-	-	-	600.000.000		600.000.000		-				
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	- ,00	-	- ,00	600.000.000	40,00	600.000.000	- ,00	600.000.000	0%	0,00%		
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	500.000.000		500.000.000		500.000.000				
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang memenuhi Standar Mutu dan Kompetensinya (Orang)	- ,00	-	- ,00	500.000.000	100,00	500.000.000	- ,00	500.000.000	0%	100,00%		
	1.02.05	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		-	-	-	699.999.139		699.999.139		699.999.139		99,89%		DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	699.999.139		699.999.139		699.999.139				
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	699.999.139	3,00	699.999.139	- ,00	699.999.139	0%	99,89%		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															



No	Kode	Uraian/Bidang Usuhan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 1/2 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 1/2 Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD /6 Tahun n-1 (%)		Peringkat Daerah Pemanggang Jawab	Kgl.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	13
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	40.000.000	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-		
	1.03.02.2.01.0078	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-		
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-		
	1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-		
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-		
	1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya		-	-	-	-	40.000.000	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-		
	1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-		
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		-	-	-	-	4.763.566.504	1.485.928.586	-	-	31,19%	1.485.928.586	-	0,00%	1.485.928.586	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	4.763.566.504	1.485.928.586	-	-	0,00%	1.485.928.586	-	0,00%	1.485.928.586	-		
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang memperhatikan persyaratan teknis (Liter/Desik)		-	-	-	25,00	4.763.566.504	1.485.928.586	-	-	0%	1.485.928.586	-	0,00%	1.485.928.586	-		
	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-		
	1.03.04.2.01.0009	Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-		
	1.03.04.2.01.0011	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-		
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		-	-	-	-	1.040.000.000	1.485.928.586	-	-	142,88%	1.485.928.586	-	0,00%	1.485.928.586	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	1.040.000.000	1.485.928.586	-	-	0,00%	1.485.928.586	-	0,00%	1.485.928.586	-		



No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 5/6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 5/6 Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RKPD 5/6 Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	103.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi (Unit)	-	.00	-	.00	5,00	1.040.000.000	-	.00	142,88%	-	1.485.928.586	0%	0,00%			
	103.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	103.06.2.01	Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung dengan sungai/ saluran di Kecamatan/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%				
	103.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%				
	103.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		-	-	-	-	82.015.004	82.015.004	-	-	0,00%	-	-	0,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	103.08.2.01	Penyelenggaraan Pembangunan Gedung Pemerintah Kabupaten/Kota, Pembangunan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		-	-	-	-	82.015.004	82.015.004	-	-	0,00%	-	-	0,00%				
	103.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKB), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Pemilik, dan Perizinan Bangunan Gedung Perizinan SNI/BO		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%				
	103.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN LINGKUNGANNYA		-	-	-	-	3.058.162.150	3.058.162.150	-	-	44,34%	-	1.356.133.000	0,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	103.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	3.058.162.150	3.058.162.150	-	-	44,34%	-	1.356.133.000	0,00%				
	103.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata (kawasan)		-	-	-	-	25.811.987.000	25.811.987.000	-	-	20,19%	-	5.212.558.780	0,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	103.10	PROGRAM PENYELANGGARAAN JALAN		-	-	-	-	25.811.987.000	25.811.987.000	-	-	16,79%	-	3.488.962.780	0,00%				
	103.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		-	-	-	-	20.792.035.000	20.792.035.000	0,40	0,40	34,33%	6,00	1.218.596.000	0,00%				
	103.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Penjangkaran Jalan Direkonstruksi (KM)	-	.00	-	.00	5,96	5,96	0,40	0,40	16,79%	0,40	3.488.962.780	0%				
	103.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Penjangkaran Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	-	.00	-	.00	4,00	3.550.000.000	6,00	6,00	34,33%	6,00	1.218.596.000	0%				



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 1/2 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 1/2 tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD 1/2 Tahun n-1 (%)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	103.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%				
	103.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (Jembatan)	-	-	-	-	700	505.000.000	700	505.000.000	64%	0%				
	103.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan		-	-	-	-	350.000.000	-	-	-	0,00%	0,00%				
	103.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan		-	-	-	-	119.952.000	-	-	-	0,00%	0,00%				
	103.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%				
	103.11.2.01	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%				
	103.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%				
	103.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%				
	103.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		-	-	-	-	375.181.112	-	375.181.112	-	0,00%	0,00%				
	103.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota		-	-	-	-	375.181.112	-	375.181.112	-	0,00%	0,00%				
	103.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	-	-	-	330.131.408	-	-	-	0%	0%				
	103.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang		-	-	-	-	46.049.704	-	-	-	0,00%	0,00%				
	103.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%				
	103.12.2.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Perencanaan Ruang		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%				
	104.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		-	-	-	-	12.045.744.000	4.649.026.300	-	4.649.026.300	38,59%	0,00%				
	104.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		-	-	-	-	28.540.000	28.540.000	-	28.540.000	100,00%	0%				
	104.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Pemenerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang diserahkan Peminta Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	-	-	-	28.540.000	28.540.000	-	28.540.000	0%	0%				
	104.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		-	-	-	-	11.443.500.000	4.524.894.300	-	4.524.894.300	100,00%	0%				



No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output/output) Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 1/2 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 1/2 tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 1/2 Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Akibat Pembangunan Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Akibat Pembangunan Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	-	0,00	-	0,00	2700	11.443.500.000	10,00	4.524.894.300	0%	0,00%		
	1.04.02.2.06	Pencabutan Ijin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	-	0,00	-	0,00	2700	573.704.000	10,00	95.592.000	0%	0,00%		
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	-	0,00	-	0,00	2700	573.704.000	10,00	95.592.000	0%	0,00%		
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		-	0,00	-	0,00		2.369.893.000		1.085.865.000	45,82%	0,00%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		-	0,00	-	0,00		169.893.000		142.840.000				
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP yang terusun/ Legalisasi (Dokumen)	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang terusun/ Legalisasi (Dokumen)	-	0,00	-	0,00	1,00	169.893.000	1,00	142.840.000	0%	0,00%		
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		-	0,00	-	0,00		2.200.000.000		943.025.000				
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	-	0,00	-	0,00	30,00		45,00	943.025.000	0%	0,00%		
			Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Sertunan Tanah (Dokumen)	-	0,00	-	0,00	9,00	2.200.000.000	-	0,00	0%	0,00%		
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		-	0,00	-	0,00		625.362.760		-			DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.05.2.01	Usanan Penyelenggaraan PSU Perumahan		-	0,00	-	0,00		28.000.000		-				
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	-	0,00	-	0,00	2,00	28.000.000	-	0,00	0,00%	0,00%		
	1.04.05.3.01	Usanan Penyelenggaraan PSU Perumahan		-	0,00	-	0,00		597.362.760		-				
	1.04.05.3.01.0006	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	Jumlah Rumah Penerima Manfaat dari Penyediaan Jaringan Tenaga Listrik (Unit Rumah)	-	0,00	-	0,00	2700	597.362.760	-	0,00	0,00%	0,00%		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERAMAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1(%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kct.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	106.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Toknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	- ,00	-	- ,00	40.000.000	6,00	40.000.000	6,00	40.000.000	0%	0,00%		13
	106.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
	106.02.2.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL													
	106.02.2.01	Pembinaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		-	-	-	768.947.732	6,00	690.187.072	6,00	690.187.072	89,76%	690.187.072		0,00% DINAS SOSIAL
	106.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT		-	-	-	690.187.072		690.187.072		690.187.072	100,00%	690.187.072		0,00%
	106.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	78.760.660		-		-		-		0,00%
	106.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	- ,00	-	150,00	78.760.660	- ,00	-	- ,00	-	0%	-		0,00%
	106.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL													
	106.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantel Sosial		-	-	-	506.547.906	406.549.980	-	-	99.997.926	19,74%	99.997.926		0,00% DINAS SOSIAL
	106.04.2.01.0001	Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	- ,00	-	250,00	221.919.539	- ,00	-	- ,00	-	0%	-		0,00%
	106.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakailan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	- ,00	-	250,00	184.630.441	- ,00	-	- ,00	-	0%	-		0,00%
	106.04.2.01.0003	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantel Sosial		-	-	-	99.997.926		-		-	0,00%	99.997.926		0,00%



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg direvisasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangik Daerah Pemangung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NARZA	Jumlah Peserta Jamboran Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NARZA	-	0,00	-	0,00	150,00	99.997.926	150,00	99.997.926	0%	0,00%		13
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		-	-	-	-	653.378.651	653.378.651	100,00%	653.378.651	0,00%	0,00%	DINAS SOSIAL	
	1.06.05.2.02	Pengalokasian Dana Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	653.378.651	653.378.651	100,00%	653.378.651	0,00%	0,00%		
	1.06.05.2.02.0003	Penerima Manfaat (PM) yang Mendapat Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (PM) yang Mendapat Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	-	0,00	-	0,00	200,00	653.378.651	200,00	653.378.651	0%	0,00%		
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		-	-	-	-	136.235.407	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		-	-	-	-	136.235.407	-	0,00%	-	0,00%	0,00%		
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	-	0,00	-	0,00	150,00	136.235.407	-	0,00	0%	0,00%		
	2.07.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		-	-	-	-	1.039.022.392	-	100,00%	1.039.022.392	0,00%	0,00%	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.03.2.01	PROGRAM PELATIHAN TENAGA KERJA		-	-	-	-	1.039.022.392	-	100,00%	1.039.022.392	0,00%	0,00%		
	2.07.03.2.01.0002	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Operasi Pemertasi Kompetensi dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	-	0,00	-	0,00	139.024.000	1.039.022.392	-	139.024.000	0%	0,00%		
	2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang)	-	0,00	-	0,00	899.998.392	899.998.392	-	899.998.392	0%	0,00%		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD y/d tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RKPD y/d Tahun n-1 (%)		Paragkat Daerah Pemanangjawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan (Lembaga)	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan (Lembaga)	-	0,00	-	0,00	2,00	149.999.242	2,00	149.999.242	100,00%	100,00%	2,00	149.999.242	0%	0,00%		
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		-		-			149.515.328		149.515.328	99,68%	0,00%				0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		-		-			49.999.500		49.999.500								
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Layanan)	-	0,00	-	0,00	5,00	49.999.500	-	49.999.500	100,00%	0,00%	-	49.999.500	0%	0,00%		
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perifudngan Perempuan Tinglat Daerah Kabupaten/ Kota		-		-			99.515.828		99.515.828								
	2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	0,00	-	0,00	1,00	99.999.828	-	99.999.828	0%	0,00%	-	99.999.828	0%	0,00%		
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		-		-			99.999.505		99.999.505	100,00%	0,00%				0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		-		-			99.999.505		99.999.505								



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Lalu (n-2)		Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg direvisasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangik Daerah Pemangku Jawab	Kd.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2.08.05.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Pemerintah, Non Pemerintah, Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha (Organisasi)	-	-	-	-	1,00	99.999.505	1,00	99.999.505	0%	0,00%		13
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		-	-	-	-		199.999.260		199.999.260		0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Berbasis Komunitas di Seluruh Wilayah Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-		149.999.260		149.999.260				
	2.08.07.2.01.0003	Penggiatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecemasan layak Anak, desa/keurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KKA terpadu (kegiatan)	-	-	-	-	1,00	149.999.260	1,00	149.999.260	0%	0,00%		
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-		50.000.000		50.000.000				
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan (Layanan)	-	-	-	-	3,00	50.000.000	-	50.000.000	0%	0,00%		
	2.09.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		-	-	-	-		112.055.000		112.055.000		0,00%	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.02.2.01	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAUATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		-	-	-	-		939.999.680		939.999.680		11,92%		
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lumbung Pangan yang tersedia (unit)-1435	-	-	-	-	4,00	939.999.680	-	939.999.680	0%	0,00%		
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya (Unit)	-	-	-	-	4,00	939.999.680	4,00	939.999.680	100%	11,92%		
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		-	-	-	-		174.839.000		174.839.000		25,05%	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan		-	-	-	-		244.839.000		244.839.000				



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 5/6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 5/6 Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD 5/6 Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Pemangku Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota			-	-	199.999.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-			
	2.09.03.2.01.0016	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan			-	-	44.840.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-			
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dim rakat dim penganeka ragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal (laporan)-1436		-	-	930.000.000	- ,00	1,00	- ,00	31,64%	- ,00	0%	0%	294.280.000	0%	
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganketragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)-1436	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganketragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)-1437		- ,00	-	930.000.000	1,00	1,00	1,00	31,64%	1,00	0%	294.280.000	0%		
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			-	-	930.000.000	-	-	-	43,46%	-	0%	404.160.000	0%	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.04.2.02	Peningkatan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengabdian, pengelo lisan dan penyuluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 daerah kabupaten/kota		- ,00	-	930.000.000	- ,00	6,00	- ,00	43,46%	- ,00	0%	404.160.000	0%		
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengabdian, Penyuluran, dan Penyuluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengabdian, Pengelolaan, dan Penyuluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)-1437		- ,00	-	930.000.000	5,00	5,00	5,00	43,46%	5,00	0%	404.160.000	0%		
	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			-	-	9.354.000.000	-	-	-	0,58%	-	0%	54.000.000	0%	DINAS PERUMAHAN BAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Penetapan Penetapan Penerima Santunan Tanah (Dokumen)		-	-	9.354.000.000	-	-	-	0%	-	0%	54.000.000	0%		
	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah (Dokumen) Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Penetapan Penetapan Penerima Santunan Tanah (Dokumen)		- ,00	-	9.300.000.000	- ,00	9,00	- ,00	0,00%	- ,00	0%	-	0%		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Kegiatan (output)	Target Kinerja RKPD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 1/2 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 1/2 Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RKPD 1/2 Tahun n-1 (%)		Prengket Daerah Penanggung Jawab	Kgl.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanskoregaman Hayati Kabupaten/Kota		-	-	-	-	150.203.142	41.200.000	41.200.000	41.200.000	100%	41.200.000	0,00%				12	13
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah pengaduan permasalahan pemersalahan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)	- ,00	-	- ,00	-	150.203.142	5,00	5,00	5,00	27,43%	41.200.000	0%	41.200.000	0%			
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		-	-	-	-	161.848.270	61.837.185	61.837.185	61.837.185	38,21%	61.837.185	0,00%	61.837.185	0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	161.848.270	61.837.185	61.837.185	61.837.185		61.837.185		61.837.185				
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan dan/atau Survei Kesehatan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	1,00	12.736.185	- ,00	- ,00	12.736.185	100,00%	- ,00	0%	12.736.185	0%			
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan Usaha dan/atau Kegiatan yang disetujui (Badan Usaha)	- ,00	-	- ,00	5,00	149.112.085	- ,00	- ,00	49.101.000	32,93%	- ,00	0%	49.101.000	0%			
	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN UNTUK MASYARAKAT		-	-	-	-	320.309.626	350.466.944	350.466.944	350.466.944	109,42%	350.466.944	0,00%	350.466.944	0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2.11.08.2.01	Penyenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	320.309.626	350.466.944	350.466.944	350.466.944		350.466.944		350.466.944				
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		-	-	-	-	200.263.802	200.263.802	200.263.802	200.263.802	100,00%	200.263.802	0,00%	200.263.802	0,00%			
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan Hidup untuk Lembaga pendidikan/forma/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	1,00	150.203.142	1,00	1,00	1,00		1,00	0%	150.203.142	0%			



No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 1/6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 1/6 Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD 1/6 tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2																			13
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	- ,00		- ,00		1,00		1,00		100%		1,00		0%				
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	- ,00		- ,00		12,00	120.045.824	12,00		100%	12,00	150.203.142		0%				
			Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi terkait PPLH (Lembaga)	- ,00		- ,00		50,00		100,00		200%		100,00		0%				
2.11.10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			-				41.200.000			100,00%		41.200.000		0,00%				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10.2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota			-				41.200.000					41.200.000						
2.11.10.2.01.0004		Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota			-				41.200.000			100,00%		41.200.000		0,00%				
2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			-				2.183.792.326			100,00%		2.183.792.326		0,00%				
2.11.11.2.01		Pengelolaan Sampah			-				2.183.792.326			100%		2.183.792.326		0,00%				
2.11.11.2.01.0007		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengalihan dan Pemrosesan Akhir (Unit)			-				913.992.830			100%		913.992.830		0%				
2.11.11.2.01.0009		Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah			-				200.000.000			0%		200.000.000		0%				
2.11.11.2.01.0015		Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah			-				1.069.799.496			0%		1.069.799.496		0%				
2.12.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			-				550.000.000			18,18%		100.000.000		0,00%				
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			-				100.000.000			18,18%		100.000.000		0,00%				



No	Kode	Ususan/Pemeliharaan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 5/6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd 5/6 Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd 5/6 tahun n-1 (%)		Parengkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	-	550.000.000	-	100.000.000	0%	100.000.000	0,00%	100.000.000	0%			
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk		-	350.000.000	-	0	0%	-	0,00%	-	0%			
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk (Laporan)	-	100.000.000	-	0	0%	-	0,00%	-	0%			
	2.12.02.2.03.0004	Penyenggaraan Pemantapan Data Kependudukan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan (Dokumen)	-	100.000.000	-	100.000.000	100%	100.000.000	100,00%	100.000.000	0%			
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		-	350.000.000	-	350.000.000	100,00%	350.000.000	100,00%	350.000.000	0,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		-	350.000.000	-	350.000.000	100%	350.000.000		350.000.000	0,00%			
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	-	100.000.000	-	100.000.000	100%	100.000.000	100,00%	100.000.000	0%			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	25,00	-	21,75	75%	21,75	1,00	21,75	0%			
			Jumlah Data Kependudukan terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan (Dokumen)	-	1,00	-	1,00	100%	1,00	100,00%	1,00	0%			
			Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	-	1,00	-	1,00	100%	1,00	100%	1,00	0%			
	2.13.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		-	299.940.000	-	299.940.000	100,00%	299.940.000	100,00%	299.940.000	0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG		
	2.13.02.2.01	PROGRAM PENATAAN DESA		-	299.940.000	-	299.940.000	100,00%	299.940.000	100,00%	299.940.000	0,00%			
	2.13.02.2.01.0002	Penyelenggaraan Penataan Fasilitas Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	-	25,00	-	25,00	100%	25,00	100,00%	25,00	0%			



No	Kode	Usuan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RKPD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 1/6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 1/6 Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RKPD 1/6 Tahun n-1 (%)		Peringkat Daerah Pemangku Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		-	-	455.778.920	625.734.940	137,25%	625.734.940	0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG								
2.13.04.2.01		Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		-	-	455.778.920	625.734.940		625.734.940										
2.13.04.2.01.0005		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	- ,00	- ,00	225.737.440	225.737.440	100,00%	225.737.440	100,00%		0,00%							
2.13.04.2.01.0014		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	- ,00	- ,00	114,00	114,00	100,00%	114,00	100,00%		0,00%							
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dan Tim Penggerak Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	-	-	230.041.480	399.997.500	173,86%	399.997.500	105,00%		0,00%							
2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		-	-	2.108.369.159	908.450.903	43,09%	908.450.903	0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG								
2.13.05.2.01		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Desa/Kabupaten/Kota		-	-	2.108.369.159	908.450.903		908.450.903										
2.13.05.2.01.0003		Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Kerang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	- ,00	- ,00	2,00	2,00	100,00%	2,00	100,00%		0,00%							
			Jumlah Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Kerang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	- ,00	- ,00	92,00	92,00	100,00%	92,00	100,00%		0,00%							



No	Kode	Uraian/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) Kegiatan (output)	Target Kinerja RKPD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja 1/2 Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 1/2 Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 1/2 Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Pemanggung Jawab	Kgt.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	-	1.599.915.756	399.997.500	25,00%	399.997.500	0,00%	399.997.500	0,00%						13
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK																	
		2.14.02																		
		2.14.02.2.01	Pemuduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-	-	-	300.399.475	636.079.563	21,74%	636.079.563	0,00%	636.079.563	0,00%						DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.02.2.01						99.999.475	636.079.363		636.079.363		636.079.363							
		2.14.02.2.01.0009	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendirikan yang Mengikuti Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Jalur Formal di Satu-satunya SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	-	-	-	-	99.999.475	636.079.363	636,08%	636.079.363	5000%	636.079.363	0,00%						
			Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Jalur Formal di Satu-satunya SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	-	-	-	-					10000%								
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	-	-	-	-					100,00%								
		2.14.02.2.02	Pemetaan Perilaku Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota	-	-	-	-	200.400.000	200		200		200							
		2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-	-	-	-	80.400.000	100	0,00%	100	0,00%	100	0,00%						
		2.14.02.2.02.0013	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	-	-	-	-	120.000.000	100	0,00%	100	0,00%	100	0,00%						
		2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					3.933.747.319	1.100	0,00%	1.100	0,00%	1.100	0,00%						DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	-	-	1.059.998.583	600		600		600							
		2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KBPK (Laporan)	-	-	-	-	59.999.613	100	0,00%	100	0,00%	100	0,00%						



No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 1/6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang direvisasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Direvisasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 1/6 Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD 1/6 Tahun n-1 (%)		Parangkat Daerah Pemanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana	Jumlah Unit Sasana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Berencana)(Unit)	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	1,00	- ,00	- ,00	- ,00	0%	- ,00	- ,00	0%	0,00%			
			Jumlah Laporan Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Berencana) Melalui Rapat-Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minitok) (Laporan)	- ,00	- ,00	- ,00	150.000.000	1,00	2,00	2,00	2,00	200%	2,00	2,00	0%	0,00%	100		
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Berencana) (Laporan)	- ,00	- ,00	- ,00	250.000.000	10,00	- ,00	- ,00	- ,00	0%	- ,00	- ,00	0%	0,00%	100		
	2.14.03.2.01.0011	Peleaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minitok)	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	- ,00	- ,00	- ,00	300.000.000	-	-	-	-	0%	-	-	0%	0,00%	100		
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	- ,00	- ,00	- ,00	99.999.070	1,00	- ,00	- ,00	- ,00	0%	- ,00	- ,00	0%	0,00%	100		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RKPD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (t-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RKPD s/d tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2.14.03.2.01.0014																			13
		Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	2,00	200.000.000	- ,00	- ,00	0,00%	0,00%	100	- ,00	0%	0%	100	0,00%	
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/PKB/PLKB																		
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	1,00	530.000.000	- ,00	- ,00	0,00%	0,00%	100	- ,00	0%	0%	100	0,00%	
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	275,00	561.000.000	- ,00	- ,00	0%	0,00%	-	- ,00	0%	0%	-	0,00%	
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota																		
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	375,00	185.999.500	- ,00	- ,00	0,00%	0,00%	100	- ,00	0%	0%	100	0,00%	
	2.14.03.2.03.0005	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	12,00	670.000.000	- ,00	- ,00	0%	0,00%	100	- ,00	0%	0%	100	0,00%	
	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB (Orang)	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	50,00	100.000.000	- ,00	- ,00	0%	0,00%	100	- ,00	0%	0%	100	0,00%	
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	10,00	13.500.000	- ,00	- ,00	0,00%	0,00%	-	- ,00	0%	0%	-	0,00%	
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Perawat yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	20,00	200.000.000	- ,00	- ,00	0,00%	0,00%	100	- ,00	0%	0%	100	0,00%	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Tingkat Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD y/d tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD y/d Tahun n-1 (%)		Paragraf Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelembagaan dan Pengembangan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Pelembagaan dan Pengembangan KB Bergerak (Laporan)	- ,00	-	- ,00	200.000.000	1,00	-	- ,00	-	0,00%	-	-	0,00%				
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)	- ,00	-	- ,00	150.000.000	50,00	-	- ,00	-	0,00%	-	-	0,00%				
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang)	- ,00	-	- ,00	199.999.236	50,00	-	- ,00	-	0,00%	-	-	0,00%				
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelembagaan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB		-	-	-	63.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.14.03.2.04.0005	Facilitasi Pengelolaan Dapur Sehat/Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	21,00	-	- ,00	-	0,00%	-	-	0,00%				
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berencana yang Berprogres di Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	- ,00	-	- ,00	63.250.000	6,00	-	- ,00	-	0,00%	-	-	0,00%				
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		-	-	-	725.000.000	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%				
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR, BKR, BKLR, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR, BKR, BKLR, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	10,00	-	- ,00	-	0,00%	-	-	0,00%				



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RKPD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 1/6 Tahun Lalu (n-2)		Tugas Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 1/6 tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RKPD 1/6 tahun n-1 (%)		Peringkat Daerah Pemangku Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	214.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKI, PPKS, PIK-R, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKI, PPKS, PIK-R, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	-	-	-	-	100,00	200.000.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		13	
	214.04.2.02	Pelekanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							525.000.000											
	214.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	-	-	-	-	282,00	282.000.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%			
	214.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	-	-	-	-	94,00	243.000.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																				
	215.02	PROGRAM PENGAGARAN LALU LINTAS DAN ANGGARAN JALAN (LLAJ)							1.412.346.874						824.473.874					
	215.02.2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota							999.961.624						744.381.874					
	215.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang terbangun (Unit)	-	-	-	-	1,00	427.965.000	1,00	1,00	100%	133,66%	571.996.624	1,00	1,00	100%	133,66%		
	215.02.2.02.0002	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia (Unit)	-	-	-	-	1,00	571.996.624	1,00	1,00	100%	30,14%	172.385.250	1,00	1,00	100%	30,14%		
	215.02.2.06	Pelekanaan Manajemen dan Rekyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota							172.385.250						80.092.000					



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Tingkat Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD y/d tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD y/d Tahun n-1 (%)		Parangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Merencanakan dan Rekrutasi Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Merencanakan dan Rekrutasi Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	-	-	-	-	1,00	172.385.250	1,00	80.092.000	46,46%	0%	0,00%	
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-		240.000.000		-				
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		-	-	-	-		240.000.000		-			0,00%	
	2.16.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
	2.16.02.2.01	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		-	-	-	-		-		-			0,00%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-		-		-				
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik		-	-	-	-		999.992.975		999.992.975			0,00%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		-	-	-	-		999.992.975		999.992.975			0,00%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-		999.992.975		999.992.975			0,00%	
	2.16.03.2.02.0024	Peningkatan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Parangkat Daerah)	-	-	36,00	999.992.975	34,00	999.992.975	34,00	999.992.975	100,00%	0%	0,00%	
	2.17.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
	2.17.03.2.01	PROGRAM PENGANVASAN DAN PEMERISAN KOPERASI		-	-	-	-		32.048.375		-			0,00%	DINAS PERINDUSTRIAN, BERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.03.2.01	Pemeliharaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha yang telah dilakukan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pengawasan (Unit Usaha)-1430 Kota	-	-	43,00	32.048.375	-	32.048.375	-	-	0,00%	0%	0,00%	
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		-	-	-	-		-		-			0,00%	
	2.17.03.2.01.0004	Pelembagaan Proses Pemertan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Pengawasan dan Pengawasan (Unit Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemertan dan Pengawasan (Unit Kabupaten/Kota	-	-	43,00	32.048.375	-	32.048.375	-	-	0,00%	0%	0,00%	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja, RKPD 4/4 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 4/4 tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD 4/4 Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kdt.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2																13
2.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
2.17.07.2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Pemetaan, dan Penetapan Kawasan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah unit usaha mikro yang diberdayakan (Unit)-I431	-	-	-	892.134.091	10,00	892.134.091	- ,00	403.485.000	0%	403.485.000	0%			
2.17.07.2.01.0002		Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	- ,00	- ,00	- ,00	51.495.000	10,00	51.495.000	5,00	30.815.000	50%	30.815.000	0%			
2.17.07.2.01.0003		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		-	-	-											
2.17.07.2.01.0004		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	- ,00	- ,00	- ,00	840.639.091	10,00	840.639.091	5,00	372.670.000	50%	372.670.000	0%			
2.17.09		PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI															
2.17.09.3.01		Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi.					29.242.000		29.242.000		15.675.000		15.675.000			DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	
2.17.09.3.01.0001		Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi	Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan penyuluhan untuk mendirikan koperasi (kelompok)	- ,00	- ,00	- ,00	29.242.000	35,00	29.242.000	94,00	15.675.000	269%	15.675.000	0%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																	
2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL															DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.02		Pembinaan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Penanaman Modal Daerah (Kabupaten/ Kota) dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)-I427	-	-	-	102.954.000	1,00	102.954.000	- ,00	102.935.000	0%	102.935.000	0%			
2.18.02.2.02.0001		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)	- ,00	- ,00	- ,00	102.954.000	1,00	102.954.000	1,00	102.935.000	100%	102.935.000	0%			
2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL															DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



No	Kode	Usuhan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 5/6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 5/6 Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD 5/6 Tahun n-1(%)		Peringkat Daerah Pemangku Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2																			
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Media yang Berhubungan dengan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah Diinformasikan, Dirilis, dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspekti Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Pemilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)					17,00	102.741.625	- ,00	102.738.000	100,00%	- ,00	102.738.000	0%	0,00%				
	2.18.05.2.01.0006																			
	2.18.06	Pengawasan Penanaman Modal						17,00	102.741.625	7,00	102.738.000	100,00%	7,00	102.738.000	0%	0,00%				
	2.18.06.2.01	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL																		
	2.18.06.2.01.0002	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)-M29					1,00	103.978.875	- ,00	103.830.000	99,86%	- ,00	103.830.000	0%	0,00%				
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berusaha Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berusaha Sistem Perizinan Berusaha Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)					1,00	103.978.875	1,00	103.830.000	99,86%	1,00	103.830.000	0%	0,00%				
	2.19.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																		
	2.19.02.2.01	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase Pengabdian Masyarakat yang Dibiayai (Persen)	20,00	-	15,00	563.544.090	25,00	563.544.090	- ,00	563.544.090	100,00%	- ,00	563.544.090	0%	0,00%				
	2.19.02.2.01	Pengabdian, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota																		



No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 5/6 Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 4/5 Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD 4/5 Tahun n-1 (%)		Peranglat Daerah Pemangung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	-	.00	-	.00	100,00	563.544.090	100,00	563.544.090	0%	0,00%		
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		-	-	-	-		865.167.804	63,37%	865.167.804	0,00%	0,00%	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-		85.187.837		85.187.837				
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi pelayanan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengisian, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	-	.00	-	.00	1,00	85.187.837	100,00%	85.187.837	0%	0,00%		
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		-	-	-	-		590.000.000	100%	590.000.000	0%	0,00%		
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kantor yang Disiapkan (Laporan)	-	.00	-	.00	1,00	590.000.000	100%	590.000.000	0%	0,00%		
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		-	-	-	-		189.979.967	27,53%	189.979.967	0%	0,00%		
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	-	.00	-	.00	13,00	189.979.967	100%	189.979.967	0%	0,00%		
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan		-	-	-	-		500.000.000	0,00%	-	-	0,00%		
	2.20.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		-	-	-	-		81.996.898	0,00%	-	-	0,00%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan (output)	5		6		7		8		9		10		11		12	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.20.02.2.01			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah diunggah (Dokumen)	-	-	1,00	81.996.898	-	81.996.898	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																	
	2.21.02	PROGRAM PENGARABAN PERSEDIAAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI																	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keselamatan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	-	-	1,00	85.759.793	-	85.759.793	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-		
	2.21.02.2.01.0002	Peleaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keselamatan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keselamatan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	-	-	1,00	85.759.793	-	85.759.793	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL																	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Kursus/Workshop/Orang)	-	-	540,00	342.752.582	-	342.752.582	-	-	52,52%	-	-	-	0,00%	-		
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Kursus/Workshop/Orang)	-	-	540,00	342.752.582	-	342.752.582	-	-	52,52%	-	-	-	0,00%	-		
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	-	-	65,00	179.999.060	-	179.999.060	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-		
	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH																	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	-	-	5,00	85.000.000	-	85.000.000	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-		
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	-	-	5,00	85.000.000	-	85.000.000	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-		
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA																	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota																	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg direvisasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Pemanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2																			13
	222.052.01.0001	Pendefinisian Objek Cagar Budaya (Objek)	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	-	0,00	-	0,00	15,00	99.999.920	-	0,00	100,00%	0%	99.999.920	0%	0,00%				
	222.052.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	-	0,00	-	0,00	16,00	129.901.930	-	0,00	100,00%	0%	129.901.930	0%	0,00%				
	223.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																		
	223.02.2.01	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN																		
	223.02.2.01.0004	Pengalokasian Perpuustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpuustakaan pada Tingkat Dasar dan yang Didukung dalam Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpuustakaan	-	0,00	-	0,00	65,00	289.500.000	164.490.000	56,82%	0%	164.490.000	0%	164.490.000	0%				
	223.02.2.01.0001	Pembinaan Perpuustakaan pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpuustakaan pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	0,00	-	0,00	1,00	149.998.633	-	0,00%	0%	-	0%	-	0,00%				
	223.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpuustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpuustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpuustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	-	0,00	-	0,00	90,00	199.999.169	-	0,00%	0%	-	0%	-	0,00%				
	223.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpuustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpuustakaan (Dokumen)	-	0,00	-	0,00	40,00	148.000.558	-	0,00%	0%	-	0%	-	0,00%				
	223.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpuustakaan	Jumlah Bahan Perpuustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpuustakaan (Eksemplar)	-	0,00	-	0,00	2.000,00	762.346.018	-	0,00%	0%	-	0%	-	0,00%				
	223.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RKJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 1/6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 1/6 Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RKPD 1/6 Tahun n-1 (%)		Parangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusif Sosial Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	-	0,00	-	0,00	20,00	199.998.357	-	0,00	0,00%	-	0,00%						
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Masyarakat Kabupaten Kota (Orang)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Masyarakat Kabupaten Kota (Orang)	-	0,00	-	0,00	50,00	149.999.916	50,00	100,00%	100,00%	149.998.600	0%						
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pendidikan Keperguruan Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	-	0,00	-	0,00	25,00	199.999.336	-	0,00%	0,00%	-	0%						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																				
2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		-		-			283.225.428		67,7%		190.236.000							
2.24.02.2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		-		-			92.900.000				-							
	2.24.02.2.01.0009	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan (Laporan)	-	0,00	-	0,00	1,00	92.900.000	-	0,00%	0,00%	-	0%						
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		-		-			190.326.428				190.236.000							
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	-	0,00	-	0,00	-	190.326.428	-	99,95%	99,95%	190.236.000	0%						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																				
3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		-		-			2.289.137.253		39,32%		899.993.572							
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Budidaya Perikanan	Tersedianya jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia, jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia, jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (unit)-1418	-	0,00	-	0,00	4,00	1.789.144.529	-	22,36%	22,36%	400.000.848	0%						



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 4/6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 4/6 Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD 4/6 Tahun n-1(%)		Perangkat Daerah. Pemangung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	99.999.888	1,00	99.999.888	100,00%	1,00	99.999.888	0%	0,00%			
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	13,00	1.689.144.641	- ,00	300.000.960	0%	- ,00	300.000.960	0%	0,00%			
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Jumlah nelayan kecil yang meningkatkan kapasitasnya. Jumlah Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (65 Kelompok)-1419	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	299.993.040	- ,00	299.993.040	100,00%	- ,00	299.993.040	0%	0,00%			
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	50,00	-	- ,00	-	0%	- ,00	-	0%	0,00%			
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Dibentuk dan dikembangkan Kelembagaannya (Kelompok)	- ,00	-	- ,00	-	5,00	299.993.040	5,00	299.993.040	100,00%	5,00	299.993.040	0%	0,00%			
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan, Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen)-1420	-	-	- ,00	-	1,00	-	- ,00	-	0%	- ,00	-	0%	0,00%			
	3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	-	- ,00	-	0%	- ,00	-	0%	0,00%			
	3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Gemangan Air Lain yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Jumlah persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Gemangan Air Lain yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)-1421	-	-	- ,00	-	1,00	199.999.684	- ,00	199.999.684	100,00%	- ,00	199.999.684	0%	0,00%			



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 1/2 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 1/2 tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 1/2 Tahun n-1 (%)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3.25.03.2.04.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pemberian Rekomendasi Pemukiman Khusus Diater Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Pemberian Rekomendasi Pemukiman Khusus Diater Kapal Perikanan yang Menjadi Keinginan Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	0,00	-	0,00	1,00	199.999.684	1,00	199.999.684	0%	0,00%		
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUIDIDAYA		-	-	-	-	899.987.578	952.887.551	105,88%	952.887.551	0,00%	0,00%	DINAS PERIKANAN	
	3.25.04.2.02		Tersedianya jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas, jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pelatihan dan pengembangan kelembagaan (21 Kelompok)-1422	-	0,00	-	0,00	599.987.013	599.987.013	100,00%	599.987.013	0%	0,00%		
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (kelompok)	-	0,00	-	0,00	299.990.347	299.990.347	100,00%	299.990.347	0%	0,00%		
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Membentuk dan mengembangkan Kelembagaan (kelompok)	-	0,00	-	0,00	299.996.666	299.996.666	100,00%	299.996.666	0%	0,00%		
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Pengorganisasian Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memberikan Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (kelompok)	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00%	-	0%	0,00%		
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Tersedianya jumlah data dan informasi pembudidaya ikan (kelompok) daerah kabupaten/kota, jumlah pembudidaya ikan prasarna dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota (Unit)-1423	-	0,00	-	0,00	352.900.538	352.900.538	117,64%	352.900.538	0%	0,00%		



No	Kode	Urusan/Bidang Peningkatan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Laju (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg direalisasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Peringkat Daerah Pemangung Jawab	Kdt.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Perikanan (Batu) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	5,00	299.980.665	5,00	352.900.538	117,64%	5,00	352.900.538	0,00%	
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		-	-	-	-	1.301.016.381	1.301.016.381		1.301.016.381	100,00%			0,00%	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya jumlah ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, jumlah usaha pelepasan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi (Unit)-1424	-	-	- ,00	-	3,00	699.995.056	- ,00	699.995.056	100,00%	- ,00	699.995.056	0,00%	
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	699.995.056	1,00	699.995.056	100,00%	1,00	699.995.056	0,00%	
	3.25.06.3.04	Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Tersedianya Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil (Unit Usaha)-1425			- ,00	-	5,00	201.098.989	- ,00	201.098.989	100,00%	- ,00	201.098.989	0,00%	
	3.25.06.3.04.0001	Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil (Unit Usaha)	- ,00	-	- ,00	-	5,00	201.098.989	- ,00	201.098.989	100,00%	- ,00	201.098.989	0,00%	
	3.25.06.3.06	Fasilitas akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Tersedianya fasilitas akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil (kg/kep/tahun)-1426	-	-	- ,00	-	200,00	399.922.336	- ,00	399.922.336	100,00%	- ,00	399.922.336	0,00%	



No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan/Kelembagaan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD/d Tahun n-1(%)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Kcd.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3.25.06.3.06.0001	Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah kegiatan angka kredit yang dilaksanakan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil (kg/kap/tahun)	-	-	-	-	200,00	399.922.336	-	399.922.336	0%	0%		13
	3.26.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													
	3.26.02.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA													
	3.26.02.02.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpeliharasi dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Orang 5 Unit)-1414	-	-	-	-	40,00	1.699.988.387	-	269.998.172	0%	15,88%	0,00%	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpeliharasi dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	-	-	40,00	799.994.479	-	-	0,00%	0,00%		
	3.26.02.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	-	-	-	-	40,00	299.996.396	-	-	0,00%	0,00%		
	3.26.02.02.0003	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan/Pengembangan (Rintis, Berkembang, Pematangan, Revitalisasi Unit)-1415	-	-	-	-	6,00	499.998.083	-	269.998.172	0%	30,00%	0,00%	
	3.26.02.02.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan/Pengembangan (Rintis, Berkembang, Pematangan, Revitalisasi) (Lokas)	-	-	-	-	1,00	899.993.908	-	269.998.172	0%	30,00%	0,00%	



No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg direvisasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Pemanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2														
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF													
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Parwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)-1416	-	-	-	1.299.974.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	DINAS PARIWISATA	
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	-	-	-	799.991.388	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)-1417	-	-	-	499.983.112	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	-	-	-	499.983.112	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
	3.27.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
	3.27.02.2.01	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN													
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Speisifik Lokasi (Laporan)	-	-	-	4.788.089.500	-	4.270.527.000	-	4.270.527.000	89,19%	0,00%	DINAS PERTANIAN	
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	-	-	-	2.844.171.500	-	2.844.171.500	-	2.844.171.500	100%	0,00%		
	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	-	-	-	665.281.000	1,00	1,00	1,00	268.020.000	40,29%	0%		
	3.27.02.2.01.0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	-	-	-	947.400.000	1,10	1,10	1,10	947.400.000	100,00%	0%		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 1/2 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd 1/2 tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD 1/2 tahun n-1 (%)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Kot.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3.2702.2.01.0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura berbentuk batang yang dipanen banyak (Batang)	- ,00	-	- ,00	-	1.750,00	885.596.000	1.750,00	885.596.000	100,00%	100,00%	1.750,00	885.596.000	0%	0,00%		13
	3.2702.2.03	Peningkatan Mutu dan Penanganan Benih/Bibit Ternak Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	241.048.000	141.048.000	-	141.048.000	0%	0%	-	141.048.000	0%	0,00%		
	3.2702.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	241.048.000	- ,00	141.048.000	58,51%	0%	- ,00	141.048.000	0%	0,00%		
	3.2702.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	345.327.500	345.327.500	345.327.500	345.327.500	100,00%	100,00%	345.327.500	345.327.500	0%	0,00%		
	3.2702.2.05.0008	Penjajinan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	345.327.500	1,00	345.327.500	100,00%	100,00%	1,00	345.327.500	0%	0,00%		
	3.2702.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		-	-	-	-	939.980.000	939.980.000	939.980.000	939.980.000	100,00%	100,00%	939.980.000	939.980.000	0%	0,00%		
	3.2702.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumber dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain (Ekor)	- ,00	-	- ,00	-	53,00	939.980.000	53,00	939.980.000	100,00%	100,00%	53,00	939.980.000	0%	0,00%		
	3.2703	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		-	-	-	-	904.027.000	416.565.000	904.027.000	416.565.000	46,08%	0,00%	416.565.000	416.565.000	0,00%	0,00%	DINAS PERTANIAN	
	3.2703.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian		-	-	-	-	754.027.000	416.565.000	754.027.000	416.565.000	100,00%	100,00%	416.565.000	416.565.000	0%	0,00%		
	3.2703.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan (Ha)	- ,00	-	- ,00	-	13,00	416.565.000	13,00	416.565.000	100,00%	100,00%	13,00	416.565.000	0%	0,00%		
	3.2703.2.01.0012	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan		-	-	-	-	337.462.000	-	337.462.000	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0,00%		
		Pembangunan Prasarana Pertanian		-	-	-	-	150.000.000	-	150.000.000	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0,00%		
	3.2703.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya		-	-	-	-	150.000.000	-	150.000.000	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0,00%		
	3.2704	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		-	-	-	-	399.990.000	399.990.000	399.990.000	399.990.000	100,00%	100,00%	399.990.000	399.990.000	0,00%	0,00%	DINAS PERTANIAN	
	3.2704.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	399.990.000	399.990.000	399.990.000	399.990.000	100,00%	100,00%	399.990.000	399.990.000	0,00%	0,00%		



No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	5		6		7		8		9		10		11		Peranglat Daerah Pemangung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	-	-	1,00	399.990.000	2,00	399.990.000	100,00%	2,00	399.990.000	0%	0,00%					
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN WABAH ZOOZOOZIN BENCANA PERTANIAN		-	-		329.755.000		329.755.000	100,00%		329.755.000		0,00%				DINAS PERTANIAN	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Hewan Ternak Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Diidentifikasi (Ha)	-	-		329.755.000		329.755.000	100%		329.755.000		0,00%					
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		-	-	30,00	329.755.000	30,00	329.755.000	100,00%	30,00	329.755.000	0%	0,00%					
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		-	-		2.323.294.210		2.323.294.210	58,36%		1.355.935.460		0,00%				DINAS PERTANIAN	
	3.27.07.2.01.0002	Pembinaan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Dilengkapi Kapasitasnya (Unit)	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Dilengkapi Kapasitasnya (Unit)	-	-	2,00	466.194.160	2,00	466.194.160	95,71%	2,00	446.194.160	0%	0,00%					
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	-	-	5,00	951.358.750	-	951.358.750	0%	-	100.000.000	0%	0,00%					
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Tani yang terbentuk Beroperasi (Unit)	-	-	5,00	809.741.300	-	809.741.300	100,00%	-	809.741.300	0%	0,00%					
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan difungsikan kapasitasnya (Orang)	-	-	5,00	96.000.000	-	96.000.000	0%	-	-	0%	0,00%					
	3.30.03	PROGRAM Peningkatan Sarana Distribusi		-	-		180.170.000		180.170.000	8,70%		15.675.000		0,00%				DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah laporan pengendalian stok yang tersedia (Laporan)-432	-	-	1,00	180.170.000	-	180.170.000	8,70%	-	15.675.000	0%	0,00%					
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pre Koperasi yang didampingi dan diberikan penyuluhan untuk mendirikan koperasi (kelompok)	-	-	35,00		20,00		57%	20,00		0%	0,00%					



No	Kode	Urusan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (output) (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPJMD 1/2 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPJMD yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPJMD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPJMD /d Tahun n-1(%)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Kgt.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Indragiri (Dokumen)	- ,00	- ,00	2,00	1,00	50%	1,00	0%					
3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				1.999.998.000	800.000.000	40,00%	800.000.000	0,00%	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM				
3.30.04.2.01		Manjalin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				1.999.998.000	800.000.000		800.000.000						
3.30.04.2.01.0003		Pengendalian Ketersediaan atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		- ,00	2,00	1.999.998.000	800.000.000	40,00%	800.000.000	0%					
3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)			83.376.000	32.288.000	38,73%	32.288.000	0,00%	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM				
3.30.06.2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat ukur pelaksanaan metrologi legal yang tersedia (Unit)-H33			83.376.000	32.288.000	38,73%	32.288.000	0%					
3.30.06.2.01.0001		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Ukur (Dibaca dan Unit)	- ,00	50,00	83.376.000	32.288.000	50%	32.288.000	0%					
3.31.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
3.31.02.01		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Unit)-H34			69.899.940	-	0,00%	-	0,00%	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM				
3.31.02.2.01		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	- ,00	1,00	69.899.940	- ,00	0,00%	- ,00	0%					
3.31.02.2.01.0004		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	- ,00	1,00	69.899.940	- ,00	0,00%	- ,00	0%					
4.01.02		SEKRETARIAT DAERAH													
4.01.02.2.01		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				23.868.300.000	12.410.000.000	51,99%	12.410.000.000	0,00%	SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.02.2.01		Administrasi Tata Pemerintahan				14.188.300.000	8.000.000.000		8.000.000.000						



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RKPD Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 4/6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 4/6 Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RKPD 4/6 Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Pemangku Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	-	.00	-	.00	1,00	1.300.000.000	-	.00	84,62%	-	1.100.000.000	0%	0,00%			
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	-	.00	-	.00	5,00	1.200.000.000	-	.00	25,00%	-	300.000.000	0%	0,00%			
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	-	.00	-	.00	1,00	1.168.300.000	-	.00	56,47%	-	6.600.000.000	0%	0,00%			
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		-		-			8.980.000.000					3.660.000.000					
	4.01.02.2.02.0002		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Program Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengabdian Masyarakat dan KB (Dokumen)	-	.00	-	.00	1,00	8.980.000.000	-	.00	40,76%	-	3.660.000.000	0%	0,00%			
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		-		-			700.000.000					750.000.000					
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	-	.00	-	.00	200,00	200.000.000	-	.00	75,00%	-	150.000.000	0%	0,00%			
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	-	.00	-	.00	3,00	300.000.000	-	.00	200,00%	-	600.000.000	0%	0,00%			
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	-	.00	-	.00	1,00	200.000.000	-	.00	0,00%	-	-	0%	0,00%			
	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMANGUNGAN		-		-			999.997.000					1.349.999.259				SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		-		-			999.997.000					1.349.999.259					
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	-	.00	-	.00	1,00	300.000.000	-	.00	116,67%	-	350.000.000	0%	0,00%			



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) Kegiatan (output)	5		6		7		8		9		10		11		Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Program Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	-	-	-	-	1,00	350.000.000	-	700.000.000	0%	-	-	0%	0,00%		
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	-	-	-	-	20,00	349.997.000	-	299.999.259	0%	-	-	0%	0,00%		
	4.02.02	SEKRETARIAT DPRD		-	-	-	-											
	4.02.02.2.01.0001	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		-	-	-	-											
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		-	-	-	-											
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	-	-	-	-	2,00	596.611.006	-	-	0%	-	-	0%	0,00%		
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	-	-	-	-	2,00	885.048.000	1,00	442.524.000	50%	1,00	442.524.000	0%	0,00%		
	4.02.02.2.01.0003	Penyenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	-	-	-	-	2,00	299.985.508	-	299.985.508	0%	-	-	0%	0,00%		
	4.02.02.2.01.0004	Penyusunan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	-	-	-	-	2,00	400.000.000	-	400.000.000	0%	-	-	0%	0,00%		
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	-	-	-	-	2,00	76.840.000	-	-	0%	-	-	0%	0,00%		
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran		-	-	-	-											
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	-	-	-	-	2,00	54.617.527	-	54.617.527	0%	-	-	0%	0,00%		
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	-	-	-	-	2,00	54.517.527	2,00	54.517.527	100%	2,00	54.517.527	0%	0,00%		
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	-	-	-	-	2,00	298.945.207	2,00	298.945.207	100%	2,00	298.945.207	0%	0,00%		
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	-	-	-	-	2,00	296.869.207	2,00	296.869.207	100%	2,00	296.869.207	0%	0,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Kegiatan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun-tahun yang direvisasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kdt.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	4.02.02.2.03.0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	-	0,00	-	0,00	2,00	57.900.000,00	2,00	57.900.000,00	0%	0,00%		13
	4.02.02.2.03.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	-	0,00	-	0,00	2,00	110.742.007,00	1,00	110.742.007,00	0%	0,00%		
	4.02.02.2.03	Penyenggaraan Pemerintahan		-	-	-	-	-	7.628.326.853	-	7.628.326.853				
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	-	0,00	-	0,00	1,00	2.421.163.054	-	2.421.163.054	0%	0,00%		
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur (Laporan)	-	0,00	-	0,00	1,00	2.454.805.011	1,00	2.454.805.011	0%	0,00%		
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	-	0,00	-	0,00	1,00	562.897.104	-	562.897.104	0%	0,00%		
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Perekonomian (Laporan)	-	0,00	-	0,00	3,00	839.745.656	2,00	839.745.656	0%	0,00%		
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	-	0,00	-	0,00	3,00	783.771.018	2,00	783.771.018	0%	0,00%		
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	-	0,00	-	0,00	1,00	314.350.000	1,00	314.350.000	0%	0,00%		
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	-	0,00	-	0,00	1,00	52.800.000	1,00	52.800.000	0%	0,00%		
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	-	0,00	-	0,00	1,00	198.795.010	1,00	198.795.010	0%	0,00%		
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD		-	-	-	-	-	4.241.258.680	-	4.241.258.680				



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (kecuali Kegiatan) (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPMD 1/6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPMD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPMD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPMD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPMD 1/6 Tahun n-1		Paragraf Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100%	1,00	0,00%	1,00	0,00%		13
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	3,00	667.970.000	- ,00	-	0%	- ,00	0%	1.275.500.000	0%		
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Orang dalam kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	- ,00	-	- ,00	4,00	2.791.938.000	2.699.758.680	126.000.000	50%	2,00	96,70%	2.699.758.680	0,00%		
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Masyarakat (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	1,00	363.534.000	- ,00	-	0%	- ,00	0,00%	- ,00	0,00%		
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Masyarakat (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	2,00	180.000.000	110.000.000	126.000.000	50%	2,00	61,11%	110.000.000	0%		
	4.02.02.2.04.0006	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Masyarakat (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	2,00	8.400.000	- ,00	-	0%	- ,00	0,00%	- ,00	0,00%		
	4.02.02.2.05.0002	Rubrikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Masyarakat (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	2,00	170.566.980	30.000.000	30.000.000	50%	1,00	17,59%	30.000.000	0%		
	4.02.02.2.05.0001	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Masyarakat (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	2,00	10.787.969.360	10.753.969.360	10.753.969.360	100%	2,00	100,00%	2.056.065.000	0%		
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Masyarakat (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	1,00	34.000.000	- ,00	-	0%	- ,00	0,00%	- ,00	0,00%		
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Masyarakat (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	75,00	8.697.904.350	8.697.904.350	8.697.904.350	100%	- ,00	100,00%	8.697.904.350	0%		
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	1,00	52.578.000	- ,00	-	0%	- ,00	0,00%	- ,00	0,00%		
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Masyarakat (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	1,00	625.122.000	901.165.740	68.680.000	0%	- ,00	0,00%	901.165.740	0%		
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Masyarakat (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	1,00	854.328.490	820.760.740	820.760.740	0%	- ,00	96,07%	820.760.740	0%		
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Masyarakat (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	1,00	11.345.824	11.725.000	11.725.000	0%	- ,00	9,91%	11.725.000	0%		
PERENCANAAN																	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja, RKPD 1/4 Tahun Lalu (n-3)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD y/d tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD y/d Tahun n-1 (%)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Kgt.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	282.183.726	1,00	282.183.726	100,00%	1,00	282.183.726	0%	0,00%			13
	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	500.000.000	- ,00	-	0%	- ,00	-	0%	0,00%			
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		-	-	-	-		3.509.462.339		1.749.998.353	49,87%		1.749.998.353		0,00%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan dan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		-	-	-	-		2.249.992.955		1.749.998.353			1.749.998.353		0,00%			
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan RPJMD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir per tahunnya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	1.299.998.507	1,00	1.299.998.507	100,00%	1,00	1.299.998.507	0%	0,00%			
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas (Rencana/Berita) dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	449.999.846	- ,00	449.999.846	0%	- ,00	449.999.846	0%	0,00%			
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir per tahunnya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	3,00	499.994.602	- ,00	-	0%	- ,00	-	0%	0,00%			
	5.01.03.2.02.0002	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SPA (Pember Daya Alam) Asisten Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Perencanaan		-	-	-	-		459.469.772		-			-		0,00%			
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		-	-	-	-		799.999.612		-			-		0,00%			
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir per tahunnya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	799.999.612	- ,00	-	0%	- ,00	-	0%	0,00%			



No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD pada t/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg di evaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yang Diverifikasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Kdt.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	KEUANGAN																12	13
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH																BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah																	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	-	-	-	-	169751.305.999	2,653.006.092	-	-	32,54%		55.242.507.233	0,00%				
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	-	-	-	-	49.997.770		-	-	0%		642.084.828	0%				
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	-	-	-	-	46.607.290		1,00	1,00	100,00%		46.607.290	0%				
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	-	-	-	-	135.432.264		-	-	0%		-	0%				
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	-	-	-	-	99.978.424		-	-	0%		-	0%				
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	-	-	-	-	134.989.060		1,00	1,00	100,00%		134.989.060	0%				
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	-	-	-	-	799.997.660		-	-	0%		-	0%				
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	-	-	-	-	99.999.201		-	-	0%		100.000.000	0%				
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	-	-	-	-	51.032.410		1,00	1,00	100%		25.516.205	0%				
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Anggaran Pendapatan (Dokumen)	-	-	-	-	49.982.143		1,00	1,00	100%		49.982.143	0%				
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	-	-	-	-	49.982.143		1,00	1,00	100%		49.982.143	0%				



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	5		6		7		8		9		10		11		Perangkat Daerah Pemanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Penganggaran Daerah (Kecamatan/Kabupaten/Kota)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	- ,00	- ,00	30,00	149.999.802	149.999.802	- ,00	100,00%	- ,00	0%	100,00%	- ,00	0%	0,00%			
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Pembendaharaan Daerah		-	-	-	899.993.528	899.993.528											
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	- ,00	- ,00	30,00	99.995.490	99.995.490	1,00	100,00%	1,00	3%	100,00%	1,00	0%	0,00%			
	5.02.02.2.02.0003	Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pembelian Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pembelian Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	- ,00	- ,00	240,00	-	-	- ,00	0,00%	- ,00	0%	0,00%	- ,00	0%	0,00%			
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	- ,00	- ,00	5,00	199.999.340	199.999.340	1,00	100,00%	1,00	20%	100,00%	1,00	0%	0,00%			
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pemotongan dan Penyortiran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemotongan dan Penyortiran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Kerja Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemotongan dan Penyortiran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	- ,00	- ,00	112,00	249.980.000	249.980.000	1,00	100,00%	1,00	1%	100,00%	1,00	0%	0,00%			
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan SPD dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan SPD dengan Instansi Terkait (Dokumen)	- ,00	- ,00	45,00	49.987.465	49.987.465	1,00	100,00%	1,00	2%	100,00%	1,00	0%	0,00%			



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yg direvisasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Kdt.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	5.02.02.2.02.001	Pembinaan Pentausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pentausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	-	0,00	-	0,00	41,00	300.031.233	1,00	300.031.233	0%	0,00%		13
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		-	-	-	1.424.998.835		1.899.998.467		1.424.998.835				
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Pemerintahan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Pemerintahan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	-	0,00	-	49.999.695	4,00	49.999.695	1,00	49.999.695	0%	0,00%		
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	-	0,00	-	-	10,00	50.000.000	-	0,00	0%	0,00%		
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	-	0,00	-	75.000.000	20,00	300.000.000	1,00	75.000.000	0%	0,00%		
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	-	0,00	-	549.999.580	6,00	549.999.580	-	0,00	0%	0,00%		
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	0,00	-	699.999.560	2,00	699.999.560	1,00	699.999.560	0%	0,00%		
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	-	0,00	-	50.000.000	2,00	50.000.000	1,00	50.000.000	0%	0,00%		



No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja RKPD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 1/8 Tahun Lalu (t-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 1/8 Tahun n-1		Paragraf Daerah Pemanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintahan Daerah		-	-	-	149.999.632	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%			
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Dokumen)	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	50.000.000	- ,00	-	- ,00	- ,00	0,00%	-	0,00%			
	5.02.02.2.04	Penujangan Urusan Keuangan Pengelolaan Daerah		-	-	-	163.948.346.802		52.075.432.562		52.075.432.562						
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Pencapaian dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Pencapaian dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	154.548.346.802	0,50	48.570.435.082	0,50	48.570.435.082	0%	0,00%	0,00%			
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	- ,00	-	- ,00	9.400.000.000	0,75	3.504.997.480	0,75	3.504.997.480	0%	0,00%	0,00%			
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Lingkup Keuangan Daerah		-	-	-	199.997.480		199.997.480		199.997.480						
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	99.997.480	1,00	99.997.480	1,00	99.997.480	0%	0,00%	0,00%			
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Milik Daerah Bidang Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Kabupaten/Kota (Orang)	- ,00	-	- ,00	100.000.000	2%	100.000.000	2%	100.000.000	0%	0,00%	0,00%			
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		-	-	-	1.789.617.222		839.907.731		839.907.731			0,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah		-	-	-	1.789.617.222		839.907.731		839.907.731						
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	249.963.901	1,00	249.963.901	1,00	249.963.901	0%	0,00%	0,00%			
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	400.000.000	- ,00	-	- ,00	- ,00	0,00%	-	0,00%			
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	- ,00	-	- ,00	389.693.265	- ,00	189.980.000	0%	189.980.000	0%	0,00%	0,00%			
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	- ,00	-	- ,00	399.999.226	1,00	199.999.000	17%	199.999.000	0%	0,00%	0,00%			



No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 1/4 tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd 1/4 Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD 1/4 Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Pemanggung Jawab	Kec.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	-	0,00	-	0,00	6,00	149.996.000	-	0,00	0,00%	0,00%				
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Laporan)	-	0,00	-	0,00	20,00	199.964.830	1,00	100,00%	0%	0,00%				
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		-		-			1.286.567.134		59,81%		0,00%				
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		-		-			1.286.567.134								
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	-	0,00	-	0,00	5,00	244.999.304	5,00	100,00%	0%	0,00%				
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		-		-			99.990.830								
	5.02.04.2.01.0005	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	-	0,00	-	0,00	9,00	99.980.000	5,00	100,00%	56%	0,00%				
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disediakan dan Didaftarkan NJO P nya (Objek Pajak)	-	0,00	-	0,00	100,00	50.000.000	5,00	100,00%	5%	0,00%				
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Objek Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	-	0,00	-	0,00	100,00	70.000.000	5,00	100,00%	5%	0,00%				
	5.02.04.2.01.0011	Penaugihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	-	0,00	-	0,00	10,00	241.998.000	-	0%	0%	0,00%				
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	-	0,00	-	0,00	5,00	50.000.000	-	0%	0%	0,00%				
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Realisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Realisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Laporan)	-	0,00	-	0,00	10,00	29.999.000	-	0,00%	0%	0,00%				
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		-		-			400.000.000		0,00%		0,00%				
KEPEGAWAIAN																	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD tahun berjalan yg diawalkan (tahun n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg diawalkan (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Diawalkan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd y/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD y/d Tahun n-1 (%)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
5.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH																		
5.03.02.2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawain ASN																		
5.03.02.2.01.0002		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	-	-	-	-	1,00	340.587.000	1,00	340.587.000	100,00%	100%	1,00	340.587.000	100%	100%			
5.03.02.2.01.0001		Pengelolaan Data Kepegawain	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawain (Dokumen)	-	-	-	-	1,00	102.981.460	1,00	102.981.460	100,00%	100%	1,00	102.981.460	100%	100%			
5.03.02.2.02		Mutasi dan Promosi ASN																		
5.03.02.2.02.0002		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengeloan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	-	-	-	-	60,00	149.992.750	60,00	149.992.750	100,00%	100%	60,00	149.992.750	100%	100%			
5.03.02.2.03		Pengembangan Kompetensi ASN																		
5.03.02.2.03.0001		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	-	-	-	-	35,00	49.998.350	35,00	49.998.350	100,00%	100%	35,00	49.998.350	100%	100%			
5.03.02.2.03.0005		Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)	-	-	-	-	1,00	580.780.000	1,00	580.780.000	100,00%	100%	1,00	580.780.000	100%	100%			
5.03.02.2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
5.03.02.2.04.0010		Evaluasi Disiplin ASN (Laporan)	Jumlah Laporan Disiplin ASN (Laporan)	-	-	-	-	10,00	178.742.310	10,00	178.742.310	100,00%	100%	10,00	178.742.310	100%	100%			
5.04.02		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																		
5.04.02.2.01		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																		
5.04.02.2.01.0003		Pengembangan Kompetensi dan Peningkatan Kualitas bagi Jabatan Administrasi Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	-	-	-	-	80,00	1.299.999.832	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%			
5.04.02.2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional																		
5.04.02.2.02.0005		Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga (Dokumen)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga (Dokumen)	-	-	-	-	1,00	99.969.880	1,00	99.969.880	100,00%	100%	1,00	99.969.880	100%	100%			



No	Kode	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPd 5/6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd yg Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd 5/6 Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd 5/6 Tahun n-1		Pangikat Daerah Peninggung Javab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	5.04.02.2.02.0007	Penyenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional, Kepimimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional, Kepimimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	-	0,00	1,00	280.903.500	1,00	280.903.500	100,00%	1,00	280.903.500	0%	0,00%				
INSPEKTORAT DAERAH																		
6.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		-	-	-	2.886.163.331	-	2.886.163.331	103,59%	-	2.886.163.331	0,00%	0,00%			INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.02.2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		-	-	-	2.886.163.331	-	2.886.163.331		-	2.886.163.331	0,00%	0,00%				
6.01.02.2.01.0001		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	-	0,00	2,00	199.972.000	3,00	199.972.000	150%	3,00	799.925.000	0%	0,00%				
6.01.02.2.01.0002		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	-	0,00	32,00	799.925.000	1,00	181.442.575	3%	1,00	181.442.575	0%	0,00%				
6.01.02.2.01.0003		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	-	0,00	5,00	204.800.000	1,00	181.442.575	20%	1,00	204.800.000	0%	0,00%				
6.01.02.2.01.0004		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	-	0,00	3,00	199.997.622	-	0,00	0%	-	0,00%	0%	0,00%				
6.01.02.2.01.0005		Pengawasan Desa	Jumlah Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	-	0,00	5,00	204.800.000	3,00	299.999.000	60%	3,00	299.999.000	0%	0,00%				
6.01.02.2.01.0006		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP (Dokumen)	-	0,00	2,00	299.999.000	1,00	499.998.256	50%	1,00	499.998.256	0%	0,00%				
6.01.02.2.01.0007		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP (Dokumen)	-	0,00	2,00	299.999.000	1,00	499.998.256	40,00%	1,00	499.998.256	0%	0,00%				
6.01.02.2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		-	-	-	699.999.000	-	699.999.000		-	699.999.000	0%	0,00%				
6.01.02.2.02.0001		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	-	0,00	1,00	200.000.000	3,00	199.999.500	300%	3,00	199.999.500	0%	0,00%				



No	Kode	Usuan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RKPD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 1/6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dialevaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD y/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD 1/4 Tahun n-1 (%)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	701.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kearsyafatan yang Disediakan (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kearsyafatan yang Disediakan (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	5,00	399.921.541	- ,00	0,00%	0,00%	0,00%				
	701.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		-	-	-	-	-	75.000.000	-	0,00%	0,00%	0,00%	DISTRIK SARMI			
	701.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelegaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum		-	-	-	-	-	75.000.000	-							
	701.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	75.000.000	- ,00	0,00%	0,00%	0,00%				
	701.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-	-	-	-	-	44.400.000	-	0,00%	0,00%	0,00%	DISTRIK TOR ATAS			
	701.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kearsyafatan Tingkat Kecamatan		-	-	-	-	-	44.400.000	-							
	701.03.2.03.0001	Penyelegaraan Lembaga Kearsyafatan	Jumlah Lembaga Kearsyafatan yang Dielestirakan (Lembaga Kearsyafatan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	44.400.000	- ,00	0,00%	0,00%	0,00%				
	701.02	PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		-	-	-	-	-	44.000.000	-	54,55%	54,55%	0,00%	DISTRIK BONGGO			
	701.02.2.01	Koordinasi Penyelegaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		-	-	-	-	-	22.000.000	-							
	701.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	22.000.000	- ,00	54,55%	54,55%	0%				
	701.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		-	-	-	-	-	22.000.000	-							
	701.02.2.03.0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	22.000.000	- ,00	54,55%	54,55%	0%				
	701.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-	-	-	-	-	44.000.000	-	54,55%	54,55%	0,00%	DISTRIK BONGGO			



No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Peningkatan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d 6 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg direalisasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (%)		Parangkat Daerah Pemangku Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2														
	701.03.2.03	Pembudayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan													
	701.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan													
	701.03.2.06	Pembudayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan													
	701.03.2.06.0007	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menempikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat													
	701.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTIBAN UMUM													
	701.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keintimaran dan Kertertiban Umum													
	701.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
	701.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													
	701.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa													
	701.06.2.01.0002	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
	701.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
	701.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan													



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (output) Kegiatan (output)	Target Kinerja RKPD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 1/2 Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD divaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yang Divaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 1/2 Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 1/2 Tahun n-1 (%)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Kd.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	13.993.023	- ,00	13.993.023	- ,00	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-	-	-	20.500.000	-	20.500.000	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	- ,00	-	- ,00	20.500.000	- ,00	20.500.000	- ,00	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		- ,00	-	- ,00	20.500.000	- ,00	20.500.000	- ,00	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-	-	-	96.000.000	-	96.000.000	-	83,33%	83,33%	80.000.000	0,00%	80.000.000	0,00%			
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		-	-	-	96.000.000	-	96.000.000	-			80.000.000		80.000.000				
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	96.000.000	1,00	96.000.000	- ,00	83,33%	83,33%	80.000.000	0,00%	80.000.000	0,00%			
	8.01.02	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		-	-	-	1.099.999.844	-	1.099.999.844	-	100,00%	100,00%	1.099.998.500	0,00%	1.099.998.500	0,00%			
	8.01.02.2.01	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		-	-	-	1.099.999.844	-	1.099.999.844	-			1.099.998.500		1.099.998.500				
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Pusikbraka	Jumlah Pusikbraka (Orang)	- ,00	-	- ,00	1.099.999.844	50,00	1.099.999.844	- ,00	100,00%	100,00%	1.099.998.500	0,00%	1.099.998.500	0,00%			
	8.01.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		-	-	-	1.296.135.135	-	1.296.135.135	-	54,00%	54,00%	699.950.656	0,00%	699.950.656	0,00%			
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	-	1.296.135.135	-	1.296.135.135	-			699.950.656		699.950.656				



No	Kode	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RKPD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 1/2 Tahun Lalu (t-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 1/2 tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD 1/2 Tahun n-1 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
1	8.01.03.2.01.0002	Perencanaan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Demokrasi, Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Fasilitas Kelembagaan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	-	-	-	1.090.195,00	1.090.195.005	494.010.656	494.010.656	45,3%	494.010.656	0%	494.010.656	0,00%	
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	-	-	-	205.940,00	205.940.130	205.940.000	205.940.000	100%	205.940,00	0%	205.940.000	0,00%	
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNITAS EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		-	-	-	393.060,000	393.060.000	393.060.000	393.060.000	100,00%	393.060.000	0,00%	393.060.000	0,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Pemantauan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		-	-	-	393.060,00	393.060.000	393.060.000	393.060.000	100,00%	393.060,00	0%	393.060.000	0,00%	
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Fasilitas Penyelenggaraan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Fasilitas Penyelenggaraan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	-	-	-	34.188,141	34.188.141	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEMASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		-	-	-	34.188,141	34.188.141	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		-	-	-	34.188,141	34.188.141	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (output)/ Kegiatan (output)	5		6		7		8		9		10		11		12	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	8.01.06.2.01.0003	Penyediaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama, Pertahanan, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama, Pertahanan, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	13	

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan Kabupaten SarMI menggambarkan berbagai tantangan dalam penyediaan layanan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Kondisi geografis SarMI yang didominasi wilayah pesisir, sungai, kampung adat, serta konektivitas antar-distrik yang terbatas menjadi faktor struktural yang memengaruhi capaian pembangunan. Permasalahan ini berhubungan langsung dengan prioritas nasional, prioritas pembangunan daerah, serta tugas dan fungsi perangkat daerah.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten SarMI hingga tahun berjalan menunjukkan adanya kemajuan pada beberapa indikator makro, namun masih dihadapkan pada berbagai permasalahan mendasar yang berhubungan langsung dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kompleksitas permasalahan tersebut dipengaruhi oleh karakteristik wilayah yang luas, sebaran penduduk yang tidak merata, serta keterbatasan konektivitas antar distrik, terutama yang berada pada wilayah pesisir, alur sungai, dan kawasan adat terpencil. Secara umum, permasalahan pembangunan daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Permasalahan pada pencapaian peningkatan kualitas SDM dan layanan dasar.

Akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan masih belum merata, khususnya pada distrik yang jauh dari pusat layanan dan hanya dapat dijangkau melalui transportasi sungai atau laut. Ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan belum mencukupi, sementara kualitas layanan belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). Kondisi ini berdampak pada capaian IPM, pemerataan kualitas pendidikan, dan masih tingginya risiko masalah kesehatan ibu dan anak.

2. Permasalahan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar.

Konektivitas antar distrik dan kampung masih menjadi kendala utama. Infrastruktur jalan kabupaten, jembatan, dan jaringan transportasi belum seluruhnya terbangun atau dalam kondisi rusak, sehingga menghambat distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan telekomunikasi belum menjangkau seluruh wilayah, terutama kampung-kampung adat yang berada jauh dari pusat pertumbuhan.

3. Permasalahan dalam penguatan ekonomi lokal dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Struktur ekonomi Kabupaten SarMI yang masih bergantung pada sektor primer menghadapi tantangan rendahnya produktivitas, minimnya fasilitas pascapanen, terbatasnya akses pasar, serta belum optimalnya nilai tambah komoditas unggulan. Tidak stabilnya pertumbuhan ekonomi daerah juga dipengaruhi oleh lemahnya investasi serta terbatasnya kegiatan ekonomi produktif di distrik-distrik terpencil. Kondisi ini berdampak pada pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan yang masih fluktuatif.

4. Permasalahan kemiskinan dan ketimpangan antarwilayah.

Masih terdapat kantong-kantong kemiskinan di beberapa distrik pesisir dan lembah sungai yang belum terintervensi secara optimal. Kesenjangan akses terhadap layanan dasar, minimnya lapangan kerja layak, dan rendahnya keterampilan masyarakat turut memengaruhi peningkatan angka kemiskinan pada tahun tertentu. Ketimpangan antarwilayah juga tercermin dari perbedaan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur antara distrik di pusat pemerintahan dan distrik-distrik yang jauh dari jalur transportasi utama.

5. Permasalahan tata kelola pemerintahan, kapasitas fiskal, dan efektivitas perangkat daerah.

Keterbatasan kapasitas fiskal daerah masih menjadi tantangan dalam mendukung pembiayaan pembangunan prioritas, terutama pada program yang berhubungan dengan layanan dasar dan pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, kapasitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program pada sebagian perangkat daerah memerlukan penguatan agar konsisten dengan target RPJMD dan RKPD. Penyelarasan dokumen perencanaan juga masih memerlukan perbaikan, khususnya antara Renstra OPD, RKPD, hingga RKA dan APBD.

6. Permasalahan lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Letak geografis Kabupaten SarMI yang berada pada kawasan pesisir dan sungai menjadikan sebagian wilayah rentan terhadap bencana alam seperti banjir, abrasi pantai, dan gelombang pasang. Pengelolaan sumber daya alam belum optimal, sementara kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana dan kebersihan lingkungan masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini memengaruhi ketahanan wilayah dan perlindungan terhadap kawasan pemukiman masyarakat.

Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan dasar dalam merumuskan prioritas pembangunan daerah tahun 2026. Penguatan konektivitas, peningkatan kualitas layanan dasar, penurunan kemiskinan, serta optimalisasi potensi ekonomi lokal menjadi fokus utama untuk mendorong percepatan pembangunan yang lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Sarmi.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Pengelolaan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Sarmi masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek kelembagaan, kapasitas perangkat daerah, ketersediaan sumber daya, maupun kualitas layanan kepada masyarakat. Kondisi geografis Sarmi yang bercorak pesisir, sungai, pulau dan hutan, memiliki banyak kampung yang tersebar sepanjang pantai dan alur sungai, pulau dan hutan, serta keterbatasan konektivitas antar distrik, menjadi faktor yang berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan.

Proses penyelenggaraan urusan wajib maupun pilihan masih belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Hal ini tercermin dari masih bervariasinya kinerja perangkat daerah dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal, belum meratanya distribusi tenaga teknis dan pelayanan, serta adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan kapasitas layanan yang tersedia. Selain itu, koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program prioritas daerah juga belum berjalan secara konsisten, sehingga berdampak pada efektivitas pelaksanaan pembangunan di tingkat distrik dan kampung.

Melalui sub bab ini dilakukan identifikasi permasalahan utama pada setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non-pelayanan dasar, maupun urusan pilihan. Identifikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai isu-isu strategis yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus menjadi dasar penyusunan alternatif kebijakan, prioritas pembangunan daerah, serta perbaikan kinerja perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Sarmi.

Sebagai tindak lanjut dari identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diuraikan sebelumnya, diperlukan pemetaan yang lebih rinci terhadap permasalahan yang dihadapi masing-masing perangkat daerah. Pemetaan ini penting untuk memastikan bahwa

setiap isu strategis, hambatan pelayanan, serta kesenjangan capaian kinerja dapat dianalisis secara spesifik sesuai karakteristik urusan yang dikelola. Dengan pendekatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sarmi dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi faktual penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat perangkat daerah, sehingga arah kebijakan dan prioritas pembangunan dapat disusun secara lebih terukur, konsisten, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di seluruh distrik.

Secara umum, permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Sarmi meliputi:

1) Urusan Pendidikan

- Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih rendah yaitu sekitar 7,2 tahun, dipengaruhi keterbatasan akses pendidikan di distrik pedalaman, pesisir, dan kampung adat.
- Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) masih dijumpai pada masyarakat pesisir dan kampung-kampung akibat jarak sekolah dan minimnya transportasi.
- Mutu layanan PAUD belum merata; masih terdapat lembaga PAUD belum terakreditasi dan belum memiliki tenaga pendidik yang memadai.
- APM SD dan SMP belum mencapai target, salah satunya akibat distribusi guru tidak merata dan kondisi geografis.

2) Urusan Kesehatan

- Prevalensi stunting masih di atas rata-rata provinsi, terutama di wilayah distrik Bonggo, Sarmi Timur, Pantai Barat, Tor Atas dan Apawer, dipengaruhi keterbatasan gizi, sanitasi, serta akses layanan kesehatan.
- SDM kesehatan belum lengkap pada tingkat Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
- Angka kematian ibu dan bayi berisiko meningkat akibat keterlambatan rujukan, jarak tempuh jauh, dan keterbatasan transportasi darat maupun laut.
- Layanan kesehatan jiwa dan pelayanan promotif – preventif belum tersedia di seluruh Puskesmas.
- Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional belum mencapai universal coverage.

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Penyediaan dokumen tata ruang seperti RDTR belum menjangkau kawasan strategis pesisir dan pusat pertumbuhan baru.
- Akses sanitasi dan air minum layak masih rendah, terutama pada kampung dengan akses sulit.

- Kondisi kemantapan jalan kabupaten masih rendah, dipengaruhi topografi, curah hujan tinggi, dan keterbatasan anggaran pemeliharaan.
- Konektivitas antar-distrik—khususnya wilayah Apawer, Pantai Barat, Sarmi Selatan, Tor Atas dan Pantai Timur yang belum memadai karena keterbatasan jembatan dan ruas strategis.

4) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Identifikasi kawasan kumuh belum komprehensif, khususnya di kawasan pesisir dan bantaran sungai.
- Data RTLH belum mutakhir sehingga menyulitkan pemetaan kebutuhan intervensi.

5) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Personel Satpol PP sangat terbatas dibandingkan luas wilayah dan sebaran kampung.
- Kesiapsiagaan bencana belum optimal, sementara Sarmi rawan banjir, gelombang pasang, dan abrasi pesisir.

6) Urusan Sosial

- Persentase penduduk miskin masih cukup tinggi dan terdistribusi terutama pada kampung dengan akses sulit dan beberapa wilayah pulau.
- Fasilitas publik ramah disabilitas masih terbatas.
- Data kemiskinan belum mutakhir sehingga intervensi bantuan sosial belum tepat sasaran optimal.

7) Urusan Tenaga Kerja

- Peluang kerja formal rendah; sebagian besar penduduk bekerja pada sektor informal (nelayan, buruh tani, jasa lokal).
- Pelatihan vokasi berbasis potensi lokal belum optimal.

8) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi, terutama pada wilayah sulit akses layanan perlindungan.
- Angka perkawinan usia anak masih tinggi karena kondisi sosial ekonomi dan rendahnya pendidikan.

9) Urusan Lingkungan Hidup

- Pengelolaan sampah belum terstruktur dan masih dilakukan secara terbuka.
- Terjadi kerusakan ekosistem pesisir, abrasi, dan penurunan kualitas air sungai.
- Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan sumber daya alam belum optimal.

10) Urusan Pangan

- Cadangan pangan daerah masih terbatas; Pengelolaan cadangan pangan tingkat kabupaten belum sepenuhnya mendukung penanganan kerawanan pangan di wilayah-wilayah terisolasi.
- Ketergantungan tinggi pada pasokan pangan dari luar daerah; Komoditas pangan pokok sebagian besar didatangkan dari Jayapura dan luar Papua, sehingga rawan terganggu saat cuaca buruk atau biaya logistik naik.
- Produksi pertanian lokal belum berkembang optimal; Lahan potensial belum dikelola maksimal, teknologi budidaya terbatas, dan kelompok tani membutuhkan peningkatan kapasitas serta alat produksi.
- Keterbatasan data pangan lintas kampung dan distrik; Informasi stok, produksi, dan kebutuhan pangan belum terintegrasi sehingga menyulitkan pemetaan kerawanan pangan secara cepat dan akurat.

11) Urusan Dukcapil

- Kepemilikan dokumen kependudukan belum universal, terutama pada kampung pedalaman dan pesisir.
- Kesadaran administrasi kependudukan masyarakat masih rendah.

12) Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

- Akses layanan KB modern masih terbatas di kampung terpencil.
- Penggunaan kontrasepsi modern masih rendah.

13) Urusan Perhubungan

- Sarana transportasi darat dan laut masih minim, sehingga menghambat mobilitas barang dan orang antar-distrik.
- Perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan belum memadai karena sulitnya akses logistik dan minimnya anggaran pemeliharaan.

14) Urusan Kominfo

- Infrastruktur telekomunikasi dan internet belum merata; sebagian besar kampung belum terlayani sinyal yang stabil;
- Pemanfaatan SPBE masih rendah akibat keterbatasan SDM teknis.

15) Urusan Statistik

- Pengelolaan Satu Data Daerah belum optimal, ditandai dengan belum konsistennya penyediaan data sektoral dari OPD serta variasi kualitas data antar-distrik.
- Integrasi data spasial (satu peta) belum berjalan penuh, dan distrik dan kampung juga belum memiliki pemetaan lengkap.
- Ketersediaan data pembangunan masih terbatas pada sebagian indikator, sehingga menyulitkan analisis mendalam untuk perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning).

- Kapasitas pengelolaan data di tingkat OPD masih bervariasi, termasuk keterbatasan SDM statistik di distrik dan kampung.
- Infrastruktur pengelolaan data belum merata, khususnya jaringan internet dan perangkat penginputan data di wilayah dengan akses yang sulit.

16) Urusan Persandian

- Optimalisasi keamanan informasi pemerintahan belum maksimal, terutama terkait perlindungan data layanan publik dan keamanan jaringan perangkat daerah.

17) Urusan Koperasi dan UKM

- Persentase koperasi aktif dan berkualitas masih rendah .
- Kapasitas manajerial pengurus koperasi bervariasi dan sebagian belum memenuhi standar tata kelola sehat.
- UMKM di tingkat distrik dan kampung masih menghadapi kendala akses modal, pasar, serta teknologi pengolahan.
- Masih perlunya pendampingan kepada produk usaha mikro yang belum memiliki sertifikasi merk, halal dan BPPOM.

18) Urusan Penanaman Modal

- Belum tersedianya RDTR yang lengkap pada wilayah potensial investasi (pesisir, kawasan wisata, dan sentra perikanan), sehingga kepastian ruang bagi investor masih terbatas.
- Promosi dan fasilitasi investasi belum optimal, khususnya untuk sektor unggulan SarMI seperti perikanan, kelautan, dan pariwisata alam.
- Potensi investasi pesisir dan wisata bahari belum tergarap maksimal, termasuk peluang yang muncul dari peningkatan konektivitas antar-distrik dan akses jalan ke wilayah pantai.

19) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- Keterbatasan sarana latihan dan fasilitas olahraga, termasuk GOR, lapangan serbaguna, serta venue untuk cabang olahraga tertentu di distrik-distrik.
- Kompetisi olahraga pelajar belum rutin, sehingga pembinaan atlet usia dini belum berjalan optimal.
- Kegiatan kepemudaan belum berkembang merata, terutama di kampung-kampung dan distrik terpencil yang ingin diberdayakan melalui kegiatan kreativitas, wirausaha muda, dan event pemuda.

20) Urusan Kebudayaan

- Terbatasnya ruang kreasi dan ekspresi budaya bagi komunitas seni lokal, termasuk sanggar dan program pelestarian budaya berbasis kampung.
- Penguatan budaya lokal dan tradisi kampung adat belum optimal, terutama dokumentasi, revitalisasi tarian, musik, dan pengetahuan lokal masyarakat pesisir–sungai.

21) Urusan Kearsipan

- Belum seluruh perangkat daerah memiliki tenaga kearsipan atau pengelola arsip yang memahami standar tata kelola arsip.
- Pengelolaan arsip digital masih terbatas, padahal diperlukan untuk pelayanan administrasi yang lebih cepat dan aman, termasuk di distrik-distrik.

22) Urusan Perpustakaan

- Belum tersedianya perpustakaan daerah yang representatif sebagai pusat layanan literasi masyarakat.
- Minat baca masyarakat masih rendah, terutama di kampung-kampung yang akses bacaannya terbatas.
- Konten literasi digital dan pembaruan media informasi belum optimal, sementara masyarakat mulai mengakses informasi melalui telepon genggam dan media daring.

23) Urusan Pariwisata

- Kolaborasi dengan stakeholder pariwisata belum optimal, termasuk peran pelaku usaha lokal, komunitas wisata bahari, dan lembaga adat.
- Event pariwisata belum berkembang, terutama event yang dapat menonjolkan potensi bahari, sungai, budaya, serta wisata minat khusus Sarmi.
- Fasilitasi HAKI untuk pelaku ekonomi kreatif masih minim, terutama bagi kerajinan khas kampung adat dan karya seni lokal.
- Branding pariwisata Kabupaten Sarmi belum optimal, sehingga promosi potensi unggulan seperti pantai, sungai, hutan, dan wisata budaya belum dikenal luas.

24) Urusan Kelautan dan Perikanan

- Pendampingan dan sarpras budidaya ikan masih terbatas, terutama bagi komoditas perikanan tangkap dan budidaya yang potensinya besar namun belum tergarap optimal .
- Kelembagaan nelayan belum kuat, termasuk organisasi nelayan, koperasi nelayan, dan unit pengolahan hasil perikanan yang masih bersifat sporadis.

- Fasilitas rantai dingin (cold chain) minim, sehingga hasil tangkapan tidak bertahan lama, terutama di distrik pesisir yang jauh dari pusat kabupaten.
- Akses bahan bakar, es, dan logistik perikanan tidak merata, sehingga biaya operasional nelayan menjadi tinggi.

25) Urusan Pertanian

- Perencanaan budidaya belum adaptif terhadap kondisi cuaca ekstrem, terutama pada wilayah yang sering mengalami curah hujan tinggi dan banjir sungai.
- Penanganan pascapanen masih terbatas, menyebabkan nilai tambah komoditas pangan dan hortikultura rendah.
- Penerapan pertanian organik masih minim, meskipun terdapat potensi lahan dan permintaan pasar lokal yang mulai tumbuh.
- Ketersediaan pakan ternak belum stabil, dan kerjasama penyediaannya antarwilayah belum optimal.
- Pertanian modern belum berkembang, karena keterbatasan alat mesin pertanian (alsintan), teknologi budidaya, dan akses pelatihan.
- Pendampingan untuk petani muda/hortikultura masih kurang, padahal distrik-distrik tertentu memiliki potensi pengembangan sayuran dataran rendah.

26) Urusan Perdagangan

- Belum seluruh pasar rakyat direvitalisasi, padahal banyak pasar distrik masih beroperasi dengan kondisi dasar dan belum memenuhi standar keamanan pangan.
- Penerapan e-retribusi belum merata, karena ketersediaan jaringan internet dan perangkat pembayaran non-tunai masih terbatas.
- Pembinaan ekspor hasil perikanan dan produk lokal belum optimal, padahal terdapat potensi perikanan tangkap dan komoditas UMKM yang bisa dikembangkan.
- Distribusi barang perdagangan tidak efisien, terutama ke distrik terluar yang bergantung pada angkutan laut dan sungai.

27) Urusan Perindustrian

- Pengembangan industri berbasis sumber daya lokal belum optimal, terutama industri kecil pengolahan ikan, kopra, sagu, dan kerajinan lokal.
- Keterbatasan sarana produksi dan energi di beberapa distrik menghambat tumbuhnya sentra industri kecil.
- Kapasitas SDM industri kecil/rumah tangga masih rendah, termasuk kemampuan pengemasan, kualitas produksi, dan pemasaran.

28) Urusan Sekretariat Daerah

- Implementasi SAKIP belum optimal, ditandai variatifnya kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan pada perangkat daerah.
- Integrasi perencanaan–penganggaran masih perlu diperkuat, terutama dalam penyelarasan target RPJMD dengan program dan kegiatan OPD.
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen kinerja masih terbatas, khususnya pada OPD dan distrik dengan SDM perencanaan yang belum merata.

29) Sekretariat DPRD Kabupaten SarMI

- Dukungan administrasi dan persidangan DPRD belum sepenuhnya berbasis aplikasi digital, sehingga efisiensi kerja belum optimal.
- Ketersediaan sarana ruang rapat dan dokumentasi sidang masih terbatas.
- Penyebaran informasi hasil-hasil pembahasan DPRD kepada masyarakat belum optimal.
- Keterbatasan SDM teknis di sekretariat untuk mendukung fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

30) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

- Kualitas data dasar pembangunan dari OPD dan distrik belum konsisten sehingga menghambat analisis perencanaan.
- Kapasitas perencanaan di distrik masih rendah, menyebabkan ketidaktepatan penyusunan usulan program/kegiatan.
- Integrasi perencanaan–penganggaran dalam SIPD belum optimal dan sering terkendala jaringan.
- Monitoring dan evaluasi pembangunan belum sepenuhnya berbasis data spasial dan dashboard kinerja.
- Keterbatasan peta tematik wilayah adat dan kampung adat untuk perencanaan berbasis wilayah (spatial planning).

31) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

- Pengelolaan aset daerah masih terkendala pendataan dan penandaan aset di distrik dengan akses sulit.
- Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan sering terpengaruh oleh kendala komunikasi dan jaringan dari OPD/distrik.
- Optimalisasi pemanfaatan aset belum maksimal karena belum seluruh aset terpetakan secara digital.
- Kapasitas SDM pengelola keuangan di beberapa OPD belum optimal.

32) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

- Potensi PAD dari sektor jasa, perdagangan, dan perikanan belum tergarap optimal karena belum adanya basis data potensi yang lengkap.
- Penerapan sistem pemungutan pajak/retribusi secara digital masih terbatas akibat kendala jaringan.
- Tingkat kepatuhan pajak masyarakat rendah, khususnya pada pelaku usaha kecil di kampung .
- Keterbatasan sarana pelayanan pajak keliling ke distrik jauh.

33) Inspektorat Daerah

- Pengawasan internal belum sepenuhnya berbasis risiko (risk-based audit).
- Cakupan pengawasan ke distrik jauh terkendala jarak, cuaca, dan sarana transportasi.
- SDM auditor masih terbatas terutama bidang audit kinerja dan audit berbasis sistem informasi.
- Tindak lanjut hasil pemeriksaan belum seragam di tiap OPD.

34) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM)

- Distribusi ASN belum merata, banyak distrik terpencil kekurangan guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
- Kapasitas ASN masih rendah dalam pemanfaatan aplikasi pemerintahan dan penggunaan teknologi digital.
- Sistem manajemen kinerja ASN belum diterapkan secara optimal.
- Keterbatasan anggaran pengembangan kompetensi untuk memenuhi standar minimal pelatihan.
- Masih tingginya ketergantungan pada tenaga honorer untuk layanan dasar di kampung dan distrik.

35) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

- Pembinaan kehidupan politik di distrik dan kampung adat belum optimal karena jarak geografis dan minimnya forum dialog.
- Penguatan wawasan kebangsaan, terutama bagi pemuda dan pelajar di wilayah terpencil, masih terbatas.
- Deteksi dini dan pencegahan potensi konflik sosial belum didukung sistem informasi yang kuat; monitoring keamanan sering terkendala medan dan komunikasi.

BAB III

KERANGKA EKONOMI KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Bab ini menguraikan secara komprehensif mengenai kerangka ekonomi daerah dan kerangka keuangan daerah Kabupaten SarMI Tahun 2026, yang meliputi kerangka ekonomi makro daerah serta kerangka pendanaan dan pembiayaan pembangunan yang menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2026.

Kerangka ekonomi makro daerah disusun untuk memberikan gambaran umum arah kebijakan perekonomian Kabupaten SarMI, dengan memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi kinerja ekonomi, baik dari sisi perekonomian regional, nasional, maupun dinamika ekonomi global. Analisis ini diharapkan mampu menggambarkan kondisi riil perekonomian daerah serta tren perkembangan utama yang berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan kesejahteraan masyarakat di tahun perencanaan.

Dalam rangka mencapai target-target kinerja ekonomi makro yang direncanakan, maka kerangka pendanaan dan pembiayaan pembangunan menjadi bagian penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Kerangka ini memberikan gambaran mengenai perkiraan kapasitas pendapatan daerah dari berbagai sumber, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer pemerintah pusat, maupun sumber pendanaan lainnya. Selain itu, kerangka pendanaan juga memuat proyeksi belanja daerah dan pembiayaan pembangunan, yang diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten SarMI secara efektif, efisien, dan berkelanjutan dengan berpedoman pada prinsip perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

Pada bab ini akan disajikan kondisi perekonomian Kabupaten SarMI hasil publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) hingga tahun 2024, serta proyeksi perekonomian untuk tahun 2026 yang diuraikan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah. Analisis ini sekaligus menjadi dasar untuk menjelaskan keterkaitan antara indikator makro ekonomi daerah dengan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembiayaan daerah.

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah berfungsi sebagai landasan dalam menentukan arah kebijakan alokasi sumber daya keuangan daerah secara optimal, dengan menggunakan pendekatan “money follow program”, yaitu pengalokasian anggaran yang berorientasi pada hasil dan capaian program prioritas pembangunan.

Lebih lanjut, dalam penentuan kapasitas keuangan daerah tahun 2026, posisi realisasi anggaran tahun sebelumnya menjadi acuan utama dalam menetapkan kemampuan fiskal daerah. Dengan demikian, perencanaan pendanaan pembangunan dapat disusun secara realistis, proporsional, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap kondisi ekonomi serta kapasitas keuangan daerah, maka kerangka ekonomi dan keuangan daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2026 akan dijelaskan lebih rinci pada sub-bab berikutnya.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Sarmi pada dasarnya ditujukan untuk mengimplementasikan program pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, sekaligus menjawab berbagai permasalahan dan isu strategis daerah yang dihadapi. Arah kebijakan ekonomi ini menjadi landasan bagi perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Dengan demikian, penyusunan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Sarmi perlu didasarkan pada kajian yang komprehensif, serta berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2045 dan RPD Kabupaten Sarmi Tahun 2024–2026. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dalam RKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2025 merupakan formula strategis dalam mengarahkan kebijakan ekonomi daerah agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengatasi berbagai hambatan dan ketimpangan pembangunan yang masih terjadi di wilayah Kabupaten Sarmi.

Mencermati kondisi ekonomi yang menunjukkan tren pemulihan dan peningkatan setelah pelaksanaan berbagai program strategis pada tahun 2024, maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sarmi Tahun 2025 diarahkan untuk menjamin kesinambungan pembangunan ekonomi daerah dengan tetap selaras terhadap kebijakan ekonomi nasional dan kebijakan pembangunan Provinsi Papua. Arah kebijakan ekonomi tahun 2026 juga menjadi bagian dari pelaksanaan tahun kedua RPJMD Kabupaten Sarmi

2025–2029, dimana pada tahun 2026 menitikberatkan pada tema **“Pemenuhan Infrastruktur Pembangunan guna Meningkatkan Pemerataan dan Akses Layanan Dasar”**.

Untuk menunjang kinerja pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi daerah, diperlukan analisis menyeluruh terhadap kondisi perekonomian Kabupaten SarMI, baik dari perspektif global, nasional, maupun regional. Hal ini penting mengingat struktur perekonomian Kabupaten SarMI masih sangat dipengaruhi oleh sektor-sektor berbasis sumber daya alam, seperti perikanan, pertanian, kehutanan, serta potensi kelautan dan pariwisata, yang rentan terhadap fluktuasi pasar global dan perubahan kebijakan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten SarMI perlu memperhatikan konstelasi geoekonomi global dan dinamika perdagangan dunia, guna memastikan kebijakan ekonomi daerah tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 serta Perkiraan Tahun 2024 dan 2025

3.1.1.1 Kondisi Ekonomi Dunia

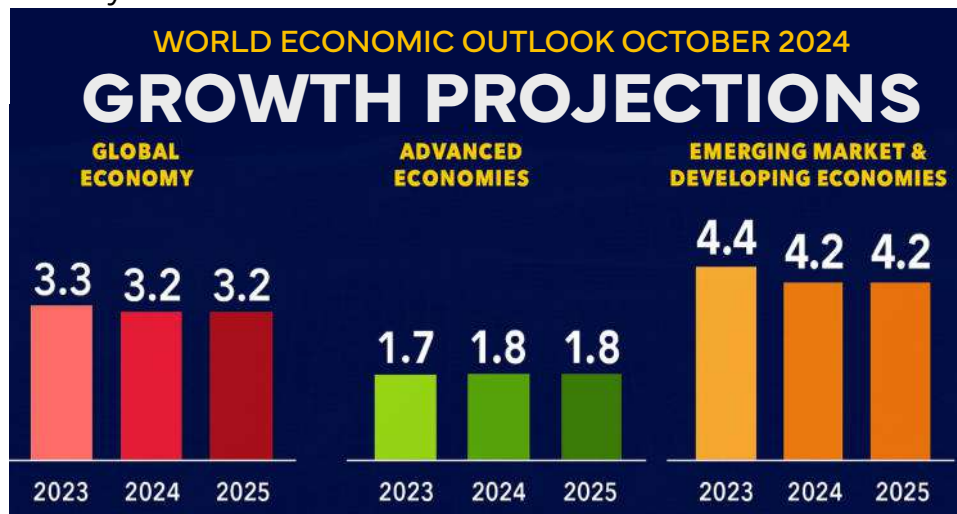
Sepanjang tahun 2024, perekonomian dunia dihadapkan pada tantangan global yang kompleks dan dinamis. Secara umum, terdapat tiga isu utama yang memengaruhi stabilitas dan arah perekonomian global, yaitu: (1) meningkatnya konflik geopolitik di berbagai kawasan, (2) dinamika politik internasional akibat pergantian kepemimpinan di banyak negara, dan (3) melemahnya proyeksi pertumbuhan ekonomi global.

Situasi geopolitik global masih diwarnai oleh konflik Rusia–Ukraina yang berkepanjangan, ketegangan di Timur Tengah, serta potensi eskalasi di kawasan Laut Cina Selatan, yang secara tidak langsung memengaruhi stabilitas ekonomi dunia. Di sisi lain, tahun 2024 juga menjadi periode penting secara politik, di mana lebih dari 60 negara di dunia menyelenggarakan pemilihan umum nasional, termasuk Indonesia, yang menandai transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto.

Perubahan kepemimpinan global dan nasional ini membawa dampak terhadap arah kebijakan ekonomi, perdagangan, dan investasi internasional, yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap arus perdagangan, ekspor-impor, dan sektor komoditas utama di tingkat daerah, termasuk Kabupaten SarMI. Dengan kondisi global yang masih penuh ketidakpastian ini, pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan ekonomi yang adaptif, antisipatif, dan berorientasi pada penguatan ketahanan ekonomi lokal, agar

pembangunan ekonomi Kabupaten SarMI tetap berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi dunia.

Gambar. 3.1
Proyeksi Ekonomi Dunia World Economic Forum 2024 & 2025



3.1.1.2 Kondisi dan Kebijakan Ekonomi Nasional

Berdasarkan data dan proyeksi perekonomian global yang dirilis oleh International Monetary Fund (IMF) melalui World Economic Outlook Oktober 2024, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan tetap moderat pada level 3,2 persen pada tahun 2025. Sementara itu, negara-negara berkembang dan pasar berkembang di kawasan Asia diproyeksikan mengalami perlambatan pertumbuhan dari 4,4 persen pada tahun 2023 menjadi 4,2 persen pada tahun 2024 dan 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi global masih menghadapi tekanan akibat ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, dan fluktuasi harga komoditas internasional.

Dalam konteks tersebut, Indonesia menunjukkan kinerja ekonomi yang relatif stabil dan resilien di tengah perlambatan ekonomi dunia. Setelah masa pandemi berakhir, perekonomian nasional berhasil tetap berada dalam zona ekspansi, ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik yang kuat. Sekitar 45 persen dari total aktivitas ekonomi nasional masih bertumpu pada tiga sektor utama, yaitu pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Meskipun demikian, ketiga sektor tersebut menunjukkan tren pertumbuhan yang belum sepenuhnya optimal, dengan sektor pengolahan industri yang cenderung mengalami stagnasi sehingga mengindikasikan terjadinya deindustrialisasi prematur.

Kinerja sektor perdagangan besar dan eceran yang tumbuh di bawah 5 persen juga mencerminkan adanya potensi pelemahan daya beli masyarakat,

terutama di lapisan kelas menengah. Kondisi ini turut dipengaruhi oleh rendahnya pertumbuhan produktivitas tenaga kerja, yang berdampak pada keterbatasan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, sektor pertanian mengalami tekanan akibat rendahnya produktivitas, keterbatasan akses terhadap pembiayaan dan jaminan usaha, serta dampak anomali iklim El-Nino yang memengaruhi hasil panen di berbagai wilayah.

Dalam situasi global dan nasional yang masih penuh ketidakpastian ini, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, mempertahankan daya beli masyarakat, dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Kebijakan fiskal dan moneter diarahkan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, memperluas lapangan kerja, serta mengendalikan inflasi agar tetap pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.

Perekonomian Indonesia dalam periode 2022 hingga 2024 diperkirakan tumbuh stabil di kisaran 5 persen, di tengah melambatnya ekonomi global. Hingga November 2024, inflasi tercatat sebesar 1,55 persen year-on-year, termasuk salah satu yang terendah di dunia. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga tetap terjaga dan neraca perdagangan mencatat surplus selama 54 bulan berturut-turut hingga Oktober 2024, mencerminkan daya tahan sektor ekspor nasional dan meningkatnya kontribusi dari sektor-sektor produktif seperti manufaktur, konstruksi, dan perdagangan domestik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku pada Triwulan III Tahun 2024 mencapai Rp5.638,9 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai Rp3.279,6 triliun. Secara triwulanan (q-to-q), ekonomi nasional tumbuh sebesar 1,50 persen, dengan pertumbuhan tertinggi dari Lapangan Usaha Konstruksi (6,06 persen). Dari sisi pengeluaran, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 8,44 persen.

Secara tahunan (y-on-y), ekonomi Indonesia Triwulan III Tahun 2024 tumbuh 4,95 persen, dengan Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebagai kontributor tertinggi (9,95 persen). Sementara dari sisi pengeluaran, Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) meningkat signifikan sebesar 11,69 persen. Hingga triwulan ketiga tahun 2024, pertumbuhan ekonomi secara cumulative-to-cumulative (c-to-c) mencapai 5,03 persen, dengan kontribusi terbesar dari sektor akomodasi, makanan dan minuman (9,29 persen) serta PK-LNPRT (15,10 persen).

Secara spasial, perekonomian nasional masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dengan kontribusi 56,84 persen terhadap total PDB nasional, tumbuh sebesar 4,92 persen (y-on-y). Sementara itu, kawasan

Indonesia Timur, termasuk Provinsi Papua, terus menunjukkan potensi pertumbuhan melalui pengembangan sektor-sektor unggulan berbasis sumber daya alam, infrastruktur dasar, serta peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat lokal.

Gambar 3.2

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan 3 Tahun 2024



Berdasarkan Gambar 3.2 tentang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III Tahun 2024, terlihat bahwa perekonomian nasional masih menunjukkan tren pertumbuhan yang positif meskipun dalam tekanan ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 1,50 persen (q-to-q) dan 4,95 persen (y-on-y). Kondisi ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi nasional tetap terjaga dan terus bergerak di jalur pemulihan setelah periode pandemi serta tekanan eksternal akibat perlambatan ekonomi global.

Dari sisi distribusi perekonomian, lima lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap struktur ekonomi nasional yaitu Industri Pengolahan, Pertanian, Perdagangan, Konstruksi, dan Pertambangan menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi triwulan III tahun 2024 juga ditopang oleh meningkatnya aktivitas pada beberapa lapangan usaha utama.

Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan tumbuh signifikan seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, volume penumpang berbagai moda transportasi, serta peningkatan pengiriman barang. Sementara itu, lapangan usaha Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, didorong oleh meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara serta pelaksanaan berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional seperti MotoGP Mandalika, PON XXI, dan International Sustainability Forum.

Kinerja positif beberapa sektor utama tersebut mencerminkan bahwa struktur perekonomian Indonesia semakin mengarah pada pemulihan yang berkelanjutan, yang pada gilirannya akan memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian daerah, termasuk Provinsi Papua dan Kabupaten Sarmi, melalui peningkatan arus perdagangan antarwilayah, aktivitas logistik, dan potensi pengembangan sektor-sektor unggulan daerah.

Gambar 3.3

Distribusi Ekonomi Indonesia Triwulan III Tahun 2024



Melihat kondisi ekonomi Indonesia beserta tantangan serta peluang yang akan dihadapi pada tahun-tahun mendatang yang mana prospek ekonomi Indonesia tahun 2025 dan 2026 cukup baik dan diperkirakan mampu bertahan menghadapi berbagai isu ketidakpastian global. Indonesia memiliki keunggulan dalam mengoptimalkan perekonomian domestik dibandingkan dengan negara-negara yang terlalu bertumpu kepada kinerja ekspor. Maka proyeksi ekonomi Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1

Proyeksi Ekonomi Indonesia Tahun 2025 dan 2026

Indikator Makro (Nasional)	2023	2024 (Resiliensi)	2025 (Resiliensi)	2026 (Consolidation and Reform)
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05	1,50 (Q3)	5,0–5,2	5,80–6,30
Pengangguran (%)	5,32	4,91	4,67–4,81	4,44–4,96
Angka Kemiskinan (%)	9,36	9,03 (Q1)	8,01–9,01	6,50–7,50
Gini Rasio	0,388	0,374 (Q1)	0,360–0,374	0,337–0,380
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	n.a	n.a	n.a	n.a
Penurunan Intensitas Emisi GRK	n.a	n.a	35,12	37,14

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya mengenai Kondisi dan Kebijakan Ekonomi Nasional, arah pembangunan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi, memperkuat ketahanan terhadap gejolak global, serta mendorong transformasi ekonomi yang lebih produktif dan inklusif. Perkembangan indikator makro nasional berikut menjadi landasan penting dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah, termasuk bagi Kabupaten Sarmi, agar tetap selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan mempertimbangkan dinamika ekonomi terkini.

Berdasarkan data perkembangan indikator makro nasional tahun 2023–2026, dapat disampaikan uraian sebagai berikut:

- **Pertumbuhan Ekonomi (PDB) Nasional**

Laju pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 tercatat sebesar 5,05 persen, menandai stabilitas ekonomi yang cukup baik di tengah dinamika global. Meskipun pada triwulan III tahun 2024 pertumbuhan ekonomi sempat melambat menjadi 1,50 persen (q-to-q) akibat tekanan eksternal dan fluktuasi harga komoditas, namun secara keseluruhan ekonomi Indonesia tetap berada pada jalur positif.

Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan berada pada kisaran 5,0–5,2 persen, dan terus meningkat pada tahun 2026 mencapai 5,80–6,30 persen seiring dengan masuknya fase Consolidation and Reform. Kondisi ini menggambarkan arah pemulihan ekonomi yang semakin solid serta mengindikasikan efektivitas kebijakan fiskal dan moneter pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendorong investasi produktif.

- **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Perkembangan tingkat pengangguran nasional menunjukkan tren yang semakin membaik. Pada tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 5,32 persen, kemudian menurun menjadi 4,91 persen pada tahun 2024, dan diproyeksikan kembali turun hingga kisaran 4,44–4,96 persen pada tahun 2026. Penurunan ini mencerminkan peningkatan kesempatan kerja yang merata di berbagai sektor, terutama pada sektor-sektor padat karya seperti konstruksi, perdagangan, serta industri pengolahan yang menjadi penopang utama perekonomian nasional.

Perkembangan ini juga menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Sarmi dalam memperkuat kebijakan penyerapan tenaga kerja lokal, terutama melalui program pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis potensi wilayah.

- **Angka Kemiskinan**

Angka kemiskinan nasional juga menunjukkan arah penurunan yang konsisten. Pada tahun 2023, angka kemiskinan tercatat sebesar 9,36 persen, menurun menjadi 9,03 persen pada triwulan I tahun 2024, dan diproyeksikan terus turun ke kisaran 6,50–7,50 persen pada tahun 2026.

Penurunan tersebut menggambarkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat perlindungan sosial, dan meningkatkan akses terhadap sumber-sumber ekonomi produktif. Bagi Kabupaten Sarmi, tren ini menjadi momentum untuk mempercepat penurunan kemiskinan daerah melalui program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ekonomi.

- **Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)**

Gini rasio nasional menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan dari 0,388 pada tahun 2023 menjadi kisaran 0,337–0,380 pada tahun 2026, yang menandakan semakin meratanya distribusi pendapatan masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan keberhasilan pemerintah dalam menurunkan kesenjangan ekonomi antardaerah.

Dalam konteks daerah, Pemerintah Kabupaten Sarmi perlu terus memperkuat strategi pemerataan pembangunan antar distrik dan kampung, agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat.

- **Kualitas Lingkungan dan Penurunan Emisi GRK**

Meskipun data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup belum tersedia, komitmen nasional terhadap pembangunan berkelanjutan tercermin melalui penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang diproyeksikan mencapai 35,12 persen pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 37,14 persen pada tahun 2026.

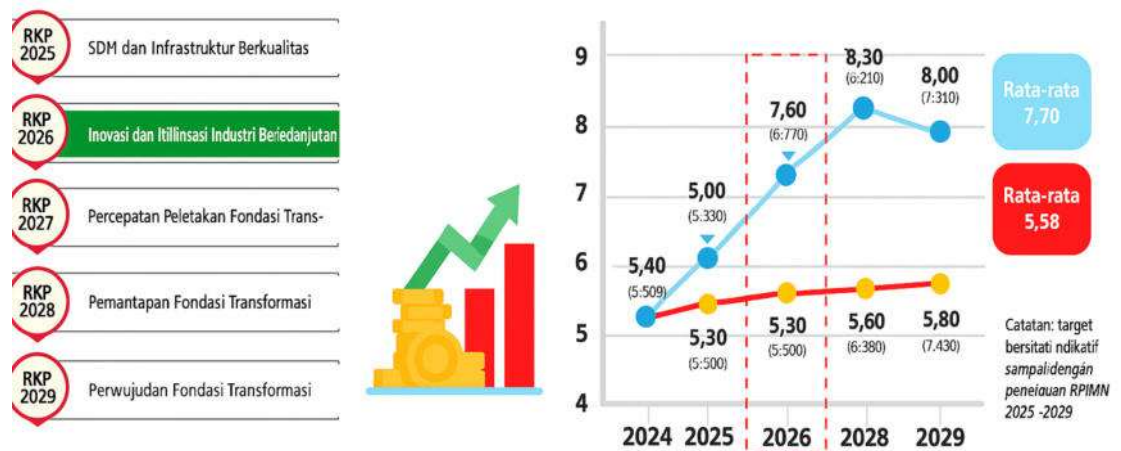
Arah kebijakan ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Sarmi dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, terutama melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dinamika indikator makro ekonomi nasional menunjukkan arah pemulihan yang semakin kuat dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang stabil dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi landasan penting dalam

menyusun arah kebijakan pembangunan daerah, termasuk bagi Kabupaten Sarmi, agar tetap sejalan dengan kebijakan nasional dan memperhatikan potensi serta karakteristik wilayah.

Selanjutnya, arah dan skenario pertumbuhan ekonomi nasional dalam periode menengah ditunjukkan pada Gambar 3.4, yang menggambarkan Skenario Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025–2029. Melalui gambar ini, terlihat bahwa kebijakan pembangunan nasional dirancang secara bertahap untuk memperkuat fondasi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Gambar 3.4
Skenario Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2025-2029



Gambar 3.4, skenario pertumbuhan ekonomi tahun 2025-2029, Pada tahun 2025, kebijakan pembangunan nasional difokuskan pada peningkatan SDM dan infrastruktur berkualitas sebagai modal dasar produktivitas nasional. Kemudian pada tahun 2026, fokus diarahkan pada inovasi dan hilirisasi industri berkelanjutan yang menjadi motor utama dalam peningkatan nilai tambah dan daya saing ekonomi. Dalam periode selanjutnya, tahun 2027–2029, arah kebijakan difokuskan pada percepatan, pemantapan, hingga perwujudan fondasi transformasi ekonomi.

Dari sisi pertumbuhan, terdapat dua skenario utama, yakni skenario tinggi (high) dan skenario rendah (low). Pada skenario tinggi, pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan meningkat dari 6,8 persen pada tahun 2025 menjadi 8,3 persen pada tahun 2026, dan bertahan di kisaran 7,8–8,0 persen hingga tahun 2029, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,7 persen. Sementara pada skenario rendah, pertumbuhan berada pada kisaran 5,3–5,8 persen dengan rata-rata 5,58 persen.

Secara keseluruhan, proyeksi ini menunjukkan optimisme terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka menengah. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten SarMI, untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah dengan strategi nasional, terutama dalam penguatan sektor unggulan, hilirisasi industri, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung ekonomi daerah.

3.1.1.3 Kondisi dan Kebijakan Ekonomi Wilayah Provinsi

Perkembangan kondisi ekonomi wilayah Provinsi Papua dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, seiring dengan proses penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan nasional dan regional. Pertumbuhan ekonomi Papua pada periode 2023–2024 masih menghadapi sejumlah tantangan struktural, terutama pada sektor-sektor utama seperti pertambangan, konstruksi, dan pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Di sisi lain, pemerintah provinsi terus berupaya mendorong diversifikasi ekonomi melalui penguatan sektor jasa, perdagangan, dan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal.

Kebijakan ekonomi yang ditempuh Pemerintah Provinsi Papua diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Fokus kebijakan diarahkan untuk memperkuat transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam, pengembangan potensi daerah berbasis komoditas unggulan, serta peningkatan investasi di wilayah strategis. Selain itu, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran tetap menjadi prioritas utama dalam kerangka pembangunan manusia dan pemerataan kesejahteraan.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam RKP Tahun 2026 yang bertemakan “Konsolidasi dan Reformasi untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, Pemerintah Provinsi Papua menetapkan sasaran pembangunan ekonomi yang konsisten dengan arah kebijakan RPJMD dan RPD Provinsi Papua 2024–2026. Sasaran ini tercermin dalam beberapa indikator makro utama seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, rasio gini, dan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca.

Perkembangan indikator makro ekonomi Provinsi Papua selama periode 2023 dan target tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Proyeksi Ekonomi Papua Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Target RPJMN 2025-2029	Target RPD Pov Papua 2024-2026	Target Nasional (RKP)	Target Provinsi (RKP)	Realisasi 2024	Target RKPD Pov Papua 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,4	6,9 – 7,2	5,8 – 6,3	5,0 – 5,7	4,11	4,02 – 4,15
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	16,00 – 16,50	4	4,44 – 4,96	6,02 – 6,45	6,48	6,20 – 6,30
3	Tingkat Kemiskinan (%)	6,00 – 6,40	16,25 – 16,78	6,5 – 7,5	15,80 – 16,00	17,26	16,25 – 16,78
4	Rasio Gini (indeks)	0,380 – 0,383	0,362 – 0,368	0,377 – 0,380	0,363 – 0,389	0,362	0,362 – 0,368
5	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	59,28	98,23	37,14	57,58 – 63,46	98,16	98,23

Sumber: BPS Provinsi Papua, Bappeda Provinsi Papua 2025

Secara umum, kinerja ekonomi Provinsi Papua pada periode 2023–2024 menunjukkan arah pemulihan yang perlahan namun konsisten. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 tercatat sebesar 4,11 persen, lebih rendah dibandingkan target provinsi 5,0–5,7 persen. Hal ini disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas pertambangan dan masih terbatasnya aktivitas hilirisasi di sektor unggulan daerah. Namun demikian, pada tahun rencana 2026, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat ke kisaran 4,02–4,15 persen seiring dengan stabilisasi sektor industri pengolahan, peningkatan investasi daerah, serta penguatan belanja infrastruktur publik.

Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2024 masih relatif tinggi, yakni sebesar 6,48 persen, meskipun menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Pemerintah Provinsi Papua memproyeksikan bahwa tingkat pengangguran akan menurun ke kisaran 6,20–6,30 persen pada tahun 2026 melalui penguatan program padat karya, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penciptaan lapangan kerja berbasis ekonomi lokal.

Sementara itu, angka kemiskinan yang masih berada pada level 17,26 persen pada tahun 2024 mencerminkan tantangan struktural yang perlu diatasi, terutama di wilayah pedalaman dan pesisir. Upaya penurunan kemiskinan diarahkan melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat adat. Rasio gini yang tercatat sebesar 0,362 menunjukkan adanya perbaikan distribusi pendapatan, dan diproyeksikan tetap terjaga dalam kisaran 0,362–0,368 pada tahun 2026.

Selain itu, kinerja penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan realisasi sebesar 98,16 persen pada tahun 2024 dan dipertahankan pada kisaran 98,23 persen di tahun 2026.

Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Papua terhadap pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, yang menjadi bagian integral dari agenda pembangunan ekonomi hijau di wilayah timur Indonesia.

Capaian dan proyeksi ekonomi Provinsi Papua tersebut menjadi dasar penting dalam memahami arah pembangunan ekonomi di tingkat kabupaten/kota. Dinamika pertumbuhan ekonomi, ketimpangan wilayah, serta capaian indikator kesejahteraan di tingkat provinsi memberikan pengaruh langsung terhadap kondisi ekonomi lokal, termasuk Kabupaten Sarmi. Oleh karena itu, analisis kondisi ekonomi daerah berikutnya akan menguraikan secara lebih spesifik tentang perkembangan perekonomian Kabupaten Sarmi, meliputi struktur ekonomi, pertumbuhan sektoral, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mendukung transformasi ekonomi daerah.

3.1.1.4 Kondisi Ekonomi Daerah Kabupaten Sarmi

Perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Sarmi secara umum menunjukkan arah yang positif dalam lima tahun terakhir. Setelah membahas perkembangan ekonomi di tingkat Provinsi Papua, dapat terlihat bahwa dinamika pertumbuhan ekonomi daerah di tingkat kabupaten turut memberikan kontribusi terhadap kestabilan ekonomi provinsi secara keseluruhan. Hal ini tercermin dari tren peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sarmi baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan tahun 2010 (ADHK) selama periode 2020–2024 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.19 berikut.

Tabel 3.3.
Perkembangan PDRB Kabupaten Sarmi Tahun 2020–2024

Tahun	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	PDRB ADHK 2010 (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
2020	2.937,45	1.834,11	0,03
2021	3.103,77	1.852,96	1,03
2022	3.315,80	1.906,55	2,89
2023*	3.562,53	1.974,37	3,56
2024**	3.824,65	2.058,50	4,26

(Sumber: BPS Kabupaten Sarmi, 2020–2024, diolah)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai PDRB ADHB Kabupaten Sarmi terus meningkat dari Rp2.937,45 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp3.824,65 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, PDRB ADHK 2010 juga mengalami peningkatan dari Rp1.834,11 miliar menjadi Rp2.058,50 miliar pada periode yang sama. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan aktivitas ekonomi daerah secara bertahap setelah sempat melambat pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten SarMI menunjukkan tren positif dengan laju yang semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 0,03 persen akibat dampak pandemi. Namun, mulai tahun 2021 hingga 2024, laju pertumbuhan meningkat berturut-turut menjadi 1,03 persen, 2,89 persen, 3,56 persen, dan 4,26 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa pemulihan ekonomi pascapandemi berjalan cukup baik, ditopang oleh peningkatan aktivitas pada sektor-sektor produktif, seperti pertanian, perikanan, konstruksi, serta perdagangan dan jasa.

Secara umum, struktur ekonomi Kabupaten SarMI masih didominasi oleh sektor primer, khususnya pertanian, kehutanan, dan perikanan yang berkontribusi signifikan terhadap PDRB. Namun demikian, sektor sekunder dan tersier juga mulai menunjukkan peran yang semakin besar, terutama sektor konstruksi dan perdagangan, yang tumbuh seiring dengan meningkatnya investasi dan pembangunan infrastruktur daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang stabil ini menjadi sinyal positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dengan dukungan kebijakan pembangunan yang diarahkan untuk memperkuat basis ekonomi lokal, mendorong kemandirian pangan, serta memperluas akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar.

Berdasarkan arah perkembangan ekonomi yang telah dibahas sebelumnya, capaian dan target indikator makro Kabupaten SarMI menunjukkan tren yang optimistis dalam dua tahun mendatang. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten SarMI untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 3.4
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten SarMI Tahun 2026

Indikator Makro	2023 [realisasi]	2024 [realisasi]	Target 2025	Target 2026
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,56	4,26	4,87	5,48
Tingkat Pengangguran (%)	3,09	3,41	3,30	3,19
Angka Kemiskinan (%)	13,21	14,05	13,76	13,34
Gini Rasio	0,372	0,430	0,364	0,360
IPM	67,00	67,89	68,83	69,65

(Sumber: BPS Kabupaten SarMI, 2023–2024, diolah)

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten SarMI mengalami peningkatan yang cukup konsisten. Setelah tumbuh sebesar 3,56 persen pada tahun 2023 dan 4,26 persen pada tahun 2024, pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan mencapai 4,87 persen

pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 5,48 persen pada tahun 2026. Proyeksi ini menggambarkan arah pembangunan ekonomi yang semakin kuat, terutama dengan adanya dorongan investasi infrastruktur, pengembangan sektor unggulan lokal seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata, serta peningkatan kualitas konektivitas antarwilayah.

Pada sisi lain, tingkat pengangguran terbuka menunjukkan tren yang menurun dari 3,09 persen pada tahun 2023 menjadi 3,41 persen pada tahun 2024. Dengan semakin membaiknya iklim usaha dan lapangan kerja produktif di sektor informal maupun formal, angka pengangguran ditargetkan turun menjadi 3,30 persen pada tahun 2025 dan 3,19 persen pada tahun 2026. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong kewirausahaan lokal dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sarmi masih menjadi perhatian utama, meskipun tren penurunannya menunjukkan arah yang positif. Persentase penduduk miskin meningkat sedikit pada tahun 2024 menjadi 14,05 persen akibat dampak inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Namun, pemerintah daerah menargetkan penurunan secara bertahap menjadi 13,76 persen pada tahun 2025 dan 13,34 persen pada tahun 2026. Upaya pengentasan kemiskinan diarahkan melalui penguatan program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pedalaman, serta peningkatan akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Sementara itu, ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Gini Rasio menunjukkan tren perbaikan yang signifikan. Setelah sempat berada pada angka 0,430 pada tahun 2024, ketimpangan diharapkan menurun menjadi 0,364 pada tahun 2025 dan 0,360 pada tahun 2026. Penurunan ini mencerminkan arah kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, terutama dengan memperluas kesempatan ekonomi bagi kelompok berpendapatan rendah dan memperkuat ekonomi lokal berbasis komunitas.

Dari sisi pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sarmi terus menunjukkan peningkatan dari 67,00 pada tahun 2023 menjadi 67,89 pada tahun 2024, dengan target mencapai 68,83 pada tahun 2025 dan 69,65 pada tahun 2026. Peningkatan ini mengindikasikan adanya kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Pemerintah daerah terus memperkuat kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar, pemberantasan buta huruf, peningkatan angka harapan hidup, serta pemberdayaan ekonomi keluarga.

Secara keseluruhan, capaian dan target indikator makro tersebut mencerminkan arah pembangunan Kabupaten Sarmi yang semakin baik dan berdaya saing. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat diharapkan dapat disertai dengan pemerataan kesejahteraan, penurunan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sarmi memerlukan dukungan berbagai sumber daya yang mampu menggerakkan roda organisasi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks tersebut, keuangan daerah merupakan sumber daya finansial yang sangat penting dan strategis bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah.

Kuangan daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Sarmi yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah dan berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya sebatas aspek administratif, tetapi juga merupakan instrumen kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan hasil pembangunan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Kabupaten Sarmi.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur keseluruhan kegiatan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan. Dalam implementasinya, kebijakan keuangan daerah di Kabupaten Sarmi diarahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan asli daerah (PAD), memanfaatkan transfer pemerintah pusat dan provinsi secara efektif, serta mengelola belanja daerah dengan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan berorientasi pada hasil (money follow program).

Kebijakan keuangan daerah juga berperan penting dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2029 dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2045. Oleh karena itu, setiap program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen RKPD harus memiliki keterkaitan langsung dengan prioritas pembangunan serta isu-isu strategis daerah, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun infrastruktur.

Dalam kerangka tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarmi merupakan instrumen utama kebijakan fiskal daerah yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat daya saing daerah, serta menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah. Penyusunan APBD dilakukan setiap tahun secara transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Sarmi tahun 2026 diarahkan untuk:

- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah, serta pengembangan aset daerah sebagai sumber pendapatan berkelanjutan.
- Meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Transfer, baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua, agar lebih tepat sasaran dalam mendukung prioritas pembangunan daerah.
- Mendorong efisiensi dan efektivitas belanja daerah dengan fokus pada peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi rakyat, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
- Menjaga keseimbangan fiskal daerah melalui pengelolaan pembiayaan yang hati-hati, serta memastikan kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang.
- Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Sarmi juga mendukung pencapaian sasaran makro pembangunan Provinsi Papua, yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi inklusif, penurunan kemiskinan, pengendalian inflasi, serta peningkatan kualitas SDM dan tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, kebijakan fiskal daerah diharapkan dapat menjadi instrumen utama dalam mendorong kemandirian daerah dan memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sarmi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Sarmi wajib mengelola keuangan daerah secara tertib, taat asas, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Pengelolaan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, serta kemanfaatan bagi masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran daerah sebagai

berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
- b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
- d. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut, kebijakan keuangan daerah Kabupaten SarMI tahun 2026 difokuskan pada upaya mendorong efektivitas belanja publik yang berorientasi pada hasil (*output-oriented budgeting*), serta memperkuat kapasitas fiskal daerah agar lebih mandiri dan berkelanjutan. Kebijakan keuangan diarahkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi strategis, terutama pada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan publik.

Selain itu, kebijakan keuangan daerah juga menekankan pentingnya pengelolaan belanja yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan prinsip akuntabilitas publik. Arah kebijakan ini dijabarkan ke dalam tiga pilar utama, yaitu kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, dan kebijakan pembiayaan daerah.

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten SarMI tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi berbagai sumber penerimaan, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penguatan kebijakan pendapatan ini menjadi bagian integral dari strategi keuangan daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Secara umum, struktur pendapatan daerah Kabupaten Sarmi masih didominasi oleh pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua, dengan kontribusi lebih dari 98 persen terhadap total pendapatan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah masih sangat bergantung pada dana transfer pusat, terutama Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus (Otsus), dan Dana Desa. Sementara itu, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil, namun tetap menunjukkan potensi yang dapat dikembangkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah.

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Sarmi tahun 2026 difokuskan pada:

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah berbasis digital serta peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola pendapatan.

Peningkatan akurasi data potensi pajak dan retribusi, serta penerapan sistem pengawasan terpadu terhadap sumber-sumber penerimaan daerah.

Pemanfaatan Dana Transfer secara efektif dan tepat sasaran, dengan memastikan alokasi dana pusat dan provinsi diarahkan untuk program prioritas yang mendukung pelayanan dasar masyarakat.

Peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui pengembangan aset daerah produktif, penyertaan modal BUMD, dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga berbasis potensi ekonomi lokal.

Tabel 3.5
 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2023–2026 (Dalam Rupiah)

No	Uraian Pendapatan	2023 (Realisasi)	2024 (Realisasi)	2025 (Proyeksi)	2026 (Rencana)	Perubahan 2025–2026 (%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	17.724.603.641,74	18.339.019.892,67	11.213.287.750	8.943.287.750	(20,24)
	a. Pajak Daerah	4.222.504.779,00	3.516.513.936,00	4.523.287.750	3.853.287.750	(14,81)
	b. Retribusi Daerah	279.246.000,00	270.839.093,00	390.000.000	390.000.000	0,00
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.932.597.315,00	5.859.433.240,00	5.000.000.000	4.000.000.000	(20,00)
	d. Lain-lain PAD yang Sah	8.290.255.547,74	8.692.233.623,67	1.300.000.000	700.000.000	(46,15)
2	Pendapatan Transfer	1.047.344.551.558,00	1.086.730.008.170,00	936.560.196.650	777.240.014.650	(17,01)
	Pendapatan tranfer Pemerintah Pusat	1.035.933.348.870,00	1.073.854.616.418,00	929.018.451.000	769.698.269.000	(17,15)
	a. Dana Perimbangan	824.673.480.870,00	851.446.398.418,00	708.480.712.000	585.485.024.000	(17,36)
	b. Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	123.149.112.000,00	130.492.614.000,00	134.037.104.000	110.147.905.000,00	(17,82)
	c. Dana Desa	88.110.756.000,00	91.915.604.000,00	86.500.635.000	74.065.340.000	(14,38)
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	11.411.202.688,00	12.875.391.752,00	7.541.745.650	7.541.745.650	0,00
	a. Pendapatan Bagi Hasil	11.411.202.688,00	12.875.391.752,00	7.541.745.650	7.541.745.650	0,00
4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	50.108.508.469,00	8.525.582.133	3.459.160.000	3.459.160.000	0,00
	Pendapatan Hibah	33.753.380.742,00	0	0	0	0,00
	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.355.127.727,00	8.525.582.133,00	3.459.160.000	3.459.160.000	0,00
	Total Pendapatan Daerah	1.115.177.663.668,74	1.113.594.610.195,67	951.232.644.400	789.642.462.400	(16,99)



Berdasarkan tabel di atas, total pendapatan daerah Kabupaten Sarmi tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp789,64 miliar, menurun sekitar 16,99 persen dibandingkan tahun 2025. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya penerimaan dari pendapatan transfer pusat, terutama Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami penurunan sekitar 20,24 persen, terutama akibat menurunnya setoran laba BUMD dan penerimaan jasa giro daerah. Kondisi ini mencerminkan perlunya strategi peningkatan PAD yang lebih agresif melalui penguatan basis pajak daerah dan optimalisasi aset pemerintah.

Dari sisi komposisi pendapatan, Dana Transfer masih mendominasi dengan kontribusi sekitar 98,86 persen dari total pendapatan, sedangkan PAD baru menyumbang sekitar 1,13 persen. Ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pusat ini menjadi tantangan utama dalam mendorong kemandirian fiskal daerah.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sarmi akan menempuh langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Intensifikasi pajak daerah dan retribusi dengan memperkuat sistem pemungutan digital, pengawasan lapangan, serta perluasan objek dan subjek pajak.
- Optimalisasi kinerja BUMD, terutama dalam memberikan dividen yang berkelanjutan.
- Digitalisasi pengelolaan PAD, termasuk penerapan sistem online payment untuk pajak hotel, restoran, dan reklame.
- Mendorong kolaborasi fiskal antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi Papua dalam pemanfaatan Dana Otsus dan Dana Bagi Hasil untuk mendukung program prioritas lokal.
- Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan keuangan daerah agar kinerja fiskal lebih transparan dan akuntabel.

Secara keseluruhan, arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Sarmi tahun 2026 diarahkan untuk mewujudkan struktur pendapatan yang lebih berimbang antara PAD dan pendapatan transfer, guna memperkuat kemandirian fiskal dan memastikan kesinambungan pembangunan daerah.

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan instrumen utama kebijakan fiskal yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten SarMI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kapasitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Melalui belanja daerah, pemerintah berupaya untuk memperkuat daya ungkit ekonomi lokal dan memperluas manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah distrik dan kampung terpencil.

Arah kebijakan belanja daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan berorientasi hasil (result-based budgeting), serta mengedepankan asas keadilan, pemerataan, dan manfaat publik. Perencanaan belanja daerah juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui pengendalian terhadap struktur belanja yang proporsional antara belanja operasional dan belanja pembangunan.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten SarMI Tahun 2025–2029, dengan fokus pada pencapaian Visi **“BERSATU MEWUJUDKAN SARMI LEBIH MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”** dan Misi:

1. Mewujudkan Birokrasi yang berorientasi "Pelayanan Prima" dalam melayani masyarakat, kelembagaan kampung dan adat;
2. Mewujudkan dan menjamin terlaksananya program Otonomi Khusus [OTSUS] di Kabupaten SarMI;
3. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia [SDM] SarMI yang unggul, beriman dan berilmu;
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan kesehatan yang merata, terpadu, dan berkelanjutan;
5. Memperkokoh toleransi antar umat beragama dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat;
6. Mewujudkan "Pembangunan Ekonomi Inklusif" berbasis potensi dan kearifan lokal, berwawasan lingkungan dan kawasan perbatasan;
7. Mewujudkan Infrastruktur Pelayanan Publik yang memadai dan merata di wilayah Kabupaten SarMI.

Pemerintah Kabupaten SarMI juga telah menerapkan pendekatan penganggaran berbasis kinerja serta penggunaan instrumen Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Satuan Harga (SSH) dalam penyusunan anggaran, sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.

Selanjutnya Struktur dan proyeksi belanja daerah Kabupaten SarMI Tahun 2023–2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2023–2026 (Dalam Rupiah)

No	Jenis Belanja	2023 (Realisasi)	2024 (Realisasi)	2025 (Proyeksi)	2026 (Rencana)	Perubahan 2025–2026 (%)
1	Belanja Operasional	784.581.218.191,56	776.473.831.582,00	758.398.856.728,46	605.019.220.489	(5.006.108.032,8052)
	a. Belanja Pegawai	231.379.958.540,00	273.587.685.981,00	307.723.116.271,46	257.788.053.447,94	99.568.766,926
	b. Belanja Barang dan Jasa	471.581.208.267,56	414.567.713.652,00	415.409.102.452,00	317.679.992.964,06	(977.291.094,8794)
	c. Belanja Hibah	71.396.234.534,00	66.770.215.549,00	19.047.782.005,00	14.529.360.005,00	(45.184.220,00)
	d. Belanja Bantuan Sosial	10.223.816.850,00	21.548.216.400,00	16.218.856.000,00	15.021.814.072,00	(11.970.419,28)
						0
2	Belanja Modal	198.103.801.640,66	186.053.486.663,75	101.766.908.888	54.517.087.211	(472.498.216,77)
	Belanja Modal Tanah	0,00	10.000.000.000,00	9.200.000.000,00	2.662.338.000	(65.376.620)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.513.409.110,00	19.730.520.348,00	20.257.912.175,00	12.091.613.903,00	(81.662.982,72)
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.142.525.002,16	44.297.641.726,00	40.139.687.334,00	14.916.342.050,00	(252.233.452,84)
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	118.235.643.117,50	111.828.160.540,75	31.647.521.018,00	24.738.314.440,00	(69.092.065,78)
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.812.224.411,00	197.164.049,00	110.180.693,00	108.478.818	(17.018,75)
	Belanja Modal Aset Lainnya	400.000.000,00	0,00	411.607.668,00	0,00	(4116076,68)
3	Belanja Tidak Terduga	10.381.964.200,00	7.893.775.000,00	9.700.000.000,00	5.300.000.000	(44.000.000)
	Belanja Tidak Terduga	10.381.964.200,00	7.893.775.000,00	9.700.000.000,00	5.300.000.000	(44.000.000)
						0
4	Belanja Transfer	158.098.978.797,00	161.240.032.851,00	154.548.346.802,00	124.806.154.700,00	(297.421.921,02)
	Belanja Bantuan Keuangan ke Desa	158.098.978.797,00	161.240.032.851,00	154.548.346.802,00	124.806.154.700,00	(297.421.921,02)
						0
	Total Belanja Daerah	1.151.165.962.829,22	1.131.661.126.096,75	1.024.414.112.418,46	789.642.462.400	(2.347.716.500,1846)

Berdasarkan data pada Tabel 3.6 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2023–2026, dapat disampaikan bahwa total belanja daerah menunjukkan tren penurunan dari tahun 2023 hingga tahun 2026. Pada tahun 2023, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp1,151 triliun, menurun menjadi Rp1,131 triliun pada tahun 2024, dan diproyeksikan sebesar Rp1,024 triliun pada tahun 2025. Pada tahun 2026, belanja daerah direncanakan sebesar Rp789,64 miliar, atau mengalami penurunan sekitar Rp234,77 miliar dibandingkan dengan tahun 2025 (setara dengan kontraksi 22,9%).

Penurunan ini disebabkan oleh penyesuaian kemampuan fiskal daerah, efisiensi program pasca-pemulihan ekonomi, serta rasionalisasi terhadap kegiatan yang dinilai belum memberikan dampak langsung terhadap pencapaian sasaran prioritas pembangunan. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Sarmi tetap berkomitmen menjaga proporsi belanja yang produktif dan berorientasi pada hasil.

1. Belanja Operasional

Komponen belanja operasional masih mendominasi struktur belanja daerah dengan nilai mencapai Rp605,01 miliar pada tahun 2026 atau sekitar 76,6% dari total belanja daerah. Meskipun secara nominal mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025 sebesar Rp758,39 miliar, kebijakan ini mencerminkan upaya efisiensi pengeluaran rutin pemerintah.

Dari rincian belanja operasional, terlihat bahwa:

Belanja Pegawai diproyeksikan mencapai Rp257,78 miliar atau meningkat 99,56 miliar dari tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan penyesuaian gaji dan tunjangan ASN serta kebijakan rekrutmen tenaga teknis pelayanan dasar, khususnya guru dan tenaga kesehatan.

Belanja Barang dan Jasa mengalami penurunan signifikan dari Rp415,40 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp317,67 miliar pada tahun 2026, sejalan dengan kebijakan efisiensi belanja non-prioritas dan optimalisasi pengadaan berbasis elektronik.

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial juga mengalami penurunan yang cukup tajam, masing-masing menjadi Rp14,52 miliar dan Rp15,02 miliar, dengan arah kebijakan yang lebih selektif dan terfokus pada program sosial berbasis kinerja serta bantuan yang bersifat produktif.

2. Belanja Modal

Alokasi belanja modal menunjukkan kontraksi signifikan, dari Rp101,76 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp54,52 miliar pada tahun 2026 (turun sebesar 46,5%). Penurunan ini terutama terjadi pada belanja modal gedung dan bangunan, modal jalan dan jaringan, serta modal peralatan dan mesin.

Meskipun demikian, arah kebijakan belanja modal tetap diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas wilayah, terutama perbaikan dan peningkatan jalan antar distrik serta penyediaan sarana pelayanan publik seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pasar rakyat. Rasionalisasi dilakukan dengan mengedepankan asas keberlanjutan proyek multi-years dan penyelesaian program strategis yang sudah berjalan.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp5,30 miliar pada tahun 2026 atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9,70 miliar. Penurunan ini mencerminkan stabilitas kondisi fiskal dan minimnya perkiraan kebutuhan darurat yang bersifat tak terduga. Meski demikian, alokasi ini tetap disiapkan untuk mendukung respon cepat terhadap bencana alam, keadaan darurat sosial, atau kebijakan tanggap darurat lainnya.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer kepada pemerintah kampung diproyeksikan sebesar Rp124,80 miliar pada tahun 2026, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp154,54 miliar. Arah kebijakan belanja transfer difokuskan pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan kampung dan mendorong penggunaan dana desa yang lebih produktif untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal, ketahanan pangan, serta penguatan pelayanan publik di tingkat kampung.

Dari struktur belanja daerah tersebut, terlihat bahwa belanja operasional masih mendominasi dengan proporsi lebih dari 75% dari total belanja, sementara belanja modal hanya sekitar 6–7%. Struktur ini menunjukkan bahwa sebagian besar belanja daerah Kabupaten SarMI masih digunakan untuk mendukung kegiatan rutin pemerintahan dan pelayanan dasar. Ke depan, arah kebijakan belanja diarahkan untuk secara bertahap meningkatkan porsi belanja pembangunan produktif dan investasi publik, guna memperkuat fondasi ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten SarMI juga berkomitmen untuk:

- Meningkatkan efektivitas belanja melalui penganggaran berbasis kinerja dan hasil (performance-based budgeting).

- Melanjutkan penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Satuan Harga (SSH) untuk memastikan efisiensi dan kewajaran pengeluaran daerah.
- Memperkuat sistem evaluasi dan pengendalian anggaran agar belanja daerah benar-benar berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, arah kebijakan belanja daerah Kabupaten SarMI Tahun 2026 difokuskan pada penguatan pelayanan dasar, peningkatan infrastruktur, serta pengendalian belanja operasional agar tetap efisien namun tetap mampu mendukung fungsi utama pemerintahan. Penyesuaian terhadap struktur belanja dilakukan untuk memastikan keberlanjutan fiskal daerah serta mendukung pencapaian target pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten SarMI Tahun 2025–2029.

Sebagai bagian dari strategi fiskal yang berimbang, kebijakan belanja ini juga terintegrasi dengan arah kebijakan pembiayaan daerah, yang akan dijelaskan pada subbab berikutnya.

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan salah satu komponen penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam konteks perencanaan keuangan Kabupaten SarMI Tahun 2026, kebijakan pembiayaan diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah, serta memastikan keberlanjutan fiskal yang sehat dan efisien.

Kebijakan pembiayaan daerah disusun dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), transparansi, dan akuntabilitas, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara umum, pembiayaan daerah Kabupaten SarMI meliputi dua komponen utama, yaitu penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi APBD Kabupaten SarMI Tahun Anggaran 2026, struktur dan proyeksi pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7
 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sarmi
 Tahun 2023–2026 (Dalam Rupiah)

No	Jenis Belanja	2023 (Realisasi)	2024 (Realisasi)	2025 (Proyeksi)	2026 (Rencana)	Perubahan 2025–2026 (%)
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	118.248.930.230,02	76.765.089.676,54	56.698.573.775,46	56.698.573.775,46	0,00
	a. SiLPA Tahun Sebelumnya	118.248.930.230,02	76.765.089.676,54	56.698.573.775,46	56.698.573.775,46	0,00
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
	a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
3	Pembiayaan Neto (1–2)	113.248.930.230,02	74.765.089.676,54	54.698.573.775,46	54.698.573.775,46	0,00

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa struktur pembiayaan daerah Kabupaten Sarmi dalam periode 2023–2026 menunjukkan arah yang relatif stabil dengan tren penurunan pada sisi penerimaan pembiayaan, sejalan dengan meningkatnya efisiensi pengelolaan anggaran dan menurunnya saldo lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Sarmi sepenuhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, nilai SiLPA yang direalisasikan mencapai Rp118,25 miliar, turun menjadi Rp76,76 miliar pada tahun 2024, dan diproyeksikan sebesar Rp56,69 miliar pada tahun 2025 hingga 2026.

Kondisi ini menunjukkan peningkatan efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah, dimana serapan anggaran menjadi semakin optimal sehingga sisa anggaran yang tidak terpakai dapat ditekan. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Sarmi berhasil menjaga prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan APBD.

Penurunan SiLPA juga mencerminkan perbaikan dalam sinkronisasi antara perencanaan program dan kesiapan pelaksanaan kegiatan, sekaligus menandakan adanya peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah yang lebih disiplin dan akuntabel.

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pada sisi pengeluaran pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Sarmi menetapkan alokasi sebesar Rp2 miliar per tahun selama periode 2024–2026, dengan fokus utama pada penyertaan modal pemerintah daerah (investasi) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT.Bank Papua.

Kebijakan ini merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan peran BUMD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperluas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa depan. Penyertaan modal juga diarahkan secara selektif pada BUMD yang memiliki prospek usaha strategis dan potensi pengembalian investasi yang menguntungkan bagi daerah.

3. Pembiayaan Neto

Pembiayaan neto Kabupaten Sarmi selama periode 2023–2026 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, dari Rp113,25 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp54,69 miliar pada tahun 2026. Penurunan ini bersumber dari menurunnya SiLPA tahun-tahun sebelumnya, serta semakin kecilnya kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemampuan fiskal daerah menuju arah yang lebih seimbang (*balanced budget*), di mana belanja daerah cenderung disesuaikan dengan kapasitas riil pendapatan tanpa mengandalkan sumber pembiayaan tambahan yang besar.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2026

Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2026 difokuskan pada tiga arah utama, yaitu:

- Menjaga Keseimbangan Fiskal Daerah, melalui pengendalian defisit dan optimalisasi realisasi pendapatan agar belanja dapat dibiayai secara mandiri dan berkelanjutan.
- Meningkatkan Efektivitas Penggunaan SiLPA, dengan menekan akumulasi saldo tidak terpakai serta memastikan penggunaannya untuk kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan publik dan pembangunan ekonomi daerah.
- Memperkuat Investasi Pemerintah Daerah, melalui penyertaan modal yang selektif, terukur, dan berorientasi hasil pada BUMD strategis yang dapat memperluas basis ekonomi daerah serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD di masa mendatang.

Secara keseluruhan, arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2026 disusun dengan prinsip kehati-hatian dan efisiensi fiskal. Pendapatan daerah dioptimalkan untuk menopang belanja produktif, sementara pembiayaan diarahkan untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung agenda prioritas pembangunan.

Dengan demikian, kerangka ekonomi dan keuangan daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2026 diharapkan mampu menciptakan tata kelola fiskal yang sehat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta memperkuat daya saing daerah.

3.2.4 Kebijakan Pembiayaan Sumber Dana Otonomi Khusus

Pelaksanaan kebijakan pembangunan di Kabupaten Sarmi tidak terlepas dari dukungan sumber pendanaan yang bersifat khusus, salah satunya melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan di Provinsi Papua. Dana ini berfungsi untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Arah Kebijakan Umum Dana Otonomi Khusus

Arah kebijakan pengelolaan Dana Otonomi Khusus Tahun 2026 di Kabupaten Sarmi difokuskan pada peningkatan efektivitas penggunaan dana, dengan menitikberatkan pada hasil (outcome) yang terukur serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2029.

Kebijakan ini juga sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta ketentuan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Secara prinsip, arah kebijakan Dana Otsus Kabupaten Sarmi Tahun 2026 diarahkan untuk:

- Mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Papua, melalui pembiayaan bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dengan fokus pada penguatan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung, dan pengembangan potensi unggulan daerah.
- Menjamin pemerataan pembangunan antar distrik dan kampung, melalui peningkatan akses layanan publik, penyediaan sarana dasar, dan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Otsus, melalui penerapan sistem pelaporan berbasis kinerja dan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi penggunaan dana.

Struktur pembiayaan Dana Otsus Kabupaten Sarmi Tahun 2026 bersumber dari transfer Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Papua, yang kemudian dialokasikan ke kabupaten/kota dengan mempertimbangkan jumlah penduduk asli Papua, tingkat kemiskinan, kondisi geografis, dan indeks pembangunan manusia (IPM).

Adapun arah penggunaan Dana Otsus di Kabupaten Sarmi Tahun 2026 difokuskan pada empat bidang utama berikut:

Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM

- Penyediaan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa asli Papua.
- Rehabilitasi dan peningkatan sarana prasarana sekolah di distrik dan kampung terpencil.
- Pelatihan keterampilan kerja bagi pemuda dan perempuan Papua.

Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat

- Peningkatan layanan kesehatan dasar, terutama di Puskesmas dan Pustu kampung.
- Penyediaan tenaga medis dan dukungan operasional untuk daerah sulit jangkau.
- Program penanggulangan stunting, gizi buruk, dan penyakit endemik lokal.

Bidang Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah

- Pembangunan dan pemeliharaan jalan penghubung antar kampung dan distrik.
- Peningkatan sarana air bersih, sanitasi lingkungan, serta penerangan kampung.
- Dukungan terhadap pembangunan infrastruktur ekonomi (pasar rakyat, dermaga kecil, dan jembatan produksi).

Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat

- Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis sumber daya lokal.
- Dukungan terhadap koperasi dan kelompok usaha masyarakat asli Papua.
- Penguatan kapasitas pemerintahan kampung dalam pengelolaan dana pembangunan dan pemberdayaan ekonomi berbasis kampung.

Kebijakan Efisiensi dan Akuntabilitas Dana Otsus

Untuk memastikan efektivitas pemanfaatan Dana Otsus Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Sarmi menerapkan beberapa kebijakan pengelolaan yang menekankan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik, yaitu:

- Penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) pada kegiatan yang didanai oleh Otsus guna memastikan kesesuaian antara kebutuhan riil dan besaran anggaran yang dialokasikan.
- Sinkronisasi program Otsus dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) OPD, agar tidak terjadi tumpang tindih pendanaan antar sumber anggaran.
- Monitoring dan evaluasi berbasis kinerja, yang dilakukan secara berkala untuk menilai capaian output dan outcome dari setiap kegiatan yang didanai oleh Dana Otsus.
- Pelibatan masyarakat dan lembaga adat Papua dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Otsus sebagai wujud pendekatan partisipatif dan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal.

Arah Kebijakan Pembiayaan Dana Otonomi Khusus Tahun 2026

Secara ringkas, arah kebijakan pembiayaan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Sarmi Tahun 2026 difokuskan pada:

- Optimalisasi penggunaan Dana Otsus untuk memperkuat sektor pelayanan dasar dan pengentasan kemiskinan;
- Percepatan realisasi keuangan dan fisik Dana Otsus untuk mendukung penyaluran tahap berikutnya;
- Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan, agar selaras dengan sistem pengawasan keuangan daerah; dan
- Pemanfaatan Dana Otsus secara berkelanjutan, dengan memperhatikan kesinambungan pembangunan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat asli Papua.

Dengan demikian, keseluruhan Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2026, yang meliputi kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan umum, dan pembiayaan Dana Otonomi Khusus, disusun secara terpadu dan berorientasi hasil.

Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas fiskal daerah, meningkatkan efektivitas pembangunan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sarmi secara berkelanjutan dalam kerangka pembangunan Provinsi Papua.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPd Tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Bab ini menguraikan arah pembangunan tahunan Kabupaten Sarmi yang menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan seluruh perangkat daerah pada Tahun Anggaran 2026. Penetapan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan merupakan langkah strategis dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2029.

Penyusunan Bab IV ini dimaksudkan untuk memberikan panduan yang jelas mengenai fokus pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi pada tahun perencanaan, sekaligus menjadi instrumen koordinasi dan sinergi antara kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional. Dengan demikian, arah pembangunan tahun 2026 diharapkan dapat memperkuat konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran, guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana visi RPJMD, yaitu **“Bersatu Mewujudkan Sarmi yang Lebih Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.”**

Penetapan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- Arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2029 dan RPJPD Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2045;
- Keterpaduan dan konsistensi kebijakan antar level pemerintahan, yang mencakup keselarasan dengan RPD Provinsi Papua Tahun 2024–2026, RPJPD Provinsi Papua Tahun 2025–2045, RPJMN Tahun 2025–2029, dan RPJPN Tahun 2025–2045;
- Hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya, termasuk capaian indikator makro daerah serta hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPd Tahun 2025;

- Isu-isu strategis pembangunan daerah, baik yang bersifat lokal, regional, nasional, maupun global, yang berpengaruh terhadap keberlanjutan pembangunan Kabupaten SarMI;
- Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten SarMI, sebagai bentuk penyaluran aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah; serta
- Potensi, peluang, dan tantangan pembangunan lintas sektor, yang mencakup aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur wilayah, dan tata kelola pemerintahan.

Melalui penetapan sasaran dan prioritas pembangunan yang terarah, terukur, dan berbasis pada data serta kondisi faktual daerah, Pemerintah Kabupaten SarMI diharapkan dapat:

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pembangunan;
- Memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam pencapaian sasaran pembangunan;
- Menjamin konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan; serta
- Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pemerataan pembangunan antar wilayah.

Dengan demikian, Bab IV RKPD Kabupaten SarMI Tahun 2026 ini menyajikan uraian yang mencakup tiga komponen utama, yaitu:

1. Tema Pembangunan Daerah Tahun 2026, yang menjadi gambaran umum arah dan fokus pembangunan tahunan;
2. Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026, yang menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara terukur dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan; dan
3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026, yang berisi fokus-fokus pembangunan lintas sektor dan urusan pemerintahan daerah yang diprioritaskan dalam pelaksanaan RKPD.

Ketiga komponen tersebut menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan prioritas oleh perangkat daerah, serta menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten SarMI yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

4.1 Tema Pembangunan Daerah Tahun 2026

Tema pembangunan daerah merupakan gambaran umum yang digunakan untuk menentukan arah kebijakan dan fokus pembangunan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan pada tahun yang direncanakan. Tema ini menjadi benang merah yang menghubungkan berbagai kebijakan sektoral, lintas urusan, serta program dan kegiatan perangkat daerah agar

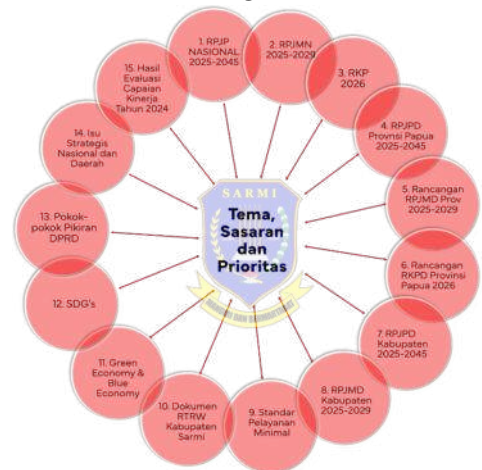
selaras dengan arah pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Pada Tahun 2026, Kabupaten Sarmi dihadapkan pada berbagai persoalan dan tantangan pembangunan yang bersifat kompleks, baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun global. Isu-isu strategis tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan transformasi ekonomi daerah, penguatan ketahanan pangan dan energi, pemerataan infrastruktur dasar, peningkatan konektivitas antarwilayah, hingga pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan sosial budaya masyarakat baik di wilayah pesisir, pulau serta pedalaman.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sarmi perlu merumuskan arah pembangunan tahunan yang mampu merespons dinamika tersebut secara adaptif dan berkelanjutan. Tema pembangunan daerah dimaksudkan untuk menjadi arah prioritas pembangunan tahunan yang konsisten, berkesinambungan, serta mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2029.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarmi Tahun 2026 dilakukan dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, keadilan, keberlanjutan, serta terukur secara tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS). Pendekatan ini dimaksudkan untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dengan arah pembangunan provinsi dan nasional, sehingga seluruh sumber daya pembangunan dapat diarahkan secara optimal dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Secara tematik, penyusunan RKPD Tahun 2026 Kabupaten Sarmi didasarkan pada hasil sinkronisasi berbagai dokumen perencanaan strategis sebagaimana tergambar dalam Gambar 4.1.

Gambar 4.1
Dasar Penentuan Tema, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2026



Adapun dasar penentuan tema, sasaran, dan prioritas pembangunan Kabupaten Sarmi Tahun 2026 meliputi:

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029;

- Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026;
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Tahun 2025–2045;
- Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2025–2029;
- Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2026;
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2045;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2029;
- Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- Dokumen Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sarmi;
- Kebijakan Green Economy dan Blue Economy;
- Isu dan Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDGs);
- Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sarmi;
- Isu Strategis Daerah, Regional, Nasional, dan Global; dan
- Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2024.

Dengan demikian, tema pembangunan Kabupaten Sarmi pada Tahun 2026 didasarkan dengan memperhatikan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. RPJPN Tahun 2025–2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. Dokumen ini mengusung visi besar **“Indonesia Emas 2045”** dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Visi tersebut bertumpu pada kekuatan modal dasar bangsa Indonesia, antara lain: potensi kependudukan dan modal manusia, kekayaan alam dan kekuatan maritim, serta modal sosial dan budaya yang kokoh. Selain itu, perumusan RPJPN juga mempertimbangkan dinamika mega tren global, seperti digitalisasi, perubahan iklim, geopolitik dunia, dan transformasi ekonomi hijau.

Gambar 4.2

Visi Indonesia Emas 2045 dalam RPJP Nasional Tahun 2025–2045

Visi Indonesia 2045:

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan



Sumber : Dokumen RPJP Nasional 2025–2045 (Bappenas RI)

Gambaran visi nasional tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.2. Selanjutnya, arah pembangunan nasional dalam mencapai visi tersebut dijabarkan melalui misi pembangunan 2045 sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 4.3.

Misi tersebut mencakup tiga pilar transformasi utama:

Transformasi Sosial,

Transformasi Ekonomi, dan

Transformasi Tata Kelola,

yang ditopang oleh dua

landasan utama, yakni Supremasi Hukum dan Ketahanan Sosial Budaya, serta diimplementasikan melalui tiga kerangka besar pembangunan yaitu: pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, penyediaan infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan, serta kesinambungan pembangunan lintas periode.

Gambar 4.3
Misi Pembangunan Indonesia 2045 dalam RPJPN Tahun 2025-2045



Sumber : Dokumen RPJP Nasional 2025-2045 (Bappenas RI)

2. RPJMN Tahun 2025–2029

RPJMN Tahun 2025–2029 merupakan implementasi tahap pertama dari RPJPN 2025–2045 yang mengusung tema besar **“Penguatan Transformasi untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045.”**

RPJMN ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 dan menjadi acuan utama bagi pemerintah pusat serta daerah dalam perencanaan lima tahunan.

RPJMN menegaskan delapan prioritas nasional (Asta Cita), yaitu:

- Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM;
- Memantapkan pertahanan keamanan dan kemandirian bangsa;
- Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan lapangan kerja berkualitas;
- Memperkuat pembangunan SDM, sains, dan teknologi;
- Melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis SDA;
- Membangun dari desa dan mempercepat pengentasan kemiskinan;
- Memperkuat reformasi hukum, birokrasi, dan pemberantasan korupsi;
- Memperkuat keharmonisan sosial, lingkungan, dan budaya bangsa.

3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026

Sebagai penjabaran tahunan dari RPJMN, RKP Tahun 2026 menjadi dasar sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah. Tahun 2026 memiliki posisi

strategis karena menjadi tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025–2029 sekaligus awal implementasi RPJPN 2025–2045, sehingga berperan sebagai tahun fondasi transformasi pembangunan nasional.

RKP Tahun 2026 ditetapkan melalui Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2025, dengan mengusung tema nasional:

“Kedaulatan Pangan, Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.”

Tema ini dijabarkan dalam dua fokus utama:

1) Pangan dan Energi, dengan penekanan pada:

- Swasembada pangan, energi, dan air;
- Optimalisasi food estate dan energi terbarukan;
- Penguatan BULOG serta pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) terintegrasi.

2) Ekonomi Produktif dan Inklusif, yang difokuskan pada:

- Penguatan pendidikan dan kesehatan,
- Reformasi birokrasi dan kemudahan investasi,
- Transformasi digital dan inovasi riset,
- Peningkatan daya saing pertahanan dan kemandirian fiskal,
- Hilirisasi sumber daya alam oleh entitas nasional, serta
- Percepatan pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan.

3). Ekonomi inklusif terdiri dari :

- Percepatan Pertumbuhan Ekonomi ditekankan pada percepatan hilirisasi SDA oleh entitas milik Indonesia dan optimalisasi potensi SWF Danantara.
- Percepatan Pengentasan Kemiskinan ditekankan pada data tunggal kemiskinan, digitalisasi bantuan, 3 juta rumah dan 70.000 koperasi merah putih.

Untuk mewujudkan tema RKP tersebut ditetapkan sasaran makro pembangunan nasional pada tahun 2026, yaitu: 1). Laju Pertumbuhan Ekonomi; 2). PDRB per kapita (juta); 3). Kontribusi PDRB Provinsi; 4). Tingkat Kemiskinan; 5). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); 6). Indeks Rasio Gini; 7). Indeks Modal Manusia; 8). Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK dan 9). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

4. RPJPD Provinsi Papua Tahun 2025–2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Tahun 2025–2045 menjadi pedoman arah pembangunan jangka panjang yang menuntun seluruh pemerintah daerah di wilayah Papua, termasuk Kabupaten Sarmi, dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan. RPJPD ini menegaskan arah pembangunan Papua untuk dua dekade mendatang dengan visi:

“Provinsi Papua yang Maju dan Berkelanjutan Berbasis Ekonomi Biru, Agroindustri, dan Ekonomi Kreatif.”

Visi tersebut mencerminkan semangat untuk membangun Papua secara berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, kelautan, dan pertanian secara optimal, serta mengembangkan sektor ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal dan inovasi masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan delapan misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Transformasi sosial untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, dan inklusif;
2. Transformasi ekonomi untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, dan produktif;
3. Transformasi tata kelola pemerintahan yang efektif dan bebas dari korupsi;
4. Penguatan keamanan daerah, demokrasi substantif, dan stabilitas ekonomi makro daerah;
5. Pembangunan masyarakat yang berketahanan dari sisi sosial, budaya, dan ekologi;
6. Pemerataan pembangunan kewilayahan yang adil dan berkelanjutan;
7. Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas, mudah diakses, serta mendukung kemandirian pangan;
8. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan masyarakat dalam menjalankan pembangunan secara berkesinambungan.

Keterkaitan RPJPD Provinsi Papua dengan tema pembangunan Kabupaten Sarmi Tahun 2026 terletak pada upaya mendorong transformasi sosial dan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan, khususnya melalui penguatan ekonomi biru, agroindustri, dan ekonomi kreatif yang menjadi pilar utama pembangunan Papua 2045. Arah kebijakan ini menjadi dasar dalam penentuan tema pembangunan Kabupaten Sarmi Tahun 2026 yang selaras dengan visi pembangunan provinsi, dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat, pengembangan sektor unggulan daerah, peningkatan infrastruktur dasar, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan adaptif terhadap dinamika pembangunan di wilayah pesisir dan pedalaman.

5. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2026

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024–2026, sekaligus menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun arah dan prioritas pembangunan di wilayahnya. RKPD

Provinsi Papua Tahun 2026 menandai tahap akhir pelaksanaan RPD 2024–2026, yang berfokus pada upaya mempercepat transformasi ekonomi daerah, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua secara berkelanjutan.

Sejalan dengan arah pembangunan nasional dan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Papua Tahun 2025–2045, RKPD Provinsi Papua Tahun 2026 menetapkan **tema pembangunan daerah**, yaitu:

“Percepatan Pembangunan Struktur Ekonomi yang Inklusif Melalui Akselerasi Potensi Unggulan Daerah.”

Tema tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Papua untuk memperkuat struktur perekonomian yang berbasis pada potensi unggulan lokal, seperti sektor kelautan, perikanan, pertanian, kehutanan, dan ekonomi kreatif, dengan tetap menjamin keterlibatan seluruh lapisan masyarakat secara inklusif dan berkeadilan. Tema ini juga menegaskan pentingnya peningkatan produktivitas dan kemandirian daerah dalam mendukung pencapaian visi Papua 2045 yang maju dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tema pembangunan tersebut, RKPD Provinsi Papua Tahun 2026 menetapkan lima prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Sumber Daya Manusia, yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat Papua melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, serta pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan daerah.
2. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan, dan Berkelanjutan, melalui pengembangan sektor unggulan daerah yang berorientasi pada ekonomi biru, agroindustri, dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat adat dalam kegiatan ekonomi produktif.
3. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, guna memastikan stabilitas sosial dan keamanan yang kondusif sebagai prasyarat utama pelaksanaan pembangunan yang efektif di seluruh wilayah Papua.
4. Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur serta Konektivitas Wilayah, melalui penguatan jaringan transportasi darat, laut, dan udara, serta penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, energi, dan perumahan layak huni untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, yang difokuskan pada reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Secara keseluruhan, arah kebijakan pembangunan Provinsi Papua Tahun 2026 mencerminkan keberlanjutan dari agenda pembangunan tahun-tahun sebelumnya (2024–2025), yaitu:

Tahun 2024 berfokus pada penguatan dan percepatan perekonomian daerah sesuai potensi unggulan lokal,

Tahun 2025 diarahkan pada percepatan pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan

Tahun 2026 menjadi tahap akselerasi pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis potensi daerah.

Dengan demikian, RKPD Provinsi Papua Tahun 2026 berperan sebagai panduan strategis bagi Kabupaten Sarmi untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerahnya dengan arah kebijakan provinsi, terutama dalam memperkuat struktur ekonomi lokal, meningkatkan daya saing wilayah, serta mempercepat transformasi sosial-ekonomi menuju Papua yang maju, adil, dan berkelanjutan.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2045 merupakan arah kebijakan pembangunan daerah untuk kurun waktu dua puluh tahun ke depan. RPJPD ini menjadi pedoman utama dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan, termasuk RKPD Tahun 2026 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJPD yang baru.

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2045 adalah:

“Mewujudkan Sarmi Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan Berbasis Ekonomi Lokal dan Kearifan Lokal.”

Visi tersebut mencerminkan tekad Pemerintah Kabupaten Sarmi untuk membangun masyarakat yang berdaya saing, mandiri, serta berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan delapan misi pembangunan daerah yang saling terkait dan menjadi landasan bagi arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan tahunan, yaitu:

1. Mewujudkan transformasi sosial yang berkualitas;
2. Mewujudkan transformasi pembangunan ekonomi berbasis pengelolaan sumber daya lokal yang inklusif dan berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan kemandirian dan pemerataan pembangunan wilayah;

4. Mentransformasikan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, inovatif, dan bersih;
5. Mewujudkan pembangunan daerah yang stabil dan aman;
6. Meningkatkan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan;
7. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan merata;
8. Mewujudkan pembangunan yang terintegrasi dan berkesinambungan.

Visi dan Misi tersebut mengandung makna bahwa arah pembangunan daerah diarahkan untuk membangun masyarakat yang berdaya saing, sejahtera, dan mandiri dengan bertumpu pada potensi lokal, budaya, serta nilai-nilai kearifan masyarakat asli Papua di Kabupaten Sarmi.

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang ini dibagi ke dalam empat tahapan lima tahunan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5.1.

Gambar 5.1 menunjukkan RPJPD Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2045 membagi arah pembangunan daerah ke dalam empat tahapan lima tahunan yang saling berkesinambungan, yaitu:



1. Tahap I (2025–2029): Peningkatan Fondasi Transformasi.

Fokus pada peningkatan kapasitas pembangunan sosial, ekonomi, dan politik daerah melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang berkualitas. Tahapan ini menjadi fondasi awal bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan, dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat asli Papua di Kabupaten Sarmi.

2. Tahap II (2030–2034): Percepatan Transformasi.

Menekankan percepatan pembangunan dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua, penguatan ekonomi rakyat, serta peningkatan infrastruktur dasar dan layanan publik.

3. Tahap III (2035–2039): Pemantapan Transformasi.

Menekankan pada pembangunan manusia yang berdaya saing, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal yang berkelanjutan.

4. Tahap IV (2040–2045): Perwujudan Transformasi.

Mencapai kemandirian daerah yang maju dan berdaya saing tinggi, dengan masyarakat yang berkepribadian, harmonis, dan sejahtera berbasis ekonomi lokal dan kearifan budaya daerah.

Selaras dengan arah pembangunan jangka panjang tersebut, tahapan pertama RPJPD (2025–2029) menjadi periode **“Peningkatan Fondasi Transformasi”**, yang menitikberatkan pada penguatan kapasitas sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan sebagai dasar untuk mewujudkan transformasi pembangunan di tahun-tahun berikutnya.

Secara substansial, RPJPD Kabupaten SarMI 2025–2045 memiliki keterkaitan langsung dengan tema pembangunan daerah Tahun 2026, yaitu tahun pertama pelaksanaan RPJPD tersebut. Dengan demikian, arah pembangunan Tahun 2026 menjadi langkah strategis dalam mengimplementasikan visi dan misi RPJPD Kabupaten SarMI, sekaligus menyiapkan fondasi bagi terwujudnya SarMI yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan dalam dua dekade mendatang.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten SarMI Tahun 2025–2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten SarMI Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih. Dokumen ini memuat arah kebijakan, strategi, serta prioritas pembangunan daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten SarMI Tahun 2025–2029 adalah: **“BERSATU MEWUJUDKAN SARMI LEBIH MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN.”**

Visi tersebut menggambarkan arah pembangunan yang menekankan semangat kebersamaan seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, serta mitra pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan yang inklusif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Pembangunan diarahkan untuk memperkuat fondasi sosial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, serta memastikan keberlanjutan tata kelola pemerintahan dan lingkungan hidup.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan tujuh misi pembangunan daerah yang dikenal dengan Sapta Cita Pembangunan Kabupaten SarMI, yaitu:

1. Mewujudkan birokrasi yang berorientasi pada pelayanan prima dalam melayani masyarakat, kelembagaan kampung, dan adat.
2. Menjamin pelaksanaan program Otonomi Khusus (Otsus) secara optimal untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, beriman, dan berilmu.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan kesehatan yang merata, terpadu, dan berkelanjutan.

5. Memperkokoh toleransi antarumat beragama guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis.
6. Mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal dan kearifan daerah yang berwawasan lingkungan dan memperhatikan kawasan perbatasan.
7. Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik yang memadai dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Sarmi.

Selaras dengan arah kebijakan jangka menengah tersebut, tema pembangunan Kabupaten Sarmi Tahun 2026 ditetapkan sebagai:

“Pemenuhan Infrastruktur Pembangunan Guna Meningkatkan Pemerataan dan Akses Layanan Dasar.”

Tema ini merupakan langkah awal dalam kerangka pencapaian visi dan misi RPJMD 2025–2029, yang berfungsi sebagai fondasi pembangunan daerah pada awal periode pemerintahan. Pembangunan tahun 2026 difokuskan pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, air bersih, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, serta jaringan komunikasi dan transportasi antarkampung.

Tujuan utama dari arah pembangunan ini adalah memperluas jangkauan pelayanan publik dan mempercepat pemerataan pembangunan antarwilayah di Kabupaten Sarmi. Selain itu, pelaksanaan pembangunan tahun 2026 juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan kampung, mendorong efisiensi birokrasi pelayanan publik, serta memastikan sinergitas pelaksanaan program Otonomi Khusus bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur bukan hanya berorientasi pada fisik, tetapi juga pada penguatan kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat lokal.

Gambar 4.4 di atas memperlihatkan tahapan arah pembangunan Kabupaten Sarmi selama lima tahun (2026–2030) sebagai implementasi dari visi dan misi RPJMD 2025–2029.

Tahun 2026: Pemenuhan Infrastruktur Pembangunan guna Meningkatkan Pemerataan dan Akses Layanan Dasar, menjadi fondasi utama dalam membangun keterhubungan wilayah dan pemerataan pelayanan publik.



Sumber : Dokumen RPJMD Kab.Sarmi 2025-2029

Tahun 2027: Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul, Berkarakter, dan Berbudaya, difokuskan pada penguatan pendidikan, pelatihan kerja, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja lokal.

Tahun 2028: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah menuju Reformasi Birokrasi yang Profesional dan Melayani, diarahkan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tahun 2029: Pemantapan Perekonomian Daerah berbasis Pengelolaan SDA dan Ekonomi Kerakyatan, dengan mendorong pengembangan sektor unggulan lokal serta peningkatan daya saing ekonomi daerah.

Tahun 2030: Perwujudan Sarmi Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan, sebagai puncak dari tahapan pencapaian RPJMD menuju visi jangka panjang daerah (RPJPD 2025–2045).

Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan Tahun 2026 menjadi fase awal yang sangat strategis dalam siklus RPJMD Kabupaten SarMI Tahun 2025–2029. Tahun ini berperan penting dalam membangun pondasi infrastruktur dan pelayanan dasar yang kuat, sebagai landasan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi tata kelola pemerintahan, dan penguatan ekonomi lokal di tahun-tahun selanjutnya. Keseluruhan tahapan tersebut diarahkan untuk memastikan terwujudnya Kabupaten SarMI yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan sesuai dengan semangat visi dan misi RPJMD.

8. Posisi RKPD dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten SarMI 2013–2033

Pembangunan Daerah Tahun 2026 merupakan bagian dari periode Tahap IV dalam kerangka pembangunan spasial Kabupaten SarMI. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten SarMI Tahun 2013–2033 menitikberatkan pada upaya penguatan struktur dan pola ruang melalui implementasi Pemantapan Sistem Perkotaan, Sistem Sarana dan Prasarana Wilayah, Rencana Pola Ruang, serta penetapan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).

Arah penataan ruang pada periode ini difokuskan untuk:

Mengembangkan kawasan budidaya secara berkelanjutan sesuai potensi wilayah pesisir, perdesaan, dan kawasan hinterland Kabupaten SarMI.

Mendorong optimalisasi Kawasan Strategis Kabupaten, khususnya yang memiliki nilai penting secara ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Meningkatkan kapasitas infrastruktur wilayah, baik infrastruktur transportasi, energi, air bersih, permukiman, maupun prasarana pelayanan dasar lainnya, guna mendukung konektivitas dan pertumbuhan pusat-pusat kegiatan wilayah.

9. Sustainable Development Goals (SDG's)

Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG's), Pemerintah Kabupaten Sarmi mengidentifikasi dan mengakomodasi tujuh isu pembangunan yang menjadi perhatian utama dalam penyusunan RKPD Tahun 2026. Isu-isu tersebut meliputi:

- isu kesehatan,
- isu pendidikan,
- isu pelestarian lingkungan hidup,
- isu kemiskinan,
- isu perekonomian,
- isu kesejahteraan sosial, dan
- isu ketahanan pangan.

Sejumlah capaian indikator SDG's di Kabupaten Sarmi menunjukkan bahwa masih diperlukan percepatan dan penguatan intervensi, terutama pada target-target berikut:

- Penurunan angka kemiskinan, khususnya pada kelompok masyarakat rentan di distrik-distrik dengan tingkat keterisolasian tinggi.
- Peningkatan akses dan kualitas layanan dasar pendidikan dan kesehatan, yang masih menghadapi tantangan pada aspek keterjangkauan geografis, ketersediaan tenaga layanan, dan kapasitas fasilitas pelayanan.
- Penurunan prevalensi stunting, baik pada anak balita maupun baduta, yang masih berada pada tingkat yang memerlukan perhatian serius.
- Pengurangan angka kematian ibu (AKI) dan kematian bayi (AKB) yang masih terjadi di beberapa wilayah akibat keterbatasan layanan kesehatan maternal dan neonatal.
- Pengendalian penyakit menular dan penyakit berisiko tinggi, yang masih muncul secara sporadis di beberapa distrik dan memerlukan penguatan sistem surveilans kesehatan.
- Perluasan layanan air minum layak dan sanitasi, mengingat sebagian masyarakat belum memperoleh akses yang memadai terhadap layanan dasar tersebut.
- Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, yang masih cenderung fluktuatif serta belum sepenuhnya ditopang oleh sektor-sektor ekonomi lokal yang produktif.
- Penguatan upaya perlindungan dan rehabilitasi lingkungan hidup, mengingat masih tingginya tekanan terhadap ekosistem pesisir, sungai, dan kawasan hutan.

Secara keseluruhan, integrasi isu-isu SDG's dalam RKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2026 merupakan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan secara inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjangkau seluruh masyarakat, terutama pada wilayah-wilayah yang selama ini mengalami ketertinggalan dalam akses layanan dasar dan pertumbuhan ekonomi.

10. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sarmi

Dalam rangka memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah bersifat partisipatif dan mampu menampung aspirasi masyarakat secara menyeluruh, penyusunan RKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2026 memperhatikan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang disampaikan melalui mekanisme penjangkauan aspirasi pada masing-masing daerah pemilihan. Aspirasi tersebut dihimpun dan disampaikan oleh anggota DPRD melalui aplikasi SIPD sebagai bagian dari proses politik anggaran yang terintegrasi dalam siklus perencanaan daerah.

Pada Tahun Perencanaan 2026, Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sarmi yang terekam dalam aplikasi SIPD berjumlah 263 usulan dari 25 anggota DPRD. Dari jumlah tersebut, usulan telah diteruskan kepada Perangkat Daerah pengampu sesuai kewenangannya. Seluruh usulan yang diteruskan kemudian dikelompokkan menurut urusan pemerintahan dan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab, untuk selanjutnya dianalisis kesesuaian dan kontribusinya terhadap pemecahan permasalahan pembangunan daerah.

Secara umum, Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sarmi Tahun 2026 didominasi oleh usulan pada sektor pembangunan infrastruktur wilayah, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penguatan struktur perekonomian lokal, serta penanganan isu-isu sosial kemasyarakatan. Berbagai usulan tersebut menjadi salah satu pertimbangan strategis dalam perumusan tema pembangunan daerah, penetapan prioritas pembangunan, serta penyusunan program dan kegiatan pada RKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2026, sehingga tujuan pembangunan yang berorientasi pada pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat di wilayah Kabupaten Sarmi.

11. Tantangan Pembangunan Tahun 2026

Berdasarkan dinamika pembangunan Kabupaten Sarmi hingga Tahun 2024 serta proyeksi kondisi perekonomian pada Tahun 2026, terdapat sejumlah tantangan strategis yang perlu diantisipasi dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah. Karakteristik geografis Sarmi yang luas, terfragmentasi, dengan aksesibilitas terbatas serta ketergantungan ekonomi pada sektor primer menjadi faktor utama yang

memengaruhi arah dan kecepatan pembangunan. Tantangan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Keterbatasan aksesibilitas antar distrik dan kampung, yang berimplikasi pada tingginya biaya logistik, lambatnya mobilitas barang dan orang, serta terbatasnya efektivitas pelayanan dasar.
- b. Ketergantungan ekonomi pada sektor primer, terutama perikanan, pertanian, dan hasil hutan, di mana produktivitas dan nilai tambah masih rendah akibat minimnya fasilitas pascapanen, industri pengolahan, dan rantai pasok yang belum terintegrasi.
- c. Rendahnya kapasitas fiskal daerah, sehingga kemampuan daerah dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan pelayanan publik masih terbatas dan sangat mengandalkan dana transfer pusat, termasuk Dana Otonomi Khusus.
- d. Belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata berbasis alam dan budaya, yang sebenarnya memiliki potensi besar namun terkendala pada aksesibilitas, kesiapan destinasi, dan kurangnya dukungan infrastruktur pendukung.
- e. Kelembagaan ekonomi kampung yang masih lemah, baik dari sisi manajemen usaha, kemitraan, maupun akses pembiayaan, sehingga belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.
- f. Rantai nilai (value chain) komoditas unggulan belum berkembang, baik untuk perikanan tangkap, budidaya, sagu, maupun hasil pertanian lainnya, akibat terbatasnya sarana penyimpanan dingin, pemasaran, industri pengolahan, dan konektivitas antarwilayah.
- g. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan penghubung antar distrik, jaringan air bersih, sanitasi, listrik, dan telekomunikasi, yang berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat dan daya tarik investasi di wilayah Kabupaten Sarmi.
- h. Kualitas Sumber Daya Manusia masih rendah, tercermin dari tingkat pendidikan, derajat kesehatan, serta angka stunting yang masih memerlukan penanganan berkelanjutan, khususnya pada wilayah-wilayah terpencil.
- i. Sektor UMKM belum berkembang optimal, karena minimnya akses pelatihan, pasar, dan permodalan, serta rendahnya pemanfaatan teknologi dalam aktivitas produktif masyarakat.
- j. Tantangan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam percepatan pembangunan, termasuk keselarasan kebijakan, konsistensi pelaksanaan, serta sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.

Tantangan-tantangan tersebut menjadi landasan bagi Pemerintah Kabupaten SarMI dalam merumuskan strategi pembangunan Tahun 2026 yang lebih fokus pada peningkatan konektivitas wilayah, penguatan ekonomi lokal berbasis potensi kampung, peningkatan kualitas pelayanan dasar, serta percepatan penyediaan infrastruktur dan penguatan kapasitas kelembagaan daerah.

Dengan demikian, penyusunan RKPD Tahun 2026 harus memperhatikan arah pengembangan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW 2013–2033, sehingga sinkronisasi antara rencana pembangunan tahunan dan rencana penataan ruang dapat terjaga serta mendukung terwujudnya struktur ruang Kabupaten SarMI yang efisien, produktif, dan berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan capaian pelaksanaan pembangunan hingga Tahun 2024, serta memperhatikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penyusunan dan pelaksanaan RKPD Tahun 2026, maka ditetapkan Tema Pembangunan Kabupaten SarMI Tahun 2026 sebagai pelaksanaan Tahun Ketiga RPJMD Tahun 2025–2029 dan sekaligus Tahap I pelaksanaan RPJPD Kabupaten SarMI Tahun 2025–2029. Tema tersebut mencerminkan fokus dan titik berat pelaksanaan agenda pembangunan daerah pada tahun perencanaan, yaitu:

“Pemenuhan Infrastruktur Pembangunan untuk Meningkatkan Pemerataan dan Akses terhadap Layanan Dasar.”

Tema Pembangunan RKPD Kabupaten SarMI Tahun 2026 tersebut menitikberatkan pada upaya percepatan penyediaan infrastruktur wilayah yang mendukung konektivitas, pemerataan pembangunan, serta peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Tema “Pemenuhan Infrastruktur Pembangunan untuk Meningkatkan Pemerataan dan Akses terhadap Layanan Dasar” mengandung arti bahwa pembangunan Kabupaten SarMI pada Tahun 2026 difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan wilayah melalui penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang mampu mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah serta menjamin ketersediaan layanan dasar bagi seluruh masyarakat. Tema ini juga menggambarkan upaya transformatif pemerintah daerah dalam memperbaiki disparitas antar distrik, memperlancar konektivitas, meningkatkan mobilitas barang dan jasa, serta memperluas jangkauan pelayanan dasar, khususnya pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan permukiman.

Makna tema tersebut menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur bukan semata penyediaan fisik, tetapi merupakan instrumen untuk memperkuat produktivitas ekonomi lokal, membuka akses wilayah terisolir, serta membangun ketahanan sosial masyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur menjadi kunci untuk mempercepat pencapaian visi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Kabupaten SarMI.

4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Tahun 2026 disusun sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten SarMI Tahun 2025–2029, yang menjadi pedoman utama pembangunan jangka menengah daerah. Penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2026 juga diarahkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten SarMI Tahun 2025–2045.

Tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2026 dirumuskan berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025–2029 sebagai langkah strategis untuk memastikan kesinambungan agenda pembangunan daerah. Penetapan tujuan dan sasaran ini mencerminkan prioritas pembangunan Kabupaten SarMI dalam mempercepat peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, memperkuat struktur ekonomi daerah, serta meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan dan layanan publik. Seluruh tujuan dan sasaran diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah serta indikator makro pembangunan yang menjadi dasar pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Dengan memperhatikan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok dalam RPJMD 2025–2029 yang sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang 2025–2045, maka tujuan pembangunan Kabupaten SarMI Tahun 2026 ditetapkan untuk menggambarkan capaian tahunan yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian target menengah dan panjang daerah. Hubungan antara tujuan pembangunan dan indikator kinerja pembangunan daerah selanjutnya ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1
Matriks Tujuan dan Indikator Tujuan
RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2029

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	56.00
		Nilai SAKIP	Poin	56.00
2.	Peningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia yang unggul dan terdepan	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	69.65
3.	Peningkatkan perekonomian daerah yang tumbuh, produktif dan inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonom	%	5.45
4.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkualitas	Tingkat Kemiskinan	%	13.34
5.	Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang asri dan tahan bencana	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	61.29
6.	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pembangunan yang handal dan berkeadilan	Indeks Infrastruktur	Poin	59.88

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Sarmi 2025–2029

Tabel 4.2
Matriks Keterkaitan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2029

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	• Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	56.00	
		• Nilai SAKIP	Poin	56.00	
		• Peningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima dan Merata	Indeks Pelayanan Publik	Poin	3.34
		• Peningkatkan pembangunan desa yang handal dan berkeadilan	Indeks Desa	Poin	"0,52
2.	Peningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia yang unggul dan terdepan	• Meningkatkan kesejahteraan Orang Asli	Indeks Pemenuhan hak-hak Orang asli Sarmi	Poin	5,00
		• Peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	69.65
			Indeks Pendidikan	Poin	69,20
		• Peningkatnya akses fasilitas kesehatan berkualitas di seluruh wilayah	• Indeks Kesehatan	Poin	78.06
			• Revalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita **	%	20.64
		• Peningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya	• Indeks Pembangunan Kebudayaan **	Poin	45.50
• Indeks Kerukunan Umat Beragama**	Poin		76.40		
• Penguatan pengarusutamaan gender	Indeks Ketimpangan Gender **	Poin	0.434		
3.	Peningkatkan perekonomian daerah yang tumbuh, produktif dan inklusif	• Laju Pertumbuhan Ekonom	%	5.45	
		• PDRB per Kapita	Juta Rp/ Kapita	98.04	
	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	0.09	
	Penguatan kualitas produksi sektor unggulan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	3.22	
	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Kontribusi PDRB Kabupaten Sarmi terhadap Provinsi	%	5.46	
	Peningkatkan produktivitas tenaga kerja	Pengangguran Terbuka	%	3.19	

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
4	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkualitas Pemenuhan Kehidupan Masyarakat yang layak dan berkeadilan	Tingkat Kemiskinan	%	13.34
		• Rasio Gini*	Poin	0.360
		• Tingkat kedalaman kemiskinan (PI)	Poin	1.77
5	Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang asri dan tahan bencana Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Penguatan wilayah yang tangguh dan responsif terhadap bencana	• Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	61.29
		• Indeks Risiko Bencana	Poin	Tinggi
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	Poin	79.19
		Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0.61
6.	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pembangunan yang handal dan berkeadilan Penyediaan infrastruktur konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang handal dan memadai Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika yang handal dan memadai Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman masyarakat	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pembangunan yang handal dan berkeadilan	Poin	59.88
		• Persentase Ketercapaian Infrastruktur Pekerjaan Umum	%	61.50
		• Persentase Ketercapaian Infrastruktur • Perhubungan	%	61.50
		Persentase Ketercapaian Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	%	66.00
		Persentase Ketercapaian Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	%	51.00

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten SarMI 2025-2029

Penetapan indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten SarMI Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang bersumber dari instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Penetapan indikator tersebut berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014, yang menjadi dasar dalam penentuan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah.

Penetapan IKU dimaksudkan untuk menyediakan informasi kinerja yang relevan, terukur, dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara efektif. IKU juga menjadi instrumen untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah dalam RPJMD, serta menjadi dasar perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun-tahun berikutnya.

Sejalan dengan itu, penyusunan sasaran dan indikator kinerja RKPD Tahun 2026 secara konsisten mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten SarMI Tahun 2025-2029. Matriks Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD yang ditampilkan pada Tabel 4.1, serta Matriks Keterkaitan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD pada Tabel 4.2, menjadi rujukan utama dalam

penjabaran sasaran tahunan daerah. Dengan demikian, sasaran dan indikator kinerja RKPD Tahun 2026 merupakan hasil penurunan langsung dari kerangka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sarmi.

Selain itu, penetapan target indikator RKPD Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan baseline dan capaian indikator kinerja hingga Tahun 2024, perkembangan dan kondisi aktual pembangunan Tahun 2025, serta proyeksi pembangunan daerah selama periode RPJMD 2025–2029. Pendekatan ini memastikan agar sasaran tahunan tidak hanya konsisten dengan kerangka perencanaan menengah, tetapi juga responsif terhadap dinamika pembangunan daerah.

4.3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan penajaman, perluasan cakupan, dan kelanjutan agenda pembangunan dari tahun sebelumnya, serta menjadi jawaban atas permasalahan pembangunan yang berkembang di Kabupaten Sarmi. Penetapan prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan tantangan dan kendala yang diperkirakan akan muncul pada periode perencanaan, terutama yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah, ketimpangan layanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Prioritas pembangunan dirumuskan untuk mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah dan penyelesaian permasalahan strategis dengan mengedepankan kolaborasi lintas Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.

RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun ke-2 (kedua) dari RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, penyusunannya dilakukan dengan menekankan konsistensi arah kebijakan jangka menengah serta keselarasan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2026 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2026. Perumusan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Sarmi dilaksanakan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, dan berbasis data, dengan memperhatikan kriteria:

- a. Kesesuaian dengan dokumen perencanaan, khususnya RPJMD 2025–2029 dan arah kebijakan pembangunan daerah;
- b. Urgensi penanganan permasalahan pembangunan, terutama terkait pemenuhan layanan dasar, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan daya saing wilayah; dan
- c. Kemanfaatan langsung bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan akses, pemerataan, serta kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Kabupaten Sarmi.

Penetapan prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 dilaksanakan dengan mempertimbangkan capaian indikator makro pembangunan, Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024, serta berbagai isu strategis yang berkembang pada tataran lokal, regional, dan nasional. Selain itu, prioritas pembangunan juga dirumuskan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten SarMI Tahun 2025–2029, sehingga fokus pembangunan tahunan tetap berada pada koridor sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Selanjutnya, prioritas pembangunan Tahun 2026 disusun untuk mendukung pencapaian Tema Pembangunan Kabupaten SarMI Tahun 2026, yaitu:

“Pemenuhan Infrastruktur Pembangunan untuk Meningkatkan Pemerataan dan Akses Layanan Dasar.”

Tema tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Tahun Kedua RPJMD Kabupaten SarMI 2025–2029, yang menempatkan penguatan layanan dasar, peningkatan konektivitas wilayah, dan percepatan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi percepatan transformasi sosial-ekonomi masyarakat SarMI.

Untuk memperkuat arah pembangunan daerah pada Tahun 2026, diperlukan perumusan prioritas yang mampu menjawab permasalahan pembangunan, isu strategis, serta tantangan yang dihadapi Kabupaten SarMI dalam periode RPJMD 2025–2029. Prioritas pembangunan ini menjadi pedoman utama bagi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan secara lebih terfokus, terukur, dan selaras dengan tujuan jangka menengah. Selain itu, prioritas tersebut dirancang untuk memastikan konsistensi antara pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas layanan publik, pembangunan infrastruktur wilayah, serta penguatan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kabupaten SarMI menetapkan delapan prioritas pembangunan yang menjadi arah kebijakan tahunan pada RKPD Tahun 2026. Setiap prioritas mencerminkan penekanan kebijakan yang relevan dengan kondisi wilayah, karakteristik sosial budaya, serta tantangan pembangunan di daerah. Adapun prioritas pembangunan dimaksud disajikan pada Gambar berikut.

Gambar 4.5

Prioritas Pembangunan Kabupaten Sarmi Tahun 2026



Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Sarmi 2025-2029

Dalam rangka memastikan keterpaduan arah pembangunan tahunan dengan kerangka pembangunan jangka menengah, penyusunan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 dilakukan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2029. Penetapan prioritas pembangunan juga memperhatikan capaian indikator makro tahun sebelumnya, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD, isu-isu strategis lintas sektor, serta kebutuhan percepatan pemerataan layanan dasar di seluruh wilayah Kabupaten Sarmi.

Tema pembangunan Kabupaten Sarmi Tahun 2026 adalah **“Pemenuhan Infrastruktur Pembangunan untuk Meningkatkan Pemerataan dan Akses Layanan Dasar.”** Tema ini menekankan pentingnya percepatan penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar sebagai fondasi bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pendorong produktivitas sektor-sektor unggulan daerah.

Sejalan dengan tema tersebut, prioritas pembangunan Tahun 2026 dirumuskan untuk menjawab kebutuhan strategis daerah, antara lain peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemerataan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, peningkatan daya saing ekonomi lokal, serta perluasan konektivitas infrastruktur wilayah. Setiap prioritas kemudian diturunkan ke dalam sasaran pembangunan tahunan yang bersifat lebih operasional sesuai mandat RPJMD.

Oleh karena itu, tabel berikut menyajikan keterkaitan secara sistematis antara tema pembangunan, prioritas pembangunan, dan sasaran pembangunan Tahun 2026. Penyajian ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan arah kebijakan serta memperkuat sinergi antara dokumen perencanaan tahunan dan dokumen perencanaan jangka menengah, sehingga pelaksanaan pembangunan Kabupaten SarMI Tahun 2026 dapat berlangsung secara terarah, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil.

Tabel 4.3
Keterkaitan antara Tema, Prioritas, dan
Sasaran Pembangunan Tahun 2026

TEMA RKPD TAHUN 2026		
"Pemenuhan Infrastruktur Pembangunan untuk Meningkatkan Pemerataan dan Akses Layanan Dasar."		
No	8 PRIORITAS PEMBANGUNAN	18. SASARAN PEMBANGUNAN
1	Peningkatan Reformasi Birokrasi yang Profesional, Adaptif, dan Berorientasi Pelayanan Difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemenuhan standar akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.	<ul style="list-style-type: none"> ⦿ Meningkatkan akuntabilitas kinerja seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten SarMI ⦿ Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima dan merata ⦿ Meningkatkan pembangunan desa yang handal dan berkeadilan
2	Akselerasi Pelaksanaan Program Dana Otonomi Khusus yang Akuntabel dan Tepat Sasaran Mengarah pada optimalisasi pemanfaatan dana Otsus untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan OAP, dan pembangunan wilayah secara terukur serta berbasis kebutuhan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> ⦿ Meningkatkan kesejahteraan orang Asli SarMI
3	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Pendidikan untuk Mendorong SDM Unggul, Kreatif, dan Inovatif Berfokus pada pemerataan akses layanan pendidikan, peningkatan mutu sarana prasarana sekolah, dan penguatan kompetensi guru di seluruh distrik.	<ul style="list-style-type: none"> ⦿ Peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau
4	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Meliputi peningkatan akses layanan kesehatan dasar, pemenuhan tenaga medis, penurunan stunting, dan penguatan layanan kesehatan rujukan di wilayah terpencil.	<ul style="list-style-type: none"> ⦿ Meningkatnya akses fasilitas kesehatan berkualitas di seluruh wilayah
5	Penguatan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Tertib, Toleran, dan Berbudaya; Berorientasi pada peningkatan kohesi sosial, penguatan nilai budaya lokal, serta kerukunan antara kelompok masyarakat dan umat beragama.	<ul style="list-style-type: none"> ⦿ Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya
6	Peningkatan Kapasitas Kinerja Perekonomian Berbasis Komoditas Unggulan Daerah yang Berdaya Saing; Difokuskan pada pengembangan sektor unggulan seperti perikanan, pertanian, dan kehutanan, serta peningkatan hilirisasi dan nilai tambah produk daerah.	<ul style="list-style-type: none"> ⦿ Meningkatnya produktivitas sektor pertanian unggulan; ⦿ Penguatan kualitas produksi sektor unggulan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi; ⦿ Meningkatnya daya saing ekonomi daerah; ⦿ Meningkatkan produktivitas tenaga kerja ; ⦿ Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
7	Penurunan Kemiskinan Berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Integratif; Mencakup penajaman sasaran program penanggulangan kemiskinan, bantuan sosial terintegrasi, serta pengurangan kerentanan sosial masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> ⦿ Pemenuhan Kehidupan Masyarakat yang layak dan berkeadilan; ⦿ Penguatan pengarusutamaan gender
8	Pemenuhan dan Pemerataan Sarana Prasarana Wilayah yang Terintegrasi, Efisien, dan Handal; Difokuskan pada pengembangan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, air bersih, listrik), peningkatan konektivitas antarwilayah, serta pemerataan akses layanan publik.	<ul style="list-style-type: none"> ⦿ Penyediaan infrastruktur konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang handal dan memadai; ⦿ Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika yang handal dan memadai; ⦿ Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman masyarakat ; ⦿ Penguatan wilayah yang tangguh dan responsif terhadap bencana

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten SarMI 2025-2029

Untuk memastikan bahwa perumusan prioritas pembangunan Tahun 2026 benar-benar selaras dengan kebutuhan faktual dan tantangan pembangunan daerah, identifikasi permasalahan dan isu strategis dilakukan secara mendalam melalui analisis dokumen RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2029, evaluasi capaian pembangunan tahun sebelumnya, serta dinamika perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kabupaten Sarmi. Permasalahan dan isu strategis yang telah dirumuskan menjadi dasar dalam menetapkan arah prioritas pembangunan tahunan, sehingga intervensi yang direncanakan mampu menjawab akar persoalan dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk melihat keterkaitan tersebut secara lebih sistematis, berikut disajikan tabel yang menggambarkan hubungan antara permasalahan pembangunan, isu strategis daerah, dan prioritas pembangunan RKPd Kabupaten Sarmi Tahun 2026. Penyajian keterkaitan ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan logis mengenai alasan pemilihan prioritas, memastikan konsistensi dengan arah kebijakan RPJMD, serta memperkuat integrasi perencanaan lintas urusan pemerintahan.

Tabel 4.4
Keterkaitan antara Permasalahan dan Isu Strategis
dengan Prioritas Pembangunan dalam RKPd Kabupaten Sarmi Tahun 2026

No	Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
1	<ul style="list-style-type: none"> Akuntabilitas kinerja birokrasi masih rendah; Kualitas pelayanan publik belum prima dan merata; Pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya akuntabel 	Penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Peningkatan Reformasi Birokrasi yang Profesional, Adaptif, dan Berorientasi Pelayanan
2	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi Dana Otsus belum tepat sasaran; Keterbatasan pemenuhan kebutuhan dasar berbasis wilayah; Masih terdapat kesenjangan pelayanan publik antar distrik 	Optimalisasi pemanfaatan Dana Otonomi Khusus untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan OAP, dan kebutuhan masyarakat	2. Akselerasi Pelaksanaan Program Dana Otsus yang Akuntabel dan Tepat Sasaran
3	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas pendidikan belum merata di semua distrik; Akses layanan pendidikan yang belum merata; Keterbatasan jumlah dan distribusi guru kompeten; Masih terdapat Anak Tidak Sekolah (ATS) Manajemen dan tata kelola pendidikan belum optimal; Partisipasi masyarakat dan dukungan lingkungan belajar masih rendah 	Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan	3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Pendidikan untuk Mendorong SDM Unggul, Kreatif, dan Inovatif
4	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas kesehatan masyarakat belum optimal; Kompetensi guru dan tenaga medis belum merata; Penurunan kasus penyakit menular dan gizi belum signifikan; Akses layanan kesehatan dasar masih terbatas; Fasilitas pelayanan kesehatan belum merata sampai wilayah terpencil; Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, penurunan penyakit, dan pemerataan fasilitas kesehatan 	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, penurunan penyakit, dan pemerataan fasilitas kesehatan	4. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

No	Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
5	<ul style="list-style-type: none"> Konflik horizontal kecil masih terjadi; Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan masih terbatas; Nilai budaya lokal belum terintegrasi dalam pembangunan 	Penguatan nilai budaya lokal, kerukunan umat beragama, dan harmoni sosial masyarakat	5. Penguatan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Tertib, Toleran, dan Berbudaya
6	<ul style="list-style-type: none"> Produktivitas sektor unggulan (perikanan, pertanian, kehutanan) masih rendah; Nilai tambah produk daerah belum optimal; Rantai pasok daerah belum efisien 	Pengembangan komoditas unggulan daerah berbasis daya saing dan hilirisasi produk	6. Peningkatan Kapasitas Kinerja Perekonomian Berbasis Komoditas Unggulan Daerah yang Berdaya Saing
7	<ul style="list-style-type: none"> Masih Tingginya angka kemiskinan; Terbatasnya perlindungan sosial adaptif; Belum optimalnya ketahanan ekonomi keluarga 	Penanganan kemiskinan ekstrem, bantuan sosial tepat sasaran, dan pengurangan kerentanan sosial	7. Penurunan Kemiskinan Berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif
8	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas infrastruktur dasar belum merata; Aksesibilitas antarwilayah masih menjadi kendala; Konektivitas layanan publik belum optimal 	Pengembangan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi, efisien, dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik	8. Pemenuhan dan Pemerataan Sarana Prasarana Wilayah yang Terintegrasi, Efisien, dan Handal

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten SarMI 2025-2029

Tabel 4.4 menggambarkan keterkaitan antara permasalahan pembangunan daerah, isu strategis, dan prioritas pembangunan Tahun 2026. Setiap prioritas dirumuskan secara sistematis berdasarkan analisis kondisi faktual, tantangan utama, serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permasalahan pada berbagai urusan, mulai dari kualitas SDM, keterbatasan infrastruktur dasar, kinerja ekonomi unggulan yang belum optimal, hingga tata kelola pemerintahan, uraikan menjadi isu strategis yang kemudian menjadi dasar penentuan prioritas pembangunan yang operasional dan selaras dengan sasaran RPJMD 2025–2029.

Dengan demikian, prioritas Tahun 2026 merupakan respons langsung terhadap kebutuhan penyelesaian isu strategis dan dirancang untuk mendukung pencapaian tema pembangunan **“Pemenuhan Infrastruktur Pembangunan untuk Meningkatkan Pemerataan dan Akses Layanan Dasar.”**

Untuk menjaga konsistensi antara arah pembangunan jangka menengah dan rencana tahunan, dilakukan pemetaan keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD dengan prioritas pembangunan 2026, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.5.

Penjabaran keterkaitan ini diharapkan dapat memperkuat landasan perencanaan tahunan, sehingga setiap program dan kegiatan yang dirumuskan perangkat daerah memiliki korelasi yang jelas dengan target pembangunan jangka menengah. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan Tahun 2026 dapat berlangsung lebih terarah, terukur, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten SarMI.

Tabel 4.5

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, RPJMD 2025-2029 dengan Prioritas RKPD 2026

"BERSATU MEWUJUDKAN SARMI LEBIH MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN"													
Tema RKPD tahun 2026 "Pemenuhan Infrastruktur Pembangunan untuk Meningkatkan Pemerataan dan Akses Layanan Dasar."													
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN								Prioritas RKPD 2026	
				Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	
MISI 1: Mewujudkan Birokrasi yang berorientasi "Pelayanan Prima" dalam melayani masyarakat, kelembagaan kampung dan adat. MISI 2: Mewujudkan dan menjamin terlaksananya program Otonomi Khusus [OTSUS] di Kabupaten Sarmi MISI 3: Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia [SDM] Sarmi yang unggul, beriman dan berilmu MISI 4: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan kesehatan yang merata, terpadu, dan berkelanjutan	Tujuan 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sasaran 1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sarmi Sasaran 1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima dan merata Sasaran 1.3 Meningkatkan pembangunan desa yang handai dan berkeadilan Sasaran 1.3 Meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Sarmi	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	NA	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00	60,00	1. Peningkatan Reformasi Birokrasi yang Profesional, Adaptif, dan Berorientasi Pelayanan 2. Akselerasi Pelaksanaan Program Dana Otsus yang Akuntabel dan Tepat Sasaran	
			Nilai SAKIP	Poin	NA	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00	60,00		3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Pendidikan untuk Mendorong SDM Unggul, Kreatif, dan Inovatif; 4. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan 5. Penguatan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Tertib, Toleran, dan Berbudaya
			Indeks Pelayanan Publik	Poin	NA	3,25	3,34	3,43	3,51	3,60	3,69		
			Indeks Desa	Poin	0,5069*	0,52243	0,52816	0,53389	0,53962	0,54535	0,55108		3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Pendidikan untuk Mendorong SDM Unggul, Kreatif, dan Inovatif; 4. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan 5. Penguatan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Tertib, Toleran, dan Berbudaya
	Tujuan 2. Meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia yang unggul dan terdepan	Sasaran 2.1 Peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau Sasaran 2.2 Meningkatnya akses fasilitas kesehatan berkualitas di seluruh wilayah Sasaran 2.3 Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya	Indeks Pemenuhan hak-hak Orang asli Sarmi	Poin	NA	0,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Pendidikan untuk Mendorong SDM Unggul, Kreatif, dan Inovatif; 4. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan 5. Penguatan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Tertib, Toleran, dan Berbudaya	
			Indeks Pembangunan Manusia	Poin	67,89	68,83	69,65	70,47	71,29	72,10	72,91		3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Pendidikan untuk Mendorong SDM Unggul, Kreatif, dan Inovatif; 4. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan 5. Penguatan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Tertib, Toleran, dan Berbudaya
	Tujuan 3. Meningkatkan perekonomian daerah yang tumbuh, produktif dan inklusif	Sasaran 2.4 Penguatan pengarusutamaan gender	Indeks Pendidikan	Poin	66,42	67,76	69,20	70,65	72,10	73,54	74,99	3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Pendidikan untuk Mendorong SDM Unggul, Kreatif, dan Inovatif; 4. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan 5. Penguatan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Tertib, Toleran, dan Berbudaya	
			Indeks Kesehatan	Poin	76,78	77,69	78,06	78,43	78,80	79,17	79,54		3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Pendidikan untuk Mendorong SDM Unggul, Kreatif, dan Inovatif; 4. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan 5. Penguatan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Tertib, Toleran, dan Berbudaya
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita**	%	16,00	15,50	15,00	14,50	14,00	13,50	13,00		
			Indeks Pembangunan Kebudayaan**	Poin	NA	45,00	45,50	46,00	46,50	47,00	47,50		3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Pendidikan untuk Mendorong SDM Unggul, Kreatif, dan Inovatif; 4. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan 5. Penguatan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Tertib, Toleran, dan Berbudaya
Sasaran 2.4 Penguatan pengarusutamaan gender	Indeks Kerukunan Umat Beragama**	Poin	NA	76,00	76,40	76,80	77,20	77,60	78,00	3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Pendidikan untuk Mendorong SDM Unggul, Kreatif, dan Inovatif; 4. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan 5. Penguatan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Tertib, Toleran, dan Berbudaya			
	Indeks Ketimpangan Gender**	Poin	0,439*	0,439	0,434	0,428	0,423	0,417	0,412		3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Pendidikan untuk Mendorong SDM Unggul, Kreatif, dan Inovatif; 4. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan 5. Penguatan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Tertib, Toleran, dan Berbudaya		
Tujuan 3. Meningkatkan perekonomian daerah yang tumbuh, produktif dan inklusif	Sasaran 2.4 Penguatan pengarusutamaan gender	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,26	4,87	5,48	6,08	6,69	7,30	7,91		3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Pendidikan untuk Mendorong SDM Unggul, Kreatif, dan Inovatif; 4. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan 5. Penguatan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Tertib, Toleran, dan Berbudaya	
		PDRB per Kapita	Juta Rp/ Kapita	88,76	93,40	98,04	102,69	107,33	111,97	116,61	3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Pendidikan untuk Mendorong SDM Unggul, Kreatif, dan Inovatif; 4. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan 5. Penguatan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Tertib, Toleran, dan Berbudaya		

“BERSATU MEWUJUDKAN SARMI LEBIH MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN ” “Pemuenuhan Infrastruktur Pembangunan untuk Meningkatkan Pemerataan dan Akses Layanan Dasar.”													
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN									Prioritas RKPD 2026
				Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	
MISI 5: Memperkokoh toleransi antar umat beragama dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat	Sasaran 3.1 Meningkatkan produktivitas sektor pertanian unggulan Sasaran 3.2 Penguatan kualitas produksi sektor unggulan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi Sasaran 3.3 Meningkatkan daya saing ekonomi daerah Sasaran 3.4 Meningkatkan produktivitas tenaga kerja	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan LPE Kategori Industri Pengolahan Kontribusi PDRB Kabupaten Sarmi terhadap Provinsi Tingkat Pengangguran Terbuka	% % % %	-0,92	0,50	0,90	1,30	1,70	2,10	2,50	6. Peningkatan Kapasitas Kinerja Perekonomian Berbasis Komoditas Unggulan Daerah yang Berdaya Saing		
				14,05	13,76	13,34	12,92	12,51	12,09	11,67			
				0,372*	0,364	0,360	0,356	0,352	0,348	0,344			
				1,86	1,81	1,77	1,72	1,68	1,64	1,60			
MISI 6: Mewujudkan “pembangunan Ekonomi Inklusif” berbasis potensi dan kearifan lokal, berwawasan lingkungan dan kawasan perbatasan	Tujuan 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkualitas Sasaran 4.1 Pemuenuhan Kehidupan Masyarakat yang layak dan berkeadilan	Tingkat kedalaman kemiskinan (PI) Penurunan Intensitas Emisi GRK* Indeks Risiko Bencana*	% Poin %	14,05	13,76	13,34	12,92	12,51	12,09	11,67	7. Penurunan Kemiskinan Berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSSEN) dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Adaptif		
				0,372*	0,364	0,360	0,356	0,352	0,348	0,344			
				1,86	1,81	1,77	1,72	1,68	1,64	1,60			
				NA	59,28	61,29	63,30	65,31	67,31	69,32			
MISI 7: Mewujudkan Infrastruktur Pelayanan Publik yang memadai dan merata di wilayah Kabupaten Sarmi	Tujuan 5. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang asri dan tahan bencana Sasaran 5.1 Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Sasaran 5.2 Penguatan wilayah yang tangguh dan responsif terhadap bencana Tujuan 6. Meningkatkan pemuenuhan infrastruktur pembangunan yang handal dan berkeadilan Sasaran 6.1 Penyediaan infrastruktur konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang handal dan memadai Sasaran 6.2 Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika yang handal dan memadai Sasaran 6.3 Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** Indeks Ketahanan Daerah Indeks Ketercapaian Infrastruktur Pekerjaan Umum Persentase Ketercapaian Infrastruktur Perhubungan Persentase Ketercapaian Infrastruktur Komunikasi dan Informatika Persentase Ketercapaian Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Poin Poin Poin Poin Poin % % % %	172,22*	167,75	163,00	158,25	153,50	148,75	144,00	8. Pemuenuhan dan Pemerataan Sarana Prasarana Wilayah yang Terintegrasi, Efisien, dan Handal		
				79,46	81,01	81,17	81,33	81,48	81,64	81,80			
				NA	0,6	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65			
				NA	58,75	59,88	61,00	62,13	63,25	64,38			

Dalam rangka memastikan konsistensi dan integrasi perencanaan pembangunan, penyusunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sarmi Tahun 2026 dilakukan dengan memperhatikan keselarasan terhadap prioritas pembangunan pada tingkat provinsi dan nasional. Hal ini penting untuk menjamin bahwa arah pembangunan daerah tidak hanya menjawab kebutuhan dan permasalahan lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan Provinsi Papua dan agenda strategis nasional sebagaimana termuat dalam RKPD Provinsi Papua Tahun 2026 dan RKP Tahun 2026.

Keselarasan ini menjadi landasan penting dalam memperkuat efektivitas perencanaan, meningkatkan sinergi lintas level pemerintahan, serta memastikan bahwa program dan kegiatan yang dirumuskan perangkat daerah berada dalam satu kerangka kebijakan pembangunan yang terpadu. Melalui proses penyelarasan tersebut, prioritas pembangunan Kabupaten Sarmi Tahun 2026 diarahkan agar mampu menghasilkan dampak pembangunan yang lebih optimal, terukur, dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Gambaran mengenai hubungan dan keterkaitan antara prioritas pembangunan Kabupaten Sarmi dengan prioritas pembangunan Provinsi Papua serta prioritas nasional disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.6
Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sarmi dengan
Prioritas Pembangunan Provinsi Papua dan
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Kabupaten Sarmi 2026	Keselarasan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Papua 2026	Keselarasan dengan Prioritas Nasional (RKP 2026)
TEMA: "Pemenuhan Infrastruktur Pembangunan untuk Meningkatkan Pemerataan dan Akses Layanan Dasar."	TEMA: Percepatan Pembangunan Struktur Ekonomi yang Inklusif Melalui Akselerasi Potensi Ungulan Daerah	TEMA: "Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif".
Priorotas I: Peningkatan Reformasi Birokrasi yang Profesional, Adaptif, dan Berorientasi Pelayanan Publik	PRIORITAS I: Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
Priorotas II: Akselerasi Pelaksanaan Program OTSUS yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.	PRIORITAS II: Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi
Priorotas III: Peningkatan pemerataan dan kualitas Pelayanan Pendidikan untuk mendorong terwujudnya SDM Kabupaten Sarmi yang unggul, kreatif, dan inovatif.	PRIORITAS III: Peningkatan Keamanan dan Ketertiban	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif
Priorotas IV: Peningkatan pemerataan, kualitas, dan aksesibilitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah	PRIORITAS IV: Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

Prioritas Pembangunan Kabupaten Sarmi 2026	Keselarasn dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Papua 2026	Keselarasn dengan Prioritas Nasional (RKP 2026)
Prioritas V: Penguatan kehidupan masyarakat yang harmonis, tertib, toleran, dan berbudaya lokal.	PRIORITAS V: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan pelayanan public	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
Prioritas VI: Peningkatan kapasitas kinerja Perekonomian daerah berbasis komoditas unggulan yang produktif dan berdaya saing.		Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
Prioritas VII: Penurunan kemiskinan melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) serta penguatan perlindungan sosial yang adaptif dan integratif.		Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
Prioritas VIII: Pemenuhan dan pemerataan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi, efisien, dan handal untuk mendukung konektivitas dan pelayanan dasar.		Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Secara keseluruhan, penetapan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan, isu strategis, serta keterkaitannya dengan sasaran RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2029. Formulasi ini menunjukkan kesinambungan antara agenda pembangunan jangka menengah dan kebutuhan penanganan tahunan, sehingga mampu memberikan arah kebijakan yang lebih fokus, terukur, dan operasional bagi perangkat daerah. Prioritas yang dirumuskan juga menjadi respons terhadap tantangan utama daerah, termasuk ketimpangan layanan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur, serta dinamika sosial dan ekonomi yang berpengaruh terhadap kinerja pembangunan daerah.

Selanjutnya, keselarasan prioritas Kabupaten Sarmi dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Papua dan Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2026 memastikan bahwa arah pembangunan daerah berada dalam satu kerangka kebijakan yang terintegrasi dan saling mendukung. Sinergi lintas level pemerintahan ini diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan, termasuk dana Otonomi Khusus, serta meningkatkan konsistensi pencapaian sasaran pembangunan secara berkelanjutan. Dengan demikian, prioritas pembangunan Tahun 2026 menjadi landasan strategis dalam perumusan program dan kegiatan perangkat daerah pada tahap perencanaan berikutnya.

Tabel 4.7

Keselarasn Prioritas Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2026 dan RKPD Kabupaten SarMI tahun 2026 sesuai Permendagri no. 10 tahun 2025

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
Prioritas Nasional 2	1	Pembangunan pangan hewani	<p>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINE Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular</p> <p>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain</p>
Prioritas Nasional 2	2	Pembangunan pangan lokal dan nabati	<p>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</p> <p>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan</p>
Prioritas Nasional 2	3	Konservasi sumberdaya air	<p>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Pembangunan Unit Air Baku Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota</p>
Prioritas Nasional 2	4	Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	<p>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</p>



PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Pengelolaan Sampah	
Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	
Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
Pendidikan dan Latihan Perkerasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkerasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
Pengadaan Perlengkapan PAUD	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
Pengelolaan Dana BOP PAUD	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	
NO	5
Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS	
PRIORITAS NASIONAL 3	
NO	6
Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR	
PRIORITAS NASIONAL 3	
NO	7
Pengembangan koperasi sektor produksi	
PRIORITAS NASIONAL 3	
NO	8
Perluasan layanan pendidikan anak usia dini	
PRIORITAS NASIONAL 4	



PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	
	<p>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</p> <p>Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota</p>
	<p>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</p> <p>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah</p> <p>Implementasi Sistem Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</p> <p>Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</p>
	<p>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</p> <p>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</p> <p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</p> <p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</p> <p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</p> <p>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</p> <p>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</p> <p>Operasional Pelayanan Puskesmas</p> <p>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</p> <p>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</p>
PRIORITAS NASIONAL	NO KEGIATAN PRIORITAS UTAMA
Prioritas Nasional 4	9 Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi
Prioritas Nasional 4	10 Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi
Prioritas Nasional 4	11 Penurunan kematian ibu dan anak
Prioritas Nasional 4	12 Pencegahan dan penurunan stunting
Prioritas Nasional 4	13 Penuntasan TBC



PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
Prioritas Nasional 4	14	Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita	<p>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</p> <p>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</p> <p>Operasional Pelayanan Puskesmas</p>
Prioritas Nasional 4	15	Eliminasi penyakit kusta dan Schistosomiasis	<p>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</p> <p>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pelayanan Kesehatan Penderita Kusta</p>
Prioritas Nasional 4	16	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	<p>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</p> <p>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>
Prioritas Nasional 5	17	Pengembangan hilirisasi Kelapa	<p>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</p> <p>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</p> <p>Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang</p> <p>Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anak-anak</p>
Prioritas Nasional 6	18	Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	<p>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</p> <p>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</p> <p>Pembangunan Rumah Khusus</p> <p>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</p> <p>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</p> <p>Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan</p>



PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
Prioritas Nasional 6	19	Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa	<p>PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</p> <p>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</p> <p>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman</p> <p>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</p> <p>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pemeliharaan Berkala Jalan Rehabilitasi Jembatan Rekonstruksi Jalan Pembangunan Jembatan</p> <p>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</p> <p>Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Reviu Laporan Keuangan Pengawasan Desa Kerja Sama Pengawasan Internal Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP</p> <p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p>
Prioritas Nasional 7	20	Pencegahan tindak pidana korupsi	
Prioritas Nasional 7	21	Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN	



PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
Prioritas Nasional 7	22	Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan	<p>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</p> <p>Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah</p> <p>Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</p> <p>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah</p> <p>Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah</p> <p>Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</p> <p>Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</p> <p>Penetapan Wajib Pajak Daerah</p>
Prioritas Nasional 8	23	Penguatan karakter dan jati diri bangsa	<p>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</p> <p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</p> <p>Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p> <p>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>



Tabel 4.8
Program Prioritas Daerah dan Sub Kegiatan dalam RKPD tahun 2026

PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH [sub kegiatan]	PAGU	OPD
1. PROGRAM Penguatan Reformasi Birokrasi Didukung Oleh 3 OPD		
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	530.100.000	INSPEKTORAT DAERAH
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	550.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
Reviu Laporan Keuangan	19.890.000	INSPEKTORAT DAERAH
Pengawasan Desa	249.999.972	INSPEKTORAT DAERAH
Kerja Sama Pengawasan Internal	134.901.000	INSPEKTORAT DAERAH
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	150.000.000	BAPPEDA
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	518.931.296	BAPPEDA
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	450.000.000	BAPPEDA
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	BAPPEDA
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	638.449.944	BAPPEDA
Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	461.550.056	BAPPEDA
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	150.000.000	BAPPEDA
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	518.931.296	BAPPEDA
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	450.000.000	BAPPEDA
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	199.999.376	INSPEKTORAT DAERAH
2. Program peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara [ASN] disertai pemberian reward dalam bentuk peningkatan kesejahteraan Didukung Oleh 1 OPD		
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	799.999.905	BKPSDM

PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH [sub kegiatan]	PAGU	OPD
3. Program revitalisasi dan peningkatan sarana pelayanan publik berbasis elektronik untuk seluruh urusan pemerintahan Daerah DIDUKUNG OLEH 2 OPD		
Penyusunan Konten	19.970.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	200.000.000	SETDA
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	99.960.000	SETDA
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100.000.000	SETDA
4. Program "PRESISI" [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi] DIDUKUNG OLEH 9 OPD		
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	166.032.960	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	9.807.600.000	DINAS PENDIDIKAN
Pembinaan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	363.583.728	DINAS PENDIDIKAN
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	380.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	9.546.660.000	DINAS PENDIDIKAN
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	80.796.384	DINAS PENDIDIKAN
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	146.548.152	DINAS PENDIDIKAN
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	30.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	106.688.640	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.494.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	59.309.186	DINAS PENDIDIKAN



PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH [sub kegiatan]	PAGU	OPD
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	5.146.620.000	DINAS PENDIDIKAN
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	29.654.592	DINAS PENDIDIKAN
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	35.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Perlengkapan PAUD		DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	586.800.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	80.876.160	DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.193.160.000	DINAS PENDIDIKAN
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	20.893.008	DINAS PENDIDIKAN
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	24.213.140	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.296.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	47177.760	DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	4.948.750.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.248.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	23.588.880	DINAS PENDIDIKAN
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	23.588.880	DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	730.100.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.000.000.000	DINAS KESEHATAN



PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH [sub kegiatan]	PAGU	OPD
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	6.186.317.277	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	99.999.106	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100.000.000	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100.000.000	DINAS KESEHATAN
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penujang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.000.000.000	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	250.000.000	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	299.999.850	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	199.999.137	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1.500.000.000	DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	399.999.280	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	7.400.905.000	DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Puskesmas	26.381.374.074	DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan Penderita Kusta	100.000.000	DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan Penderita Filariasis	100.000.000	DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan Penderita Frambusia	100.000.000	DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	199.999.084	DINAS KESEHATAN
Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000.000	DPKP
Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	296.000.000	DINSOS
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	80.000.000	DINSOS
Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	250.000.000	DINSOS



PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH [sub kegiatan]	PAGU	OPD
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	500.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	200.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	1.216.426.000	DINAS PERTANIAN
Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	449.080.000	DINAS PERTANIAN
Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	850.254.000	DINAS PERTANIAN
Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	927.205.000	DINAS PERTANIAN
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	15.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Perlekapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penanganan sampah melalui pengangkutan	840.004.250	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.000.000.000	DINAS TENAGA KERJA
5. Program Kampung Mandiri melalui pemberdayaan masyarakat setempat, menggunakan potensi sumber daya setempat dan kearifan local DIDUKUNG OLEH 2 OPD		
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	124.806.154.700	BPKAD
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	250.000.000	DPMK
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	350.000.000	DPMK
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	125.000.000	DPMK



PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH [sub kegiatan]	PAGU	OPD
6. Program "zero pungutan" dan biaya gratis jenjang pendidikan PAUD, TK, SD, SMP dan SMA DIDUKUNG OLEH 1 OPD		
Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	360.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Perengkapan Peserta Didik	700.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	164.560.858	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	240.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Perengkapan Peserta Didik	240.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	95.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	180.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Perengkapan Peserta Didik	60.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	5.247.534.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Perengkapan Peserta Didik	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	175.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	60.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	180.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	50.126.480	DINAS PENDIDIKAN



PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH [sub kegiatan]	PAGU	OPD
7. Program pemberian beasiswa bagi pelajar/mahasiswa berprestasi dan kurang mampu DIDUKUNG OLEH 1 OPD		
Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	9.199.663.392	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Dasar	159.616.680	DINAS PENDIDIKAN
8. Program ajang prestasi olah raga dan pemberian bantuan pembinaan seluruh cabang olahraga. DIDUKUNG OLEH 1 OPD		
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	108.305.353	DINAS PENDIDIKAN
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	585.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	108.305.353	DINAS PENDIDIKAN
9. Program "SARASEHAN" [Sarapan Sehat Harian] untuk semua murid TK dan SD di Kabupaten Sarmi berupa 1 [satu] gelas susu dan roti gandum [makanan lokal] setiap hari sebelum mulai aktifitas pembelajaran. DIDUKUNG OLEH 1 OPD		
Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.193.160.000	DINAS PENDIDIKAN
10. Program jaminan gizi bagi anak usia 0 - 5 tahun dan ibu hamil untuk menekan angka stunting di Kabupaten Sarmi serta pemberian multi vitamin bagi remaja putri. DIDUKUNG OLEH 1 OPD		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	831.600.000	DINAS PENDIDIKAN
Operasional Pelayanan Puskesmas	3.766.600.000	DINAS PENDIDIKAN
11. Program ajang prestasi seni, budaya dan agama untuk melestarikan budaya serta memperkokoh iman dan taqwa. DIDUKUNG OLEH 1 OPD		
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	53.916.908	DINAS PENDIDIKAN



PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH [sub kegiatan]	PAGU	OPD
<p>12. Program bantuan insentif bagi Pendeta, Guru Injil, Guru Sekolah Minggu, Koster, Ustadz, Guru Ngaji, Pengurus Takmir Masjid, Marbot Masjid/Mushola dan para pegiat agama... DIDUKUNG OLEH 1 OPD</p>	695,530,000	DINAS PENDIDIKAN
<p>Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan</p> <p>13. Program "PROSPEK EMAS" [Proyek Pemerintah Daerah Sarmi Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi dan Melibatkan Masyarakat Sarmi] memprioritaskan dan memberdayakan kontraktor lokal dalam mengerjakan proyek- proyek Pemerintah Daerah Sarmi serta melibatkan dunia usaha dan masyarakat Sarmi] DIDUKUNG OLEH 1 OPD</p>	1.216.426.000	DINAS PERTANIAN
<p>Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih</p>	449.080.000	DINAS PERTANIAN
<p>Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang</p>	850.254.000	DINAS PERTANIAN
<p>Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang</p> <p>14. Program pemberdayaan dan peningkatan usaha super mikro melalui bantuan keuangan dan pelatihan kewirausahaan DIDUKUNG OLEH 1 OPD</p>	35.038.000	DINAS PERINDAGKOP UKM
<p>Pengembangan Usaha Mikro</p> <p>Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi</p>	250.000.000	DINAS PERINDAGKOP UKM
<p>15. Program revitalisasi dan peningkatan Balai Latihan Kerja [BLK] bagi generasi muda dan angkatan kerja DIDUKUNG OLEH 1 OPD</p>	1.000.000.000	DISNAKER
<p>Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</p>	4.125.000.000	DINAS PUPR
<p>16. Program Infrastruktur Pelayanan Publik bidang jalan, jembatan, irigasi, komunikasi dan energi. DIDUKUNG OLEH 1 OPD</p>	15.839.274.440	DINAS PUPR
<p>Rekonstruksi Jalan</p>	797.962.000	DINAS PUPR
<p>Pemeliharaan Berkala Jalan</p> <p>Pembangunan Jembatan</p>		



PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH [sub kegiatan]	PAGU	OPD
17. Program Infrastruktur Pelayanan Publik bidang kesehatan DIDUKUNG OLEH 1 OPD		
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	858.000.000	DINAS KESEHATAN
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	500.000.000	DINAS KESEHATAN
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	124.994.279	DINAS KESEHATAN
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	160.000.000	DINAS KESEHATAN
18. Program Infrastruktur Pelayanan Publik bidang air bersih/minimum DIDUKUNG OLEH 1 OPD		
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.965.200.000	DINAS PUPR
19. Program Infrastruktur Pelayanan Publik bidang perumahan DIDUKUNG OLEH 1 OPD		
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.560.000.000	DPKP
Pembangunan Rumah Khusus	11.382.414.000	DPKP
perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh di Luar Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.000.000.000	DPKP
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	1.000.000.000	DPKP
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	166.271.000,00	DPKP
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.560.000.000	DPKP

4.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sarmi Terhadap Penyusunan RKPD Tahun 2026

Dalam rangka memastikan proses perencanaan pembangunan daerah berjalan secara partisipatif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, penyusunan RKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2026 turut memperhatikan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sebagai salah satu sumber masukan penting. Pokok pikiran tersebut merupakan penjabaran aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui mekanisme reses, rapat dengar pendapat, serta fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Integrasi Pokir DPRD ke dalam dokumen RKPD bertujuan untuk memperkuat relevansi perencanaan pembangunan dengan kondisi riil di lapangan, sekaligus memastikan bahwa program dan kegiatan yang dirumuskan mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan prioritas masyarakat. Dengan demikian, Pokir DPRD menjadi instrumen strategis dalam menyelaraskan perspektif legislatif dan eksekutif, serta mendorong pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Sarmi secara lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

4.4.1 Rumusan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sarmi

Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sarmi Tahun 2026 merupakan hasil kompilasi aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses dan penjangkangan isu pembangunan di tingkat kampung hingga distrik. Secara umum, pokok pikiran yang muncul menggambarkan kebutuhan nyata masyarakat terhadap peningkatan sarana prasarana pelayanan publik, penguatan kapasitas ekonomi lokal, peningkatan konektivitas wilayah, serta pemenuhan fasilitas lingkungan permukiman. Rumusan pokok pikiran ini diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan menjadi bahan pertimbangan utama dalam perumusan program serta kegiatan pada RKPD Tahun 2026.

Uraian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sarmi

1. Usulan Bidang Pariwisata

Aspirasi yang disampaikan menekankan kebutuhan peningkatan sarana pendukung pada kawasan wisata di Distrik Pantai Timur Barat. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah keterbatasan transportasi antar Pulau Masimasi dan Pulau Yamna yang menghambat mobilitas masyarakat dan wisatawan. DPRD memandang perlunya pengadaan sarana transportasi (spit) sebagai upaya memperkuat aksesibilitas destinasi wisata dan mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah. Namun demikian, perangkat daerah

terkait menegaskan bahwa fokus pembangunan Tahun 2026 diarahkan pada penyelesaian dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) sebagai dasar kebijakan pengembangan pariwisata secara menyeluruh.

2. Bidang UMKM – Pelatihan Kewirausahaan

Usulan ini menyoroti masih minimnya pelatihan kewirausahaan bagi pemuda usia produktif di Kampung Mawesday, Kampung Anus, dan kampung sekitar Distrik Bonggo. Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya keterampilan dan kesempatan kerja. DPRD memandang pentingnya intervensi pelatihan UMKM untuk meningkatkan kemampuan wirausaha, mendorong kemandirian ekonomi pemuda, dan memperluas peluang usaha. Usulan ini telah diterima oleh Perindagkop UKM sebagai bagian dari penguatan kapasitas pelaku UMKM tahun berjalan.

3. Bidang UMKM – Sarana Tempat Usaha

Usulan terkait penyediaan tempat usaha dan payung jualan bagi pedagang di Jalan Mamberamo, Sarmi Kota, muncul dari masih terbatasnya fasilitas berdagang yang layak. Masalah tersebut berdampak pada kurang optimalnya aktivitas ekonomi masyarakat. Setelah verifikasi, perangkat daerah menilai bahwa usulan belum dapat diakomodasi dalam perencanaan tahun 2026 sehingga masuk kategori tidak diterima. Namun demikian, persoalan yang disampaikan tetap menjadi catatan dalam pengembangan penataan kawasan perdagangan di masa mendatang.

4. UBidang UMKM -Bantuan Modal dan Sarana Usaha

Aspirasi kedua dari pengusul menyoroti minimnya fasilitas tempat usaha bagi pelaku UMKM di Kampung Anus II, yang menghambat produktivitas dan jangkauan pemasaran produk/jasa lokal. DPRD menilai bahwa penyediaan bantuan sarana usaha merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung tumbuhnya ekonomi masyarakat. Usulan ini diterima oleh perangkat daerah terkait sebagai bagian dari program pemberdayaan UMKM yang akan diakomodasi sesuai kemampuan anggaran.

5. Usulan Bidang Lingkungan Hidup–Pengelolaan Sampah

Permasalahan yang mengemuka adalah terjadinya penumpukan sampah di Kelurahan Sarmi Kota akibat tidak tersedianya tempat pembuangan sampah sementara. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu kebersihan kota dan kesehatan lingkungan. DPRD mengusulkan penyediaan TPS atau bak sampah sementara sebagai langkah awal perbaikan sistem pengelolaan sampah perkotaan. Perangkat daerah menyatakan bahwa kebutuhan tersebut telah sesuai dengan rencana kerja OPD dan akan dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran Tahun 2026.

6. Usulan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rangkaian pokok pikiran pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang menunjukkan perhatian yang kuat dari masyarakat terhadap peningkatan infrastruktur dasar, mitigasi bencana, pemenuhan air bersih, dan penguatan sarana pelayanan publik serta sosial keagamaan di berbagai kampung dan distrik. Secara umum, aspirasi yang disampaikan mencerminkan kebutuhan peningkatan aksesibilitas, pengurangan risiko banjir, dan perbaikan kualitas layanan dasar. Dalam proses verifikasi teknis, seluruh usulan telah dikaji kesesuaiannya dengan pagu indikatif, ketentuan perencanaan tahunan, serta arah kebijakan RPJMD Kabupaten SarMI Tahun 2025–2029.

Usulan pembangunan jalan di Kampung Lembah Neidam muncul dari kebutuhan masyarakat terhadap akses yang lebih memadai untuk mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi lokal. Pada kawasan yang sama, masyarakat juga mengusulkan pembangunan drainase untuk mengurangi potensi genangan saat curah hujan tinggi. Kedua kebutuhan tersebut telah dicatat dan dipertimbangkan, namun pelaksanaannya memerlukan penyesuaian dengan kemampuan anggaran tahun berjalan. Usulan pemeliharaan jalan menuju SD YPK P. Niel Sawar juga menggambarkan komitmen peningkatan akses pendidikan, namun belum dapat diakomodasi dalam tahun perencanaan karena keterbatasan ruang fiskal daerah.

Pada sektor sumber daya air, aspirasi terkait normalisasi sungai di Kelurahan Mararena, Kampung Kaskuwe, dan Kampung Serwar Baru menggambarkan kondisi lapangan yang membutuhkan penanganan untuk mengurangi risiko banjir. Usulan tersebut dinilai relevan dan sebagian terarah dengan dokumen perencanaan OPD, namun memerlukan survei teknis lanjutan guna memastikan kebutuhan, cakupan penanganan, dan kesiapan teknis di lapangan. Penyediaan air bersih untuk Distrik SarMI Kota juga menjadi salah satu kebutuhan prioritas masyarakat dan telah sesuai dengan rencana kerja perangkat daerah untuk tahun 2026.

Dalam lingkup perlindungan pesisir, usulan pembangunan talud penahan ombak di Kampung Armo Pesisir menggambarkan kebutuhan masyarakat untuk mengurangi dampak abrasi dan menjaga keberlanjutan permukiman. Kewenangan pelaksanaan kegiatan tersebut berada pada instansi teknis tingkat provinsi maupun balai terkait, sehingga diperlukan koordinasi lintas lembaga untuk memastikan penanganan berkelanjutan. Usulan pembangunan jembatan di Serwar Baru juga telah dicatat sebagai kebutuhan untuk meningkatkan konektivitas menuju lahan pertanian masyarakat, namun penjadwalan pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan pagu indikatif tahun perencanaan.

Aspirasi mengenai pembangunan dan peningkatan sarana rumah ibadah seperti Gedung Sekolah Minggu GKI Maranata, Gereja GKI Pniel Sawar, GPdI Lembah Pujian, dan Gereja GKI Elim mencerminkan kebutuhan penguatan aktivitas sosial dan pembinaan masyarakat. Berdasarkan ketentuan dalam RPJMD 2025–2029, dukungan pemerintah daerah berada pada aspek fasilitasi nonfisik dan koordinasi, sehingga pembiayaan pembangunan sarana ibadah melalui APBD belum dapat dialokasikan dalam RKPD 2026. Pemerintah daerah tetap memberikan ruang bagi dukungan melalui mekanisme non-APBD serta mendorong optimalisasi peran lembaga keagamaan dan kemitraan komunitas dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana tersebut.

7. Usulan Bidang Perumahan dan Permukiman

Usulan pada Bidang Perumahan dan Permukiman menggambarkan tingginya kebutuhan masyarakat Kabupaten SarMI terhadap peningkatan kualitas hunian, rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta penyediaan tempat tinggal yang aman bagi kelompok rentan di berbagai distrik. Aspirasi ini muncul dari kondisi faktual di lapangan yang menunjukkan masih terbatasnya rumah permanen, adanya kerusakan bangunan, kepadatan hunian, serta minimnya infrastruktur dasar pada lingkungan permukiman. Secara umum, kelompok usulan ini menegaskan perlunya intervensi peningkatan kualitas rumah, pembangunan unit hunian baru, serta penciptaan lingkungan permukiman yang lebih sehat dan layak.

Sejumlah usulan penyediaan rumah layak huni di Kampung Bebon Jaya, Kampung Towe Hitam, serta beberapa titik di Distrik Bonggo dan SarMI, mencerminkan kebutuhan prioritas masyarakat yang tinggal pada bangunan tidak permanen atau tidak memenuhi standar kelayakan. Usulan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Benggere Treet, Tetop, SarMI Kota, Mararena, Muara Besar, dan Bonggo Timur menunjukkan bahwa masih banyak kawasan permukiman dengan struktur bangunan yang belum kuat, ventilasi yang kurang memadai, serta fasilitas sanitasi yang belum memenuhi syarat kesehatan. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, sehingga memerlukan penanganan bertahap sesuai kapasitas fiskal daerah.

Pada kampung lain seperti Amsira, Aurimi, Airoran, dan Denander, kebutuhan penyediaan hunian baru turut dipicu oleh pertumbuhan jumlah keluarga, keterbatasan lahan hunian yang layak, serta kondisi bangunan lama yang sudah tidak memungkinkan untuk dihuni. Di beberapa lokasi seperti Munukania, Bonggo, dan Samanente, permintaan penyediaan rumah layak huni juga berkaitan dengan situasi kedaruratan maupun kerusakan lingkungan, sehingga memerlukan perhatian dalam konteks peningkatan kualitas permukiman jangka menengah.

Secara teknis, perangkat daerah menyampaikan bahwa keseluruhan usulan dalam bidang ini memerlukan tahapan verifikasi, pendataan kondisi sosial ekonomi rumah tangga, serta penyesuaian dengan kemampuan anggaran dan kriteria program perumahan yang berlaku. Sejumlah usulan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme verifikasi lapangan dan sinkronisasi dengan program peningkatan kualitas permukiman dalam RENJA OPD. Selain itu, penilaian kelayakan program bantuan rumah harus disesuaikan dengan ketentuan prioritas nasional dan kewenangan teknis sektor perumahan.

Sebagian usulan rumah layak huni belum dapat diakomodasi secara penuh dalam RKPD Tahun 2026 karena keterbatasan pagu indikatif serta perlunya pengutamaan berdasarkan urgensi, kondisi sosial masyarakat, serta keselarasan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten SarMI Tahun 2025–2029. Meskipun demikian, seluruh aspirasi telah dicatat sebagai bagian dari kebutuhan pembangunan permukiman jangka menengah dan menjadi dasar penguatan program perumahan pada tahun perencanaan berikutnya.

Dengan demikian, usulan pada Bidang Perumahan dan Permukiman menegaskan bahwa masih terdapat kebutuhan yang cukup besar dalam peningkatan kualitas hunian dan lingkungan permukiman di Kabupaten SarMI. Pokok pikiran DPRD menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah untuk memperkuat intervensi pembangunan rumah layak huni secara bertahap, terukur, dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal serta ketentuan perencanaan yang berlaku.

8. Usulan Bidang Pendidikan

Pokok-pokok pikiran DPRD pada bidang pendidikan berfokus pada peningkatan kualitas sarana belajar serta penyediaan ruang pendukung bagi tenaga pendidik. Usulan yang disampaikan menekankan perlunya rehabilitasi ruang kelas yang telah rusak dan pembangunan ruang guru untuk mendukung proses belajar mengajar yang lebih efektif.

- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMA Negeri 1 SarMI, karena kondisi bangunan yang sudah rusak dan mengganggu proses belajar mengajar.
- Pembangunan Ruang Guru/Tenaga Kependidikan SMA Negeri 1 SarMI, untuk memastikan ketersediaan ruang yang layak bagi guru dalam menunjang kegiatan pembelajaran.

9. Usulan Bidang Kesehatan

Usulan bidang kesehatan pada pokok pikiran DPRD menitikberatkan pada penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang merata, peningkatan fasilitas puskesmas/pustu, serta pemenuhan tenaga kesehatan pada wilayah terpencil. Arah usulan ini sejalan dengan kebutuhan peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan fasilitas dasar yang memadai.

- Pembangunan Puskesmas/Pustu di Kampung Mawes Mukti, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dasar.
- Pembangunan Rumah Tenaga Medis di Distrik Sarmi, guna menyediakan hunian layak bagi tenaga kesehatan.
- Pembangunan pagar Puskesmas Buritin Pantai Timur, sebagai bagian dari peningkatan fungsi pelayanan.
- Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Buritin, karena kerusakan pada rumah perawat dan dokter.
- Sosialisasi Hidup Sehat bagi Masyarakat, sebagai upaya promosi kesehatan masyarakat.
- Pembangunan Pustu Kampung Airoran dan Kampung Bina, untuk mengurangi jarak tempuh masyarakat ke layanan kesehatan.
- Pembangunan Pustu Kampung Maseb, mendukung pelayanan kesehatan berbasis kampung.
- Rehabilitasi Berat Pustu Kampung Subu, karena fasilitas lama sudah tidak layak.
- Bantuan Pendidikan Dokter bagi Anak Asli Sarmi, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan jangka panjang di daerah terpencil.

10. Usulan Bidang Ketenagakerjaan

Pokok pikiran DPRD dalam bidang ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan kompetensi tenaga kerja muda untuk menekan angka pengangguran. Usulan tersebut menegaskan pentingnya pelatihan keterampilan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal.

Ringkasan Usulan:

Pelatihan Kompetensi bagi Pencari Kerja di Kampung Anus, Distrik Bonggo, untuk mengurangi pengangguran usia produktif akibat minimnya keterampilan kerja.

Pelatihan Kompetensi bagi Pencari Kerja di Kampung Tarawash–Marenggi, Distrik Bonggo Timur, sebagai upaya meningkatkan kapasitas kerja dan membuka peluang kerja baru bagi pemuda setempat.

11. Usulan Bidang Perikanan

Pada bidang perikanan, aspirasi yang dihimpun menunjukkan bahwa masyarakat pesisir di berbagai kampung masih menghadapi keterbatasan sarana penangkapan ikan serta perlunya peningkatan kapasitas kelompok nelayan. Usulan yang diterima meliputi penyediaan kolam ikan bagi kelompok pembudidaya, dukungan alat tangkap bagi kelompok nelayan, serta pelatihan kewirausahaan bagi nelayan tangkap dan budidaya.

Permasalahan yang teridentifikasi antara lain belum tersedianya infrastruktur kolam ikan yang memadai, kebutuhan atas alat tangkap modern untuk meningkatkan hasil tangkapan, serta perlunya dukungan peningkatan keterampilan usaha perikanan. Beberapa kampung yang menjadi lokasi usulan juga menghadapi keterbatasan akses peralatan penangkapan seperti speedboat, paket alat tangkap, hingga pengembangan sarana perahu.

Secara umum, usulan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait melalui proses verifikasi, peninjauan lapangan, serta penyelarasan dengan RENJA OPD Tahun 2026. Sebagian usulan diarahkan pada optimalisasi pelatihan kewirausahaan nelayan dan peningkatan efisiensi kegiatan penangkapan ikan, sehingga mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi keluarga nelayan.

12. Usulan Bidang Pertanian

Usulan pada bidang pertanian memperlihatkan bahwa masyarakat di berbagai wilayah masih membutuhkan dukungan alat dan sarana produksi untuk meningkatkan produktivitas usaha tani. Penyediaan alat pertanian, bibit ternak, bibit tanaman pangan, hingga pembangunan jalan produksi pertanian menjadi isu yang dominan di lapangan.

Permasalahan yang teridentifikasi mencakup keterbatasan alat pertanian mekanis, belum meratanya akses terhadap bantuan bibit, kondisi jalan usaha tani yang belum memadai, serta kebutuhan untuk membuka lahan baru guna meningkatkan produksi pertanian rumah tangga. Sejumlah usulan juga menekankan perlunya ketersediaan alsintan serta peningkatan kualitas sarana pendukung agar aktivitas petani lebih efisien.

Melalui verifikasi perangkat daerah, beberapa usulan telah masuk dalam kegiatan berjalan tahun sebelumnya, sementara usulan lain disesuaikan dengan kebijakan anggaran dan prioritas pembangunan sektor pertanian pada tahun 2026. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga kesinambungan program sekaligus memberikan ruang bagi optimalisasi hasil pertanian di berbagai distrik.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana RKPD 2025, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten SarMI Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun yang disusun sebagai upaya mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten SarMI Tahun 2025–2029. RKPD Tahun 2026 memuat program dan kegiatan yang dirancang oleh Pemerintah Kabupaten SarMI sebagai respons terhadap dinamika permasalahan pembangunan daerah yang berkembang saat ini.

Penyusunan program dan kegiatan dalam dokumen ini dilakukan dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, isu-isu strategis pembangunan, keterkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), kebijakan transformasi pelayanan kesehatan, penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Rencana kerja dan pendanaan daerah merupakan uraian rinci yang memuat nama program, kegiatan, dan sub kegiatan; indikator kinerja; lokasi; target capaian kinerja; kebutuhan anggaran/pagu indikatif; serta klasifikasi program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dituangkan dalam matriks rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah Kabupaten SarMI. Tahapan penyusunan program dan kegiatan merupakan proses teknokratis dalam menerjemahkan analisis permasalahan dan perumusan sasaran pembangunan daerah ke dalam intervensi yang terukur dan terarah.

Rencana program dan kegiatan tersebut disusun untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, indikator kinerja daerah, serta mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten SarMI.

RKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2026 memuat program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah yang meliputi:

Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, serta sosial.

Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, seperti tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta lainnya.

Urusan Pemerintahan Pilihan, seperti kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, dan urusan lain sesuai potensi unggulan daerah.

Urusan Pendukung Penyelenggaraan Pemerintahan, seperti perencanaan, keuangan daerah, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, serta pengawasan.

Perumusan program prioritas pembangunan Kabupaten Sarmi Tahun 2026 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan pilihan tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, penyusunan program dan kegiatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pelaksanaan RKPD juga didukung oleh perangkat daerah yang menjalankan fungsi pendukung dan penunjang urusan pemerintahan, sehingga keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dapat diwujudkan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

5.1 Rencana Program Pembangunan Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2026

Rencana program pembangunan daerah pada Tahun 2026 merupakan keseluruhan upaya Pemerintah Kabupaten Sarmi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sarmi dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan, kebutuhan pelayanan publik, serta kemampuan keuangan daerah.

Skema pendanaan dan penyusunan RKPD Tahun 2026 disesuaikan dengan kapasitas fiskal Kabupaten SarMI, sehingga alokasi belanja diarahkan pada program prioritas yang memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Estimasi belanja Tahun 2026 memperhatikan kebutuhan seluruh perangkat daerah, baik perangkat daerah pelaksana urusan wajib dan pilihan, maupun unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5.1.1 Rencana Kerja Tahun 2026

Implementasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2026 memperhatikan aspek urgensi, relevansi terhadap isu pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah. Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan, penjabaran program dibagi ke dalam dua kategori prioritas, yaitu:

1. Prioritas I

Merupakan program prioritas pembangunan Kabupaten SarMI Tahun 2026 yang sejalan dengan pentahapan perencanaan tahun kedua RPJMD Kabupaten SarMI Tahun 2025–2029. Kategori ini mencakup:

- ▲ Program intervensi yang bersifat kebijakan strategis daerah;
- ▲ Program yang menjawab isu global, nasional, dan provinsi;
- ▲ Program prioritas pembangunan daerah yang berorientasi pada penyelesaian isu strategis;
- ▲ Program yang berorientasi pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Program Prioritas I diarahkan pada pencapaian target-target utama pembangunan daerah seperti peningkatan kualitas layanan dasar, pengurangan kemiskinan, peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat, penguatan infrastruktur dasar wilayah, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif.

2. Prioritas II

Merupakan program yang dilaksanakan perangkat daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai urusan pemerintahan, bidang urusan, atau sebagai unsur pendukung maupun penunjang pemerintahan. Program pada kategori Prioritas II berfungsi untuk menjaga keberlanjutan layanan pemerintahan, mendukung operasional perangkat daerah, serta memastikan tercapainya kinerja internal dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Dalam rangka menjaga konsistensi antara prioritas pembangunan dan

kapasitas fiskal, penyusunan rencana kerja Tahun 2026 dilakukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Setelah penetapan Prioritas I dan Prioritas II sesuai urgensi program perangkat daerah, kebutuhan belanja kemudian dirumuskan ke dalam proyeksi belanja daerah Tahun 2026. Estimasi belanja ini mencerminkan penyesuaian fiskal yang ditempuh Pemerintah Kabupaten SarMI untuk memastikan efektivitas dan fokus belanja pada program prioritas. Berikut disajikan Tabel 5.1 Rekapitulasi Estimasi Belanja Daerah Kabupaten SarMI Tahun 2026.

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten SarMI Tahun 2026 (Dalam Rupiah)

No	Jenis Belanja	2025	2026 (Rencana)	Perubahan 2025–2026 (%)
1	Belanja Operasional	758.398.856.728,46	605.019.220.489	(5.006.108.032,8052)
	a. Belanja Pegawai	307.723.116.271,46	257.788.053.447,94	99.568.766,926
	b. Belanja Barang dan Jasa	415.409.102.452,00	317.679.992.964,06	(977.291.094,8794)
	c. Belanja Hibah	19.047.782.005,00	14.529.360.005,00	(45.184.220,00)
	d. Belanja Bantuan Sosial	16.218.856.000,00	15.021.814.072,00	(11.970.419,28)
				0
2	Belanja Modal	101.766.908.888	54.517.087.211	(472.498.216,77)
	Belanja Modal Tanah	9.200.000.000,00	2.662.338.000	(65.376.620)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.257.912.175,00	12.091.613.903,00	(81.662.982,72)
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.139.687.334,00	14.916.342.050,00	(252.233.452,84)
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	31.647.521.018,00	24.738.314.440,00	(69.092.065,78)
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	110.180.693,00	108.478.818	(17.018,75)
	Belanja Modal Aset Lainnya	411.607.668,00	0,00	(411.607.668)
				0
3	Belanja Tidak Terduga	9.700.000.000,00	5.300.000.000	(44.000.000)
	Belanja Tidak Terduga	9.700.000.000,00	5.300.000.000	(44.000.000)
				0
4	Belanja Transfer	154.548.346.802,00	124.806.154.700,00	(297.421.921,02)
	Belanja Bantuan Keuangan ke Desa	154.548.346.802,00	124.806.154.700,00	(297.421.921,02)
Total Belanja Daerah		1.024.414.112.418,46	789.642.462.400	(2.347.716.500,1846)

Tabel 5.1 memberikan gambaran menyeluruh mengenai arah kebijakan belanja Pemerintah Kabupaten SarMI pada Tahun Anggaran 2026. Secara visual, tabel tersebut memperlihatkan adanya penyesuaian signifikan pada total belanja daerah, yang mencerminkan strategi konsolidasi fiskal untuk menjaga keberlanjutan pendanaan program prioritas. Penurunan total belanja dari tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah melakukan penajaman kembali terhadap program dan kegiatan, dengan mengutamakan belanja yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Melalui penyajian angka-angka tersebut terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten SarMI berupaya mengarahkan belanja secara lebih selektif dan terukur. Fokus belanja diarahkan pada pemenuhan layanan dasar, penguatan program prioritas pembangunan, serta efisiensi belanja rutin perangkat daerah. Representasi dalam tabel ini juga menegaskan bahwa ruang fiskal Tahun 2026 digunakan secara optimal untuk mendukung program-program krusial yang masuk dalam kategori Prioritas I, tanpa mengabaikan kebutuhan operasional minimal perangkat daerah pada Prioritas II.

Dengan demikian, Tabel 5.1 bukan hanya menampilkan besaran belanja, tetapi juga menggambarkan arah kebijakan fiskal Kabupaten SarMI yang lebih hati-hati, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome oriented), sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah dan dinamika kemampuan keuangan tahun berjalan.

5.1.1.1 Rencana Kerja Prioritas I

Rencana Kerja Prioritas I merupakan kumpulan program dan kegiatan strategis yang ditetapkan sebagai fokus utama Pemerintah Kabupaten SarMI pada Tahun 2026. Penetapan Prioritas I mempertimbangkan urgensi permasalahan daerah, konsistensi dengan arah kebijakan daerah dan nasional, serta kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan RPJMD Tahun 2025–2029, khususnya pada tahap kedua. Program-program yang masuk dalam kategori ini memiliki karakteristik bersifat fundamental, berdampak langsung bagi masyarakat, serta mendukung pemenuhan layanan dasar dan penanganan isu strategis daerah.

Untuk memastikan kejelasan arah pembangunan dan konsistensi perencanaan antarperangkat daerah, program dan kegiatan yang termasuk dalam kategori Prioritas I perlu disajikan secara terstruktur sesuai fokus intervensinya. Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pembangunan daerah serta mandat regulasi nasional dan daerah, terdapat empat kelompok utama intervensi yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten SarMI Tahun 2026. Kelompok intervensi ini mencerminkan kewajiban layanan dasar, penanganan isu strategis daerah, serta pelaksanaan amanat otonomi khusus.

Sebagai bagian dari penjabaran Prioritas I, dokumen ini menyajikan daftar program dan kegiatan yang mendukung:

- » Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang menjadi dasar penyelenggaraan layanan publik wajib oleh pemerintah daerah;
- » Penanganan kemiskinan, khususnya dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan ekstrem melalui intervensi lintas perangkat daerah;

- » Penanganan stunting, melalui intervensi spesifik dan sensitif yang melibatkan berbagai sektor; serta
- » Pelaksanaan program berbasis Otonomi Khusus, yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan percepatan pembangunan wilayah.

Keempat kelompok intervensi tersebut disajikan dalam bentuk tabel untuk memperjelas hubungan antara program, kegiatan, indikator, target kinerja, serta perangkat daerah pelaksana. Penyajian ini diharapkan menjadi rujukan utama dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026 serta dalam penyelarasan rencana kerja dengan prioritas pembangunan daerah.

Selanjutnya, disajikan tabel-tabel berikut.



Tabel 5.2
Program dan Kegiatan yang mendukung Pelaksanaan SPM di tahun 2026

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
1	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	19.998.060,00
2	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	250.000.000,00
3	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	586.800.000,00
4	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	60.052.165,00
5	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	180.000.000,00
6	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	5.247.534.000,00
8	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	30.180.000,00
9	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.324.784.000,00
10	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	674.106.000,00
11	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	699.518.700,00
12	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	800.000.000,00
13	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	150.009.290,00
14	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	175.000.000,00
15	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	87.024.640,00
16	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	180.000.000,00
17	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	35.050.000,00
18	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	239.099.420,00
19	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	300.000.000,00
20	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	48.516.000,00
21	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	49.868.000,00
22	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	16.848.380,00
23	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	11.793.480,00

Tabel 5.2
Program dan Kegiatan yang mendukung Pelaksanaan SPM di tahun 2026

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
24	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	11.794.380,00
25	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	23.588.495,00
26	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	23.558.245,00
27	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	25.232.000,00
28	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	380.000.000,00
29	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	25.264.000,00
30	SPM Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20.000.000,00
31	SPM Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	41.746.135,00
32	SPM Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	80.866.175,00
33	SPM Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	40.437.500,00
34	SPM Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	41.751.625,00
35	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kelembagaan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.000.000,00
36	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	90.000.000,00
37	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	50.468.112,00
38	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	166.061.065,00
39	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	146.694.888,00
40	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	50.089.958,00
41	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	364.369.876,00
42	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	33.660.112,00

Tabel 5.2
Program dan Kegiatan yang mendukung Pelaksanaan SPM di tahun 2026

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
43	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	9.807.600.000,00
44	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	164.544.000,00
45	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	359.911.500,00
46	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	52.000.000,00
47	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	11.794.380,00
48	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	24.213.033,00
49	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	47177.490,00
50	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	11.794.380,00
51	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.296.000.000,00
52	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	60.000.000,00
53	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	60.000.000,00
54	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	23.558.245,00
55	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	11.794.380,00
56	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.248.000.000,00
57	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	50.126.000,00
58	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	70.000.000,00
59	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	14.844.000,00
60	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	106.685.000,00
61	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	59.308.758,00
62	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	47.044.000,00

Tabel 5.2
Program dan Kegiatan yang mendukung Pelaksanaan SPM di tahun 2026

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
63	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.494.000.000,00
64	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	95.000.000,00
65	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	240.000.000,00
66	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100.000.000,00
67	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	299.999.850,00
68	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	250.000.000,00
69	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	200.000.000,00
70	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	70.000.000,00
71	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	99.999.213,00
72	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	100.000.000,00
73	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	99.999.106,00
74	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Balita	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	200.000.000,00
75	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	400.000.000,00
76	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	400.000.000,00
77	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	400.000.000,00

Tabel 5.2
Program dan Kegiatan yang mendukung Pelaksanaan SPM di tahun 2026

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
78	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	2.219.800.000,00
79	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.965.200.000,00
80	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	52.760.000,00
81	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.560.000.000,00
82	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	15.000.000,00
83	SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	118.837.816,00
84	SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Kabupaten/ Kota	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	110.400.000,00
85	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/ kota	DINAS SOSIAL	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Penyediaan Makanan	50.000.000,00
86	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	80.000.000,00

Tabel 5.3
Program dan Kegiatan yang mendukung fokus kebijakan pemerintah
Penghapusan Kemiskinan di tahun 2026

NO	TAHUN	NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
1	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	1.324.784.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
2	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	674.106.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
3	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	166.061.065,00	KEMISKINAN EKSTREM
4	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	9.546.660.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
5	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	146.694.888,00	KEMISKINAN EKSTREM
6	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	33.660.112,00	KEMISKINAN EKSTREM
7	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	50.468.112,00	KEMISKINAN EKSTREM
8	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	30.180.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
9	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	49.868.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
10	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	90.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
11	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	48.516.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
12	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.01.0045	Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	359.911.500,00	KEMISKINAN EKSTREM
13	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	699.518.700,00	KEMISKINAN EKSTREM
14	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	164.544.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
15	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	800.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
16	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	300.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
17	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	106.685.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
18	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	4.494.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM



NO	TAHUN	NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
19	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	5.146.620.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
20	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	47.044.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
21	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	14.844.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
22	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	35.050.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
23	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	25.264.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
24	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	70.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
25	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	25.232.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
26	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	95.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
27	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.02.0061	Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	240.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
28	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	239.099.420,00	KEMISKINAN EKSTREM
29	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	200.542.295,00	KEMISKINAN EKSTREM
30	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	250.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
31	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	586.800.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
32	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	1.193.160.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
33	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	40.437.500,00	KEMISKINAN EKSTREM
34	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	41.746.135,00	KEMISKINAN EKSTREM
35	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	19.998.060,00	KEMISKINAN EKSTREM
36	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	41.751.625,00	KEMISKINAN EKSTREM
37	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	20.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM



NO	TAHUN	NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
38	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	106.665.747,00	KEMISKINAN EKSTREM
40	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	180.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
41	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	695.530.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
42	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	60.052.165,00	KEMISKINAN EKSTREM
44	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	5.247.534.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
45	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.3.05.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	150.009.290,00	KEMISKINAN EKSTREM
46	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.3.05.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	175.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
47	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.3.05.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	24.213.033,00	KEMISKINAN EKSTREM
48	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.3.05.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	1.296.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
49	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.3.05.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	4.948.750.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
50	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.3.05.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	11.794.380,00	KEMISKINAN EKSTREM
51	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.3.05.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	11.793.480,00	KEMISKINAN EKSTREM
52	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.3.05.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	16.848.380,00	KEMISKINAN EKSTREM
53	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.3.05.0066	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	52.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
54	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.3.05.0067	Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	119.956.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
55	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.3.06.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	87024.640,00	KEMISKINAN EKSTREM
56	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.3.06.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	180.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
57	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.3.06.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	1.248.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
58	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.3.06.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	730.100.000,00	KEMISKINAN EKSTREM



NO	TAHUN	NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
59	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.3.06.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	11.794.380,00	KEMISKINAN EKSTREM
60	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.3.06.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	23.558.245,00	KEMISKINAN EKSTREM
61	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.3.06.0057	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	11.794.380,00	KEMISKINAN EKSTREM
62	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.3.06.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	23.588.495,00	KEMISKINAN EKSTREM
63	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.3.06.0066	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	60.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
64	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.3.07.0004	Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	150.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
65	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.3.07.0006	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	159.616.680,00	KEMISKINAN EKSTREM
66	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02.3.08.0002	Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	7.199.663.392,00	KEMISKINAN EKSTREM
67	2026	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	114.801.068,00	KEMISKINAN EKSTREM
68	2026	DINAS KESEHATAN	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	858.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
69	2026	DINAS KESEHATAN	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	124.994.279,00	KEMISKINAN EKSTREM
70	2026	DINAS KESEHATAN	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	160.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
71	2026	DINAS KESEHATAN	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	1.000.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM



NO	TAHUN	NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
72	2026	DINAS KESEHATAN	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	6.186.317.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
73	2026	DINAS KESEHATAN	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	464.164.802,00	KEMISKINAN EKSTREM
74	2026	DINAS KESEHATAN	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	400.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
75	2026	DINAS KESEHATAN	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	400.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
76	2026	DINAS KESEHATAN	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	400.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
77	2026	DINAS KESEHATAN	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	200.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
78	2026	DINAS KESEHATAN	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	70.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
79	2026	DINAS KESEHATAN	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	99.999.213,00	KEMISKINAN EKSTREM
80	2026	DINAS KESEHATAN	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	200.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
81	2026	DINAS KESEHATAN	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	99.999.106,00	KEMISKINAN EKSTREM
82	2026	DINAS KESEHATAN	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	100.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
83	2026	DINAS KESEHATAN	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	100.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
84	2026	DINAS KESEHATAN	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	250.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
85	2026	DINAS KESEHATAN	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	299.999.850,00	KEMISKINAN EKSTREM
86	2026	DINAS KESEHATAN	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	1.032.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
87	2026	DINAS KESEHATAN	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	149.999.890,00	KEMISKINAN EKSTREM
88	2026	DINAS KESEHATAN	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	49.999.925,00	KEMISKINAN EKSTREM
89	2026	DINAS KESEHATAN	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	199.999.137,00	KEMISKINAN EKSTREM



NO	TAHUN	NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
90	2026	DINAS KESEHATAN	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	1.500.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
91	2026	DINAS KESEHATAN	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	399.999.280,00	KEMISKINAN EKSTREM
92	2026	DINAS KESEHATAN	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	7.400.905.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
95	2026	DINAS KESEHATAN	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	526.399.750,00	KEMISKINAN EKSTREM
96	2026	DINAS KESEHATAN	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	100.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
97	2026	DINAS KESEHATAN	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	239.999.250,00	KEMISKINAN EKSTREM
98	2026	DINAS KESEHATAN	1.02.02.3.02.0047	Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	47.046.575,00	KEMISKINAN EKSTREM
99	2026	DINAS KESEHATAN	1.02.02.3.02.0053	Pelayanan Kesehatan Penderita Kusta	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	100.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
100	2026	DINAS KESEHATAN	1.02.02.3.02.0054	Pelayanan Kesehatan Penderita Filariasis	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	100.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
102	2026	DINAS KESEHATAN	1.02.02.3.02.0056	Pelayanan Kesehatan Penderita Frambusia	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	100.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
103	2026	DINAS KESEHATAN	1.02.02.3.02.0068	Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	199.999.084,00	KEMISKINAN EKSTREM
105	2026	DINAS KESEHATAN	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	99.999.183,00	KEMISKINAN EKSTREM
106	2026	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	2.995.365.530,00	KEMISKINAN EKSTREM
107	2026	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	29.556.510,00	KEMISKINAN EKSTREM
108	2026	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	400.008.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
109	2026	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	42.034.075,00	KEMISKINAN EKSTREM
110	2026	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	35.334.224,00	KEMISKINAN EKSTREM



NO	TAHUN	NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
111	2026	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	49.583.444,00	KEMISKINAN EKSTREM
112	2026	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02.2.01.0078	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	50.004.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
113	2026	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	1.700.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
114	2026	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	220.700.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
115	2026	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	1.965.200.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
116	2026	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	2.219.800.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
117	2026	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	152.870.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
118	2026	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10.2.01.0052	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	140.030.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
119	2026	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	15.839.274.440,00	KEMISKINAN EKSTREM
120	2026	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	1.000.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
121	2026	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	4.125.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
122	2026	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	797.962.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
123	2026	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	288.914.758,00	KEMISKINAN EKSTREM
124	2026	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	499.999.026,00	KEMISKINAN EKSTREM



NO	TAHUN	NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
125	2026	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	52.760.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
126	2026	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	15.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
127	2026	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	1.560.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
128	2026	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02.2.05.0003	Pembangunan Rumah Khusus	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Langsung	11.382.414.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
129	2026	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Langsung	3.000.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
130	2026	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04.2.01.0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	150.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
131	2026	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05.3.01.0006	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Langsung	166.271.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
132	2026	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	118.837.816,00	KEMISKINAN EKSTREM
133	2026	DINAS SOSIAL	1.06.02.2.01.0004	Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	289.994.100,00	KEMISKINAN EKSTREM
134	2026	DINAS SOSIAL	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	65.467.440,00	KEMISKINAN EKSTREM
135	2026	DINAS SOSIAL	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	80.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
136	2026	DINAS SOSIAL	1.06.04.2.01.0016	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	79.997.112,00	KEMISKINAN EKSTREM



NO	TAHUN	NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
137	2026	DINAS SOSIAL	1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	63.500.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
138	2026	DINAS SOSIAL	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	170.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
139	2026	DINAS SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	250.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
140	2026	DINAS SOSIAL	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	50.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
141	2026	DINAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	999.999.657,00	KEMISKINAN EKSTREM
142	2026	DINAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	82.985.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
143	2026	DINAS TENAGA KERJA	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	35.390.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
144	2026	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	49.999.815,00	KEMISKINAN EKSTREM
145	2026	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03.2.01.0007	Penyusunan kebijakan pencegahan KIP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	49.999.599,00	KEMISKINAN EKSTREM
146	2026	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03.2.02.0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	15.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
147	2026	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	10.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
148	2026	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	10.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM



NO	TAHUN	NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
149	2026	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	15.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
150	2026	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.05.2.01.0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	49.999.683,00	KEMISKINAN EKSTREM
151	2026	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	49.999.939,00	KEMISKINAN EKSTREM
152	2026	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06.2.02.0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	49.999.886,00	KEMISKINAN EKSTREM
153	2026	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	49.999.719,00	KEMISKINAN EKSTREM
154	2026	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	10.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
155	2026	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	20.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
156	2026	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	10.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM

NO	TAHUN	NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
157	2026	DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	10.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
158	2026	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	499.966.250,00	KEMISKINAN EKSTREM
159	2026	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	499.999.632,00	KEMISKINAN EKSTREM
160	2026	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	300.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
161	2026	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	199.998.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
162	2026	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	839.963.897,00	KEMISKINAN EKSTREM
163	2026	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	200.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
164	2026	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	299.999.091,00	KEMISKINAN EKSTREM
165	2026	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	30.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
166	2026	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	69.998.056,00	KEMISKINAN EKSTREM
167	2026	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	124.998.232,00	KEMISKINAN EKSTREM
168	2026	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	2.13.06.3.02.0001	Fasilitasi pengembangan BUM Kampung/ BUM Kampung bersama di Kampung/Perkampungan	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	124.998.232,00	KEMISKINAN EKSTREM



NO	TAHUN	NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
169	2026	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	66.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
170	2026	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	14.400.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
171	2026	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	26.365.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
172	2026	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	100.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
173	2026	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atas Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	60.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
174	2026	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	82.500.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
175	2026	DINAS PERHUBUNGAN	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlempangan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantonng Kemiskinan	Tidak Langsung	499.997.675,00	KEMISKINAN EKSTREM
176	2026	DINAS PERHUBUNGAN	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Meminimalkan Wilayah Kantonng Kemiskinan	Tidak Langsung	14.992.125,00	KEMISKINAN EKSTREM
177	2026	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Meminimalkan Wilayah Kantonng Kemiskinan	Penunjang	19.970.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
178	2026	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	34.962.000,00	KEMISKINAN EKSTREM



NO	TAHUN	NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
179	2026	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkerasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	148.999.500,00	KEMISKINAN EKSTREM
180	2026	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	149.999.250,00	KEMISKINAN EKSTREM
181	2026	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	35.038.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
182	2026	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	250.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
183	2026	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	516.151.121,00	KEMISKINAN EKSTREM
184	2026	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	Penunjang	283.845.411,00	KEMISKINAN EKSTREM
185	2026	DINAS PERIKANAN	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	499.996.227,00	KEMISKINAN EKSTREM
186	2026	DINAS PERIKANAN	3.25.03.2.04.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Meningkatkan Pendapatan	Penunjang	99.999.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
187	2026	DINAS PERIKANAN	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	119.886.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
188	2026	DINAS PERIKANAN	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	579.997.008,00	KEMISKINAN EKSTREM
189	2026	DINAS PERIKANAN	3.25.06.3.06.0001	Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	499.956.000,00	KEMISKINAN EKSTREM



NO	TAHUN	NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
190	2026	Dinas Pariwisata	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	499.972.928,00	KEMISKINAN EKSTREM
191	2026	Dinas Pariwisata	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	499.999.599,00	KEMISKINAN EKSTREM
192	2026	DINAS PERTANIAN	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Bijih/Benih	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	1.216.426.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
193	2026	DINAS PERTANIAN	3.27.02.2.01.0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	449.080.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
194	2026	DINAS PERTANIAN	3.27.02.2.01.0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	850.254.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
195	2026	DINAS PERTANIAN	3.27.02.2.01.0017	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anak	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	927.205.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
196	2026	DINAS PERTANIAN	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	1.050.530.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
197	2026	DINAS PERTANIAN	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	322.636.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
198	2026	DINAS PERTANIAN	3.27.03.2.01.0007	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	471.550.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
199	2026	DINAS PERTANIAN	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	60.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
200	2026	DINAS PERTANIAN	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	1.424.263.250,00	KEMISKINAN EKSTREM
201	2026	DINAS PERTANIAN	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	550.716.420,00	KEMISKINAN EKSTREM
202	2026	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	124.806.154.700,00	KEMISKINAN EKSTREM
203	2026	DISTRİK PANTAI TIMUR	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	19.999.500,00	KEMISKINAN EKSTREM
204	2026	DISTRİK PANTAI TIMUR	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	15.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
205	2026	DISTRİK PANTAI BARAT	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	9.994.349,00	KEMISKINAN EKSTREM

NO	TAHUN	NAMA SKPD	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
206	2026	DISTRİK BONGGO	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	80.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
207	2026	DISTRİK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	4.617.005,00	KEMISKINAN EKSTREM
208	2026	DISTRİK BONGGO TIMUR	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	24.880.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
TOTAL							266.314.660.722,00	



Tabel 5.4
Program dan Kegiatan yang mendukung fokus kebijakan pemerintah
Penanganan Stunting di tahun 2026

NO	TAHUN	KODE SKPD	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	NAMA AKUN	TOTAL RINCIAN
1	2026	2.08.0.00.0.00.10.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	988.125,00
2	2026	2.08.0.00.0.00.10.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.150.000,00
3	2026	2.08.0.00.0.00.10.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	68.628.000,00
4	2026	2.08.0.00.0.00.10.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.300.000,00
5	2026	1.05.0.00.0.00.07.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.219.375,00
6	2026	1.05.0.00.0.00.07.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.642.000,00
7	2026	1.05.0.00.0.00.07.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	99.827.000,00
8	2026	7.01.0.00.0.00.27.0000	DISTRIK PANTAI TIMUR	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	790.500,00
9	2026	7.01.0.00.0.00.27.0000	DISTRIK PANTAI TIMUR	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.110.500,00
10	2026	7.01.0.00.0.00.27.0000	DISTRIK PANTAI TIMUR	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	39.950.000,00
11	2026	7.01.0.00.0.00.27.0000	DISTRIK PANTAI TIMUR	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	19.999.500,00
12	2026	7.01.0.00.0.00.27.0000	DISTRIK PANTAI TIMUR	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15.000.000,00
13	2026	7.01.0.00.0.00.31.0000	DISTRIK APAWER HULU	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.634.110,00
14	2026	7.01.0.00.0.00.31.0000	DISTRIK APAWER HULU	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	355.000,00
15	2026	7.01.0.00.0.00.31.0000	DISTRIK APAWER HULU	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.210.000,00



NO	TAHUN	KODE SKPD	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	NAMA AKUN	TOTAL RINCIAN
16	2026	7010.000.000.31.0000	DISTRIK APAWER HULLU	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.800.000,00
17	2026	102.0.000.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penujiang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%--Papua--Kesehatan	Belanja Modal Alat Kecedokan Umum	1.000.000.000,00
18	2026	102.0.000.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%--Papua--Kesehatan	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.500.000.000,00
19	2026	102.0.000.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.957.553.000,00
20	2026	102.0.000.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.728.764.000,00
21	2026	102.0.000.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dana Otonomi Khusus 1,25%--Papua--Kesehatan	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	75.016.000,00
22	2026	102.0.000.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dana Otonomi Khusus 1,25%--Papua--Kesehatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	24.000.000,00
23	2026	102.0.000.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dana Otonomi Khusus 1,25%--Papua--Kesehatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	656.000,00
24	2026	102.0.000.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dana Otonomi Khusus 1,25%--Papua--Kesehatan	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	87.400.000,00
25	2026	102.0.000.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dana Otonomi Khusus 1,25%--Papua--Kesehatan	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	23.100.000,00
26	2026	102.0.000.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dana Otonomi Khusus 1,25%--Papua--Kesehatan	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	52.500.000,00
27	2026	102.0.000.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dana Otonomi Khusus 1,25%--Papua--Kesehatan	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Pempumpang	800.000,00
28	2026	102.0.000.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dana Otonomi Khusus 1,25%--Papua--Kesehatan	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.428.000,00
29	2026	102.0.000.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dana Otonomi Khusus 1,25%--Papua--Kesehatan	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	94.600.000,00



NO	TAHUN	KODE SKPD	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	NAMA AKUN	TOTAL RINCIAN
30	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dana Otonomi Khusus 1,25%--Papua--Kesehatan	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	19.500.000,00
31	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dana Otonomi Khusus 1,25%--Papua--Kesehatan	Belanja Bahan--Bahan Lainnya	47.650.000,00
32	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dana Otonomi Khusus 1,25%--Papua--Kesehatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	543.000,00
33	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dana Otonomi Khusus 1,25%--Papua--Kesehatan	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	232.500.000,00
34	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dana Otonomi Khusus 1,25%--Papua--Kesehatan	Belanja Natura dan Pakan-Natura	29.471.000,00
35	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dana Otonomi Khusus 1,25%--Papua--Kesehatan	Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan	16.800.000,00
36	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dana Otonomi Khusus 1,25%--Papua--Kesehatan	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.216.000,00
37	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dana Otonomi Khusus 1,25%--Papua--Kesehatan	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	63.820.000,00
38	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Belanja Bahan--Bahan Lainnya	6.000,00
39	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,00
40	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Belanja Tagihan Air	3.675.000,00
41	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	125.220.000,00
42	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Belanja Modal Alat Pendingin	27.935.802,00



NO	TAHUN	KODE SKPD	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	NAMA AKUN	TOTAL RINCIAN
43	2026	102.000.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	28.000,00
44	2026	102.000.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	289.300.000,00
45	2026	102.000.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	34.050.000,00
46	2026	102.000.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	590.000,00
47	2026	102.000.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	265.000.000,00
48	2026	102.000.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	Belanja Natura dan Pakan-Natura	30.000.000,00
50	2026	102.000.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	70.360.000,00
51	2026	102.000.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.908.000,00
52	2026	102.000.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	56.000,00
53	2026	102.000.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	Belanja Natura dan Pakan-Natura	159.000.000,00
57	2026	102.000.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.636.000,00
58	2026	102.000.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.400.000,00
59	2026	102.000.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	16.100.000,00
60	2026	102.000.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	300.000,00
61	2026	102.000.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	Belanja Natura dan Pakan-Natura	36.000.000,00



NO	TAHUN	KODE SKPD	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	NAMA AKUN	TOTAL RINCIAN
62	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.600.000,00
63	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	29.599.213,00
64	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	70.400.000,00
65	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Belanja Natura dan Pakan-Natura	109.800.000,00
66	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.769.400.000,00
67	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	5.409.600.000,00
68	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.137.000,00
69	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	444.930.000,00
70	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Belanja Bahan-Bahan Baku	200.000,00
71	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.034.000,00
72	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	123.783.590,00
73	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	84.420.061,00
74	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	21.982.084,00
75	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.485.000,00
76	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.854.151,00
77	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	13.449.792,00



NO	TAHUN	KODE SKPD	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	NAMA AKUN	TOTAL RINCIAN
78	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Belanja Natura dan Pakan-Natura	719.800.000,00
79	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.280.000.000,00
80	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Belanja Tagihan Listrik	289.924.000,00
81	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Belanja Sewa Jasa Internet	2.520.000,00
82	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Belanja Modal Pompa	1.805.412,00
83	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Belanja Modal Alat Pendingin	24.478.725,00
84	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11.027.614,00
85	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	15.511.137,00
86	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Belanja Modal Sumber Tenaga	20.846.250,00
87	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	15.960.500,00
88	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Belanja Modal Audio Visual	9.649.758,00
89	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.766.600.000,00
90	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.295.000,00
91	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.998.000.000,00
92	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.225.880.000,00
93	2026	211.0.00.0.00.12.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	120.660.000,00



NO	TAHUN	KODE SKPD	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	NAMA AKUN	TOTAL RINCIAN
94	2026	2.11.0.00.0.00.12.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	84.100.000,00
95	2026	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.965.430,00
96	2026	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.064.446,00
97	2026	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.000,00
98	2026	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.920.000,00
99	2026	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.160.000,00
100	2026	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	56.700.000,00
101	2026	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	136.000.000,00
102	2026	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	5.000.000,00
103	2026	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	16.800.000,00
104	2026	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	83.460.000,00
105	2026	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.188.000,00
106	2026	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.080.000,00
107	2026	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.600.000,00
108	2026	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	4.200.000,00
109	2026	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.800.000,00
110	2026	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.180.000,00



NO	TAHUN	KODE SKPD	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	NAMA AKUN	TOTAL RINCIAN
111	2026	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	84.000.000,00
112	2026	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.444.000,00
113	2026	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	46.100.000,00
114	2026	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan	2.504.000,00
115	2026	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.760.000,00
116	2026	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.050.000,00
117	2026	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	586.800.000,00
118	2026	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	608.175,00
119	2026	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	181.444.000,00
120	2026	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.200.000,00
121	2026	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.514.000,00
122	2026	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	46.400.000,00
123	2026	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	DAK Non Fisik-BOP PAUD	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.193.160.000,00
124	2026	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	117.300,00
125	2026	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	846.760,00
126	2026	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.834.000,00
127	2026	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.200.000,00
128	2026	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.000.000,00



NO	TAHUN	KODE SKPD	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	NAMA AKUN	TOTAL RINCIAN
129	2026	2.11.0.00.0.0012.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganannya sampah	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemeliharaan Lingkungan	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	490.700.000,00
130	2026	2.11.0.00.0.0012.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganannya sampah	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemeliharaan Lingkungan	Belanja Suku Cadang-Suku Cading Alat Angkutan	228.609.907,00
131	2026	2.11.0.00.0.0012.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganannya sampah	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemeliharaan Lingkungan	Belanja Sewa Excavator	80.680.990,00
132	2026	2.11.0.00.0.0012.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganannya sampah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	10.773.000,00
133	2026	2.11.0.00.0.0012.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganannya sampah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	25.200.000,00
134	2026	2.11.0.00.0.0012.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganannya sampah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.000.000,00
135	2026	7010.00.0.00.29.0000	DISTRITK TOR ATAS	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	184.620.000,00
136	2026	7010.00.0.00.29.0000	DISTRITK TOR ATAS	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.014.060,00
137	2026	7010.00.0.00.29.0000	DISTRITK TOR ATAS	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	135.000,00
138	2026	7010.00.0.00.29.0000	DISTRITK TOR ATAS	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.950.000,00
139	2026	7010.00.0.00.29.0000	DISTRITK TOR ATAS	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.900.000,00
140	2026	1020.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	591.183,00
141	2026	1020.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	886.000,00
142	2026	1020.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.504.000,00



NO	TAHUN	KODE SKPD	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	NAMA AKUN	TOTAL RINCIAN
143	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.800.000,00
144	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	4.200.000,00
145	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.218.000,00
146	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	51.800.000,00
147	2026	211.0.00.0.00.12.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasana penanganan sampah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya	200.000.000,00
148	2026	3.25.0.00.0.00.22.0000	DINAS PERIKAMAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	196.308.000,00
149	2026	3.25.0.00.0.00.22.0000	DINAS PERIKAMAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.365.125,00
150	2026	3.25.0.00.0.00.22.0000	DINAS PERIKAMAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.940.000,00
151	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	245.080.000,00
158	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	182.000.000,00
159	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	Belanja Jasa Tenaga Supir	147.200.000,00
162	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425.720.000,00
163	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17000,00
164	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.941.728.000,00
165	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pendapatan Dana Keptasi JKN pada FKTP	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	60.160.000,00



NO	TAHUN	KODE SKPD	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	NAMA AKUN	TOTAL RINCIAN
166	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT KOTA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.399.000.000,00
167	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7640.370,00
168	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	183.000,00
169	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.176.000,00
170	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT KOTA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan, Lingkungan Kesehatan, Lingkungan Kesehatan, Lingkungan Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	796.890,00
171	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT KOTA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan, Lingkungan Kesehatan, Lingkungan Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	63.000,00
172	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT KOTA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan, Lingkungan Kesehatan, Lingkungan Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.750.000,00
173	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT KOTA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan, Lingkungan Kesehatan, Lingkungan Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	2.100.000,00
174	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT KOTA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan, Lingkungan Kesehatan, Lingkungan Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.200.000,00
175	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT KOTA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan, Lingkungan Kesehatan, Lingkungan Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	128.090.000,00
176	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.000,00
177	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	92.160.000,00
178	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	57.830.000,00
179	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT KOTA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	17.280.000,00
180	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT KOTA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.001.750,00
181	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT KOTA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.205.652,00
182	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT KOTA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	Belanja Natura dan Pakan-Natura	21.613.000,00



NO	TAHUN	KODE SKPD	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	NAMA AKUN	TOTAL RINCIAN
183	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%--Papua--Kesehatan	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.080.000,00
184	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%--Papua--Kesehatan	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000,00
185	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%--Papua--Kesehatan	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	2.100.000,00
186	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%--Papua--Kesehatan	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.996.000,00
187	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%--Papua--Kesehatan	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	88.040.000,00
188	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%--Papua--Kesehatan	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	27.882.735,00
189	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dana Otonomi Khusus 1,25%--Papua--Kesehatan	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	73.733.500,00
190	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dana Otonomi Khusus 1,25%--Papua--Kesehatan	Belanja Bahan-Bahan Kimia	11.400.000,00
191	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dana Otonomi Khusus 1,25%--Papua--Kesehatan	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	63.600.000,00
192	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dana Otonomi Khusus 1,25%--Papua--Kesehatan	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	99.250.000,00
193	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dana Otonomi Khusus 1,25%--Papua--Kesehatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	68.625.780,00
194	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dana Otonomi Khusus 1,25%--Papua--Kesehatan	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-
195	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dana Otonomi Khusus 1,25%--Papua--Kesehatan	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	68.390.000,00
196	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dana Otonomi Khusus 1,25%--Papua--Kesehatan	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	15.000.000,00
197	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Dana Otonomi Khusus 1,25%--Papua--Kesehatan	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	30.700.000,00
198	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Dana Otonomi Khusus 1,25%--Papua--Kesehatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.500.000,00



NO	TAHUN	KODE SKPD	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	NAMA AKUN	TOTAL RINCIAN
199	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	490.000,00
200	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	Belanja Natura dan Pakan-Natura	41.300.000,00
201	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21780.000,00
202	2026	102.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	230.000,00
203	2026	103.0.00.0.00.04.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.040.875,00
204	2026	103.0.00.0.00.04.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7203.000,00
207	2026	7010.00.0.00.33.0000	DISTRİK SARMI SELATAN	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	29.600.000,00
208	2026	103.0.00.0.00.04.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.243.346.000,00
209	2026	103.0.00.0.00.04.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	337720.000,00
210	2026	209.0.00.0.00.11.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	114.921.000,00
211	2026	7010.00.0.00.30.0000	DISTRİK BONGGO	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	60.000.000,00
212	2026	7010.00.0.00.30.0000	DISTRİK BONGGO	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	13.000,00
213	2026	7010.00.0.00.30.0000	DISTRİK BONGGO	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7191.000,00
214	2026	7010.00.0.00.30.0000	DISTRİK BONGGO	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.240.000,00
215	2026	7010.00.0.00.30.0000	DISTRİK BONGGO	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.556.000,00



NO	TAHUN	KODE SKPD	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	NAMA AKUN	TOTAL RINCIAN
216	2026	7010.00.00.30.0000	DISTRIK BONGGO	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi, Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	59.600.000,00
217	2026	7010.00.00.30.0000	DISTRIK BONGGO	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.193.000,00
218	2026	7010.00.00.30.0000	DISTRIK BONGGO	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	400.000,00
219	2026	7010.00.00.30.0000	DISTRIK BONGGO	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.857.000,00
220	2026	7010.00.00.30.0000	DISTRIK BONGGO	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.550.000,00
221	2026	7010.00.00.30.0000	DISTRIK BONGGO	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	60.000.000,00
222	2026	7010.00.00.30.0000	DISTRIK BONGGO	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.250.000,00
223	2026	7010.00.00.30.0000	DISTRIK BONGGO	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.800.000,00
224	2026	7010.00.00.30.0000	DISTRIK BONGGO	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Bahan-Bahan/ Bibit Tanaman	175.000,00
225	2026	7010.00.00.30.0000	DISTRIK BONGGO	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	12.375.000,00
226	2026	7010.00.00.30.0000	DISTRIK BONGGO	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dana Alokasi Umum (DAU)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	63.400.000,00
227	2026	4.010.00.00.25.0000	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.974.134.000,00
228	2026	4.010.00.00.25.0000	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	525.550.000,00
229	2026	4.010.00.00.25.0000	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.400.000,00
230	2026	4.010.00.00.25.0000	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.600.000,00
231	2026	4.010.00.00.25.0000	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	82.000.000,00



NO	TAHUN	KODE SKPD	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	NAMA AKUN	TOTAL RINCIAN
232	2026	104.210.00.05.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.939.578,00
233	2026	104.210.00.05.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat.	6.936.000,00
234	2026	104.210.00.05.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	164.942.000,00
235	2026	1012.22.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	299.625,00
236	2026	1012.22.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.452.000,00
237	2026	1012.22.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.200.000,00
238	2026	1012.22.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.800.000,00
239	2026	402.00.00.48.0000	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.882.720,00
240	2026	402.00.00.48.0000	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.200.000,00
241	2026	214.0.00.00.15.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUJUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUJUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUJUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	66.000.000,00
242	2026	7010.00.00.35.0000	DISTRIBUKSI BONGGO TIMUR	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	59.960.000,00
243	2026	402.00.00.48.0000	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	604.120.000,00
244	2026	402.00.00.48.0000	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	39.745.000,00
245	2026	214.0.00.00.15.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUJUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUJUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15.000,00
246	2026	214.0.00.00.15.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUJUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUJUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	26.350.000,00
247	2026	214.0.00.00.15.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUJUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUJUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atas Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Belanja Natura dan Pakaian-Natura	26.600.000,00



NO	TAHUN	KODE SKPD	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	NAMA AKUN	TOTAL RINCIAN
248	2026	2.14.0.00.0.00.15.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUJUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUJUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	DAK Non Fisik-BOXB-KB	Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan	6.600.000,00
249	2026	2.14.0.00.0.00.15.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUJUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUJUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	DAK Non Fisik-BOXB-KB	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.200.000,00
250	2026	2.14.0.00.0.00.15.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUJUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUJUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	DAK Non Fisik-BOXB-KB	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.600.000,00
251	2026	2.15.0.00.0.00.16.0000	DINAS PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	199.168.000,00
252	2026	2.15.0.00.0.00.16.0000	DINAS PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.960.000,00
253	2026	2.14.0.00.0.00.15.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUJUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUJUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/Balita)	DAK Non Fisik-BOXB-KB	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	620.400.000,00
254	2026	2.14.0.00.0.00.15.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUJUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUJUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan	33.000.000,00
255	2026	2.14.0.00.0.00.15.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUJUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUJUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	8.000.000,00
256	2026	2.14.0.00.0.00.15.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUJUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUJUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	59.000.000,00
257	2026	7010.0.0.00.35.0000	DISTRIK BONGGO TIMUR	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.000.000,00
258	2026	7010.0.0.00.35.0000	DISTRIK BONGGO TIMUR	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12.880.000,00
259	2026	2.14.0.00.0.00.15.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUJUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUJUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	53.400.000,00
260	2026	3.25.0.00.0.00.25.0000	Dinas Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	101.376.000,00



NO	TAHUN	KODE SKPD	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	NAMA AKUN	TOTAL RINCIAN
261	2026	3.270.000.00.24.0000	DINAS PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	251.504.000,00
262	2026	3.270.000.00.24.0000	DINAS PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	218.515.000,00
263	2026	3.26.000.00.23.0000	Dinas Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.025.740,00
264	2026	3.26.000.00.23.0000	Dinas Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.796.000,00
265	2026	1.06.000.00.08.0000	DINAS SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.140.000,00
266	2026	1.06.000.00.08.0000	DINAS SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.935.000,00
267	2026	1.02.000.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	433.500,00
268	2026	1.02.000.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	638.000,00
269	2026	1.02.000.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.318.000,00
270	2026	1.02.000.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.000.000,00
271	2026	7010.000.00.34.0000	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	717005,00
272	2026	7010.000.00.34.0000	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.900.000,00
273	2026	1.02.000.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	905.659130,00
274	2026	1.02.000.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.078.456.400,00
275	2026	1.02.000.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	11.250.000,00
276	2026	1.02.000.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.130.000,00
277	2026	1.02.000.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.882.510,00



NO	TAHUN	KODE SKPD	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	NAMA AKUN	TOTAL RINCIAN
278	2026	102.000.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	9.600.000,00
279	2026	102.000.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	10.944.000,00
280	2026	7010.000.00.34.0000	DISTRIB PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.580.825,00
281	2026	7010.000.00.34.0000	DISTRIB PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.290.000,00
282	2026	2130.000.00.14.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	460.275.000,00
283	2026	2090.000.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Belanja Bahan-Bahan Kimia	124.250.000,00
284	2026	2090.000.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	5.220.000,00
285	2026	2090.000.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.850.000,00
286	2026	2090.000.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	31.586.250,00
287	2026	2090.000.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	163.200.000,00
288	2026	2090.000.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	70.000.000,00
289	2026	2090.000.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	8.000.000,00



NO	TAHUN	KODE SKPD	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	NAMA AKUN	TOTAL RINCIAN
290	2026	2.09.000.000.11.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyuluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	91.890.000,00
291	2026	8.01.000.00.54.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.100.165,00
292	2026	8.01.000.00.54.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000,00
293	2026	2.070.000.00.09.0000	DINAS TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	78.060.000,00
294	2026	8.01.000.00.54.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	158.220.000,00
295	2026	7.010.000.00.30.0000	DISTRIK BONGGO	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000.000,00
296	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH) Biasa	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	599.671.000,00
297	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.005.740,00
298	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.650.000,00
299	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.500.000,00
300	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	140.844.000,00
301	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.560.000,00
302	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	49.970.167,00
303	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.257.560,00
304	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.570.000,00
305	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.060.000,00
306	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	150.114.000,00



NO	TAHUN	KODE SKPD	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	NAMA AKUN	TOTAL RINCIAN
307	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Pelaksanaan Forum Peringkat Daerah/ Lintas Peringkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	132.600.000,00
308	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Pelaksanaan Forum Peringkat Daerah/ Lintas Peringkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Honorarium Rohaniwan	1.600.000,00
309	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Pelaksanaan Forum Peringkat Daerah/ Lintas Peringkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.000.000,00
310	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Pelaksanaan Forum Peringkat Daerah/ Lintas Peringkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	36.800.000,00
311	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Pelaksanaan Forum Peringkat Daerah/ Lintas Peringkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	98.399.000,00
312	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Peleaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	29.617.590,00
313	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Peleaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22.834.280,00
314	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Peleaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.500.000,00
315	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Peleaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.500.000,00
316	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Peleaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	59.600.000,00
317	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Peleaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	75.450.000,00
318	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Peleaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Honorarium Rohaniwan	800.000,00
319	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Peleaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.000.000,00
320	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Peleaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12.000.000,00
321	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Peleaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	151.098.000,00
322	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Peleaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	75.600.000,00
323	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.616.745,00
324	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	149.849.224,00



NO	TAHUN	KODE SKPD	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	NAMA AKUN	TOTAL RINCIAN
325	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000,00
326	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.450.000,00
327	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.650.000,00
328	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	72.000.000,00
329	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	37.400.000,00
330	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	96.034.000,00
331	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.141.765,00
332	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.690.056,00
333	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000,00
334	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.800.000,00
335	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	13.200.000,00
336	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	39.750.000,00
337	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	242.028.000,00
338	2026	5.010.000.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	307.840.000,00



NO	TAHUN	KODE SKPD	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	NAMA AKUN	TOTAL RINCIAN
339	2026	5.03.5.04.0.00.52.0000	BADAN KEGAWAJIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	KEPEGAWAIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	200.110.000,00
340	2026	5.01.0.00.0.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28.072.456,00
341	2026	5.01.0.00.0.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	44.080.280,00
342	2026	5.01.0.00.0.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000,00
343	2026	5.01.0.00.0.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.200.000,00
344	2026	5.01.0.00.0.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	44.700.000,00
345	2026	5.01.0.00.0.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	60.900.000,00
346	2026	5.01.0.00.0.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12.000.000,00
347	2026	5.01.0.00.0.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	115.887.000,00
348	2026	5.01.0.00.0.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.438.000,00
349	2026	5.01.0.00.0.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000,00



NO	TAHUN	KODE SKPD	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	NAMA AKUN	TOTAL RINCIAN
350	2026	5.01.0.00.0.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.762.000,00
351	2026	5.01.0.00.0.00.49.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	160.800.000,00
352	2026	2.09.0.00.0.00.11.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Belanja Natura dan Pakan-Natura	158.625.000,00
353	2026	2.09.0.00.0.00.11.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.173.000,00
354	2026	2.09.0.00.0.00.11.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	28.200.000,00
355	2026	2.09.0.00.0.00.11.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	8.000.000,00
356	2026	701.0.00.0.00.32.0000	DISTRIK SARMI TIMUR	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	38.400.000,00
357	2026	701.0.00.0.00.26.0000	DISTRIK SARMI	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.062.000,00
358	2026	701.0.00.0.00.26.0000	DISTRIK SARMI	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.000.000,00
359	2026	2.12.0.00.0.00.13.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000,00
360	2026	2.12.0.00.0.00.13.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.800.000,00
361	2026	1.03.0.00.0.00.04.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	20.000.000,00
362	2026	1.03.0.00.0.00.04.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	40.000.000,00



NO	TAHUN	KODE SKPD	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	NAMA AKUN	TOTAL RINCIAN
363	2026	103.000.000.04.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	99.800.000,00
364	2026	103.000.000.04.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Sanitasi Lingkungan	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.000.000.000,00
365	2026	103.000.000.04.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	DTI-Papua-Sanitasi Lingkungan	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.000.000.000,00
366	2026	103.000.000.04.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	DTI-Papua-Sanitasi Lingkungan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	20.000.000,00
367	2026	103.000.000.04.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	DTI-Papua-Sanitasi Lingkungan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	40.000.000,00
368	2026	212.000.000.13.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	82.660.000,00
369	2026	212.000.000.13.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.360.000,00
370	2026	502.000.000.50.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.832.173,00
371	2026	502.000.000.50.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.395.000,00
372	2026	502.000.000.50.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.680.000,00
373	2026	502.000.000.50.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.880.000,00
374	2026	502.000.000.50.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.500.000,00
375	2026	502.000.000.50.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.712.000,00
376	2026	103.000.000.04.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.508.000,00



NO	TAHUN	KODE SKPD	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	NAMA AKUN	TOTAL RINCIAN
377	2026	103.000.000.04.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.104.000,00
378	2026	103.000.000.04.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.346.000,00
379	2026	103.000.000.04.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00
380	2026	103.000.000.04.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	246.822.000,00
381	2026	103.000.000.04.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	62.420.000,00
382	2026	103.000.000.04.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	105.000.000,00
383	2026	103.000.000.04.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Air Bersih	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	1.500.000.000,00
384	2026	5.02.000.000.50.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	628.665.000,00
385	2026	5.02.000.000.50.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.623.236,00
386	2026	5.02.000.000.50.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.460.000,00
387	2026	105.000.000.06.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51.830.000,00
388	2026	701.000.000.34.0000	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50.340.000,00
389	2026	2.173.30.3.31.18.0000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	199.852.000,00
390	2026	2.173.30.3.31.18.0000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Belanja Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pabrik	250.000.000,00
391	2026	2.173.30.3.31.18.0000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.918.995,00
392	2026	2.173.30.3.31.18.0000	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.930.000,00
393	2026	1.04.210.000.05.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	1.000.000.000,00



NO	TAHUN	KODE SKPD	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	NAMA AKUN	TOTAL RINCIAN
394	2026	1.04.2.10.0.00.05.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.100.000,00
395	2026	1.04.2.10.0.00.05.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	30.000.000,00
396	2026	1.04.2.10.0.00.05.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.900.000,00
397	2026	2.16.2.20.2.21.17.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	81.996.000,00
398	2026	5.02.0.00.0.00.51.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	139.716.000,00
399	2026	5.02.0.00.0.00.51.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	56.700.000,00
400	2026	7.01.0.00.0.00.26.0000	DISTRIK SARMI	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	106.000.000,00
401	2026	3.270.00.0.00.24.0000	DINAS PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Belanja Bahan-Bahan Kimia	63.000.000,00
402	2026	3.270.00.0.00.24.0000	DINAS PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Belanja Bahan-Bahan/ Bibit Tanaman	345.000.000,00
403	2026	3.270.00.0.00.24.0000	DINAS PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	198.000.000,00
404	2026	3.270.00.0.00.24.0000	DINAS PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Belanja Natura dan Pakan-Natura	952.000,00
405	2026	3.270.00.0.00.24.0000	DINAS PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	44.352.000,00
406	2026	3.270.00.0.00.24.0000	DINAS PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	36.000.000,00
407	2026	3.270.00.0.00.24.0000	DINAS PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	162.950.000,00
408	2026	2.19.0.00.0.00.20.0000	DINAS PEMUDA DAN OLARHAGA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	101.313.000,00
409	2026	7.01.0.00.0.00.28.0000	DISTRIK PANTAI BARAT	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	886.293,00

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. SARMI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						142.419.499.976,00								0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						142.170.329.199,00								0,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						142.170.329.199,00								0,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Presentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Keuangan, Administrasi Umum dan Jasa Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	80.366.960.022,00						-		0,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia</i>	-			100 Persen	71.955.051.022,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	Perangkat Daerah	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				600 Orang/bulan	71.879.403.175,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD, DAK NON FISIK-TKG PNSD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	Perangkat Daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				3 Laporan	75.647.847,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia</i>	-			100 Persen	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	Aparatur	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	Aparatur		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia</i>	-			100 Persen	7.688.920.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	Aparatur	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				4 Laporan	7.688.920.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	Aparatur		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	712.989.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	34.989.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	174.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	504.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<p>Prosentase anak usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)</p> <p>Angka partisipasi sekolah Usia 5-6</p> <p>Penduduk yang Kebudayaan berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)</p> <p>Persenatase Capaian SPM Pendidikan</p> <p>Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B</p> <p>Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7- 24 (laki-laki dan perempuan)</p> <p>Angka partisipasi kasar SD</p> <p>Angka partisipasi kasar SMP</p> <p>Angka partisipasi sekolah (APS) 07- 12</p> <p>Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A</p> <p>Angka partisipasi sekolah (APS) 13- 15</p>	-			<p>72,56 Persen</p> <p>68,57 Persen</p> <p>96,21 Persen</p> <p>100 Persen</p> <p>79,41 Persen</p> <p>78,13 Persen</p> <p>110,76 Persen</p> <p>104,36 Persen</p> <p>96,27 Persen</p> <p>94,39 Persen</p> <p>94,57 Persen</p>	44.605.250.133,00						-	0,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<p>Persentase sekolah dasar yang melaksanakan pengelolaan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)</p>	-			85 Persen	24.488.169.743,00			-	<p>Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM</p> <p>Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif</p>	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			<p>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun</p>				3 Unit	1.324.784.000,00	<p>Kab. Sarmi, Sarmi, Sawar</p> <p>Kab. Sarmi, Pantai Barat, Niwerawar</p> <p>Kab. Sarmi, Pantai Timur</p> <p>Bagian Barat, Arare</p>	<p>DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN</p>	-	<p>Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM</p> <p>Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif</p>	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan</i>				2 Unit	674.106.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Mertewar, Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Holmafen	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kualitas dan Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>				0 Peserta Didik	166.061.065,00	Kab. Sarmi, Mararena	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat penguatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Peningkatan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</i>				0 Orang	9.807.600.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>				120 Orang	364.369.876,00	Kab. Sarmi, Mararena	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>				72 Satuan Pendidikan	9.546.660.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS AFIRMASI, DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			<i>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</i>				72 Orang	81.137.532,00	Kab. Sarmi, Mararena	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</i>				72 Orang	146.694.888,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			<i>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan</i>				2 Konten Digital	33.660.112,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i>				72 Orang	50.468.112,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>				5 Dokumen	30.180.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>				1 Dokumen	49.868.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			<i>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>				15 Komunitas	90.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i>				1 Kegiatan	48.516.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														
			<i>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik</i>				2000 Buku	359.911.500,00	Kab. Sarmi, Tor Atas, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</i>				3400 Paket	699.518.700,00	Kab. Sarmi, Tor Atas, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Pantai Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-PENDIDIKA N	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemer ataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik danTenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>				72 Satuan Pendidikan	164.544.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%- PAPUA-PENDIDI KAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemer ataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik danTenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>				3200 Peserta Didik	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			<i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia</i>				0 Paket	50.089.958,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Rimsersari	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<i>Persentase SMP yang melaksanakan pengelolaan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)</i>	-			80,00 Persen	11.307.535.178,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														
			<i>Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>				2.253 Peserta Didik	300.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>				210 Peserta Didik	106.685.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>				215 Orang	4.494.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>				88 Orang	59.308.758,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			<i>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan</i>				2 Satuan Pendidikan	380.000.000,00	Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Barat, Waim	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>				22 Satuan Pendidikan	5.146.620.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			<i>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</i>				22 Orang	29.388.000,00	Kab. Sarmi, Mararena	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan</i>				1 Konten Digital	47.044.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i>				22 Orang	14.844.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>				2 Dokumen	35.050.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>				2 Dokumen	25.264.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>				14 Komunitas	70.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%- PAPUA-PENDIDI KAN	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemer ataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			<i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i>				1 Kegiatan	25.232.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%- PAPUA-PENDIDI KAN	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemer ataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar</i>				22 Satuan Pendidikan	95.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0061	Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														
			<i>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik</i>				1500 Buku	240.000.000,00	Kab. Sarmi, Tor Atas, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perengkapan Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia</i>				780 Paket	200.542.295,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD														
			<i>Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>				1438 Peserta Didik	250.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD</i>				18 Orang	586.800.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>				240 Orang	80.866.175,00	Kab. Sarmi, Mararena	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP</i>				62 Satuan Pendidikan	1.193.160.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			<i>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD</i>				64 Orang	20.878.504,00	Kab. Sarmi, Mararena	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan</i>				2 Konten Digital	40.437.500,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i>				64 Orang	41.746.135,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>				2 Dokumen	19.998.060,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>				1 Dokumen	41.751.625,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>				4 Komunitas	20.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%- PAPUA-PENDIDI KAN	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemer ataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik danTenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik														
			<i>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>				100 Peserta didik	106.665.747,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%- PAPUA-PENDIDI KAN	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemer ataan SDM Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, dan inovatif	Perangkat Daerah, Peserta Didik danTenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>				1019 Peserta Didik	180.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>				35 Orang	23.583.006,00	Kab. Sarmi, Mararena	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP</i>				7 Satuan Pendidikan	695.530.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			<i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</i>				500 Paket	60.052.165,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik</i>				560 Buku	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>				670 Peserta Didik	5.247.534.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</i>				1516 Paket	150.009.290,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.05.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas														
			<i>Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>				2051 Peserta didik	175.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.05.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian</i>				5 Satuan Pendidikan	60.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.05.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>				120 Peserta Didik	24.213.033,00	Kab. Sarmi, Mararena	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.05.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</i>				45 Orang	1.296.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.05.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>				70 Orang	47.177.490,00	Kab. Sarmi, Mararena	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.05.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS</i>				5 Satuan Pendidikan	4.948.750.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.05.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														
			<i>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas</i>				25 Orang	11.794.380,00	Kab. Sarmi, Mararena	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.05.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan</i>				2 Konten Digital	11.794.380,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.05.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i>				35 Orang	11.794.380,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.05.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>				35 Dokumen	11.793.480,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.05.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			<i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i>				50 Kegiatan	16.848.380,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.05.0066	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>				13 Komunitas	52.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%- PAPUA-PENDIDI KAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemer ataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.05.0067	Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														
			<i>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik</i>				1000 Buku	119.956.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-PENDIDIKA N	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemer ataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.3.06	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<i>Persentase SMK yang melaksanakan pengelolaan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)</i>	-			85 Persen	2.461.338.765,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.06.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			<i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</i>				269 Paket	87.024.640,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.06.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>				316 Peserta didik	180.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.06.0039	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik														
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian</i>				5 Satuan Pendidikan	50.126.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.06.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</i>				44 Orang	1.248.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.06.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>				35 Orang	23.558.245,00	Kab. Sarmi, Mararena	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.06.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS</i>				5 Satuan Pendidikan	730.100.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.06.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan														
			<i>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan</i>				35 Orang	11.794.380,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.06.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan</i>				35 Konten Digital	11.794.380,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.06.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>				35 Dokumen	23.558.245,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.06.0057	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>				35 Orang	11.794.380,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.06.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			<i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i>				1 Kegiatan	23.588.495,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.06.0066	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>				14 Komunitas	60.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Perangkat Daerah, Peserta Didik dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.07	Penyediaan Pendidikan layanan khusus bagi OAP	<i>Persentase peserta didik OAP yang memperoleh layanan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)</i>	-			80 Persen	309.616.680,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	Peserta Didik	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.07.0004	Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas</i>				24 Peserta Didik	150.000.000,00	Kab. Sarmi, Tor Atas, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	Peserta Didik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.07.0006	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Dasar														
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menerima Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Dasar</i>				22 Satuan Pendidikan	159.616.680,00	Kab. Sarmi, Tor Atas, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	Peserta Didik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.3.08	Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Persentase satuan pendidikan di luar kewenangan kabupaten/kota yang mengalami peningkatan mutu layanan pendidikan setelah menerima bantuan fasilitas dan pembiayaan</i>	-			85 Persen	7.199.663.392,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	Peserta Didik	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.08.0002	Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				23 Satuan Pendidikan	7.199.663.392,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	Peserta Didik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	<i>Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal</i>	-			100 Persen	231.523.068,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	<i>Persentase satuan pendidikan dasar yang mengimplementasikan kurikulum muatan lokal sesuai ketetapan daerah</i>	-			80 Persen	231.523.068,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	Perangkat Daerah dan Tenaga Pendidik	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
			<i>Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun</i>				1 Dokumen	35.382.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	Perangkat Daerah dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia</i>				300 Buku	114.801.068,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	Perangkat Daerah dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
			<i>Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya</i>				80 Orang	81.340.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	Perangkat Daerah dan Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	<i>Indeks Pemerataan Guru Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik</i>	-			30.45 Persen 52.18 Persen	5.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	<i>Persentase satuan pendidikan dasar, PAUD, dan nonformal/kesetaraan yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar kualifikasi dan rasio kebutuhan.</i>	-			85 Persen	5.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	Tenaga Pendidik	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>				2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	Tenaga Pendidik		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6.	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	<i>Persentase pengembangan bahasa dan sastra</i>	-			69,50 Persen	53.846.326,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Presentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Keuangan, Administrasi Umum dan Jasa Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	33.507.194,00						-	0,00	
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia</i>	-			100 Persen	33.507.194,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>				4 Laporan	33.507.194,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	<i>Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan</i>	-			100 Persen	107.833.658,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase peningkatan keberlangsungan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kesenian tradisional di wilayah kabupaten/kota.</i>	-			80 Persen	107.833.658,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	Masyarakat dan Lembaga Adat	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
			<i>Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan</i>				2 Objek	53.916.750,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	Masyarakat dan Lembaga Adat		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional</i>				1 Laporan	53.916.908,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	Masyarakat dan Lembaga Adat		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	<i>Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal</i>	-			100 Persen	107.829.925,00						-	0,00	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase peningkatan pemahaman dan pelestarian nilai sejarah lokal di wilayah kabupaten/kota.</i>	-			80 Persen	107.829.925,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	Masyarakat dan Lembaga Adat	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan</i>				80 Orang	53.912.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	Masyarakat dan Lembaga Adat		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah														
			<i>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat</i>				80 Dokumen	53.917.925,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	Masyarakat dan Lembaga Adat		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
J U M L A H								142.419.499.976,00						0,00		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KESEHATAN KAB. SARMI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS KESEHATAN						92.899.263.241,00								7.672.200.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						92.899.263.241,00								7.672.200.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						92.899.263.241,00								7.672.200.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Dokumen Perencanaan Tepat Waktu Persentase Aset yang Terinventarisasi</i>	-			90 Persen 100 Persen	37.407.564.175,00						-		4.735.200.000,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Perencanaan Tepat Waktu</i>	-			100 Persen	129.998.589,00			-	Peningkata n Kualitas dan Pemer ataan SDM Peningkata n, pemerat aan dan kualitas layanan kehatan	-	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	29.999.370,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n Kualitas dan Pemer ataan SDM Peningkata n, pemerat aan dan kualitas layanan kehatan	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	29.999.219,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n Kualitas dan Pemer ataan SDM Peningkata n, pemerat aan dan kualitas layanan kehatan	-			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Pelaksanaan Monev Program Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu</i>	-			100 Persen 100 Persen	31.323.446.577,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				900 Orang/bulan	31.223.446.624,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				2 Laporan	99.999.953,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Kepegawaian yang sesuai</i>	-			100 Persen	100.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-	-	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Ketersediaan Sarana Operasional Kantor</i>	-			100 Persen	249.999.805,00			-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-	-	250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	99.999.805,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				3 Laporan	150.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penggunaan Listrik dan Alat Komunikasi</i>	-			100 Persen	5.384.119.375,00			-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-	-	3.965.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	170.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		170.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	5.184.119.375,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.765.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Aset yang Terinventarisasi</i>	-			100 Persen	219.999.829,00			-	Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-	-	220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				12 Unit	219.999.829,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		220.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun</i>				1 Unit	858.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		1.727.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar</i>				11 Unit	124.994.279,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas</i>				1 Unit	160.000.000,00	Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawes Mukti	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		160.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan</i>				20 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center</i>				5 Unit	114.163.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			<i>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan</i>				1 Paket	6.186.317.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA, DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				500 Orang	400.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%- PAPUA-KESEHA TAN	Memperku t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Peningkata n Kualitas dan Pemer ataan SDM Peningkata n, pemerat aan dan kualitas layanan kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				500 Orang	400.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%- PAPUA-KESEHA TAN	Memperku t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Peningkata n Kualitas dan Pemer ataan SDM Peningkata n, pemerat aan dan kualitas layanan kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				500 Orang	200.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%- PAPUA-KESEHA TAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				300 Orang	70.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%- PAPUA-KESEHA TAN	Memperku t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Peningkata n Kualitas dan Pemer ataan SDM Peningkata n, pemerat aan dan kualitas layanan kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				5000 Orang	99.999.213,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				100 Orang	200.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				100 Orang	99.999.106,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				100 Orang	100.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%- PAPUA-KESEHA TAN	Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Peningkata n Kualitas dan Pemer ataan SDM Peningkata n, pemerat aan dan kualitas layanan kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i>				100 Orang	100.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%- PAPUA-KESEHA TAN	Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Peningkata n Kualitas dan Pemer ataan SDM Peningkata n, pemerat aan dan kualitas layanan kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				100 0	250.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%- PAPUA-KESEHA TAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemer ataan SDM Peningkatan, pemerat aan dan kualitas layanan kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				161 Orang	299.999.850,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%- PAPUA-KESEHA TAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemer ataan SDM Peningkatan, pemerat aan dan kualitas layanan kesehatan	-		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>				1 Dokumen	1.032.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%- PAPUA-KESEHA TAN	Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Peningkata n Kualitas dan Pemer ataan SDM Peningkata n, pemerat aan dan kualitas layanan kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				2 Dokumen	149.999.890,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%- PAPUA-KESEHA TAN	Memperku t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Peningkata n Kualitas dan Pemer ataan SDM Peningkata n, pemerat aan dan kualitas layanan kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</i>				6 Dokumen	99.999.806,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%- PAPUA-KESEHA TAN	Memperku t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Peningkata n Kualitas dan Pemer ataan SDM Peningkata n, pemerat aan dan kualitas layanan kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				1 Dokumen	199.999.137,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%- PAPUA-KESEHA TAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan</i>				5 Dokumen	1.500.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-KESEHATA N	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemer ataan SDM Peningkatan, pemerat aan dan kualitas layanan kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				11 Dokumen	26.381.374.074,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%- PAPUA-KESEHA TAN	Memperku a pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Peningkata n Kualitas dan Pemer ataan SDM Peningkata n, pemerat aan dan kualitas layanan kehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>				7 Dokumen	5.036.341.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemer ataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>				10 Orang	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>				0 Orang	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				2000 Orang	526.399.750,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%- PAPUA-KESEHA TAN	Memperku a t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Peningkata n Kualitas dan Pemer ataan SDM Peningkata n, pemerat aan dan kualitas layanan kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota</i>				2 Dokumen	239.999.250,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji														
			<i>Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	<i>Prevalensi Depresi pada usia "e 15 tahun Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional Cakupan penemuan kasus TB Persentase merokok penduduk 10-21 tahun Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna Prevalensi Obesitas > 18 tahun Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat Persentase lanjut usia yang mandiri Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar</i>	-			0,37 Persen 79 Persen 0 Persen 90 Persen NA Persen 63,64 Persen 8,33 Persen 5,29 Persen 72 Persen 62,11 Perse nPersen 66,67 Persen	547.045.659,00						-	0,00	
	1.02.02.3.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penderita Kusta, Frambusia, Filariasis</i>	-			100 Persen	547.045.659,00			-	Peningkata n Kualitas dan Pemer ataan SDM Peningkata n, pemerat aan dan kualitas layanan kesehatan	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0047	Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah dukungan pelayanan kesehatan lainnya</i>				2 Dokumen	47.046.575,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Bagaisewar II Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaisewar Dua Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0053	Pelayanan Kesehatan Penderita Kusta														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang dengan penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				100 Orang	100.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0054	Pelayanan Kesehatan Penderita Filariasis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang dengan penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				100 Orang	100.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0055	Pelayanan Kesehatan Penderita Kecacingan														
			<i>Jumlah Orang dengan penyakit Kecacingan yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				0 Orang	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0056	Pelayanan Kesehatan Penderita Frambusia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang dengan penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				100 Orang	100.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0068	Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Imunisasi</i>				1 Dokumen	199.999.084,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	<i>Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar</i>	-			1392,43 Per 100.000 Penduduk 0 Persen 9,1 Persen	199.999.862,00						-	0,00	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Penikatan SDM Kesehatan</i>	-			100 Persen	0,00			-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)</i>				0 Orang	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase SDM yang di tingkatkan mutunya</i>	-			100 Persen	199.999.862,00			-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya</i>				20 Orang	199.999.862,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	<i>Presentase Masyarakat Bidang kesehatan yang diberdayakan</i>	-			100 Persen	99.999.183,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pembinaan dan Bimbingan kepada Kader Kesehatan</i>	-			100 Persen	99.999.183,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	1.071.500,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		1.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	68.318.000,00			-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-	-	150.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				7 Laporan	68.318.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		150.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	700.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-	-	700.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	700.000.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		700.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.732.980.550,00			-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-	-	4.504.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	4.005.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		4.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				16 Laporan	3.728.975.550,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		4.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	74.159.996,00			-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-	-	100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				2 Unit	74.159.996,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	<i>Rasio daya tampung rumah sakit rujukan di Kabupaten Sarmi Jumlah Rumah Sakit Yang Terakreditasi</i>	-			undefined undefined 1 Unit	8.253.589.908,00						-	9.245.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan dan pendukung pelayanan operasional Rumah Sakit Jumlah gedung dan instalasi yang dibangun Jumlah peralatan Kesehatan yang dikalibrasi. Jumlah gedung yang direhabilitasi Jumlah prasarana penunjang yang diadakan Jumlah pelaksanaan survei akreditasi oleh KARS Jumlah bangunan penunjang lainnya yang dibangun Jumlah alat Kesehatan yang diadakan	-			undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined	3.539.353.530,00			-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-	-	4.100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				1 Unit	500.000.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		1.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center				40 Unit	43.988.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	2.995.365.530,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		3.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.714.236.378,00			-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-	-	5.145.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	29.556.510,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		40.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				126 Dokumen	400.008.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		450.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12 Dokumen	4.157.720.125,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		4.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				25 Orang	42.034.075,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	-		50.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>				25 Orang	35.334.224,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		40.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria															
			<i>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria</i>				25 Orang	49.583.444,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		65.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-			-	46.190.000,00						-	75.000.000,00		
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	46.190.000,00			-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-	-	75.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya</i>				5 Orang	46.190.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	-		75.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
		J U M L A H							105.775.573.195,00							22.448.200.000,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. SARMI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						42.537.193.559,00								0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						42.537.193.559,00								0,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						42.537.193.559,00								0,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor</i>	-			100 %	13.137.446.865,00						-		0,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu</i>	-			1 DOKUMEN	10.243.875,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN & DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SARMI	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	10.243.875,00	Kab. Sarmi, Sarmi Kota, Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN & DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SARMI			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	6.636.579.240,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN & DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SARMI	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				76 Orang/bulan	6.622.592.740,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN & DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SARMI		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	13.986.500,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN & DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SARMI		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan inventarisasi dan mutasi Barang Milik Daerah yang disusun	-			10 LAPORAN	13.976.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN & DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SARMI	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				10 Laporan	13.976.500,00	Kab. Sarmi, Tor Atas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN & DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SARMI		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan	-			50 Orang	188.917.838,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Pemenuhan dan pemerataan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi, efisien dan handal	ASN & DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SARMI	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				50 Orang	188.917.838,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Pemenuhan dan pemerataan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi, efisien dan handal	ASN & DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SARMI		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen dan laporan administrasi umum yang disusun dan disampaikan tepat waktu</i>	-			185 DOKUMEN	1.898.402.791,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN & DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SARMI	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				17 Paket	69.064.440,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN & DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SARMI		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	12.676.300,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN & DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SARMI		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				9 Paket	86.846.051,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN & DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SARMI		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	78.400.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN & DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SARMI		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	70.350.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN & DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SARMI		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				180 Laporan	1.581.066.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN & DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SARMI		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah jenis Barang Milik Daerah yang berhasil diadakan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan</i>	-			7 Unit	2.022.345.621,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Pemenuhan dan pemerataan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi, efisien dan handal	ASN & DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SARMI	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan</i>				1 Unit	1.898.080.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Pemenuhan dan pemerataan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi, efisien dan handal	ASN & DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SARMI		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				6 Unit	124.265.621,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN & DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SARMI		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah laporan pertanggungjawaban kegiatan jasa penunjang yang disusun dan disampaikan tepat waktu</i>	-			20 LAPORAN	1.991.531.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN & DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SARMI	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	21.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN & DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SARMI		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	67.101.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN & DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SARMI		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				106 Laporan	1.903.430.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN & DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SARMI		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah barang milik daerah penunjang yang dipelihara</i>	-			51 unit	375.450.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN & DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SARMI	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				25 Unit	155.150.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN & DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SARMI		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				25 Unit	20.300.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN & DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SARMI		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Amsira	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN & DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SARMI		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	<i>Persentase peningkatan perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir Persentase peningkatan perlindungan Kawasan abrasi dan banjir rob Persentase luas layanan irigasi multikomoditas</i>	-			10.71 % 0 % 43 %	1.970.704.000,00						-	0,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Laporan pengelolaan SDA dan pemeliharaan bangunan pengaman pantai</i>	-			3 LAPORAN	1.970.704.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Pemenuhan dan pemerataan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi, efisien dan handal	MASYARAKAT	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0078	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi</i>				3 Lembaga	50.004.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pembangu nan Sarana dan Prasarana I nfrastruktur dan Konekti vitas Wilayah Pemenuha n dan peme rataan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi, efisien dan handal	MASYARAKAT		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku														
			<i>Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun</i>				1 Unit	1.700.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-INFRASTR UKTUR	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pembangu nan Sarana dan Prasarana I nfrastruktur dan Konekti vitas Wilayah Pemenuha n dan peme rataan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi, efisien dan handal	MASYARAKAT		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun</i>				15 Dokumen	220.700.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pembangu nan Sarana dan Prasarana I nfrastruktur dan Konekti vitas Wilayah Pemenuha n dan peme rataan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi, efisien dan handal	MASYARAKAT		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	<i>Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota</i>	-			5.97 %	1.965.200.000,00						-	0,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun</i>	-			25 Liter/Detik	1.965.200.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pembangu nan Sarana dan Prasarana I nfrastruktur dan Konekti vitas Wilayah Pemenuha n dan peme rataan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi, efisien dan handal	MASYARAKAT	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun</i>				25 Liter/Detik	1.965.200.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-INFRASTRUKTUR AIR BERSIH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Pemenuhan dan pemerataan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi, efisien dan handal	MASYARAKAT		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	<i>Persentase Ketercapaian Infrastruktur Perumahan dan Permukiman dalam kondisi Baik</i>	-			100 %	2.219.800.000,00						-	0,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota</i>	-			20 Unit	2.219.800.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Pemenuhan dan pemerataan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi, efisien dan handal	MASYARAKAT	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi</i>				20 Unit	2.219.800.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-INFRASTRUKTUR SANITASI LINGKUNGAN, DTI-PAPUA-SANITASI LINGKUNGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Pemenuhan dan pemerataan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi, efisien dan handal	MASYARAKAT		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	<i>Persentase Perijinan dan Penataan Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik</i>	-			20 %	299.993.547,00						-	0,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	<i>Jumlah dokumen pengawasan bangunan gedung dan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>	-			15 DOKUMEN	299.993.547,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Pemenuhan dan pemerataan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi, efisien dan handal	MASYARAKAT	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya</i>				248 KM	152.870.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pembangu nan Sarana dan Prasarana I nfrastruktur dan Konekti vitas Wilayah Pemenuha n dan peme rataan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi, efisien dan handal	MASYARAKAT		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0052	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang jembatan yang dibangun</i>				10 Meter	797.962.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Sewan	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN, DTI-PA PUA-PENDANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Pemenuhan dan pemerataan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi, efisien dan handal	MASYARAKAT		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	<i>Persentase Tenaga Kerja Kontruksi Kualifikasi Ahli (Pengusaha OAP)</i>	-			33 %	288.914.758,00						-	0,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih</i>	-			20 Orang	288.914.758,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Pemenuhan dan pemerataan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi, efisien dan handal	MASYARAKAT	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota</i>				6 Dokumen	499.999.026,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, membangun industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Pemenuhan dan pemerataan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi, efisien dan handal	MASYARAKAT		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang														
			<i>Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan</i>				24 Orang	99.998.923,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, membangun industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Pemenuhan dan pemerataan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi, efisien dan handal	MASYARAKAT		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
J U M L A H								42.537.193.559,00							0,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. SARMI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						26.171.890.846,06							26.265.432.048,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						23.071.890.846,06							23.165.432.048,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						23.071.890.846,06							23.165.432.048,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	5.346.375.596,06						-	5.441.436.115,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	21.016.278,00						-	19.760.096,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	9.875.578,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.480.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	2.178.500,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.196.480,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	3.094.200,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.172.928,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	5.868.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.910.688,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.584.527.879,00						-	3.584.527.219,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				36 Orang/bulan	3.387.450.739,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.387.450.739,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			0				10	160.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		160.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	23.504.900,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		23.502.368,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				4 Laporan	13.572.240,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		13.574.112,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	10.600.573,00			-	-	-		10.619.450,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	10.600.573,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.619.450,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	267.290.299,00			-	-	-		269.879.350,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	64.398.299,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		46.929.350,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	37.950.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		37.950.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				20 Laporan	164.942.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		185.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.414.119.840,00			-	-	-	-	1.404.120.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	17.400.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.400.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	24.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		24.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	120.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	1.252.719.840,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.212.720.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	48.820.727,06			-	-	-	-	142.530.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	42.530.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		42.530.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	6.290.727,06	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	-			70 % 80 %	13.256.244.250,00						-	13.232.724.933,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>Jumlah rumah korban bencana/relokasi yang telah didata dan diverifikasi</i>	-			1 dokumen	67.760.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Penduduk Kabupaten Sarmi yang terkena bencana	-	127.275.808,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi</i>				1 Dokumen	52.760.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Penduduk Kabupaten Sarmi yang terkena bencana		52.275.808,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi</i>				50 Unit Rumah	1.560.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Tor Atas, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Pantai Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Pemenuhan dan pemerataan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi, efisien dan handal	Penduduk Kabupaten Sarmi yang terkena bencana		1.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-			-	11.382.414.000,00			-	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Pemenuhan dan pemerataan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi, efisien dan handal	-	-	11.382.414.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0003	Pembangunan Rumah Khusus														
			<i>Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun</i>				29 Unit	11.382.414.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-INFRASTRUKTUR	-	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Pemenuhan dan pemerataan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi, efisien dan handal	-		11.382.414.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	<i>Persentase Jumlah izin pemb angunan/pengembangan perumahan yang diterbitkan</i>	-			35 Laporan	246.070.250,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Penduduk Kabupaten Sarmi yang terkena bencana	-	223.035.125,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Penduduk Kabupaten Sarmi yang terkena bencana		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0006	Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Permukiman kumuh di Kabupaten Sarmi		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-			-	3.150.000.000,00						-	3.150.000.000,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.150.000.000,00			-	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Pemenuhan dan pemerataan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi, efisien dan handal	-		3.150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki</i>				100 Unit Rumah	3.000.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Pemenuhan dan pemerataan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi, efisien dan handal	-		3.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru</i>				1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-			-	1.053.000.000,00						-	1.075.000.000,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-			-	1.053.000.000,00			-	-	-	-	1.075.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan</i>				20 Laporan	53.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan														
			<i>Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum</i>				20 Lokasi	1.000.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-			-	166.271.000,00						-	166.271.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.05.3.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-			-	166.271.000,00			-	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Akselerasi pelaksanaan program Otonomi Khusus yang akuntabel dan tepat sasaran	-	-	166.271.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.3.01.0006	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat														
			<i>Jumlah Rumah Penerima Manfaat dari Penyediaan Jaringan Tenaga Listrik</i>				14 Unit Rumah	166.271.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-INFRASTRUKTUR ENERGI LISTRIK	-	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Akselerasi pelaksanaan program Otonomi Khusus yang akuntabel dan tepat sasaran	-		166.271.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.100.000.000,00							3.100.000.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						3.100.000.000,00							3.100.000.000,00	
1.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-			-	3.100.000.000,00						-	3.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.100.000.000,00			-	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Akselerasi pelaksanaan program Otonomi Khusus yang akuntabel dan tepat sasaran	-	-	3.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah</i>				1 Dokumen	3.000.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-PERTANAHAN	-	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Akselerasi pelaksanaan program Otonomi Khusus yang akuntabel dan tepat sasaran	-		3.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
J U M L A H								26.171.890.846,06							26.265.432.048,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. SARMI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						3.041.890.228,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.041.890.228,00							0,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						3.041.890.228,00							0,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Terwujudnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang didukung oleh jasa penunjang yang memadahi, serta terlayannya kebutuhan masyarakat dengan baik</i>	-			100 %	2.923.052.412,00						-	0,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)</i>	-			4 Dokumen	23.185.375,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkata n Keamanan dan Ketertiban	OPD	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	10.861.375,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkata n Keamanan dan Ketertiban	OPD		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	2.395.500,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	OPD		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	3.466.500,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	OPD		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	6.462.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	OPD		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-			3 Laporan	1.987.652.710,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	OPD	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				20 Orang/bulan	1.972.811.937,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	OPD		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	14.840.773,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		OPD		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	300.614.327,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	10.019.239,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	5.018.088,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	185.750.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	99.827.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	611.600.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	611.600.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan p e n c e g a h a n d a n kesiapsiagaan terhadap bencana	-			30425 Orang	118.837.816,00						-	0,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu)tahun Jumlah Dokumen Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>	-			230 orang 1 Dokumen 1 Dokumen	118.837.816,00			Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Penduduk Kabupaten Sarmi	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														
			<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun</i>				40 Orang	118.837.816,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Penduduk Kabupaten Sarmi		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
J U M L A H								3.041.890.228,00							0,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. SARMI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						5.847.722.994,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.847.722.994,00							0,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						5.847.722.994,00							0,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor</i>	-			100 %	5.495.522.994,00						-	0,00	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik</i>	-			100 %	2.664.923.794,00			Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkata n Keamanan dan Ketertiban Peningkata n masyarakat yang harmonis, tertib, toleran dan berbudaya	ASN	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				100% Orang/bulan	2.664.923.794,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkata n Keamanan dan Ketertiban Peningkata n masyarakat yang harmonis, tertib, toleran dan berbudaya	ASN		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik</i>	-			100 %	310.032.000,00			Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkata n Keamanan dan Ketertiban Peningkata n masyarakat yang harmonis, tertib, toleran dan berbudaya	ASN Satuan Polisi Pamong Praja	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				100% Paket	253.200.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Peningkatan masyarakat yang harmonis, tertib, toleran dan berbudaya	ASN Satuan Polisi Pamong Praja		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				100% Paket	5.002.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Peningkatan masyarakat yang harmonis, tertib, toleran dan berbudaya	ASN Satuan Polisi Pamong Praja		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				100% Laporan	51.830.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Peningkatan masyarakat yang harmonis, tertib, toleran dan berbudaya	ASN Satuan Polisi Pamong Praja		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik</i>	-			100 %	2.520.567.200,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Peningkatan masyarakat yang harmonis, tertib, toleran dan berbudaya	ASN	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				100% Laporan	6.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Peningkatan masyarakat yang harmonis, tertib, toleran dan berbudaya	ASN		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				100% Laporan	2.514.567.200,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Peningkatan masyarakat yang harmonis, tertib, toleran dan berbudaya	ASN		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Umum	-			75 %	215.400.000,00						-	0,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Persentase Masyarakat Terdampak penertiban perda dan perkara yang terlayani</i>	-			0 % 75 %	163.300.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Peningkatan masyarakat yang harmonis, tertib, toleran dan berbudaya	Masyarakat	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
			<i>Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>				100% Dokumen	52.900.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Peningkatan masyarakat yang harmonis, tertib, toleran dan berbudaya	Masyarakat		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</i>				100% laporan	110.400.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Peningkatan masyarakat yang harmonis, tertib, toleran dan berbudaya	Masyarakat		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	<i>Persentase Terlaksananya pencegahan pengendalian pepadaman penyelamatan dan penanggulangan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota</i>	-			100 %	52.100.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Peningkatan masyarakat yang harmonis, tertib, toleran dan berbudaya	Masyarakat	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP</i>				100% Laporan	52.100.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Peningkatan masyarakat yang harmonis, tertib, toleran dan berbudaya	Masyarakat		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	<i>Persentase Pelayanan Pemadaman, Pencegahan, Penyelamatan kebakaran dan Non kebakaran</i>	-			45 %	136.800.000,00						-	0,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Terlaksananya pencegahan pengendalian pepadaman penyelamatan dan penanggulangan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota</i>	-			100 %	136.800.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Peningkatan masyarakat yang harmonis, tertib, toleran dan berbudaya	ASN Satuan Polisi Pamong Praja	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0026	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>				100% Laporan	136.800.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Peningkatan masyarakat yang harmonis, tertib, toleran dan berbudaya	ASN Satuan Polisi Pamong Praja		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
J U M L A H								5.847.722.994,00							0,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS SOSIAL KAB. SARMI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS SOSIAL						4.742.401.785,00							4.292.410.573,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.742.401.785,00							4.292.410.573,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						4.742.401.785,00							4.292.410.573,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.639.048.739,00						-	3.639.048.739,00	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.903.574.881,00			Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	ASN	-	2.903.574.881,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				29 Orang/bulan	2.903.574.881,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	ASN		2.903.574.881,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	44.075.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	ASN		44.075.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	666.398.858,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN	-	666.398.858,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	666.398.858,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		666.398.858,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	<i>Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial</i>	-			100 Keluarga	409.855.934,00						-	119.861.834,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	<i>Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	-			100 Keluarga	289.994.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Penurunan kemiskinan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan perlindungan sosial yang adaptif dan integratif	Keluarga	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.01.0004	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan														
			<i>Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				100 Keluarga	289.994.100,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Penurunan kemiskinan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan perlindungan sosial yang adaptif dan integratif	Keluarga		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	-			50 Keluarga	119.861.834,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdaya saing	Keluarga	-	119.861.834,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				50 Keluarga	65.467.440,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan rantasan kemiskinan.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdayasaing	Keluarga		65.467.440,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial</i>				50 Orang	54.394.394,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan rantasan kemiskinan.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan masyarakat yang harmonis, tertib, toleran dan berbudaya	Keluarga		54.394.394,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	<i>Perentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</i>	-			50 Orang	223.497.112,00						-	63.500.000,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	<i>Jumlah Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</i>	-			50 Orang	159.997.112,00			-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan masyarakat yang harmonis, tertib, toleran dan berbudaya	Masyarakat	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				50 Orang	80.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-SOSIAL	-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan masyarakat yang harmonis, tertib, toleran dan berbudaya	Masyarakat		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0016	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				50 Orang	79.997.112,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-SOSIAL	-	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan masyarakat yang harmonis, tertib, toleran dan berbudaya	Masyarakat		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	<i>Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	-			50 Orang	63.500.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Penurunan kemiskinan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan perlindungan sosial yang adaptif dan integratif	Orang	-	63.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak														
			<i>Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				100 Orang	63.500.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Penurunan kemiskinan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan perlindungan sosial yang adaptif dan integratif	Orang		63.500.000,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	<i>Persentase Daerah yang melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin</i>	-			100 Persen	420.000.000,00						-	420.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Daerah yang melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin</i>	-			1640 Orang	420.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan.	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan	Masyarakat	-	420.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata</i>				1640 Orang	170.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan.	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan	Masyarakat		170.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
			<i>Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				100 Orang	250.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan.	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan	Masyarakat		250.000.000,00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	<i>Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</i>	-			25 Orang	50.000.000,00						-	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	<i>Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam MasaTanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	-			25 Orang	50.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin- gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pertumbuh- an Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkel- anjutan	Masyarakat	-	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				25 Orang	50.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin- gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pertumbuh- an Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkel- anjutan	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
J U M L A H								4.742.401.785,00							4.292.410.573,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS TENAGA KERJA KAB. SARMI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS TENAGA KERJA						5.361.215.219,00								0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.361.215.219,00								0,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						5.361.215.219,00								0,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 Persen	4.206.480.562,00						-		0,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia</i>	-			100 Persen	4.913.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Perangkat Daerah	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	952.144,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Perangkat Daerah			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.387.706,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	2.574.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia</i>	-			100 Persen	3.132.824.681,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				30 Orang/bulan	3.132.824.681,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase administrasi umum perangkat daerah yang disediakan</i>	-			100 Persen	87.720.456,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	2.460.456,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	7.200.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				3 Laporan	78.060.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	-			100 Persen	977.361.575,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	25.260.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				5 Laporan	952.101.575,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang tersedia</i>	-			100 Persen	3.660.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				6 Unit	3.660.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS TENAGA KERJA
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	<i>Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja</i>	-			100 Persen	1.082.984.657,00						-	0,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	<i>Persentase terlaksananya pelatihan berdasarkan unit kompetensi</i>	-			100 Persen	1.082.984.657,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Akselerasi pelaksanaan program Otonomi Khusus yang akuntabel dan tepat sasaran	ASN	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>				50 Orang	999.999.657,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Akselerasi pelaksanaan program Otonomi Khusus yang akuntabel dan tepat sasaran	ASN		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja														
			<i>Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n</i>				1 Lembaga	82.985.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	ASN		0,00	DINAS TENAGA KERJA
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	<i>Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja</i>	-			100 Persen	35.390.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	<i>Persentase Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</i>	-			100 Persen	35.390.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	ASN	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			<i>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)</i>				20 Orang	35.390.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	ASN		0,00	DINAS TENAGA KERJA
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	<i>Meningkatnya Pekerja</i>	-			100 Persen	36.360.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	-			100 Persen	36.360.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	ASN	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan</i>				3 Laporan	36.360.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	ASN		0,00	DINAS TENAGA KERJA
J U M L A H								5.361.215.219,00							0,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. SARMI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						4.226.176.308,00								0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.226.176.308,00								0,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						4.226.176.308,00								0,00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor</i>	-			100 persen	3.626.178.312,00						-		0,00	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase terwujudnya perencanaan, penatausahaan keuangan dan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD</i>	-			100 persen	12.414.375,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	4.138.125,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	2.038.125,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	3.088.125,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	3.150.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase penatausahaan administrasi keuangan SKPD</i>	-			100 %	2.667.041.739,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				26 Orang/bulan	2.663.858.739,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				12 Laporan	3.183.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>terwujudnya tertib administrasi data kepegawaian</i>	-			100 Persen	184.620.664,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				60 Paket	56.865.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				2 Orang	74.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	17.171.887,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				6 Unit	76.063.902,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan penunjang urusan Perangkat Daerah</i>	-			9 Laporan	498.972.402,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	6.450.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	6.500.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				6 Laporan	486.022.402,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah barang milik daerah yang terpenuhi pemeliharaannya secara rutin/berkala, kendaraan dinas Jabatan, peralatan dan mesin, gedung kantor, sarana dan prasarana lainnya</i>	-			7 Unit	69.965.343,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	9.750.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				2 Unit	9.750.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				7 Unit	4.670.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	45.795.343,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	<i>Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja Daerah</i>	-			0,45 persen	199.999.231,00						-	0,00	
	2.08.02.2.01	Pelebagaian Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Persentase Perangkat Daerah yang aktif dalam penyelenggaraan PUG termasuk PPRG</i>	-			20 persen	49.999.815,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Organisasi Perangkat Daerah	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				2 Dokumen	49.999.815,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Lembah Neidam	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-ADMINISTRASI PEMERINTAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah SDM dan atau organisasi/lembaga pemerintah atau non pemerintah kemasyarakatan yang bergerak di bidang perempuan tingkat Kabupaten yang mendapatkan pembinaan</i>	-			15 Lembaga	149.999.416,00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi</i>				5 Lembaga	99.999.434,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan</i>				20 Orang	49.999.982,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Niwerawar	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	<i>Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan Komprehensif</i>	-			100 persen	99.999.599,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Pengembangan sistem kebijakan perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan berbasis kearifan lokal</i>	-			1 kebijakan	49.999.599,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Perempuan Korban Kekerasan	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0007	Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi</i>				1 Kebijakan	49.999.599,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Lembah Neidam	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-ADMINISTRASI PEMERINTAH	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Perempuan Korban Kekerasan		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya layanan yang komprehensif bagi perempuan korban kekerasan</i>	-			4 Layanan	50.000.000,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Perempuan korban kekerasan	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota</i>				2 orang	15.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-SOSIAL	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Perempuan korban kekerasan		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota</i>				2 Orang	10.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-SOSIAL	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Perempuan korban kekerasan		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota</i>				2 orang	10.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-SOSIAL	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Perempuan korban kekerasan		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota</i>				2 orang	15.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-SOSIAL	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Perempuan korban kekerasan		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tersedianya Data Gender dan Data Anak	-			2 Dokumen	49.999.683,00						-	0,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah data dukung terpilah penyusunan profil data gender dan anak yang terkumpul</i>	-			2 Dokumen	49.999.683,00			Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Data Gender dan Anak	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak</i>				20 Lembaga	49.999.683,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Lembah Neidam	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-ADMINISTRASI PEMERINTAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Data Gender dan Anak		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	<i>Persentase ketercapaian indikator penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak</i>	-			20 persen	149.999.764,00						-	0,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang memahami Pemenuhan Hak Anak dan menyelenggarakan</i>	-			3 Lembaga	99.999.878,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				20 Lembaga	49.999.939,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				20 Lembaga	49.999.939,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Lembah Neidam	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak dalam pemenuhan hak anak yang di kuatkan</i>	-			2 Lembaga	49.999.886,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Forum Anak Daerah Kabupaten Sarmi	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan</i>				1 Lembaga	49.999.886,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Forum Anak Daerah Kabupaten Sarmi		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	<i>Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif</i>	-			100 persen	99.999.719,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lembaga/lintas sektor yang melakukan pencegahan kekerasan terhadap Anak</i>	-			10 Lembaga	49.999.719,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Anak Korban Kekerasan	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota														
			<i>jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota</i>				1 Dokumen	49.999.719,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Anak Korban Kekerasan		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan</i>	-			100 persen	50.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Anak Korban Kekerasan	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota</i>				5 Orang	10.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Anak Korban Kekerasan		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota</i>				2 Orang	20.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Anak Korban Kekerasan		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota</i>				2 Orang	10.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Anak Korban Kekerasan		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota</i>				2 Orang	10.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Anak Korban Kekerasan		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
J U M L A H								4.226.176.308,00							0,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. SARMI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS KETAHANAN PANGAN						4.972.553.000,00								0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.972.553.000,00								0,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						4.972.553.000,00								0,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	-			100 Persentase	3.472.589.118,00						-		0,00	
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Dokumen administrasi keuangan yang lengkap, akurat, dan disampaikan tepat waktu</i>	-			1 Dokumen	2.721.434.257,00								0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				27 Orang/bulan	2.721.434.257,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	Pegawai			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu</i>	-			1 laporan	141.521.000,00								0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	21.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	Pegawai			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	5.600.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	Pegawai			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	114.921.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah barang milik daerah yang diterima dan tercatat dalam sistem aset</i>	-			2 Unit	52.500.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	52.500.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah laporan pemerintahan yang didukung oleh penyediaan jasa penunjang</i>	-			8 laporan	539.300.090,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	533.300.090,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah laporan pemeliharaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu</i>	-			1 laporan	17.833.771,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				21 Unit	17.833.771,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	<i>Meningkatnya difersifikasi dan ketahanan pangan masyarakat</i>	-			64.00 poin	999.965.882,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	<i>ketersediaan dan keterjangkauan pangan pokok serta menjaga stabilitas harga pangan di tingkat konsumen dan produsen di daerah kabupaten/kota.</i>	-			1 Kegiatan	999.965.882,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan	masyarakat	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			<i>Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia</i>				3 Laporan	499.966.250,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Keder Lama Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe Dua	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan	masyarakat		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota</i>				4 laporan	499.999.632,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan	masyarakat		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	<i>Presentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan</i>	-			60 Persentase	499.998.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Terselenggaranya kegiatan pengawasan keamanan pangan segar di wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku</i>	-			1 kegiatan	499.998.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan	masyarakat	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan	masyarakat		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi														
			<i>Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi</i>				1 Dokumen	199.998.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan	masyarakat		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
J U M L A H								4.972.553.000,00							0,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. SARMI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						9.692.055.336,00						9.906.402.964,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.692.055.336,00							9.906.402.964,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						9.692.055.336,00							9.906.402.964,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 persentase	7.443.953.457,00						-	7.530.987.214,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase penyelesaian dokumen sesuai dengan standar yang ditetapkan</i>	-			100 persentase	8.382.003,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN	-	8.383.440,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				20 Dokumen	1.371.825,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		1.372.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	7.010.178,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		7.010.640,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Presentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai standar yang berlaku</i>	-			100 persentase	2.913.043.544,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN	-	2.896.243.774,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				29 Orang/bulan	2.898.354.794,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		2.881.554.794,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	14.688.750,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		14.688.980,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Presentase penyediaan bahan logistik dan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>	-			100 persentase	420.287.910,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN	-	470.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	215.527.910,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	204.760.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Presentase jumlah laporan yang diselesaikan dari total target yang ditetapkan</i>	-			100 persentase	4.102.240.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	ASN	-	4.156.360.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	ASN		5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	ASN		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				9 Laporan	4.067.240.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	ASN		4.121.360.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara</i>	-			66,54 poin 84,37 poin	921.791.016,00						-	925.415.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Presntase penyelesaian dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi pelaksanaan Pengendalian emisi gas rumah kaca , Mitigasi dan Adaptasiperubahan iklim</i>	-			100 persentase	346.379.607,00			Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pertumbuh an Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkel anjutan Peningkata n masyarakat yang harmonis, tertib, toleran dan berbudaya	Masyarakat	-	350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i>				2 Dokumen	346.379.607,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Holmafen	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pertumbuh an Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkel anjutan Peningkata n masyarakat yang harmonis, tertib, toleran dan berbudaya	Masyarakat		350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Presentase pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</i>	-			100 persentase	575.411.409,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pertumbuh an Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkel anjutan Pemenuha n dan peme rataan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi, efisien dan handal	Masyarakat	-	575.415.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi														
			<i>luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota</i>				8,5 Ha	575.411.409,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Masep	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pertumbuh an Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkel anjutan Pemenuha n dan peme rataan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi, efisien dan handal	Masyarakat		575.415.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	<i>Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH</i>	-			100 persentase	40.000.000,00						-	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Presentase penyediaan Laporan berkala Hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/ kegiatan Lingkungan dan izin PPLH</i>	-			100 persentase	40.000.000,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Kelompok Usaha	-	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi</i>				5 Badan Usaha	40.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Kelompok Usaha		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<i>Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH</i>	-			100 persentase	208.586.966,00						-	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Penyelesaian dokumen dan SDM Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya</i>	-			100 persentase	208.586.966,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	Lembaga Kemasyarakatan	-	300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i>				1 Dokumen	110.196.768,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	Lembaga Kemasyarakatan		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat</i>				130 Orang	98.390.198,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan masyarakat yang harmonis, tertib, toleran dan berbudaya	Lembaga Kemasyarakatan		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana</i>	-			100 persentase	37.760.000,00						-	50.000.000,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	<i>Presentasi penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</i>	-			100 persentase	37.760.000,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN	-	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola</i>				5 Pengaduan	37.760.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	<i>Persentase Penanganan Sampah</i>	-			38 persentase	1.039.963.897,00						-	1.050.000.000,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	<i>Presentase pengurangan sampah</i>	-			100 persentase	1.039.963.897,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Akselerasi pelaksanaan program Otonomi Khusus yang akuntabel dan tepat sasaran	Pemerintah, Lembaga Masyarakat, Kelompok Usaha dan Masyarakat	-	1.050.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik</i>				170 Unit	839.963.897,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Akselerasi pelaksanaan program Otonomi Khusus yang akuntabel dan tepat sasaran	Pemerintah, Lembaga Masyarakat, Kelompok Usaha dan Masyarakat		850.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah														
			<i>Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik</i>				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Sewan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Pemenuhan dan pemerataan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi, efisien dan handal	Pemerintah, Lembaga Masyarakat, Kelompok Usaha dan Masyarakat		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
J U M L A H								9.692.055.336,00							9.906.402.964,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. SARMI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						5.267.447.069,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.267.447.069,00							0,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						5.267.447.069,00							0,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Terwujudnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang didukung oleh jasa penunjang yang memadai, serta terlayannya kebutuhan masyarakat dengan baik</i>	-			100 %	4.667.449.922,00						-	0,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia</i>	-			100 %	55.000.000,00			Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan Implementa si reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan Implementa si reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan Implementa si reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia</i>	-			100 %	3.352.448.288,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				30 Orang/bulan	3.337.448.288,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang disediakan</i>	-			100 %	274.900.815,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	12.736.455,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	112.194.360,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	49.950.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	100.020.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia</i>	-			100 %	60.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	60.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</i>	-			100 %	925.100.819,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	925.100.819,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	<i>Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak</i>	-			30 % 58 %	399.997.147,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	<i>Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan lengkap dan valid sesuai database kependudukan nasional</i>	-			98 %	299.999.091,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Akselerasi pelaksanaan program Otonomi Khusus yang akuntabel dan tepat sasaran	Masyarakat	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>				1 Laporan	299.999.091,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Akselerasi pelaksanaan program Otonomi Khusus yang akuntabel dan tepat sasaran	Masyarakat		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	<i>Persentase penduduk yang terdaftar dan memiliki identitas kependudukan valid dalam database kependudukan nasional</i>	-			99 %	99.998.056,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk</i>				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk</i>				1 Laporan	69.998.056,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-ADMINISTRASI PEMERINTAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Akselerasi pelaksanaan program Otonomi Khusus yang akuntabel dan tepat sasaran	Masyarakat		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	<i>Persentase Akta Kematian yang di terbitkan bagi yang melaporkan Persentase Akta Kelahiran yang di terbitkan bagi yang melaporkan</i>	-			100 % 92 %	200.000.000,00						-	0,00	
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	<i>Persentase penduduk yang peristiwa pentingnya tercatat dan memiliki dokumen pencatatan sipil sah sesuai peraturan perundang-undangan.</i>	-			98 %	200.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Akselerasi pelaksanaan program Otonomi Khusus yang akuntabel dan tepat sasaran	Masyarakat	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Tor Atas, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Pantai Barat, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Pantai Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-ADMINISTRASI PEMERINTAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Akselerasi pelaksanaan program Otonomi Khusus yang akuntabel dan tepat sasaran	Masyarakat		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
J U M L A H								5.267.447.069,00							0,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KAB. SARMI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG						5.241.761.826,00								0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.241.761.826,00								0,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						5.241.761.826,00								0,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor</i>	-			100 %	4.391.779.794,00						-		0,00	
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan</i>	-			33 Orang/Bulan	2.961.877.363,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN & DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN SARMI	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				33 Orang/bulan	2.961.877.363,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN & DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN SARMI			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-			50 LAPORAN	460.275.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN & DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN SARMI	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	460.275.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN & DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN SARMI		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			15 LAPORAN	969.627.431,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN & DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN SARMI	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				15 Laporan	969.627.431,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN & DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN SARMI		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	<i>Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya</i> <i>Persentase fasilitas tata kelola desa</i>	-			15,38 % 100 %	250.012.961,00						-	0,00	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota</i>	-			0 DOKUMEN	250.012.961,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	MASYARAKAT	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota</i>				0 Dokumen	250.012.961,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	MASYARAKAT		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
3.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat</i> <i>Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD)</i>	-			0.220551378 446115 % 94,72 %	474.970.839,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi dalam kegiatan kelembagaan masyarakat dan adat	-			2 Dokumen	474.970.839,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	MASYARAKAT	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				92 Lembaga	349.972.607,00	Kab. Sarmi, Sarmi Kota	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	MASYARAKAT		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				60 Dokumen	124.998.232,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	MASYARAKAT		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
4.	2.13.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA	-	-			-	124.998.232,00						-	0,00	
	2.13.06.3.02	Pemberdayaan Masyarakat Kampung dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah BUM Kampung/Bum Perkampungan Bersama yang sudah difasilitasi	-			60 BUM Kampung/BumM PUNG	124.998.232,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	MASYARAKAT/LEMBAGA	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.06.3.02.0001	Fasilitasi pengembangan BUM Kampung/BUM Kampung bersama di Kampung/Perkampungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah BUM Kampung/Bum Perkampungan Bersama yang sudah difasilitasi</i>				60 BUM Kam pung/Bum P erkampunga n	124.998.232,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-PEMBERD AYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	MASYARAKAT/LEM BAGA		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
J U M L A H								5.241.761.826,00							0,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SARMI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						4.982.179.616,00							4.982.140.097,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.982.179.616,00							4.982.140.097,00	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						4.982.179.616,00							4.982.140.097,00	
1.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor</i>	-			100 Persen	3.511.714.616,00						-	3.511.675.097,00	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Perubahan Dokumen RKA-SKPD</i>	-			2 Dokumen	27.791.368,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	29.408.209,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.853.280,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		1.853.280,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	2.647.500,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		2.677.158,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	5.500.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		7.010.640,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	12.862.588,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		12.879.988,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				18 Orang/bulan	2.103.555.097,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		2.029.115.097,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	6.786.170,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		6.787.056,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			100 Persen	96.100.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	96.100.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				40 Paket	56.100.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		56.100.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				1 Orang	40.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Terpenuhiya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			100 Persen	80.160.111,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	61.760.111,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	21.360.111,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		21.360.111,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	5.400.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		5.400.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangang disabilitas.	-	ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		3.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangang disabilitas.	-	ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1.184.321.870,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	ASN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		1.275.504.624,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (TFR) Angka kelahiran remaja umur 15 - 19 tahun (ASFR)	-			48450 Orang 9448 Orang	180.400.000,00						-	180.400.000,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	<i>Dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal</i>	-			2 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Anak Sekolah	-	100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga</i>				1 Laporan	66.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Masyarakat		66.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB														
			<i>Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB</i>				1 Dokumen	14.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	Masyarakat		14.400.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	<i>Angka kelahitran remaja umur 15 - 19 tahun (ASFR) Angka Kelahitan Total (TFR)</i>	-			9448 Orang 48450 Orang	387.165.000,00						-	387.165.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	<i>Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</i>	-			1 Dokumen	190.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Masyarakat	-	190.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</i>				10 Laporan	150.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</i>				5 Organisasi	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Masyarakat		40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi</i>	-			12 Laporan	137.165.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Masyarakat	-	137.165.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>				11 Laporan	10.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Masyarakat		10.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>				61 Orang	26.365.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Masyarakat		26.365.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan</i>				50 Orang	100.000.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-ADMINISTRASI PEMERINTAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	<i>Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan</i>	-			21 Kampung	60.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Masyarakat	-	60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah DASHAT di Kampung KB</i>				10 Unit	60.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Masyarakat		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	<i>Angka Kelahiran Total (TFR) Angka kelahiran remaja umur 15 - 19 tahun (ASFR)</i>	-			48450 Orang 9448 Orang	902.900.000,00						-	902.900.000,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<i>Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	-			6 Organisasi	282.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Organisasi Masyarakat	-	282.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)</i>				50 Orang	200.000.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-ADMINISTRASI PEMERINTAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Organisasi Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			<i>Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan</i>				6 Kelompok	82.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Organisasi Masyarakat		82.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	620.400.000,00			-	-	-	-	620.400.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan</i>				1 laporan	620.400.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		620.400.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
J U M L A H								4.982.179.616,00							4.982.140.097,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERHUBUNGAN KAB. SARMI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERHUBUNGAN						6.158.125.903,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.158.125.903,00							0,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						6.158.125.903,00							0,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Terpenuhinya pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor</i>	-			100 %	5.502.168.685,00						-	0,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah yang disusun tepat waktu</i>	-			4 Dokumen	10.074.461,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN KAB.SARMI	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				14 Dokumen	957.750,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN KAB.SARMI		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun</i>				5 Dokumen	9.116.711,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN KAB.SARMI		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan realisasi keuangan yang disusun tepat waktu	-			2 DOKUMEN /LAPORAN	3.194.947.869,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN KAB.SARMI	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	3.151.773.369,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN KAB.SARMI		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				15 Laporan	43.174.500,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN KAB.SARMI		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun tepat waktu	-			2 DOKUMEN /LAPPORAN	144.869.680,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN KAB.SARMI	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				12 Laporan	144.869.680,00	Kab. Sarmi, Mararena	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN KAB.SARMI		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan administrasi umum (ATK, perjalanan dinas, rapat, kendaraan dinas, dsb.) yang difasilitasi	-			2 KEGIATAN	350.118.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN KAB.SARMI	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	139.990.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN KAB.SARMI		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				20 Laporan	210.128.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN KAB.SARMI		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	144.148.675,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	144.148.675,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.658.010.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	1.643.010.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Konektivitas Darat	-			100 %	655.957.218,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	<i>Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal</i>	-			22,6 %	514.989.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	MASYARAKAT	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				38 Unit	499.997.675,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota, Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-INFRASTRUKTUR	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	MASYARAKAT		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>				30 Unit	14.992.125,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	MASYARAKAT		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah petugas yang mengikuti pelatihan kompetensi pengujian kendaraan bermotor</i>	-			2 orang	54.760.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	ASN DINAS PERHUBUNGAN KAB.SARMI	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				2 Orang	54.760.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	ASN DINAS PERHUBUNGAN KAB.SARMI		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalulintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi</i>	-			4 %	86.207.418,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban	MASYARAKAT	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi</i>				6 Laporan	86.207.418,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkata n Keamanan dan Ketertiban	MASYARAKAT		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
J U M L A H								6.158.125.903,00							0,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. SARMI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
											NASIONAL					DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						4.309.485.131,00								0,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.309.485.131,00								0,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						4.102.935.615,00								0,00		
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang didukung oleh Jasa Penunjang yang memadai serta terlayannya Kebutuhan Masyarakat dengan Baik</i>	-			100 %	4.082.965.615,00						-		0,00		
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	-			35 Orang/bulan	2.481.649.570,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	ASN Dinas KOMINFO Kab. Sarmi	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				350 Orang/bulan	2.481.649.570,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	ASN Dinas KOMINFO Kab. Sarmi			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	-			70 Stel	34.042.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	ASN Dinas KOMINFO Kab. Sarmi	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	34.042.500,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	ASN Dinas KOMINFO Kab. Sarmi		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	-			5 Paket	188.580.890,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	ASN Dinas KOMINFO Kab. Sarmi	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	85.609.890,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	ASN Dinas KOMINFO Kab. Sarmi		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	15.975.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	ASN Dinas KOMINFO Kab. Sarmi		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	ASN Dinas KOMINFO Kab. Sarmi		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	81.996.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	ASN Dinas KOMINFO Kab. Sarmi		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	-			3 Laporan	1.378.692.655,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	ASN Dinas KOMINFO Kab. Sarmi	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	4.500.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	ASN Dinas KOMINFO Kab. Sarmi		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	ASN Dinas KOMINFO Kab. Sarmi		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1.314.192.655,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	ASN Dinas KOMINFO Kab. Sarmi		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	<i>Presentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)</i>	-			10 %	19.970.000,00						-	0,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Konten Informasi Publik dihasilkan</i>	-			30 Konten	19.970.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	Masyarakat	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Konten Informasi Publik</i>				30 Konten	19.970.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pembangu nan Sarana dan Prasarana I nfrastruktur dan Konekti vitas Wilayah	Masyarakat		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						79.998.738,00							0,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	<i>Presentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)</i>	-			100 %	79.998.738,00						-	0,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan</i>	-			10 %	79.998.738,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pembangu nan Sarana dan Prasarana I nfrastruktur dan Konekti vitas Wilayah Implementa si reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Masyarakat	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik</i>				79 Orang	79.998.738,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pembangu nan Sarana dan Prasarana I nfrastruktur dan Konekti vitas Wilayah Implementa si reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Masyarakat		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						126.550.778,00							0,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	<i>Presentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)</i>	-			undefined undefined	126.550.778,00						-	0,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan</i>	-			1 Dokumen	126.550.778,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pembangu nan Sarana dan Prasarana I nfrastruktur dan Konekti vitas Wilayah	Masyarakat	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian</i>				1 Dokumen	126.550.778,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pembangu nan Sarana dan Prasarana I nfrastruktur dan Konekti vitas Wilayah	Masyarakat		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JUMLAH															0,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KAB. SARMI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM						6.973.141.536,00							0,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.768.765.161,00							0,00		
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						3.768.765.161,00							0,00		
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>presentase terpenuhinya pelayanan administrasi dan sarana prasarana kantor</i>	-				100 persen						-	0,00		
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, pengandaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	-				5 Dokumen	42.110.672,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	Aparatur Sipil Negara (ASN)	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>					1 Dokumen	9.848.995,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	Aparatur Sipil Negara (ASN)		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>					1 Dokumen	2.164.782,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	Aparatur Sipil Negara (ASN)		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	11.206.895,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara (ASN)		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	12.950.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara (ASN)		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	5.940.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara (ASN)		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Dokumen keuangan perangkat daerah disusun, dicatat, dan dilaporkan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.</i>	-			1 Laporan	1.725.705.359,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara (ASN)	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				24 Orang/bulan	1.725.705.359,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara (ASN)		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	99.840.835,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				35 Paket	49.980.835,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				2 Orang	49.860.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	-			2 Paket 2 Paket 2 Paket 1 Laporan 1 Paket	389.411.764,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara (ASN)	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	19.536.450,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara (ASN)		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	90.054.624,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara (ASN)		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	50.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara (ASN)		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				5 Paket	29.968.690,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara (ASN)		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				5 Laporan	199.852.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara (ASN)		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	-			8 Laporan 1 Laporan 2 Laporan 1 Laporan	892.697.781,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara (ASN)	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				5 Laporan	19.995.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara (ASN)		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				0 Laporan	29.955.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara (ASN)		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Laporan	99.870.041,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara (ASN)		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				8 Laporan	742.877.740,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara (ASN)		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
2.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	<i>Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</i>	-			50 persen	34.962.000,00						-	0,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah koperasi yang diperiksa sesuai jadwal</i>	-			43 Unit	34.962.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</i>				43 Unit Usaha	34.962.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
3.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	<i>Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</i>	-			4,50 persen	148.999.500,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Peserta pendidikan dan latihan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman tentang prinsip, manajemen, dan administrasi koperasi sesuai kebutuhan wilayah</i>	-			20 Orang	148.999.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>				100 Orang	148.999.500,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
4.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	<i>Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal</i>	-			2,19 persen	149.999.250,00						-	0,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	<i>Jumlah usaha mikro yang terdata dalam database resmi</i>	-			5 Usaha	149.999.250,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro</i>				5 Unit Usaha	149.999.250,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
5.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	<i>Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor</i>	-			2,15 persen	285.038.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang mengikuti pendampingan dan bimbingan teknis	-			6 Unit Usaha	285.038.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				1 Unit Usaha	35.038.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				5 Unit Usaha	250.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						3.204.376.375,00							0,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						3.145.379.375,00							0,00	
1.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana Perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	-			5,46 persen	951.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	<i>Sarana distribusi perdagangan tersedia, terbangun, terkelola, dan berfungsi sesuai standar teknis dan kebutuhan pengguna.</i>	-			100 Unit	951.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan pemerataan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi, efisien dan handal	Masyarakat	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			<i>Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan</i>				100 Unit	951.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Bonggo, Anus	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan pemerataan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi, efisien dan handal	Masyarakat		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
2.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	<i>Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</i>	-			5,10 persen	2.128.820.000,00						-	0,00	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Tersedianya data, distribusi, dan pemantauan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting secara tepat waktu dan akurat.</i>	-			4 Laporan	2.000.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Akselerasi pelaksanaan program Otonomi Khusus yang akuntabel dan tepat sasaran	Masyarakat	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			<i>Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</i>				4 Laporan	2.000.000.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Karfasia Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Akselerasi pelaksanaan program Otonomi Khusus yang akuntabel dan tepat sasaran	Masyarakat		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya informasi harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang akurat dan terkini, serta tindakan pengendalian yang efektif.</i>	-			2 Laporan	128.820.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan pemerataan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi, efisien dan handal	Masyarakat	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	53.040.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Bonggo, Armopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan pemerataan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi, efisien dan handal	Masyarakat		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				2 Laporan	75.780.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena Kab. Sarmi, Bonggo, Armopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
3.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	<i>Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen</i>	-			50 persen	65.559.375,00						-	0,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	<i>Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang</i>	-			50 Unit	65.559.375,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang</i>				50 Unit	65.559.375,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Bonggo, Armopa Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						58.997.000,00							0,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	<i>Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri</i>	-			0,73 Dokumen	58.997.000,00						-	0,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	<i>Dokumen rencana pembangunan industri kabupaten/kota yang tersusun dengan baik dan telah dievaluasi untuk dijadikan pedoman pembangunan industri di daerah.</i>	-			1 Dokumen	58.997.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>				1 Dokumen	58.997.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembeantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	J U M L A H								6.973.141.536,00						0,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. SARMI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						4.858.452.874,00								24.990.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.858.452.874,00								24.990.000,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						4.858.452.874,00								24.990.000,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja</i>	-			100 %	4.308.346.029,00						-	24.990.000,00		
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan DPMPSTP Yang Disusun Dan Disahkan Tepat Waktu</i>	-			2 Dokumen	2.344.775,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	957.375,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.387.400,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Anggaran Yang Terealisasi Sesuai Dengan Rencana Anggaran (RAS)</i>	-			100 %	3.241.209.338,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				32 Orang/bulan	3.235.286.213,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				4 Laporan	5.923.125,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pegawai Yang Mendapatkan Pelatihan/Pengembangan Kompetensi Sesuai Dengan Rencana Pengembangan Karir</i>	-			100 %	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN	-	24.990.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				49 Paket	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		24.990.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Bahan Logistik Yang Dikelola dan Didistribusikan</i>	-			5126 Liter	76.890.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	76.890.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Penyedia Jasa Yang Disusun</i>	-			7 Laporan	953.902.618,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	20.250.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	930.652.618,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Yang Mengalami Kerusakan</i>	-			1 Unit	33.999.298,00			-	-	ASN	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			-				-	33.999.298,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	<i>Realisasi Total terhadap target investasi</i>	-			100 %	99.998.901,00						-	0,00	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	<i>Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Yang Telah Disusun</i>	-			1 Dokumen	99.998.901,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdaya saing	ASN	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	99.998.901,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdayasaing	ASN		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang di hadapi Pelaku Usaha dalam membuka usaha</i>	-			100 %	99.998.000,00						-	0,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perusahaan Penanaman Modal Yang Diawasi/Dikunjungi</i>	-			15 Kegiatan Usaha	99.998.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdayasaing	Pelaku usaha	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>				15 Kegiatan Usaha	99.998.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdayasaing	Pelaku usaha		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal</i>	-			100 %	350.109.944,00						-	0,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Perizinan dan Non-Perizinan Yang Terintegrasi</i>	-			1 Dokumen	350.109.944,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Pertumbuh an Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkel anjutan Peningkata n kapasitas kinerja pere konomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdaya saing	Pelaku usaha	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>				1 Dokumen	350.109.944,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Pertumbuh an Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkel anjutan Peningkata n kapasitas kinerja pere konomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdaya saing	Pelaku usaha		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			J U M L A H					4.858.452.874,00							24.990.000,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. SARMI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA						4.109.355.345,00						0,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.109.355.345,00							0,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						4.109.355.345,00							0,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Presentase Laporan Capaian Kinerja</i>	-			100 Persen	2.518.390.813,00						-	0,00	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Prestentase Jumlah Capaian Laporan Kinerja Terlaksana</i>	-			100 Persen	25.073.769,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	5.083.769,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	9.990.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun</i>				0 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia</i>	-			100 Persen	1.799.882.999,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				19 Orang/bulan	1.799.882.999,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan</i>	-			100 Persen	32.257.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				29 Paket	32.257.500,00	Kab. Sarmi, Sarmi Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase administrasi umum perangkat daerah yang disediakan</i>	-			100 Persen	128.697.655,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				0 Paket	27.384.655,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	101.313.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 Persen	352.580.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				0 Laporan	15.100.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				0 Laporan	337.480.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	179.898.890,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				14 Unit	179.898.890,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirausaha Pemuda	-			0,31 Persen	722.119.121,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda kader yang terlibat aktif dalam organisasi kepemudaan atau kegiatan masyarakat Jumlah wirausaha muda pemula yang difasilitasi dalam pelatihan atau pendampingan Persentase Wirausaha Pemuda	-			3 Organisasi 20 Kelompok 100 Persen	722.119.121,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pemuda	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				30 Orang	516.151.121,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Mararena Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sewan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sarmi Kota Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kiren Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Sarmi, Sawar	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pemuda		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				10 Orang	205.968.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pemuda		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	<i>Persentase Atlet Berprestasi di Tingkat Provinsi/Nasional</i>	-			8,3 Persen	868.845.411,00						-	0,00	
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentas terlaksananya dalam peningkatan pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</i>	-			100 Persen	283.845.411,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	Pemuda	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota</i>				1 Kegiatan	283.845.411,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-KEPEMUD AAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	Pemuda		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	<i>Persentase Peningkatan Atlet berprestasi di tingkat Nasional</i>	-			100 Persen	585.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pemuda	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	585.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pemuda		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
J U M L A H								4.109.355.345,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	30.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan</i>	-			1 Laporan	483.263.760,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	24.012.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu- nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	ASN		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	459.251.760,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu- nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	ASN		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			1 Paket	49.318.497,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	19.927.677,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	29.390.820,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	<i>Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan</i>	-			40 Perpustakaan 100 Persen	899.921.108,00						-	0,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dan memenuhi standar nasional perpustakaan</i>	-			65 Perpustakaan	699.922.059,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	Sekolah	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan</i>				30 Perpustakaan	154.992.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	Sekolah		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya</i>				1 Perpustakaan	199.979.229,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sekolah		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>				50 Orang	49.999.265,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Pantai Barat, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Pantai Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	Sekolah		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan														
			<i>Jumlah Data dan informasi Perpustakaan</i>				1 Dokumen	49.993.115,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Pantai Barat, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Pantai Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sekolah		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota</i>				165 Orang	199.999.049,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif	Sekolah dan Masyarakat		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						332.154.089,00							0,00	
1.	2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Capaian Realisasi anggaran perangkat daerah</i>	-			100 Persen	96.851.125,00						-	0,00	
	2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	-			1 Dokumen	919.125,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	40.656.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			1 Paket	20.276.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	20.276.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan</i>	-			1 Laporan	15.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	<i>Tingkat Ketersediaan Arsip</i>	-			60 Persen	235.302.964,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	<i>Tingkat Ketersediaan Arsip</i>	-			1 Laporan	89.184.908,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0010	Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis</i>				32 Instansi	89.184.908,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya simpul jaringan kearsipan yang terintegrasi dengan Pusat Jaringan Nasional	-			1 Laporan	146.118.056,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	146.118.056,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
J U M L A H															0,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERIKANAN KAB. SARMI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERIKANAN						7.225.423.946,00							0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						7.225.423.946,00							0,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						7.225.423.946,00							0,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Presentase Terpenuhiya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor</i>	-			100 %	5.325.589.711,00						-	0,00	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Realisasi target perencanaan, pengangan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	-			100 %	8.305.125,00			-	Pertumbuh an Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkel anjutan	ASN	-	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	8.305.125,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pertumbuh an Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkel anjutan	ASN		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase penyelesaian laporan keuangan, tingkat ketepatan waktu penyaluran gaji dan tunjangan</i>	-			100 %	3.797.410.511,00			-	Pertumbuh an Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkel anjutan	ASN	-	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				52 Orang/bulan	3.777.905.386,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pertumbuh an Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkel anjutan	ASN		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	9.499.375,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan	ASN		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	10.005.750,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan	ASN		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Realisasi penyelesaian inventarisasi dan pembukuan aset, serta terlaksananya pemanfaatan dan pengamanan BMD yang efektif</i>	-			100 %	15.517.875,00			-	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan	ASN	-	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	15.517.875,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan	ASN		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Realisasi jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, persentase penyelesaian dokumen kepegawaian, tersedianya data dan informasi kepegawaian yang akurat</i>	-			100 %	150.000.000,00			-	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdaya saing	ASN	-	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				14 Orang	150.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdaya saing	ASN		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Capaian kebutuhan logistik dan administrasi kantor</i>	-			100 %	228.821.000,00			-	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan	ASN	-	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	22.500.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan	ASN		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	10.013.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan	ASN		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	196.308.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan	ASN		0,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase laporan penyediaan jasa penunjang yang efektif dan efisien</i>	-			100 %	1.087.935.200,00			-	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan	ASN	-	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	21.240.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan	ASN		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	29.190.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan	ASN		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	1.037.505.200,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan	ASN		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase jumlah barang milik daerah yang dipelihara</i>	-			100 %	37.600.000,00			-	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan	ASN	-	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				1 Unit	37.600.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan	ASN		0,00	DINAS PERIKANAN
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	<i>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap</i>	-			17.487 Ton	699.995.227,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Realisasi Target Pengelolaan Penangkapan Ikan</i>	-			100 %	599.996.227,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdayasaing	Kelompok Nelayan	-	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdayasaing	Kelompok Nelayan		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap														
			<i>Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia</i>				20 Unit	499.996.227,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena Kab. Sarmi, Sarmi, Sawar Kab. Sarmi, Bonggo, Tarontha Srum Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Holmafen Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Wakde	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdayasaing	Kelompok Nelayan		0,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Di Kabupaten Sarmi</i>	-			100 %	99.999.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdayasaing	Kelompok Nelayan	-	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.04.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT														
			<i>Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	99.999.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdayasaing	Kelompok Nelayan		0,00	DINAS PERIKANAN
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	<i>Jumlah produksi perikanan Budidaya</i>	-			432 Ton	699.883.008,00						-	0,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	<i>Realisasi target pembudidaya ikan yang diberdayakan</i>	-			100 %	119.886.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdayasaing	Kelompok Pembudidaya Ikan	-	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</i>				5 Kelompok	119.886.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdayasaing	Kelompok Pembudidaya Ikan		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	<i>Target realisasi peningkatan sarana dan prasarana pembudidaya ikan</i>	-			100 %	579.997.008,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdayasaing	Kelompok Pembudidaya Ikan	-	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				3 Unit	579.997.008,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena Kab. Sarmi, Pantai Barat, Webro Kab. Sarmi, Bonggo, Tetom Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Wakde	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdayasaing	Kelompok Pembudidaya Ikan		0,00	DINAS PERIKANAN
4.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	<i>Angka Konsumsi Ikan</i>	-			54 kg per kapita	499.956.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.3.06	Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	<i>Realisasi jumlah peningkatan angka konsumsi ikan</i>	-			100 %	499.956.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdaya saing	Masyarakat	-	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.3.06.0001	Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil														
			<i>Jumlah peningkatan angka konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil</i>				200 kg/kap/tahun	499.956.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Lembah Neidam Kab. Sarmi, Sarmi, Sawar Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Barat, Webro Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Sewan	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdaya saing	Masyarakat		0,00	DINAS PERIKANAN
J U M L A H								7.225.423.946,00							0,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PARIWISATA KAB. SARMI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PARIWISATA						5.330.872.159,00								1.630.552.021,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						5.330.872.159,00							1.630.552.021,00		
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						5.330.872.159,00							1.630.552.021,00		
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.830.900.307,00						-	130.552.021,00		
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Teknis Perencanaan/Evaluasi yang Dilaksanakan</i>	-			4 Dokumen	18.193.160,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	-	0,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	6.821.740,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.500.960,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	DINAS PARIWISATA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	2.177.750,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	7.692.710,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan yang dibuat dan disampaikan</i>	-			100 %	2.611.105.440,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				27 Orang/bulan	2.594.953.315,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	16.152.125,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			100 %	68.467.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				51 Paket	68.467.500,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Laporan administrasi umum yang tersusun</i>	-			100 %	191.832.751,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	-	80.552.021,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	9.906.751,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	80.550.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdayasaing	ASN		80.552.021,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	101.376.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah perangkat TIK yang terpasang dan berfungsi</i>	-			100 %	49.183.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	-	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	49.183.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah petugas kebersihan yang diadakan Jumlah kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan Jumlah tenaga pendukung yang disediakan Jumlah paket konsumsi yang disiapkan</i>	-			100 % 100 % 100 % 100 %	892.118.456,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	9.990.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	14.980.500,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				5 Laporan	867.147.956,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	DINAS PARIWISATA
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	<i>Presentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan</i>	-			40 %	999.972.253,00						-	1.000.000.000,00	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	<i>Jumlah daya tarik wisata yang dikelola/dibina Jumlah pelaku wisata yang mengikuti pelatihan/pendampingan</i>	-			15 Unit 40 Orang	999.972.253,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	-	1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)</i>				2 Lokasi	499.972.928,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Ebram	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan</i>				40 Orang	499.999.325,00	Kab. Sarmi, Mararena	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdaya saing	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-			-	499.999.599,00						-	500.000.000,00	
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	<i>Banyaknya pelaku ekonomi kreatif yang ikut serta dalam program peningkatan kapasitas</i>	-			40 Orang	499.999.599,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdaya saing	Masyarakat	-	500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif</i>				40 Orang	499.999.599,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Lembah Neidam	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdaya saing	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
J U M L A H								5.330.872.159,00							1.630.552.021,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERTANIAN KAB. SARMI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PERTANIAN						18.838.579.202,00								22.402.058.882,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						18.838.579.202,00								22.402.058.882,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						18.838.579.202,00								22.402.058.882,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Presentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor</i>	-			100 %	9.988.724.532,00						-	12.667.105.632,00		
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang telah disahkan dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah tingkat atas.</i>	-			1 Dokumen	27.390.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN	-	1.709.788.080,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	4.950.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		5.445.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	7.062.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		7.768.200,00	DINAS PERTANIAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				4 Dokumen	15.378.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		1.696.574.880,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah tersusun dan disahkan secara tepat waktu.</i>	-			1 Dokumen	7.868.258.683,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN	-	8.653.500.551,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				85 Orang/bulan	7.835.618.683,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		8.619.180.551,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				2 Dokumen	32.640.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		34.320.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Ketersediaan sarana, prasarana, dan layanan umum kantor sesuai Standar Kebutuhan.</i>	-			100 %	502.344.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN	-	552.900.967,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	32.325.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		35.900.967,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	470.019.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		517.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya secara optimal dan berkelanjutan layanan administrasi perkantoran, komunikasi, kebersihan, dan keamanan yang mendukung kelancaran seluruh fungsi dan tugas Perangkat Daerah.</i>	-			100 %	1.590.731.849,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN	-	1.750.916.034,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	24.990.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		27.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	14.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		16.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	1.551.741.849,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		1.706.916.034,00	DINAS PERTANIAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	<i>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Meningkatnya Populasi Tanaman Hortikultura Buah dan Perkebunan Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan</i>	-			120 Ton 100 % 735 Ekor	5.057.049.000,00						-	5.562.778.650,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	<i>Dokumen Laporan Hasil Pengawasan dan Evaluasi Penggunaan Sarana Pertanian</i>	-			4 Laporan	3.442.965.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdayasaing	Kelompok Tani dan Peternak Orang Asli Papua (OAP)	-	3.787.263.700,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0003	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak</i>				1775 Ton	1.216.426.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur, Ansudu Dua Kab. Sarmi, Bonggo, Rotea Kab. Sarmi, Bonggo, Maweswares Kab. Sarmi, Bonggo, Anus Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Tanjung Batu Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Gwinjaya Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Tamar Sari Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawes Mukti	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdayasaing	Kelompok Tani dan Peternak Orang Asli Papua (OAP)		1.338.068.600,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0008	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang														
			<i>Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang</i>				3125 Batang	449.080.000,00	Kab. Sarmi, Tor Atas, Kanderjan	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdayasaing	Kelompok Tani dan Peternak Orang Asli Papua (OAP)		493.988.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0009	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak</i>				1200 Batang	850.254.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Karfasia Kab. Sarmi, Pantai Barat, Webro Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBE RDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdaya saing	Kelompok Tani dan Peternak Orang Asli Papua (OAP)		935.281.600,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0017	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan														
			<i>Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan</i>				3300 Anakan	927.205.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Waskey Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Holmafen Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Sewan Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Finyabor Dua	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBE RDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdaya saing	Kelompok Tani dan Peternak Orang Asli Papua (OAP)		1.019.925.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah (Unit) Usaha Bahan Pakan Asal Hewan yang telah bersertifikat/teruji mutu dan didistribusikan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota</i>	-			5 Unit	240.918.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdaya saing	Usaha Bahan Pakan Asal Hewan	-	265.009.800,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil</i>				2 Laporan	240.918.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdayasaing	Usaha Bahan Pakan Asal Hewan		265.009.800,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	<i>Persentase Jumlah ekor benih/bibit ternak berkualitas unggul dan sehat yang telah berhasil didistribusikan kepada kelompok penerima manfaat sesuai dengan rencana kebutuhan dan spesifikasi teknis.</i>	-			100 %	1.373.166.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdayasaing	Petrenak dan Kelompok Ternak Orang Asli Papua (OAP)	-	1.510.505.150,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
			<i>Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain</i>				60 Ekor	1.050.530.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Webro Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Holmafen	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdayasaing	Petrenak dan Kelompok Ternak Orang Asli Papua (OAP)		1.155.605.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain</i>				200 Dosis	322.636.000,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Rimsersari Kab. Sarmi, Bonggo, Bebon Jaya Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Gwinjaya Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Tamar Sari Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawes Mukti	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBE RDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdaya saing	Petrenak dan Kelompok Ternak Orang Asli Papua (OAP)		354.900.150,00	DINAS PERTANIAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	<i>Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B</i>	-			10 Ha	929.843.000,00						-	1.022.836.100,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	<i>Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan</i>	-			50 Ha 2 Unit	929.843.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdaya saing	Petani dan Kelompok Tani Orang Asli Papua (OAP)	-	1.022.836.100,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian														
			<i>Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan</i>				50 Ha	458.293.000,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Tetom	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBE RDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdaya saing	Petani dan Kelompok Tani Orang Asli Papua (OAP)		504.131.100,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0007	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan</i>				2 Unit	471.550.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Finyabor Dua	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdayasaing	Petani dan Kelompok Tani Orang Asli Papua (OAP)		518.705.000,00	DINAS PERTANIAN
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	<i>Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)</i>	-			100 % 100 persen	530.818.000,00						-	583.972.400,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali</i>	-			1 Laporan	530.818.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdayasaing	Peternak dan Kelompok Peternak Orang Asli Papua (OAP)	-	583.972.400,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali</i>				1 Laporan	530.818.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur, Sunum Kab. Sarmi, Pantai Timur, Ansudu Kab. Sarmi, Bonggo, Rimsersari Kab. Sarmi, Bonggo, Tetom Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Finyabor Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Tamar Sari Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawes Mukti	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBE RDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdaya saing	Peternak dan Kelompok Peternak Orang Asli Papua (OAP)		583.972.400,00	DINAS PERTANIAN
5.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	<i>Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian Bencana Pertanian Persentase Penanganan Bencana Pertanian</i>	-			100 % 100 persen	297.165.000,00						-	326.881.500,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan</i>	-			25 Ha	297.165.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdaya saing	Petani dan Kelompok Tani Orang Asli Papua (OAP)	-	326.881.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan</i>				25 Ha	297.165.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Binyer	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdayasaing	Petani dan Kelompok Tani Orang Asli Papua (OAP)		326.881.500,00	DINAS PERTANIAN
6.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	<i>Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi</i>	-			100 % 100 persen	2.034.979.670,00						-	2.238.484.600,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi</i>	-			9 Unit 2 Unit	2.034.979.670,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Petani dan Kelompok Tani Orang Asli Papua (OAP)	-	2.238.484.600,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
			<i>Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				6 Unit	60.000.000,00	Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Bonggo, Maweswares Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Sewan Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Dua Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Tamar Sari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Petani dan Kelompok Tani Orang Asli Papua (OAP)		66.000.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian															
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian</i>				9 Unit	1.424.263.250,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur, Ansudu Dua Kab. Sarmi, Bonggo, Rotea Kab. Sarmi, Bonggo, Tetom Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBE RDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdaya saing	Petani dan Kelompok Tani Orang Asli Papua (OAP)		1.566.689.575,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota															
			<i>Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi</i>				2 Unit	550.716.420,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Sewan	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBE RDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdaya saing	Petani dan Kelompok Tani Orang Asli Papua (OAP)		605.795.025,00	DINAS PERTANIAN	
J U M L A H								18.838.579.202,00								22.402.058.882,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DAERAH KAB. SARMI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		SEKRETARIAT DAERAH						73.684.863.632,00								0,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						73.684.863.632,00							0,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						73.684.863.632,00							0,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Ketersediaan Laporan Capain Kinerja</i>	-			100 Persen	68.219.940.046,00						-	0,00		
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia</i>	-			100 Persen	6.629.375,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	2.666.875,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	3.962.500,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia</i>	-			100 Persen	17.441.896.662,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				12 Orang/bulan	17.395.555.326,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	29.377.192,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				2 Laporan	16.964.144,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang di sediakan</i>	-			100 Persen	303.218.656,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				150 Orang	303.218.656,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase administrasi umum perangkat daerah yang disediakan</i>	-			100 Persen	5.449.684.270,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	1.380.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	70.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	1.500.000.270,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	2.499.684.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	-			100 Persen	16.861.650.260,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	49.995.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	1.430.845.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	3.008.311.260,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12.372.499.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang tersedia</i>	-			100 Persen	550.039.176,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				12 Unit	200.716.376,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				20 Unit	150.060.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	199.262.800,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<i>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia</i>	-			100 Persen	14.879.101.604,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				12 Orang/Bulan	377.858.604,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				8 Orang/Bulan	14.501.243.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	<i>Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang tersedia</i>	-			100 Persen	9.227.660.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</i>				10 Paket	3.850.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				10 Paket	3.350.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</i>				10 Paket	2.027.660.800,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	<i>Persentase Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang tersedia</i>	-			100 Persen	400.006.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</i>				1 Dokumen	100.006.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	<i>Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang tersedia</i>	-			100 Persen	3.100.053.243,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan</i>				1 Laporan	249.995.583,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</i>				12 Laporan	2.700.060.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
			<i>Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan</i>				1 Laporan	149.997.660,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	-			100 Persen	5.064.963.586,00						-	0,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	<i>Persentase ketersediaan Dokumen Administrasi Tata pemerintahan</i>	-			100 Persen	399.963.586,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan</i>				1 Dokumen	99.996.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</i>				1 Dokumen	100.000.392,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Pemenuhan dan pemerataan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi, efisien dan handal	ASN		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</i>				1 Dokumen	199.967.194,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Akselerasi pelaksanaan program Otonomi Khusus yang akuntabel dan tepat sasaran	ASN		0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	<i>Persentase Ketersediaan Dokumen Peraturan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	-			100 Persen	4.265.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas</i>				1 Dokumen	4.265.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	<i>Persentase ketersediaan Dokumen fasilitasi dan koordinasi hukum</i>	-			100 Persen	400.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			<i>Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			<i>Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum</i>				1 Kasus	200.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<i>Meningkatnya Kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat</i>	-			100 Persen	399.960.000,00						-	0,00	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	<i>Persentase ketersediaan dokumen pengadaan barang dan jasa</i>	-			100 Persen	399.960.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik</i>				1 Dokumen	99.960.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>				70 Orang	100.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
J U M L A H								73.684.863.632,00							0,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DPRD KAB. SARMI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		SEKRETARIAT DPRD						52.069.414.548,00								0,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						52.069.414.548,00							0,00		
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						52.069.414.548,00							0,00		
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Ketersediaan Laporan Capain Kinerja</i>	-			100 Persen	27.282.498.675,00						-	0,00		
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia</i>	-			100 Persen	57.976.165,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	15.082.720,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	3.430.645,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DPRD	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	4.948.250,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	12.365.580,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	12.732.970,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	9.416.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia</i>	-			100 Persen	4.317.881.051,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				57 Orang/bulan	4.255.330.923,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	39.656.128,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				3 Laporan	22.894.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia</i>	-			100 Persen	240.974.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				20 Orang	240.974.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase administrasi umum perangkat daerah yang disediakan</i>	-			100 Persen	1.834.180.401,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	15.395.625,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	516.082.985,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	34.895.311,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	528.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	95.941.480,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	643.865.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	-			100 Persen	64.954.214,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Unit	64.954.214,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	-			100 Persen	4.119.581.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	45.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	170.795.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				6 Laporan	3.903.786.700,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	61.590.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	-	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				1 Unit	61.590.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-			-	15.329.020.144,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	-	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				25 Orang/Bulan	14.015.633.144,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	342.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				25 Orang	971.262.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-	-			-	1.256.341.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	-	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD</i>				2 Dokumen	19.470.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD</i>				2 Laporan	84.480.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>				2 Laporan	912.391.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan</i>				1 Paket	240.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	<i>"Persentase Penetapan Ranperda Tahun N" "Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan" Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan</i>	-			90 Persen 89 Persen 100 Persen	24.786.915.873,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	<i>Persentase Raperda dan Rancangan Peraturan DPRD yang disahkan</i>	-			99 Persen	770.960.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>				2 Dokumen	570.960.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi</i>				2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	<i>Persentase Rapat Pembahasan Anggaran yang terselenggara terhadap jumlah rapat yang terjadwal.</i>	-			89 Persen	876.240.821,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	68.845.349,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	68.845.349,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				2 Dokumen	293.149.129,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				2 Dokumen	293.149.129,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester</i>				2 Dokumen	40.909.858,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>				3 Dokumen	111.342.007,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	<i>Persentase Rapat dan Kunker yang terselenggara terhadap jumlah rapat dan kunker yang terjadwal.</i>	-			80 Persen	7.558.080.785,00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum</i>				3 Laporan	2.243.523.768,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>				3 Laporan	2.519.914.239,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>				3 Laporan	750.841.256,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>				3 Laporan	750.841.256,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam</i>				3 Laporan	750.841.256,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan</i>				3 Dokumen	322.774.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran</i>				1 Dokumen	52.800.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah</i>				1 Dokumen	166.545.010,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN		0,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	<i>Persentase Keterpenuhan Layanan Kapasitas Lembaga DPRD</i>	-			100 Persen	4.025.499.434,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD</i>				3 Dokumen	2.984.185.434,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>				3 Orang	319.514.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pem erintahan Implementa si reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			<i>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi</i>				6 Orang	360.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pem erintahan Implementa si reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD</i>				3 Dokumen	361.800.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	<i>Persentase cakupan layanan dalam hal penerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat.</i>	-			100 Persen	9.978.429.479,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Masyarakat	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD</i>				2 Laporan	709.601.912,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun</i>				2 Dokumen	11.513.217,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			<i>Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</i>				75 Dokumen	9.257.314.350,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	<i>Persentase Keterpenuhan Layanan tugas DPRD</i>	-			100 Persen	1.577.705.354,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Masyarakat	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>				2 Dokumen	698.759.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</i>				12 Dokumen	774.871.730,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				2 Dokumen	104.074.624,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DPRD
J U M L A H								52.069.414.548,00							0,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT DAERAH KAB. SARMI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT DAERAH						8.250.439.489,00							8.100.000.000,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						8.250.439.489,00							8.100.000.000,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						8.250.439.489,00							8.100.000.000,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja</i>	-			100 %	6.215.649.141,00						-	5.100.000.000,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun</i>	-			100 % 100 %	6.637.360,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	ASN	-	65.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	6.637.360,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	ASN	-	65.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu</i>	-			100 %	3.964.174.985,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	ASN	-	3.055.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				39 Orang/bulan	3.949.199.735,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		3.000.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	14.975.250,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		55.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang terinventarisir</i>	-			100 %	35.382.360,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN	-	100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	35.382.360,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian</i>	-			100 %	448.250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN	-	480.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				44 Paket	98.175.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		80.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				39 Orang	350.075.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		400.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Kebutuhan kantor yang terfasilitasi</i>	-			100 %	610.022.670,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN	-	200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				25 Paket	210.772.620,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				35 Paket	35.261.370,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				5 Dokumen	15.241.680,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	348.747.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		0,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase pengadaan barang milik daerah</i>	-			100 %	100.170.766,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN	-	100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	100.170.766,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Surat dinas yang ditindaklanjuti</i>	-			100 %	1.051.011.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN	-	1.100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	63.531.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	987.480.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		1.100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	<i>Tindak Lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1</i>	-			97,5 %	1.684.890.348,00						-	2.500.000.000,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	<i>Persentase Pengawasan Internal yang terlaksana tepat waktu dan sesuai prosedur</i>	-			97,5 %	1.684.890.348,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah	-	2.500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>				3 Laporan	530.100.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah		1.000.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>				4 Laporan	550.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan</i>				1 Laporan	19.890.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa</i>				1 Laporan	249.999.972,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-ADMINISTRASI PEMERINTAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah		1.000.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														
			<i>Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk</i>				1 Kesepakatan	134.901.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah		500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>				2 Dokumen	199.999.376,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-ADMINISTRASI PEMERINTAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	<i>Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)</i>	-			2 Level	349.900.000,00						-	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	<i>Persentase kegiatan Pendampingan/Asistensi yang dilaksanakan berdasarkan perencanaan PKPT yang di rencanakan</i>	-			75 %	349.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	OPD	-	500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>				5 Kegiatan	349.900.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	OPD		500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
JUMLAH								8.250.439.489,00							8.100.000.000,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. SARMI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						12.497.483.643,00								0,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						12.497.483.643,00							0,00		
	5.01	PERENCANAAN						12.497.483.643,00							0,00		
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja</i>	-			100 Persen	8.467.877.818,00						-	0,00		
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia</i>	-			100 Persen	33.196.508,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.990.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	2.874.500,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	10.102.508,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	12.873.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	5.356.500,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia</i>	-			100 Persen	5.365.182.692,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				50 Orang/bulan	5.343.884.384,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	21.298.308,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan</i>	-			100 Persen	284.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				14 Orang	284.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase administrasi umum perangkat daerah yang disediakan</i>	-			100 Persen	861.006.860,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	22.985.860,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	173.350.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	65.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				3 Laporan	599.671.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	1.792.949.858,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	162.041.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				8 Laporan	1.615.908.858,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia</i>	-			100 Persen	131.541.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				2 Unit	82.190.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				24 Unit	49.351.900,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	<i>Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Keselarasan RPJMD/RPD dengan RKPD Persentase Keselarasan RPJMD/RPD dengan Renstra PD</i>	-			100 Persen 75,00 Persen 90,00 Persen	2.835.437.196,00						-	0,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	<i>Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan dan Pendanaan yang tersedia</i>	-			100 Persen	1.518.930.306,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah, DPRK dan Masyarakat	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah</i>				4 Dokumen	149.999.740,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah, DPRK dan Masyarakat		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah</i>				3 Berita Acara	518.930.727,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah, DPRK dan Masyarakat		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota</i>				11 Berita Acara	449.999.870,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah, DPRK dan Masyarakat		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>				2 Dokumen	399.999.969,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah, DPRK dan Masyarakat		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Persentase Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang di analisis</i>	-			100 Persen	216.508.773,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi</i>				64 Orang	216.508.773,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Persentase Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	-			100 Persen	638.449.821,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</i>				1 Laporan	638.449.821,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	<i>Persentase Dokumen/Laporan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang tersedia</i>	-			100 Persen	461.548.296,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola</i>				2 Dokumen	461.548.296,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	<i>Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	-			100 Persen	1.194.168.629,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<i>Persentase Dokumen/Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	-			100 Persen	543.839.736,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				4 Dokumen	343.839.736,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah dan Masyarakat		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>				2 Laporan	200.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah dan Masyarakat		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	<i>Persentase Dokumen/Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	-			100 Persen	150.328.893,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>				2 Laporan	150.328.893,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	-			100 Persen	500.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>				1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				1 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
J U M L A H								12.497.483.643,00							0,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SARMI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						6.577.206.305,00								0,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						6.577.206.305,00							0,00		
	5.02	KEUANGAN						6.577.206.305,00							0,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Presentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor</i>	-			100 Persen	5.577.208.709,00						-	0,00		
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Dokumen perencanaan, penggangan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang lengkap</i>	-			1 Dokumen	21.201.267,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	9.938.749,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	2.181.083,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	3.172.435,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	5.909.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akurat</i>	-			3 Dokumen	3.873.790.572,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				40 Orang/bulan	3.837.449.199,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				20 Laporan	22.767.619,00	Kab. Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				20 Laporan	13.573.754,00	Kab. Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan	-			50 Orang	149.514.612,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara (ASN)	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				92 Paket	129.030.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara (ASN)		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	10.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara (ASN)		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				50 Orang	10.484.612,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara (ASN)		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan administrasi umum yang disusun dan disampaikan</i>	-			3 Laporan	271.432.440,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	50.040.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				207 Paket	24.976.440,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				9 Laporan	196.416.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah barang milik daerah yang berhasil diadakan sesuai rencana dan kebutuhan</i>	-			9 Unit	117.165.062,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				9 Unit	117.165.062,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah laporan pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun dan disampaikan</i>	-			3 Laporan	965.963.976,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				30 Laporan	7.500.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	46.500.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				5 Laporan Laporan	911.963.976,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah barang milik daerah yang diperiksa dan dilakukan pemeliharaan rutin</i>	-			1 Unit	178.140.780,00			-	-	ASN	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	49.992.080,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				11 Unit	21.950.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	106.198.700,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	presentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	-			1,67 persen	999.997.596,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Laporan realisasi dan pengelolaan pendapatan daerah	-			1 Dokumen	999.997.596,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	-	Wajib Pajak	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	50.257.963,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	-	Wajib Pajak		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				3 Laporan	229.737.638,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	-	Wajib Pajak		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Unit	49.998.495,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	-	Wajib Pajak		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</i>				5 Laporan	120.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Wajib Pajak		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</i>				5 Laporan	60.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Wajib Pajak		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
			<i>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya</i>				30 Obyek Pajak	74.981.500,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Wajib Pajak		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Wajib Pajak		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah</i>				2 Layanan	50.022.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Wajib Pajak		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi</i>				1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Wajib Pajak		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah</i>				5 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Wajib Pajak		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah</i>				1 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Wajib Pajak		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>				2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Wajib Pajak		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
J U M L A H								6.577.206.305,00							0,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. SARMI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						148.812.760.088,00								850.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						148.812.760.088,00							850.000.000,00		
	5.02	KEUANGAN						148.812.760.088,00							850.000.000,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah</i>	-			100 Persentase	15.449.766.908,00						-	0,00		
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen rencana kerja perangkat daerah yang disusun</i>	-			2 Dokumen	22.224.868,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	11.083.236,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	11.141.632,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	-			2 Dokumen	6.490.124.605,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				74 Orang/bulan	6.465.081.783,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	25.042.822,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persentase	1.058.678.400,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				40 Paket	50.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				40 Paket	50.010.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				10 Laporan	300.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	628.665.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				10 Dokumen	30.003.400,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah</i>	-			100 Persentase	7.728.554.875,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				30 Laporan	5.010.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				40 Laporan	310.035.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	7.413.509.875,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	-			100 Persentase	150.184.160,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				3 Unit	50.109.785,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				3 Unit	50.070.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	50.004.375,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	<i>Presentase Belanja Pegawai di Luar tunjangan Guru yang di alokasikan Melalui TKD Presentasi belanja infrastruktur pelayanan publik Presentase Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Presentase Penurunan SILPA Presentase Laporan keuangan Tepat Waktu</i>	-			30 Persentase 39.9 Persentase 70 Persentase 15.55 Persentase 57.31 Persentase	132.805.651.752,00						-	700.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>	-			1 Dokumen	1.400.016.526,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Daerah	-	700.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>				1 Dokumen	699.999.030,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Daerah		700.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>				1 Dokumen	599.999.380,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Daerah		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan</i>				2 Dokumen	25.017.615,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Daerah		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah</i>				2 Dokumen	25.001.328,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Daerah		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				30 Orang	49.999.173,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Daerah		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi, pengelolaan kas, dan pelaporan perbendaharaan	-			6 Kegiatan	399.481.840,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				30 Dokumen	49.913.814,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				240 Dokumen	49.977.473,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>				5 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Potongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
			<i>Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</i>				112 Laporan	99.990.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Potongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Potongan atas SP2D dengan Instansi Terkait</i>				45 Dokumen	29.856.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				41 Orang	99.744.553,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<i>Persentase transaksi kas daerah yang tercatat, direkonsiliasi, dan dilaporkan tepat waktu</i>	-			100 Persentase	899.998.686,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			<i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</i>				20 Laporan	49.999.960,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>				6 Laporan	399.999.966,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>				2 Dokumen	399.999.140,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</i>				2 Dokumen	49.999.620,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Persentase dokumen administrasi keuangan yang tersusun, lengkap, dan diajukan tepat waktu</i>	-			100 Persentase	130.106.154.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai	-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>				114 Laporan	124.806.154.700,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA DESA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>				1 Laporan	5.300.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	<i>Persentase barang milik daerah yang tercatat, terdokumentasi, dan tersusun sesuai ketentuan</i>	-			100 Persentase	557.341.428,00						-	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat dan terinventarisasi sesuai ketentuan</i>	-			100 Persentase	557.341.428,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai	-	150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>				2 Dokumen	29.999.999,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>				4 Laporan	79.998.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>				6 Laporan	149.993.966,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>				2 Dokumen	99.994.271,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>				41 Laporan	79.949.040,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		80.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun</i>				41 Laporan	69.998.744,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		70.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				20 Orang	47.407.408,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
J U M L A H								148.812.760.088,00							850.000.000,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KAB. SARMI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM						6.912.984.374,00								0,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						6.912.984.374,00								0,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						6.013.014.589,00								0,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor</i>	-			100 &	5.763.194.523,00						-		0,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja</i>	-			2 Dokumen	14.149.881,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN BKPSDM	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	5.669.706,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN BKPSDM		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	8.480.175,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN BKPSDM		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Kelengkapan Dokumen Pelaporan Keuangan</i>	-			2 Dokumen	4.694.405.933,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN BKPSDM	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				48 Orang/bulan	4.682.104.533,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN BKPSDM		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	10.975.021,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangandang disabilitas.	Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN BKPSDM		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	25.985.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangandang disabilitas.	Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN BKPSDM		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	37.545.885,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangandang disabilitas.	Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN BKPSDM		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	200.110.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangandang disabilitas.	Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN BKPSDM		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	749.286.451,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN BKPSDM	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	6.015.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN BKPSDM		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu- nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere- mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangang disabilitas.	Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN BKPSDM		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	728.271.451,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu- nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere- mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangang disabilitas.	Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN BKPSDM		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	30.736.352,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN BKPSDM	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	20.366.352,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN BKPSDM		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian</i>				1 Dokumen	49.902.216,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN Kabupaten Sarmi		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	<i>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</i>	-			100 %	99.920.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN Kabupaten Sarmi	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN</i>				1 Laporan	49.999.500,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN Kabupaten Sarmi		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						899.969.785,00							0,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	<i>Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan</i>	-			70 % 63,40 % 100 %	899.969.785,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	<i>Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis</i>	-			100 %	799.999.905,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN Kabupaten Sarmi	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			<i>Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun</i>				1 Dokumen	799.999.905,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN Kabupaten Sarmi		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	<i>Persentase ASN yang Bersertifikasi</i>	-			100 %	99.969.880,00			Memperkuat pembangu- nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangand disabilitas.	Implementa si reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN Kabupaten Sarmi	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.04.02.2.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga</i>				1 Dokumen	99.969.880,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu- nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangand disabilitas.	Implementa si reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	ASN Kabupaten Sarmi		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
J U M L A H								6.912.984.374,00							0,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. SARMI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						7.161.273.938,00								1.080.670.005,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						7.161.273.938,00								1.080.670.005,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						7.161.273.938,00								1.080.670.005,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tata kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-			100 Persen	5.350.413.694,00						-	0,00		
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja kegiatan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD</i>	-			2 Dokumen	8.706.764,00			Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				23 Dokumen	7.140.165,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				23 Dokumen	1.566.599,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase penatausahaan administrasi keuangan SKPD</i>	-			3 Kegiatan	3.742.988.832,00			Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			-				-	3.716.484.057,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				23 Laporan	16.764.500,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				4 Laporan	9.740.275,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			100 Persen	260.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				12 Orang	260.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase ketercapaian administrasi perkantoran umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi serta pelayanan SKPD</i>	-			100 Persen	317.220.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	80.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	51.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				10 Paket	28.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				9 Laporan	158.220.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah barang milik daerah yang terpenuhi pemeliharaannya secara rutin/berkala, kendaraan dinas Jabatan, peralatan dan mesin, gedung kantor, sarana dan prasarana lainnya</i>	-			2 Unit	151.330.500,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				18 Unit	114.580.500,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	36.750.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan penunjang urusan Perangkat Daerah	-			4 Laporan	815.170.100,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	18.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	38.400.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	29.800.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	728.970.100,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpenuhi pemeliharaannya secara rutin/berkala, kendaraan dinas Jabatan, peralatan dan mesin, gedung kantor, sarana dan prasarana lainnya	-			2 unit	54.997.498,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				2 Unit	54.997.498,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	<i>Meningkatnya masyarakat dan kader partai yang berpengetahuan politik baik, beretika tinggi, dan berbudaya demokrasi sehingga partisipasi politik meningkat dan demokrasi berjalan sehat</i>	-			84 Persen	1.395.871.227,00						-	1.080.670.005,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	<i>Tersusunnya kebijakan teknis yang mendukung pelaksanaan pendidikan politik yang sistematis dan terarah</i>	-			2 Kegiatan	1.395.871.227,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Peningkatan masyarakat yang harmonis, tertib, toleran dan berbudaya	Masyarakat Umum	-	1.080.670.005,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			<i>Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun</i>				1 Dokumen	1.080.670.005,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Peningkatan masyarakat yang harmonis, tertib, toleran dan berbudaya	Masyarakat Umum		1.080.670.005,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>				100 Orang	250.211.338,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-PENDIDIKAN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Umum		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>				2 Laporan	64.989.884,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Umum		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Persentase masyarakat yang mengikuti pendidikan ideologi Pancasila dan nilai kebangsaan	-			1 Tahun 100 Persen	199.999.938,00						-	0,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	<i>Persentase Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembinaan</i>	-			100 Persen	199.999.938,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Umum	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>				100 Orang	199.999.938,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-PENDIDIKAN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Umum		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial yang Terjadi di kabupaten Sarmi	-			85 Persen	214.989.079,00						-	0,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	-			15 Orang	214.989.079,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Organisasi Masyarakat	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>				0 Orang	149.999.195,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Organisasi Masyarakat		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>				2 Laporan	64.989.884,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Organisasi Masyarakat		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J U M L A H								7.161.273.938,00						1.080.670.005,00		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DISTRIK SARMI KAB. SARMI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DISTRIK SARMI						5.770.221.539,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						5.770.221.539,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						5.770.221.539,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	5.267.160.539,00						-	0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	942.525,00			-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	DISTRIK SARMI
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				2 Dokumen	942.525,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	DISTRIK SARMI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.304.581.735,00			-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	DISTRIK SARMI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				37 Orang/bulan	3.304.581.735,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	DISTRIK SARMI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	228.000.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	DISTRIK SARMI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				0 Paket	105.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	DISTRIK SARMI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				6 Paket	17.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	DISTRIK SARMI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	106.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DISTRIK SARMI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.718.159.610,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DISTRIK SARMI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				6 Laporan	4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DISTRIK SARMI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	36.014.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DISTRIK SARMI
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				0 Laporan	92.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DISTRIK SARMI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	1.585.645.610,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DISTRIK SARMI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	15.476.669,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DISTRIK SARMI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				10 Unit	15.476.669,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DISTRIK SARMI
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	30.062.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	30.062.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DISTRIK SARMI
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				6 Laporan	30.062.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DISTRIK SARMI
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	399.999.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	399.999.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DISTRIK SARMI
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan</i>				12 Unit	399.999.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DISTRIK SARMI
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	73.000.000,00						-	0,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	73.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DISTRIK SARMI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				0 Laporan	73.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DISTRIK SARMI
	J U M L A H								5.770.221.539,00						0,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DISTRIK PANTAI TIMUR KAB. SARMI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DISTRIK PANTAI TIMUR						3.422.735.837,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.422.735.837,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						3.422.735.837,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.362.736.837,00						-	0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10.713.282,00			-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	DISTRIK PANTAI TIMUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	5.901.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Dua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	DISTRIK PANTAI TIMUR
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.303.782,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Dua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	DISTRIK PANTAI TIMUR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	3.508.500,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Dua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	DISTRIK PANTAI TIMUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.891.461.859,00			-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	DISTRIK PANTAI TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				31 Orang/bulan	1.891.461.859,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Dua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	DISTRIK PANTAI TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	208.186.130,00			-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	DISTRIK PANTAI TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	14.994.358,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Dua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DISTRIK PANTAI TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.207.394.861,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DISTRIK PANTAI TIMUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				0 Laporan	10.000.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Dua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DISTRIK PANTAI TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				8 Laporan	1.197.394.861,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Dua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DISTRIK PANTAI TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	14.989.984,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DISTRIK PANTAI TIMUR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				2 Unit	14.989.984,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Dua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DISTRIK PANTAI TIMUR
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	24.999.500,00						-	0,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	24.999.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DISTRIK PANTAI TIMUR
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>				1 Laporan	24.999.500,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Dua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DISTRIK PANTAI TIMUR
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	34.999.500,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	19.999.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DISTRIK PANTAI TIMUR
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>				1 Dokumen	19.999.500,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Dua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DISTRIK PANTAI TIMUR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	15.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DISTRIK PANTAI TIMUR
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga</i>				2 Keluarga	15.000.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Dua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DISTRIK PANTAI TIMUR
J U M L A H								3.422.735.837,00							0,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DISTRIK PANTAI BARAT KAB. SARMI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DISTRIK PANTAI BARAT						4.492.091.812,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						4.492.091.812,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						4.492.091.812,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.458.927.463,00						-	0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	6.697.855,00			-	-	-	-	0,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.274.369,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.883.486,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	3.540.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.824.113.056,00			-	-	-	-	0,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				37 Orang/bulan	2.816.051.936,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	8.061.120,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	49.087.500,00			-	-	-	-	0,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	49.087.500,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	202.754.002,00			-	-	-	-	0,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	99.369.002,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	73.485.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				10 Laporan	29.900.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.320.919.010,00			-	-	-	-	0,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				50 Laporan	15.000.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	1.305.919.010,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	45.312.040,00			-	-	-	-	0,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				4 Unit	40.352.040,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	4.960.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-			-	10.044.000,00			-	-	-	-	0,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>				2 Dokumen	10.044.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK PANTAI BARAT
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	23.170.000,00						-	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	1.580.000,00			-	-	-	-	0,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				1 Laporan	1.580.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	1.760.000,00			-	-	-	-	0,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>				2 Dokumen	1.760.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	19.830.000,00			-	-	-	-	0,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>				5 Laporan	19.830.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK PANTAI BARAT
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	9.994.349,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	9.994.349,00			-	-	-	-	0,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				6 Lembaga K emasyarakat an	9.994.349,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK PANTAI BARAT
J U M L A H								4.492.091.812,00							0,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DISTRIK TOR ATAS KAB. SARMI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DISTRIK TOR ATAS						3.464.986.828,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.464.986.828,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						3.464.986.828,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.424.987.768,00						-	0,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.017.986.991,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pem erintahan	Pegawai Aparatur Sipil Negara	-	0,00	DISTRIK TOR ATAS
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				29 Orang/bulan	2.017.986.991,00	Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pem erintahan	Pegawai Aparatur Sipil Negara		0,00	DISTRIK TOR ATAS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	382.895.960,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	DISTRIK TOR ATAS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	159.275.960,00	Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	DISTRIK TOR ATAS
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	39.000.000,00	Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	DISTRIK TOR ATAS
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	184.620.000,00	Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	DISTRIK TOR ATAS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	970.862.686,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	DISTRIK TOR ATAS
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	970.862.686,00	Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DISTRIK TOR ATAS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	53.242.131,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DISTRIK TOR ATAS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				2 Unit	53.242.131,00	Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DISTRIK TOR ATAS
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	39.999.060,00						-	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	39.999.060,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DISTRIK TOR ATAS
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				1 Laporan	39.999.060,00	Kab. Sarmi, Tor Atas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DISTRIK TOR ATAS
J U M L A H								3.464.986.828,00							0,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DISTRIK BONGGO KAB. SARMI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DISTRIK BONGGO						5.085.070.892,00								0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						5.085.070.892,00							0,00		
	7.01	KECAMATAN						5.085.070.892,00							0,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.630.470.892,00						-	0,00		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.650.350.892,00			-	Percepatan Pembangu nan Sarana dan Prasarana I nfrastruktur dan Konekti vitas Wilayah	-	-	0,00	DISTRIK BONGGO	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				0 Orang/bulan	2.650.350.892,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pembangu nan Sarana dan Prasarana I nfrastruktur dan Konekti vitas Wilayah	-		0,00	DISTRIK BONGGO	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	652.100.000,00			-	Percepatan Pembangu nan Sarana dan Prasarana I nfrastruktur dan Konekti vitas Wilayah	-	-	0,00	DISTRIK BONGGO	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				0 Paket	352.100.000,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pembangu nan Sarana dan Prasarana I nfrastruktur dan Konekti vitas Wilayah	-		0,00	DISTRIK BONGGO	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				0 Laporan	300.000.000,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	-		0,00	DISTRIK BONGGO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	57.540.000,00			-	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	-	-	0,00	DISTRIK BONGGO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	57.540.000,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	-		0,00	DISTRIK BONGGO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.270.480.000,00			-	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	-	-	0,00	DISTRIK BONGGO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				0 Laporan	1.270.480.000,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	-		0,00	DISTRIK BONGGO
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	254.600.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	134.600.000,00			-	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	-	-	0,00	DISTRIK BONGGO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				0 Laporan	74.600.000,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	-		0,00	DISTRIK BONGGO
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				0 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	-		0,00	DISTRIK BONGGO
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	60.000.000,00			-	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	-	-	0,00	DISTRIK BONGGO
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</i>				0 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	-		0,00	DISTRIK BONGGO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	60.000.000,00			-	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	-	-	0,00	DISTRIK BONGGO
	7.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta														
			<i>Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta</i>				0 Unit	60.000.000,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	-		0,00	DISTRIK BONGGO
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	80.000.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	80.000.000,00			-	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	-	-	0,00	DISTRIK BONGGO
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga</i>				0 Keluarga	80.000.000,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	-		0,00	DISTRIK BONGGO
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	60.000.000,00						-	0,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	60.000.000,00			-	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban	-	-	0,00	DISTRIK BONGGO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				0 Laporan	60.000.000,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban	-		0,00	DISTRIK BONGGO
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	60.000.000,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	60.000.000,00			-	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana I nfrastruktur dan Konektivitas Wilayah	-	-	0,00	DISTRIK BONGGO
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</i>				0 Laporan	60.000.000,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana I nfrastruktur dan Konektivitas Wilayah	-		0,00	DISTRIK BONGGO
J U M L A H								5.085.070.892,00							0,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DISTRIK APAWER HULU KAB. SARMI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DISTRIK APAWER HULU						3.373.488.540,00								0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.373.488.540,00							0,00		
	7.01	KECAMATAN						3.373.488.540,00							0,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.323.489.430,00						-	0,00		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.797.208.705,00			-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	DISTRIK APAWER HULU	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				22 Orang/bulan	1.797.208.705,00	Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	DISTRIK APAWER HULU	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	424.725.000,00			-	-	-	-	0,00	DISTRIK APAWER HULU	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	424.725.000,00	Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK APAWER HULU	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.101.555.725,00			-	-	-	-	0,00	DISTRIK APAWER HULU	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1.101.555.725,00	Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK APAWER HULU	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	49.999.110,00						-	0,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	49.999.110,00			-	-	-	-	0,00	DISTRIK APAWER HULU	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				1 Laporan	49.999.110,00	Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK APAWER HULU
J U M L A H								3.373.488.540,00							0,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DISTRIK SARMI TIMUR KAB. SARMI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DISTRIK SARMI TIMUR						4.099.368.958,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						4.099.368.958,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						4.099.368.958,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.099.368.958,00						-	0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	7.136.150,00			-	-	-	-	0,00	DISTRIK SARMI TIMUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	5.279.150,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Waskey	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK SARMI TIMUR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	1.857.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK SARMI TIMUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.636.452.891,00			-	-	-	-	0,00	DISTRIK SARMI TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				31 Orang/bulan	2.636.452.891,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Waskey	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK SARMI TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	178.294.525,00			-	-	-	-	0,00	DISTRIK SARMI TIMUR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	14.056.525,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Waskey	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK SARMI TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	123.815.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Waskey	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK SARMI TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	2.023.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Waskey	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK SARMI TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	38.400.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Waskey	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK SARMi TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.227.220.292,00			-	-	-	-	0,00	DISTRIK SARMi TIMUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	10.005.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Waskey	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK SARMi TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				31 Laporan	1.217.215.292,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Waskey	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK SARMi TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	50.265.100,00			-	-	-	-	0,00	DISTRIK SARMi TIMUR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	50.265.100,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Waskey	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK SARMi TIMUR
	J U M L A H								4.099.368.958,00						0,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DISTRIK SARMi SELATAN KAB. SARMi
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DISTRIK SARMi SELATAN						2.945.198.151,00							1.161.231.367,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.945.198.151,00							1.161.231.367,00	
	7.01	KECAMATAN						2.945.198.151,00							1.161.231.367,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.945.198.151,00						-	1.161.231.367,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.839.041.059,00			-	-	-	-	7.000.000,00	DISTRIK SARMi SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				24 Orang/bulan	1.833.078.729,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK SARMi SELATAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	5.962.330,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.000.000,00	DISTRIK SARMi SELATAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	29.452.500,00			-	-	-	-	32.000.000,00	DISTRIK SARMi SELATAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	29.452.500,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		32.000.000,00	DISTRIK SARMi SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	119.481.915,00			-	-	-	-	139.000.000,00	DISTRIK SARMi SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	64.881.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	DISTRIK SARMi SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				5 Paket	25.000.915,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DISTRIK SARMi SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				10 Laporan	29.600.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		34.000.000,00	DISTRIK SARMi SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	921.442.186,00			-	-	-	-	918.231.367,00	DISTRIK SARMI SELATAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				4 Laporan	14.040.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.040.000,00	DISTRIK SARMI SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				4 Laporan	40.560.801,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		32.766.424,00	DISTRIK SARMI SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	866.841.385,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		868.424.943,00	DISTRIK SARMI SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	35.780.491,00			-	-	-	-	65.000.000,00	DISTRIK SARMI SELATAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				4 Unit	24.995.916,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	DISTRIK SARMI SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	10.784.575,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DISTRIK SARMI SELATAN
			J U M L A H					2.945.198.151,00						1.161.231.367,00		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT KAB. SARMI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT						5.307.199.608,00							1.941.317.190,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						5.307.199.608,00							1.941.317.190,00	
	7.01	KECAMATAN						5.307.199.608,00							1.941.317.190,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	5.302.582.603,00						-	1.941.317.190,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	7.778.434,00			-	-	-	-	8.000.000,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	4.870.825,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.222.926,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.000.000,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.684.683,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.106.495.474,00			-	-	-	-	0,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				39 Orang/bulan	3.099.839.830,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i>				12 Laporan	6.655.644,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	80.325.000,00			-	-	-	-	60.000.000,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				95 Paket	80.325.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	184.334.957,00			-	-	-	-	154.879.365,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	14.548.315,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		19.961.765,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	103.561.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		114.940.000,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	15.885.642,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		19.977.600,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	50.340.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	25.499.996,00			-	-	-	-	35.499.996,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				5 Unit	25.499.996,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.499.996,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.851.289.005,00			-	-	-	-	1.618.270.321,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	13.005.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		13.000.000,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	13.000.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		13.000.000,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	25.664.506,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.500.000,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	1.799.619.499,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.556.770.321,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	46.859.737,00			-	-	-	-	64.667.508,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya</i>				6 Unit	24.009.737,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		29.667.508,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	22.850.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	4.617.005,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	4.617.005,00			-	-	-	-	0,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				1 Lembaga Kemasyarakatan	4.617.005,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	J U M L A H							5.307.199.608,00							1.941.317.190,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DISTRIK BONGGO TIMUR KAB. SARMI
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DISTRIK BONGGO TIMUR						3.707.281.211,00							2.929.617.797,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.707.281.211,00							2.929.617.797,00	
	7.01	KECAMATAN						3.707.281.211,00							2.929.617.797,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.658.401.211,00						-	2.929.617.797,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.535.374.297,00						-	2.535.374.297,00	DISTRIK BONGGO TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				0 Orang/bulan	2.535.374.297,00	Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawes Mukti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.535.374.297,00	DISTRIK BONGGO TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	105.387.650,00						-	5.443.500,00	DISTRIK BONGGO TIMUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	5.434.650,00	Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawes Mukti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.443.500,00	DISTRIK BONGGO TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	39.993.000,00	Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawes Mukti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK BONGGO TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	59.960.000,00	Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawes Mukti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan Implementa si reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	-		0,00	DISTRIK BONGGO TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	992.639.894,00						-	388.800.000,00	DISTRIK BONGGO TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				5 Laporan	992.639.894,00	Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawes Mukti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	-		388.800.000,00	DISTRIK BONGGO TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	24.999.370,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DISTRIK BONGGO TIMUR
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	24.999.370,00	Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawes Mukti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DISTRIK BONGGO TIMUR
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	24.880.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	24.880.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DISTRIK BONGGO TIMUR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	24.880.000,00	Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawes Mukti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DISTRIK BONGGO TIMUR
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	24.000.000,00						-	0,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	24.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DISTRIK BONGGO TIMUR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				0 Laporan	24.000.000,00	Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawes Mukti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DISTRIK BONGGO TIMUR
J U M L A H								3.707.281.211,00							2.929.617.797,00	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sarmi melalui evaluasi capaian indikator kinerja utama, efektivitas pelaksanaan program, serta kualitas tata kelola pemerintahan. Analisis ini menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pencapaian pembangunan daerah secara lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat kapasitas pembangunan dan memastikan tercapainya sasaran prioritas tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sarmi 2025–2029. Kepala Daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi, berjalan efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sarmi.

Pengukuran keberhasilan pembangunan dilakukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah, Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta indikator layanan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Ketiga kelompok indikator tersebut merupakan instrumen utama untuk menilai capaian pembangunan daerah dan memastikan akuntabilitas Kepala Daerah.

Penetapan indikator kinerja ini bertujuan untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai sejauh mana pemerintah daerah berhasil mencapai sasaran strategis RPJMD serta target tahunan RKPD. Dengan demikian, keberhasilan kinerja tidak hanya diukur dari output kegiatan, tetapi juga dari capaian outcome pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sarmi

Pembangunan daerah pada tahun 2026 menitikberatkan pada konsistensi pencapaian sasaran prioritas RPJMD 2025–2029, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan akses layanan dasar, pengurangan kemiskinan dan stunting, percepatan pembangunan infrastruktur wilayah, serta optimalisasi pengelolaan potensi unggulan daerah seperti perikanan, kelautan, pertanian, dan pariwisata berbasis budaya lokal.

Sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik, Pemerintah Kabupaten Sarmi menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan pencapaian sasaran strategis prioritas. IKU ini menjadi pedoman bagi seluruh perangkat

daerah dalam merancang program dan kegiatan yang terukur, efisien, dan tepat sasaran.

Rumusan IKU Kabupaten Sarmi diselaraskan dengan tujuan dan sasaran RPJMD 2025–2029, memperhatikan isu strategis daerah seperti tingginya angka kemiskinan dan stunting, aksesibilitas wilayah, keterbatasan layanan dasar, serta kebutuhan percepatan pembangunan distrik dan kampung.

Berdasarkan arah RPJMD 2025–2029 yang memuat 6 Tujuan Pembangunan Daerah, maka sasaran strategis yang dijabarkan melalui Indikator Kinerja Utama meliputi 18 Sasaran berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sarmi;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima dan merata;
3. Meningkatkan pembangunan desa yang handal dan berkeadilan;
4. Meningkatkan kesejahteraan orang Asli Sarmi
5. Peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau
6. Meningkatnya akses fasilitas kesehatan berkualitas di seluruh wilayah
7. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya
8. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian unggulan;
9. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi;
10. Meningkatnya daya saing ekonomi daerah;
11. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja ;
12. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
13. Pemenuhan Kehidupan Masyarakat yang layak dan berkeadilan;
14. Penguatan pengarusutamaan gender
15. Penyediaan infrastruktur konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang handal dan memadai;
16. Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika yang handal dan memadai;
17. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman masyarakat ;
18. Penguatan wilayah yang tangguh dan responsif terhadap bencana.

Tabel 6.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Indikator Tujuan									
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	NA	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00	60,01
2	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	67,89	68,83	69,65	70,47	71,29	72,10	72,91
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,26	4,87	5,48	6,08	6,69	7,30	7,91
4	PDRB per Kapita	Juta Rp/ Kapita	88,76	93,40	98,04	102,69	107,33	111,97	116,61
5	Tingkat Kemiskinan	%	14,05	13,76	13,34	12,92	12,51	12,09	11,67
6	Indeks Infrastruktur	Poin	NA	58,75	59,88	61,00	62,13	63,25	64,38
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	NA	59,28	61,29	63,30	65,31	67,31	69,32
8	Indeks Risiko Bencana	Poin	172,5	167,75	163,00	158,25	153,50	148,75	144,00
Indikator Sasaran									
1	Nilai SAKIP	Poin	NA	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00	60,01
2	Indeks Pelayanan Publik	Poin	NA	3,25	3,34	3,43	3,51	3,60	3,69
3	Indeks Pendidikan	Poin	66,42	67,76	69,20	70,65	72,10	73,54	74,99
4	Indeks Kesehatan	Poin	76,78	77,69	78,06	78,43	78,80	79,17	79,54
5	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	16,00	15,50	15,00	14,50	14,00	13,50	13,00
6	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	NA	45,00	45,50	46,00	46,50	47,00	47,50
7	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	NA	76,00	76,40	76,80	77,20	77,60	78,00
8	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,439*	0,439	0,434	0,428	0,423	0,417	0,412
9	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	-0,92	0,50	0,90	1,30	1,70	2,10	2,50
10	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	1,33	2,28	3,22	4,17	5,11	6,06	7,00
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,41	3,30	3,19	3,07	2,96	2,85	2,74
12	Kontribusi PDRB Kabupaten Sarmi terhadap Provinsi	%	4,45	4,95	5,46	5,96	6,46	6,96	7,47
13	Rasio Gini	Poin	0,372*	0,364	0,360	0,356	0,352	0,348	0,344
14	Tingkat kedalaman kemiskinan (PI)	Poin	1,86	1,81	1,77	1,72	1,68	1,64	1,60
15	Indeks Desa	Poin	0,5069*	0,52243	0,52816	0,53389	0,53962	0,54535	0,55108
16	Persentase Ketercapaian Infrastruktur Pekerjaan Umum	%	NA	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
17	Persentase Ketercapaian Infrastruktur Perhubungan	%	NA	60,00	61,50	63,00	64,50	66,00	67,50
18	Persentase Ketercapaian Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	%	NA	65,00	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00
19	Persentase Ketercapaian Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	%	NA	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	79,46	81,01	81,17	81,33	81,48	81,64	81,80
21	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	NA	0,6	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65

Tabel 6.1 memuat daftar Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sarmi yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2029 dan proyeksi hingga tahun 2030. Penyajian tabel ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, terukur, dan terstruktur mengenai indikator strategis yang menjadi fokus kinerja Pemerintah Daerah dalam periode perencanaan jangka menengah.

Setiap IKU disajikan secara sistematis dengan mencantumkan:

- Sasaran Strategis yang ingin dicapai;
- Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan ukuran keberhasilan sasaran;
- Satuan indikator sebagai dasar pengukuran;
- Target capaian tahunan mulai tahun 2025 hingga 2030.

Penyajian tabel tersebut menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan yang berorientasi hasil (result-based), serta menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala.

Setelah penyajian Tabel 6.1, dokumen ini dilanjutkan dengan penjabaran Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menggambarkan kinerja pembangunan secara lebih luas dan komprehensif. IKD memuat indikator-indikator yang mengukur efektivitas pencapaian sasaran pembangunan tahunan RKPD dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan pembangunan daerah.

Tabel 6.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
I Aspek Geografi dan Demografi									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	63,07	63,64	64,21	64,77	65,34	65,91	66,48
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	43,89*	36,18	34,62	33,06	31,50	29,94	28,39
3	Konsumsi listrik perkapita	Kwh/Orang	NA	400,48	440,46	480,43	520,41	560,38	600,36
4	Intensitas Energi Primer	SBM/Rp milyar	NA	90,00	88,50	87,00	85,50	84,00	82,50
5	Cakupan rumah tangga yang memiliki akses listrik (PLN dan nonPLN)	%	NA	96,00	96,20	96,40	96,60	96,80	97,00
6	Kapasitas Air Baku Akses Rumah	m3/detik	NA	0,25	0,34	0,44	0,53	0,62	0,72
7	Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	NA	10,00	14,50	19,00	23,50	28,00	32,50
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	79,46	81,01	81,17	81,33	81,48	81,64	81,80
9	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	NA	7,00	9,15	11,30	13,45	15,60	17,75
10	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	NA	5,21	5,40	5,59	5,78	5,97	6,16
11	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	NA	23,13	26,97	30,82	34,66	38,50	42,35
12	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	NA	30,00	32,50	35,00	37,50	40,00	42,50
13	Cakupan wilayah (kampung) yang dapat diakses jaringan dan layanan transportasi darat/laut/udara	%	NA	11,96	15,17	18,37	21,58	24,79	27,99
14	Cakupan wilayah (kampung) yang memiliki akses sinyal telepon seluler kuat/ sangat kuat (%)	%	NA	2,17	5,32	8,48	11,63	14,78	17,93
15	Cakupan wilayah (kampung) yang memiliki akses sinyal internet (%)	%	NA	1,09	3,75	6,42	9,08	11,74	14,41
16	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	NA	59,28	61,29	63,30	65,31	67,31	69,32
17	Persentase Penurunan Emisi GRK-Kumulatif	%	NA	23,19	24,92	26,66	28,39	30,12	31,86
18	Persentase Penurunan Emisi GRK-Tahunan	%	NA	39,01	41,93	44,84	47,76	50,68	53,60
19	Indeks Risiko Bencana	Poin	172,5	167,75	163,00	158,25	153,50	148,75	144,00



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
20	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	NA	0,6	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65
21	Jumlah Penduduk	Ribu Jiwa	43,1	43,48	43,85	44,23	44,56	44,89	45,23
22	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,91	0,88	0,85	0,87	0,75	0,74	0,76
23	Rasio Penduduk	Poin	113,47	113,24	112,86	112,96	112,75	112,39	112,15
24	Kepadatan Penduduk	Jiwa/km2	2,39	2,41	2,43	2,45	2,47	2,49	2,51
II Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,26	4,87	5,48	6,08	6,69	7,30	7,91
2	Tingkat Kemiskinan	%	14,05	13,76	13,34	12,92	12,51	12,09	11,67
3	PDRB Per Kapita	Juta Rp/Kapita	88,76	93,40	98,04	102,69	107,33	111,97	116,61
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,41	3,30	3,19	3,07	2,96	2,85	2,74
5	Indeks Gini	Poin	0,372*	0,364	0,360	0,356	0,352	0,348	0,344
6	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	67,89	68,83	69,65	70,47	71,29	72,10	72,91
7	Indeks Kesehatan	Poin	76,78	77,69	78,06	78,43	78,80	79,17	79,54
8	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,91	70,50	70,74	70,98	71,22	71,46	71,70
9	Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk OAP	Tahun	NA	67,00	67,23	67,45	67,68	67,90	68,13
10	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	16,00	15,50	15,00	14,50	14,00	13,50	13,00
11	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	NA	6691	6365	6039	5712	5386	5060
12	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	%	NA	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	92,50
13	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis	%	NA	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	92,50
14	Angka Kejadian Malaria	per 1.000 kelahiran hidup	NA	316	300	285	269	254	238
15	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional	%	NA	88,16	88,75	89,34	89,94	90,53	91,12
16	Indeks Pendidikan	Poin	66,42	67,76	69,20	70,65	72,10	73,54	74,99
17	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	12,38	12,65	12,92	13,18	13,45	13,72	13,99
18	Harapan Lama Sekolah	Tahun	NA	12,30	12,59	12,87	13,16	13,44	13,73
19	Rata-rata Lama Sekolah penduduk OAP	Tahun	NA	4,20	4,29	4,37	4,46	4,54	4,63
20	Tingkat kedalaman kemiskinan (P1)	Poin	1,86	1,81	1,77	1,72	1,68	1,64	1,60
21	Daya Beli Penduduk OAP	Ribu Rp.	NA	5403,00	5590,50	5778,00	5965,50	6153,00	6340,50



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
22	Indeks Pemenuhan Hak-Hak Orang Asli SarMI	Poin	NA	0,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00
23	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	NA	45,00	45,50	46,00	46,50	47,00	47,50
24	Cakupan kearifan lokal tangible dan intangible yang terlindungi dan berdaya	%	NA	25,00	28,75	32,50	36,25	40,00	43,75
25	Persentase luas kawasan adat yang ditetapkan negara	%	NA	0,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00
	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk								
26	- Literasi Membaca	%	NA	10,00	14,00	18,00	22,00	26,00	30,00
27	- Numerasi	%	NA	1,25	4,31	7,38	10,44	13,50	16,56
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk								
28	- Literasi Membaca	%	NA	16,00	18,20	20,40	22,60	24,80	27,00
29	- Numerasi	%	NA	9,00	11,30	13,60	15,90	18,20	20,50
30	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	NA	26,03	28,36	30,68	33,01	35,33	37,66
31	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	NA	76,00	76,40	76,80	77,20	77,60	78,00
32	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Poin	NA	39,00	39,20	39,40	39,60	39,80	40,00
33	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,439*	0,439	0,434	0,428	0,423	0,417	0,412
34	Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja	%	96,59	96,70	96,81	96,93	97,04	97,15	97,26
35	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	NA	10,43	11,91	13,39	14,87	16,34	17,82
36	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	NA	15,00	16,50	18,00	19,50	21,00	22,50
37	Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	%	NA	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00	60,00



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
III Aspek Daya Saing Daerah									
1	Angka Ketergantungan	Poin	66,92	65,26	63,25	60,89	58,41	55,60	52,65
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	NA	1,79	2,20	2,61	3,02	3,43	3,84
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	%	NA	0,75	0,96	1,18	1,39	1,60	1,81
4	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	27,81	28,09	28,37	28,65	28,94	29,23	29,52
5	Harga Berlaku LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	-0,92	0,07	1,05	2,04	3,03	4,01	5,00
6	Harga Berlaku LPE Kategori Industri Pengolahan	%	1,33	2,28	3,22	4,17	5,11	6,06	7,00
7	Jumlah Tamu Wisatawan	Ribu Orang	NA	11,07	14,77	18,46	22,16	25,86	29,55
8	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	%	NA	5,99	6,31	6,64	6,96	7,28	7,61
9	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	NA	0,58	0,61	0,65	0,68	0,71	0,74
10	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	%	NA	11,37	11,61	11,86	12,10	12,34	12,59
11	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	%	NA	1,88	2,19	2,49	2,80	3,10	3,41
12	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	NA	1,68	1,95	2,21	2,48	2,74	3,01
13	Return on Aset (ROA) BUMD	%	NA	2,2	2,34	2,47	2,61	2,75	2,89
14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	61,74	62,36	62,98	63,61	64,25	64,89	65,54
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	NA	49,54	50,13	50,73	51,32	51,91	52,51
16	Indeks Inovasi Daerah	Poin	NA	20,00	22,01	24,01	26,02	28,02	30,03
17	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Poin	NA	81,87	82,31	82,74	83,18	83,62	84,06
18	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer pada PJU di Kabupaten SarMI	%	NA	25,61	27,19	28,77	30,35	31,92	33,50
19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin	NA	3,40	3,58	3,76	3,94	4,12	4,30
20	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten	%	NA	0,68	0,66	0,64	0,61	0,59	0,57



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	NA	26,78	28,70	30,62	32,54	34,46	36,39
22	Ekspor Barang dan Jasa	%	NA	3,51	4,92	6,32	7,73	9,14	10,55
23	Indeks Infrastruktur	Poin	NA	58,75	59,88	61,00	62,13	63,25	64,38
24	Persentase Ketercapaian Infrastruktur Pekerjaan Umum	%	NA	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00
25	Persentase Ketercapaian Infrastruktur Perhubungan	%	NA	60,00	61,50	63,00	64,50	66,00	67,50
26	Persentase Ketercapaian Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	%	NA	65,00	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00
27	Persentase Ketercapaian Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	%	NA	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00
28	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	NA	35,00	38,25	41,50	44,75	48,00	51,25
29	Indeks Desa Membangun	Poin	0,5069*	0,5224	0,5282	0,5339	0,5396	0,5454	0,5511
30	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	Poin	NA	142,74	141,85	140,97	140,08	139,19	138,31
31	Rasio Pajak terhadap PDRB	%	NA	2,46	2,60	2,74	2,88	3,02	3,16
32	Tingkat Inflasi	%	NA	3,57	3,45	3,34	3,22	3,11	2,99
33	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	NA	12,12	13,78	15,44	17,10	18,76	20,42
34	Aset Dana Pensiun/PDRB	%	NA	0,21	0,22	0,23	0,24	0,26	0,27
35	Nilai Transaksi Saham Per Kabupaten Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	Rp.	NA	438,31	537,48	636,64	735,81	834,97	934,14
36	Total Kredit/PDRB	%	NA	10,12	11,48	12,84	14,20	15,56	16,92
37	Inklusi Keuangan	%	NA	85,09	85,71	86,32	86,94	87,55	88,17
38	Kontribusi PDRB Sarmi Terhadap Papua	%	4,45	4,95	5,46	5,96	6,46	6,96	7,47
39	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin	NA	0,689	0,686	0,684	0,681	0,679	0,676
40	Persentase Desa Mandiri	%	0,00	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
IV	Aspek Pelayanan Umum								
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	NA	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00	60,01
2	Indeks Integritas Nasional	Poin	NA	67,13	67,82	68,50	69,19	69,88	70,56
3	Indeks Pelayanan Publik	Poin	NA	3,25	3,34	3,43	3,51	3,60	3,69
4	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	NA	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
5	Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)	%	NA	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0-17 tahun	%	NA	87,90	88,26	88,61	88,97	89,32	89,68
7	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	NA	69,31	70,33	71,35	72,37	73,39	74,41
8	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	NA	2,60	2,65	2,69	2,74	2,78	2,83
9	Indeks Reformasi Hukum	Poin	NA	23,40	25,10	26,80	28,50	30,20	31,90
10	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	NA	1,88	2,04	2,19	2,35	2,50	2,66
11	Nilai SAKIP	Poin	NA	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00	60,01
12	Indeks Zakat Nasional	Poin	0,00	0,20	0,23	0,25	0,28	0,30	0,33
13	Indeks Akses Keuangan Daerah	Poin	3,99	4,04	4,06	4,09	4,11	4,14	4,15



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
a. Pendidikan									
1	Skor Kemampuan Literasi SD	Poin	43.20	45.70	48.20	50.70	53.20	55.70	58.20
2	Skor Kemampuan Literasi SMP	Poin	58.24	59.34	60.44	61.54	62.64	63.74	64.84
3	Skor Kemampuan Numerasi SMP	Poin	55.54	57.04	58.54	60.04	61.54	63.04	64.54
4	Skor Kemampuan Numerasi SD	Poin	42.25	45.15	48.05	50.95	53.85	56.75	59.65
5	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	Poin	52.43	55.61	58.80	61.98	65.16	68.34	71.53
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	Poin	94.60	95.69	96.39	97.08	97.78	98.47	99.17
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	Poin	10.86	13.40	15.94	18.49	21.03	23.57	26.12
8	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	%	38.64	60.33	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
9	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	28.00	29.95	30.95	31.95	32.95	33.95	34.95
10	Iklim Inklusivitas SMP	Poin	53.20	55.60	58.00	60.40	62.80	65.20	67.60
11	Iklim Inklusivitas SD	Poin	51.88	54.38	56.88	59.38	61.88	64.38	66.88
12	Iklim Keamanan SMP	Poin	64.10	65.60	67.10	68.60	70.10	71.60	73.10
13	Iklim Keamanan SD	Poin	68.53	69.43	70.33	71.23	72.13	73.03	73.93
14	Iklim Kebinekaan SMP	Poin	66.30	67.30	68.30	69.30	70.30	71.30	72.30
15	Iklim Kebinekaan SD	Poin	64.07	65.07	66.07	67.07	68.07	69.07	70.07
b. Kesehatan									
1	Jumlah Kematian Ibu	Orang	NA	<100	<95	<90	<85	<80	<75
2	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	%	16,00	15,50	15,00	14,50	14,00	13,50	13,00
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	NA	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	NA	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	NA	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	NA	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	NA	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	NA	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	NA	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
10	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	NA	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	NA	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	NA	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
13	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	NA	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
14	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	%	NA	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	%	NA	60	65	70	75	80	85
2	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	%	NA	60	65	70	75	80	85
3	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	%	NA	20	21	22	23	24	25
4	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	NA	15	16	17	18	19	20
5	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	NA	10	14,5	19	23,5	28	32,5
6	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	NA	7	9,15	11,3	13,45	15,6	17,75
7	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/ Kota	%	NA	10	12	14	16	18	20
8	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	NA	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00
9	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	%	NA	10	12	14	16	18	20



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	NA	100	100	100	100	100	100
11	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Hari	NA	10	10	10	10	10	10
12	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	NA	50	52,5	55	57,5	60	62,5
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	NA	0	0	0	0	0	0
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	NA	0	0	0	0	0	0
3	persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	NA	5	10	15	20	25	30
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	NA	5	10	15	20	25	30
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	NA	10	15	20	25	30	35
e. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	NA	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	NA	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	orang	NA	1	1	1	2	2	2
4	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	NA	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	%	NA	50	50	50	50	50	50
6	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	%	NA	15	15	15	15	15	15
7	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	NA	50	55	60	65	70	75
8	Persentase warga negara dan aparaturnya yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	NA	25	30	35	40	45	50
9	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	NA	100	100	100	100	100	100
10	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	NA	100	100	100	100	100	100
11	Persentase penanganan pra bencana	%	NA	100	100	100	100	100	100
12	Persentase penanganan pasca bencana	%	NA	100	100	100	100	100	100
13	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	NA	100	100	100	100	100	100
14	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	NA	100	100	100	100	100	100
f. Sosial									
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	NA	80	81	82	83	84	85
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	NA	80	81	82	83	84	85
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	NA	100	100	100	100	100	100
4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	NA	80	81	82	83	84	85
5	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	%	NA	50	55	60	65	70	75
6	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	%	NA	50	55	60	65	70	75
7	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	NA	100	100	100	100	100	100



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	%	NA	100	100	100	100	100	100
9	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	NA	50	55	60	65	70	75
10	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	NA	50	55	60	65	70	75
11	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	NA	50	55	60	65	70	75
12	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	NA	25	30	35	40	45	50
13	Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	NA	10	12	14	16	18	20
14	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	%	NA	10	12	14	16	18	20
2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
a. Tenaga Kerja									
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	NA	50	60	70	80	90	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	NA	2	4	6	8	10	12
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rp/Orang	NA	60	62	64	66	68	70
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	NA	50	50	50	60	60	60
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	%	NA	25	26	27	28	29	30
b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak									
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	84,28	85,12	85,97	86,83	87,70	88,58	89,46
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,439*	0,439	0,4335	0,428	0,4225	0,417	0,4115
3	Persentase ARG Daerah	%	NA	10	11	12	13	14	15
4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	NA	75	80	85	90	95	100
5	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	NA	75	80	85	90	95	100
c. Pangan									
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	%	NA	100	100	100	100	100	100
2	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota	Nilai	NA	75	76	77	78	79	80
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	NA	10	9,5	9	8,5	8	7,5
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	NA	75	76	77	78	79	80
d. Pertanahan									
1	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran	%	NA	0	0	0	0	0	0
2	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	%	NA	0	0	0	0	0	0
3	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran	%	NA	0	0	0	0	0	0
4	jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran	%	NA	0	0	0	0	0	0
5	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	%	NA	25	30	35	40	45	50
6	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	%	NA	25	30	35	40	45	50



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	NA	25	30	35	40	45	50
8	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota	%	NA	25	30	35	40	45	50
9	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB	%	NA	25	30	35	40	45	50
e. Lingkungan Hidup									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota	Nilai	79,46	81,01	81,17	81,33	81,48	81,64	81,80
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	%	NA	30	32	34	36	38	40
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	%	NA	50	51	52	53	54	55
f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	NA	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	NA	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	NA	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	%	NA	50	52	54	56	58	60
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	NA	15	16	17	18	19	20
6	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	%	NA	50	55	60	65	70	75
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	NA	25	26	27	28	29	30
g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	NA	0,91	1,82	2,73	3,64	4,55	5,46
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	NA	50	55	60	65	70	75
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	NA	50	55	60	65	70	75
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga emasyarakatatan Desa	%	NA	50	55	60	65	70	75
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	NA	50	55	60	65	70	75
h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	%	NA	3	3	2,9	2,9	2,8	2,8
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	NA	40	42	44	46	48	50
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	NA	20	19	18	17	16	15
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	NA	3	3	3	2	2	2
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai	NA	39	39,2	39,4	39,6	39,8	40
i. Perhubungan									
1	Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	NA	50	52	54	56	58	60
2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	%	NA	35	35	35	37,5	37,5	37,5
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	NA	20	20	25	25	30	30
j. Komunikasi dan Informatika									
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	NA	30	30	35	35	40	40
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	NA	25	25	30	30	35	35
3	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	NA	25	25	30	30	35	35
k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah									
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	NA	5	7,5	10	12,5	15	17,5
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	NA	0,5	0,55	0,6	0,65	0,7	0,75
3	Pertumbuhan Wirausaha	%	NA	5	6	7	8	9	10
l. Penanaman Modal									
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	NA	5	6	7	8	9	10
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	NA	30	32,5	35	37,5	40	42,5
m. Kepemudaan dan Olahraga									



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/ training dan memperoleh sertifikat	%	NA	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
2	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	NA	1	1	1,25	1,25	1,5	1,5
n. Statistik									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	NA	1,25	1,3	1,35	1,4	1,45	1,5
o. Persandian									
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	NA	20	27,5	35	40	45	50
p. Kebudayaan									
1	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	%	NA	20	25	30	35	40	45
2	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	%	NA	20	25	30	35	40	45
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan	%	NA	2,5	5	7,5	10	12,5	15
q. Perpustakaan									
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	NA	25	30	35	40	45	50
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	NA	30	32,5	35	37,5	40	42,5
r. Kearsipan									
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	NA	15	17,5	20	22,5	25	27,5
3. Urusan Pilihan									
a. Kelautan dan Perikanan									
1	Produksi Perikanan Tangkap	%	NA	25	30	35	40	45	50
2	Produksi Perikanan Budi Daya	%	NA	25	30	35	40	45	50
b. Pariwisata									
1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	NA	5	7,5	10	12,5	15	17,5
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	NA	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	NA	5	5	7,5	7,5	10	10
c. Pertanian									
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	NA	0,25	0,75	1,25	1,75	2,25	2,75
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	NA	0,25	0,75	1,25	1,75	2,25	2,75
3	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%	NA	0,25	0,75	1,25	1,75	2,25	2,75
4	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan	%	NA	0,25	0,75	1,25	1,75	2,25	2,75
5	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	NA	25	30	35	40	45	50
6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	%	NA	25	30	35	40	45	50
d. Kehutanan									
e. Energi dan Sumber Daya Mineral									
f. Perdagangan									
1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	%	NA	10	10	11	11	12,5	12,5
2	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	NA	50	55	60	65	70	75
g. Perindustrian									
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi:								
	1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	NA	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5
	2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota	%	NA	1,79	2,20	2,61	3,02	3,43	3,84
	3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	NA	5	5	5	5	5	5
	4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	NA	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	NA	1,79	2,20	2,61	3,02	3,43	3,84
2	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	NA	5	6	7	8	9	10
3	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan.	%	NA	0	0	0	0	0	0



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan.	%	NA	5	5	7,5	7,5	7,5	7,5
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%	NA	50	50	60	60	70	70
h. Transmigrasi									
4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan									
a. Perencanaan									
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	NA	100	100	100	100	100	100
b. Keuangan									
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	NA	30	30	30	30	30	30
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	1,67	1,68	1,69	1,77	1,86	1,95	2,04
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	NA	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	NA	0,15	0,17	0,18	0,20	0,21	0,23
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	NA	40	42	44	46	48	50
6	Persentase Penurunan SILPA	%	NA	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
c. Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan									
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	indeks	NA	30	32,5	32,5	35	37,5	40
d. Penelitian dan Pengembangan									
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	NA	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	NA	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00
e. Fungsi Pengawasan									
1	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Kategori / Opini	NA	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	NA	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	NA	1,75	1,80	1,85	1,90	1,95	2,00
4	Manajemen Risiko Indeks	Nilai	NA	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
5	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	NA	75,00	77,50	80,00	82,50	85,00	87,50
f. Fungsi Pengadaan									
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	NA	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	NA	5,00	7,50	10,00	12,50	15,00	17,50
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	Poin	NA	15,00	17,50	20,00	22,50	25,00	27,50
g. Hubungan dengan Perwakilan Daerah									
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/ Tidak Tepat	NA	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	NA	50,00	50,00	75,00	75,00	100,00	100,00
h. Pelayanan Publik									
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	NA	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00
Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS)									
Ibu Hamil, Ibu Nifas, dan Ibu Menyusui									
1	Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil KEK	%	NA	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00
2	Pemberian Tablet Tambah Darah/MMS sebanyak 180 butir selama masa kehamilan	%	NA	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00
3	Makanan bergizi seimbang pada ibu hamil	%	NA	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00
4	Pemeriksaan kehamilan 6 kali selama masa kehamilan	%	NA	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00
5	Pelayanan KB pasca persalinan	%	NA	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00
Anak Usia 0-23 Bulan									
1	Praktik Inisiasi Menyusui Dini	%	NA	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00
2	Bayi usia <6 bulan mendapatkan ASI eksklusif	%	NA	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00
3	Anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI beragam	%	NA	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00
4	Anak usia 6-23 bulan masih mendapat ASI	%	NA	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00
5	Anak usia 0-23 bulan gizi buruk mendapat tata laksana	%	NA	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00
6	Anak usia 0-23 bulan dipantau pertumbuhan & perkembangan	%	NA	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00
7	Anak usia 0-23 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi	%	NA	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	Anak usia 0–23 bulan mendapat imunisasi rutin lengkap	%	NA	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00
9	Anak usia 6–23 bulan diare mendapat oralit dan zinc sesuai standar	%	NA	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00
10	Anak usia 6–23 bulan mendapat obat caceng (POPM)	%	NA	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00
Anak Usia 24–59 Bulan									
1	Gizi buruk mendapat tata laksana	%	NA	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00
2	Dipantau pertumbuhan dan perkembangan	%	NA	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00
3	Gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi	%	NA	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00
4	Diare mendapat oralit dan zinc sesuai standar	%	NA	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00
5	Terantau kasus pneumonia	%	NA	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00
6	Mendapat obat caceng (POPM)	%	NA	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00
Remaja Putri									
1	Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	%	NA	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00
2	Skrining anemia	%	NA	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00
Calon Pengantin									
1	Pemeriksaan kesehatan	%	NA	25,00	27,00	29,00	31,00	33,00	35,00
2	Bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	%	NA	25,00	27,00	29,00	31,00	33,00	35,00
Rumah Tangga Masyarakat									
1	Akses terhadap air minum aman	%	NA	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00
2	Akses terhadap sanitasi aman	%	NA	7,00	9,15	11,30	13,45	15,60	17,75
3	Kepemilikan JKN	%	NA	88,16	88,75	89,34	89,94	90,53	91,12
4	Kelompok sasaran mendapat pendampingan	%	NA	35,00	36,00	37,00	38,00	39,00	40,00
5	Anak usia 0–59 bulan mendapat akta lahir dan KIA	%	NA	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00
6	Pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan gizi keluarga	%	NA	30,00	32,50	35,00	37,50	40,00	42,50
Indikator Rencana Induk Bidang Kesehatan									
1	Usia harapan hidup	Tahun	69,91	70,50	70,74	70,98	71,22	71,46	71,70
2	Total Fertility Rate (Angka kelahiran total)	%	NA	0,885	0,88	0,875	0,87	0,865	0,86
3	Angka kematian ibu	Per 100.000 KH	NA	6691	6364,8	6038,6	5712,4	5386,2	5060
4	Angka kematian balita	Per 1.000 KH	NA	66,91	63,648	60,386	57,124	53,862	50,6
5	Prevalensi stunting	%	16,00	15,50	15,00	14,50	14,00	13,50	13,00
6	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	NA	22,5	25	27,5	30,5	35	40
7	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	NA	40	42,5	45	46,5	47,5	47,5
8	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	NA	88,16	88,75	89,34	89,94	90,53	91,12
9	Angka keberhasilan pengobatan TB	%	NA	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	92,50
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	NA	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00
11	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	NA	33,00	34,00	35,00	37,50	40,00	42,50
12	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	%	NA	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00
13	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	NA	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00
14	Prevalensi Obesitas > 18 tahun	%	NA	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00
15	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	NA	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00
16	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	NA	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00
17	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%	NA	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00
18	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%	NA	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00
19	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	%	NA	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00
20	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	NA	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00
21	Persentase lanjut usia yang mandiri	%	NA	50,0	52,5	55,0	57,5	60,0	62,5
22	Persentase merokok penduduk 10–21 tahun	%	NA	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0	2,5
23	Cakupan penemuan kasus TB	orang	NA	100,0	95,0	90,0	85,0	80,0	75,0
24	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	%	NA	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0
25	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	%	NA	20,0	20,0	20,0	30,0	30,0	30,0
26	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	NA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern (proportion of demand satisfied by modern methods)	%	NA	34,925	35,275	35,63	35,985	36,345	36,705
28	Angka kelahiran menurut usia tertentu / Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15–19 tahun	%	NA	3	3	3	2	2	2



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
29	Persentase KB Pasca persalinan (KBPP)	%	NA	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00
30	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	%	NA	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00
31	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	%	NA	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00
32	Persentase sarana IRTTP yang memenuhi ketentuan	%	NA	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00
33	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%	NA	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00
34	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	NA	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00

BAB VII PENUTUP

Bab ini menegaskan bahwa RKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2026 menjadi instrumen perencanaan tahunan yang memandu penetapan prioritas pembangunan secara terarah dan selaras dengan RPJMD 2025–2029. Dokumen ini menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarmi Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2029, sekaligus menjadi instrumen penting dalam mengawal pencapaian visi pembangunan daerah, yaitu **“Bersatu Mewujudkan Sarmi yang Lebih Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.”** Penyusunan RKPD ini dilakukan dengan mempedomani tema pembangunan Kabupaten Sarmi Tahun 2026, yaitu **“Pemenuhan Infrastruktur Pembangunan untuk Meningkatkan Pemerataan dan Akses Layanan Dasar,”** yang sejalan dengan Tema RKPD Provinsi Papua Tahun 2026 **“Percepatan Pembangunan Struktur Ekonomi yang Inklusif Melalui Akselerasi Potensi Unggulan Daerah,”** serta mendukung Tema RKP Nasional Tahun 2026 **“Kedaulatan Pangan, Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.”**

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2026 dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan dengan memperhatikan:

- ▲ Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RPD Kabupaten Sarmi Tahun 2023–2026;
- ▲ Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 dan capaian hingga tahun berjalan;
- ▲ Prioritas nasional dalam RKP Tahun 2026;
- ▲ Prioritas pembangunan Provinsi Papua Tahun 2026;
- ▲ Kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan pembangunan Tahun 2026;
- ▲ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs); serta
- ▲ Kebijakan terkait pemenuhan hak anak, kesetaraan gender, dan pemberdayaan kelompok rentan.

Dengan dasar tersebut, RKPD Tahun 2026 diharapkan menjadi pedoman yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan secara lebih terfokus, efektif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat di seluruh distrik, terutama dalam memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan kualitas layanan dasar, serta mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung pemerataan antarwilayah.

Sehubungan dengan penetapan RKPD ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seluruh Perangkat Daerah (PD):

1. Perangkat Daerah wajib menyempurnakan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan berpedoman pada RKPD Tahun 2026 serta memastikan koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi lintas PD berjalan efektif.
2. Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan, dengan melibatkan masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan terkait secara partisipatif dan akuntabel.
3. Untuk menjaga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap PD wajib melakukan tindakan korektif yang diperlukan, serta menyampaikan laporan pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pada akhir Tahun Anggaran 2026, seluruh PD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi evaluasi pencapaian sasaran, kesesuaian alokasi anggaran dengan APBD, konsistensi dengan target RPJMD, serta kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Akhirnya, keberhasilan pelaksanaan RKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2026 sangat ditentukan oleh komitmen, kerja sama, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah Kabupaten Sarmi mengajak seluruh masyarakat, dunia usaha, lembaga adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, serta seluruh komponen pembangunan untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal dan mewujudkan program-program pembangunan demi menciptakan Sarmi yang lebih maju, sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan.



**SARMI YANG LEBIH MAJU
SEJAHTERA DAN
BERKELANJUTAN**

